PEMERINTAH KABUPATEN BREBS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025



Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M.
Bupati Brebes

Wurja, S.E.
Wakil Bupati Brebes

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BREBES
2026

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Brebes Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansi Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Brebes.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Brebes tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Brebes, 30 Maret 2026

Bupati Brebes,

Hj. Paramitha Widya Kusuma, SE., MM

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Brebes, 16 Maret 2026
Inspektur Daerah Kabupaten Brebes

Drs. Apriyanto Sudarmoko
Pembina Utama Muda
NIP.19730413 199303 1 004

CHECKLIST REVIU

No.		Pernyataan	Check List
I.	**Format**	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II.	**Mekanisme Penyusunan**	1. LKj. disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yag memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj.	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis / penjelasan dakam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√

No.	Pernyataan		Check List
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
III.	**Substansi**	1. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak , maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat pembandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagaimana yang bermanfaat	√
		8. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan / sasaran	√
		9. Jika 'tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah SMART	√

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes berupaya menyelenggarakan pemerintahan yang berprinsip pada Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan.

Tahun 2025 merupakan tahun Ke-3 (tiga) dari pelaksanaan RPD 2023 – 2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026. Mengacu pada RPD Kabupaten Brebes tersebut, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai tujuan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- **Tujuan 1**

  Terwujudnya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama Yang Sangat Kondusif	Persentase Penurunan Konflik SARA (%)	100	100	100.00%
2	Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Demokrasi Daerah	Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg) (%)	94	98	104.26%
3	Meningkatnya Kesadaran Dan Perlindungan Hukum Dengan Menjunjung Tinggi Serta Mengutamakan Asas Bersih, Jujur Serta Adil Kepada Setiap Masyarakat	Persentase tindak pelanggaran Perda tertangani (%)	100	100	100.00%

Tujuan 1 terdapat 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 101,42 % kategori sangat berhasil.

- **Tujuan 2**

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.25	12.66	103.35%
		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6.42	6.61	102.96%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71.54	74.4	104.00%
3	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga	Pemuda Pelopor Berprestasi (Tingkat Provinsi) (Peringkat)	4	0	0.00%
		Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	30.00	0.01	0.03%
		Peningkatan Prestasi Olahraga (Tingkat Provinsi) (Peringkat)	8	17	-12.50%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan (%)	96.00	97.57	101.64%
5	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87.36	*Dalam proses*	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	63.83	*Dalam proses*	
		Peringkat Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) (Status)	4	3	75%
6	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	62.5	64.51	103.22%
		Persentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) (%)	10	6.19	138.10%
		Persentase Kepesertaan KB Aktif (Indeks)	70.5	68.26	96.82%
7	Meningkatnya Kepedulian Sosial Secara Luas Untuk Mewujudkan Ketahanan Sosial Terutama Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penanganan Jumlah PMKS (%)	50	52.93	105.86%
8	Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah	Persentase kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan (%)	50	72.12	144.24%

9	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan	Indeks Literasi (Indeks)	13.3	14.92	112.18%
		Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat (Indeks)	58	67.23	115.91%

Tujuan 2 terdapat 9 sasaran dan 17 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sementara sebesar 75,93% kategori sangat berhasil. *masih ada realisasi indikator yang masih dalam proses.

- **Tujuan 3**

  Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis, Dan Partisipatif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Serta Partisipasi Dan Peran Seluruh Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Peningkatan Kualitas Daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	100.00%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	2.9	3.29	113.45%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Skor)	98	90.09	91.93%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84	86.59	103.08%
		Indeks Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Indeks)	3.35	*Dalam proses*	
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Indeks)	64.5	64.76	100.40%
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Optimalisasi Aset Secara Efisien Dan Produktif Serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp. Juta)	811520	864266	106.50%
		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (%)	19.9	30.3	152.26%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya Kapasitas Dan Kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80.00	79.34	99.18%
		Standar Kompetensi ASN (Skor)	75	72.95	97.27%
6	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban) Yang Baik (Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif)	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks)	74	74.4	100.54%
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3.50	2.825	80.71%
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Opini)	WTP	*Dalam proses*	
7	Meningkatnya Peran Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bagian Dalam Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Daerah Serta Solusi Atas Permasalahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	52	69.1	132.88%
		Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3.14	0	0.00%
8	Tersedianya Satu Data Informasi Daerah Yang Valid, Lengkap Dan Terbaru Untuk Acuan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	100	100	100.00%

Tujuan 3 terdapat 8 sasaran dan 16 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 98,44% kategori sangat berhasil. *masih ada realisasi indikator yang masih dalam proses.

- **Tujuan 4**

  Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas,Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi	*Purchasing Power Parity*/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) (Rp. Ribu)	11500	11853	103.07%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Mengembangkan Iklim Usaha Kondusif Serta Terjaminnya Berusaha Dan Pelayanan Investasi Yang Prima	Pertumbuhan Laju Investasi	4.00	3.41	85.25%
3	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Koperasi Dan UMKM Sehingga Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Serta Mandiri	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat (%)	60	72.2	120.33%
		Persentase UMKM Aktif (%)	7.00	7.1	101.43%
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69.60	71.9	103.30%
		Rasio Penduduk Bekerja (%)	45	66.09	146.87%
5	Meningkatnya Efisiensi Modernisasi Pertanian Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Untuk Swasembada Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Susenas (Skor)	95.8	97	101.25%
6	Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	Kinerja Lalu Lintas (0.6 s.d. 0.8) (Skor)	0.8	0.45	143.75%
		Kinerja Keselamatan Lalu Lintas (Skor)	18	15	116.67%
7	Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kualitas Kelembagaan Dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa	Persentase BUMDes Aktif (%)	85	99	116.47%
		Persentase BUMDes Sehat (%)	65	70	107.69%
		Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten (Indeks)	0.69	0.72	104.35%
8	Meningkatnya Produksi Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Serta Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan Dan Perikanan	Peningkatan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Rp. Juta)	24094139	21725968.94	90.17%
		Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	130	115.54	88.88%
9	Meningkatnya Produktivitas Pertanian Untuk Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Serta Pemenuhan Kebutuhan Pangan Regional Maupun Nasional Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Pertanaman (Indeks)	235	285	121.28%
		Nilai Tukar Petani (Nilai)	112	114.78	102.48%
10	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Hutan	Peningkatan Luasan Lahan Konservasi (%)	29.86	0	0.00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
11	Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi)	Peningkatan PDRB sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) (Rp. Juta)	2227892.9	3652448.82	163.94%
12	Meningkatnya Daya Saing Industri Unggulan Daerah Untuk Penggerak Perekonomian	Peningkatan PDRB sektor Industri (Rp. Juta)	10119460	13105438	129.51%
13	Meningkatnya Transaksi Perdagangan Produk Unggulan Daerah Dan Menjaga Distribusi Dan Ketersediaan Barang-Barang Kebutuhan Pokok	Peningkatan PDRB sektor Perdagangan (Rp. Juta)	9101676.9	10667878.83	117.21%

Tujuan 4 terdapat 13 sasaran dan 20 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 108,19% kategori sangat berhasil.

- **Tujuan 5**

  Terwujudnya Peningkatkan Dan Pemerataan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Mantap (%)	88	63.19	71.81%
		Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik (%)	71	67.49	95.06%
		Cakupan Akses Air Minum Layak (%)	100	100	100.00%
		Cakupan Akses Jaringan Perpipaan (%)	26	22.11	85.04%
		Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan (%)	100	88.97	88.97%
		Persentase Penurunan Blank Spot Jaringan Seluler (%)	23.08	0	0.00%
		Bantaran/tanggul sungai dan saluran pembuang berfungsi baik (%)	45	50	111.11%
		Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0.6	0.58	96.67%
		Meningkatnya persentase sanitasi aman (%)	1.6	1.59	99.38%
		Persentase capaian penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan (%)	100	97.41	97.41%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Perumahan Dan Lingkungan Layak Dan Sehat Dengan Didukung Jaringan Infrastruktur Yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah Maupun Antar Sektor	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh (%)	24.68	16.65	67.46%
		Persentase Rumah Sehat Layak Huni (%)	27.5	48	174.55%
		Persentase Akses Sanitasi Layak (%)	100	100	100.00%
		Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak (%)	83	85.3	102.77%
		Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)	57.28	29.6	51.68%

Tujuan 5 terdapat 2 sasaran dan 15 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 89,46% kategori berhasil.

- **Tujuan 6**

  Terwujudnya Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	50.15	80.67	160.86%
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	81.25	77.81	95.77%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	47.70	63.27	132.64%
		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	40.00	24.08	60.20%
2	Meningkatnya Kelestarian Dan Kesesuaian Tata Guna Lahan Guna Terwujudnya Keserasian Pembangunan Wilayah	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	93	92	98.92%
3	Meningkatnya Konsistensi Kesesuaian Dan Terintegrasinya Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Hektar)	19	13.88	73.05%

Tujuan 6 terdapat 3 sasaran dan 6 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 103,57% kategori sangat berhasil.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 38 Sasaran yang mencakup 77 indikator sasaran, diketahui bahwa tercapai nilai sementara sebesar 94,67 % dengan kategori sangat berhasil.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
PERNYATAAN REVIU iii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Umum Kabupaten Brebes 2
1. Kondisi Geografis 2
2. Kondisi Demografis 5
3. Kondisi Pendidikan 6
4. Kondisi Kesehatan 13
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur 16
D. Isu Strategis 19
1. Kemiskinan 20
2. Indeks Pembangunan Manusia 20
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 21
4. Pendidikan 22
5. Kesehatan 23
6. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23
7. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 24
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS 26
A. Perencanaan Kinerja 26
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025 42
A. Pengukuran Kinerja 42
B. Capaian Kinerja Tahun 2025 44
1. Capaian Indikator Kinerja Utama 45
2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 51
3. Capaian Kinerja Menurut Sasaran 53
4. Capaian Kinerja Menurut Tujuan 58
C. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2025 61
1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 61
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 63

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 67
4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 71
5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 74
6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 79
7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7 85
8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8 89
9. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9 96
10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10 108
11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11 111
12. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12 114
13. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13 119
14. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14 121
15. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15 125
16. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16 134
17. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17 140
18. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18 146
19. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19 155
20. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20 166
21. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 21 168
22. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 22 171
23. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 23 175
24. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 24 179
25. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 25 185
26. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 26 191
27. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 27 196
28. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 28 204
29. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 29 211
30. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 30 218
31. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 31 219
32. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 32 223
33. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 33 225
34. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 34 227
35. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 35 255
36. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 36 264
37. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 37 275
38. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 38 277
D. Realisasi Anggaran 279
BAB IV PENUTUP 288

LAMPIRAN 294

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Batas Administrasi Kabupaten Brebes 2
Tabel 1.2. Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah per kecamatan 4
Tabel 1.3. Penduduk Kabupaten Brebes menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2025 6
Tabel 1.4. Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Brebes Tahun 2023-2025 7
Tabel 1.5. Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2025 14
Tabel 1.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Brebes Tahun 2025 18
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025..... 33
Tabel 3.1. Pengukuran dengan Skala Ordinal..... 43
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Capaian Kinerja Sasaran 45
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya. 51
Tabel 3.4. Rata – rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 54
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Menurut Tujuan..... 59
Tabel 3.6. Capaian Indikator Sasaran Persentase Penurunan Konflik SARA 61
Tabel 3.7. Capaian Indikator Sasaran Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg) 63
Tabel 3.8. Perbedaan Pilkades Regular dan Pilkades PAW 64
Tabel 3.9. Capaian Indikator Sasaran Persentase tindak pelanggaran Perda tertangani..... 67
Tabel 3.10. Data Sumber Realisasi Penanganan Pelanggaran Perda Tahun 2025..... 68
Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas 71
Tabel 3.12. Capaian Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup 75
Tabel 3.13. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga 79
Tabel 3.14. Capaian Indikator Sasaran Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 85
Tabel 3.15. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender 89
Tabel 3.16. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif..... 97
Tabel 3.17. Dimensi Indeks iBangga..... 98
Tabel 3.18. Jumlah PUS bukan peserta KB Kabupaten Brebes..... 102
Tabel 3.19. Jumlah KB Aktif dan PUS di Kabupaten Brebes 106
Tabel 3.20. Capaian Indikator sasaran Persentase Penanganan Jumlah PMKS..... 108
Tabel 3.21. Capaian Indikator Sasaran Persentase kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan 112
Tabel 3.22. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif..... 114
Tabel 3.23. Capaian Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah..... 119
Tabel 3.24. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 121
Tabel 3.25. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif..... 125
Tabel 3.26. Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Kab. Brebes Tahun 2025..... 132
Tabel 3.27. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Optimalisasi Aset Secara Efisien Dan Produktif Serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan Daerah..... 134
Tabel 3.28. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dan Kompetensi ASN 140
Tabel 3.29. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban) Yang Baik (Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif)..... 147

Tabel 3.30. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bagian Dalam Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Daerah Serta Solusi Atas Permasalahan Daerah 155
Tabel 3.31. Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Daerah 156
Tabel 3.32. Posisi Kabupaten Brebes dalam Indeks Inovasi Daerah 159
Tabel 3.33. Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes dan Perkembangan Jumlah Inovasi yang Dikirim dalam Penilaian IID 159
Tabel 3.34. Capaian Indikator sasaran Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah 166
Tabel 3.35. Capaian Indikator Sasaran Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) 168
Tabel 3.36. Capaian Indikator Sasaran Pertumbuhan Laju Investasi 171
Tabel 3.37. Realisasi dan Laju Investasi Kabupaten Brebes Tahun 2019-2025 172
Tabel 3.38. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Koperasi Dan UMKM Sehingga Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Serta Mandiri 175
Tabel 3.39. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Tenaga Kerja 179
Tabel 3.40. Capaian Indikator Sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Susenas 186
Tabel 3.41. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan 191
Tabel 3.42. Data Lakalantas Kabupaten Brebes Tahun 2025 194
Tabel 3.43. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kualitas Kelembagaan Dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa 196
Tabel 3.44. Perbandingan Status Kemajuan dan Kemandirian 203
Tabel 3.45. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Serta Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan Dan Perikanan 204
Tabel 3.46. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertanian Untuk Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Serta Pemenuhan Kebutuhan Pangan Regional Maupun Nasional Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup 211
Tabel 3.47. Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Luasan Lahan Konservasi 219
Tabel 3.48. Capaian Indikator Sasaran Peningkatan PDRB sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) 219
Tabel 3.49. Capaian Indikator Sasaran Peningkatan PDRB sektor Industri 223
Tabel 3.50. Capaian Indikator Sasaran Peningkatan PDRB sektor Perdagangan 225
Tabel 3.51. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah 228
Tabel 3.52. Penghitungan Paket pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuangan 245
Tabel 3.53. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perumahan Dan Lingkungan Layak Dan Sehat Dengan Didukung Jaringan Infrastruktur Yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah Maupun Antar Sektor 256
Tabel 3.54. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian Lingkungan Hidup 265
Tabel 3.55. Capaian Indikator Sasaran Persentase Ketaatan Terhadap RTRW 275
Tabel 3.56. Capaian Indikator Sasaran Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya 277
Tabel 3.57. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 279
Tabel 3.58. Perkembangan Pendapatan Daerah dari Tahun 2021-2025 282
Tabel 3.59. Permasalahan Pendapatan Daerah 282

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes 3
Gambar 3.1. Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2020 – 2025 76
Gambar 3.2. Grafik IPG Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024..... 90
Gambar 3.3. Grafik IDG Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024 92
Gambar 3.4. Grafik KLA Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024..... 95
Gambar 3.5. Grafik Tren iBangga Kabupaten Brebes Tahun 2022-2025..... 99
Gambar 3.6. Grafik Perbandingan Capaian iBangga..... 101
Gambar 3.7. Grafik Tren *Unmet need* KB Kabupaten Brebes Tahun 2022-2025..... 103
Gambar 3.9. Tren Kepesertaan KB Aktif Kabupaten Brebes Tahun 2022-2025 107
Gambar 3.10. Grafik Nilai SKM Kabupaten Brebes Tahun 2021 – 2025..... 127
Gambar 3.11 Grafik Nilai SAKIP Kabupaten Brebes Tahun 2021 – 2024 133
Gambar 3.12. Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2021 - 2025 136
Gambar 3.13. Grafik Perkembangan IPASN Tahun 2021 - 2025 142
Gambar 3.14. Grafik Perkembangan Nilai Standar Kompetensi ASN Tahun 2021 - 2025..... 144
Gambar 3.15. Grafik Tren SPI Tahun 2021-2025 148
Gambar 3.16. Grafik Perkembangan SPIP Tahun 2021 - 2025..... 151
Gambar 3.17. Grafik Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021-2025..... 157
Gambar 3.18. Komponen pembentukan IDSD 162
Gambar 3.19. Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Brebes 2021-2024 163
Gambar 3.20. Gambar *Screenshot dashboard* aplikasi IDM (https://idm.kemendesa.go.id) tahun 2024 202
Gambar 3.21. Grafik Capaian Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten Kondisi Mantap (%) 229
Gambar 3.22. Peningkatan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142..... 231
Gambar 3.23. Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jalan..... 231
Gambar 3.24. Grafik Cakupan Akses Air Minum Layak(%) 234
Gambar 3.25. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Kaligangsa Kulon Kec. Brebes Kab. Brebes 236
Gambar 3.26. Dokumentasi Sambungan Rumah Desa Limbangan..... 236
Gambar 3.27. Grafik Capaian Cakupan Akses Jaringan Perpipaan (%)..... 238
Gambar 3.28. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes 240
Gambar 3.29. Dokumentasi Sambungan Rumah Desa Limbangan..... 240
Gambar 3.30. Grafik Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan..... 241
Gambar 3.31. Pemeliharaan Rutin Drainase Perkotaan Sub Sistem Kali Kamal Brebes 242
Gambar 3.32. Pemeliharaan Rutin Drainase Sigeleng..... 242
Gambar 3.33. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Drainase Kec. Bumiayu..... 242
Gambar 3.34. Grafik Capaian Persentase kualitas bangunan gedung sesuai dengan norma standar dan peraturan yang berlaku 254
Gambar 3.35. Pelaksanaan Rapat Konsultasi PBG 255
Gambar 3.36. Kunjungan Lapangan SLF..... 255

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur berdasarkan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

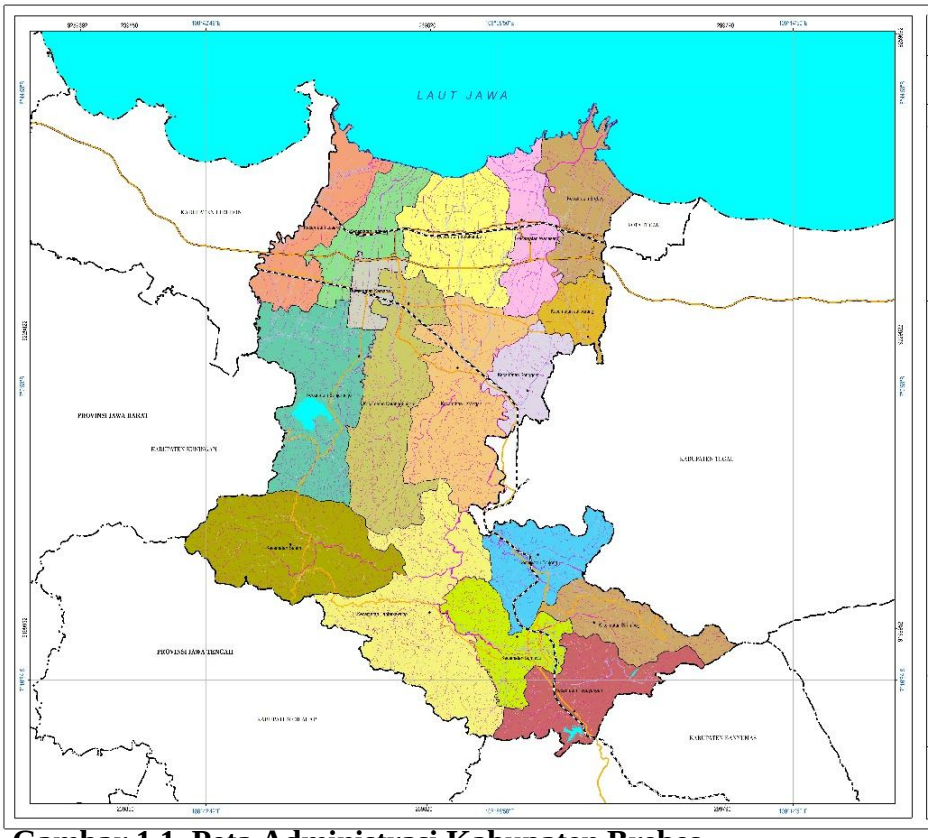
B. Gambaran Umum Kabupaten Brebes

1. *Kondisi Geografis*

Kabupaten Brebes merupakan wilayah administrasi bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki letak strategis karena berada di wilayah barat Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Secara astronomi, Kabupaten Brebes berada di Kabupaten Brebes berada pada koordinat 6° 44'56'5"– 7° 20'51,48 Lintang Selatan dan antara koordinat 108° 41'37,7"–109° 11'28,92" Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sejauh 87 Km dan dari barat ke timur sejauh 50 Km. Selain itu, terdapat garis pantai sepanjang 55 Km yang membentang dari Kecamatan Losari sampai dengan Kecamatan Brebes dan luas wilayah laut 12 mil dari darat mencapai 1.036,80 km². Luas Kabupaten Brebes tercatat 1.769,62 km². Adapun batas administrasi Kabupaten Brebes yaitu:

Tabel 1.1. Batas Administrasi Kabupaten Brebes

Batas Wilayah	Kabupaten/ Kota	Kecamatan Yang Berbatasan
Timur	Kota Tegal	Brebes
	Kabupaten Tegal	Jatibarang, Songgom, Larangan, Tonjong
Selatan	Kabupaten Banyumas	Sirampog, Paguyangan
	Kabupaten Cilacap	Bantarkawung, Salem.
Utara	Laut Jawa	Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes
Barat	Kabupaten Cirebon	Losari
	Kabupaten Kuningan	Banjarharjo, Salem



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes

Secara administratif Kabupaten Brebes terdiri dari 17 kecamatan yang terbagi menjadi 292 desa dan 5 kelurahan, 1.573 RW dan 8.153 RT. Jarak dari ibukota Kabupaten ke kecamatan terjauh adalah Kecamatan Salem dan terdekat Kecamatan Brebes.

Beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes memiliki topografi yang sama, yaitu 5 kecamatan berupa daerah pesisir/pantai, 9 kecamatan dataran rendah dan 3 kecamatan dataran tinggi atau pegunungan. Dengan topografi wilayah yang bervariasi, beberapa wilayah di Kabupaten Brebes termasuk dalam kawasan rawan bencana.

Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.2. Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah per kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN	LUAS WILAYAH (km2)	(%)
1	Salem	21	-	167,21	9,45
2	Bantarkawung	18	-	208,18	11,76
3	Bumiayu	15	-	82,09	4,64
4	Paguyangan	12	-	108,17	6,11
5	Sirampog	13	-	74,19	4,19
6	Tonjong	14	-	86,55	4,89
7	Larangan	11	-	160,25	9,06
8	Ketanggungan	21	-	153,41	8,67
9	Banjarharjo	25	-	161,75	9,14
10	Losari	22	-	91,79	5,19
11	Tanjung	18	-	72,09	4,07
12	Kersana	13	-	26,97	1,52
13	Bulakamba	19	-	120,36	6,80
14	Wanasari	20	-	75,34	4,26
15	Songgom	10	-	52,65	2,98
16	Jatibarang	22	-	36,39	2,06
17	Brebes	18	5	92,23	5,21
Jumlah		292	5	1.769,62	100

Sumber: Kabupaten Brebes Dalam Angka 2025

Topografi wilayah Kabupaten Brebes bervariasi, salah satunya berdasarkan ketinggian wilayah. Wilayah dengan kondisi topografi dataran rendah seluas 84.262,35 hektar atau sekitar 58,96% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Untuk wilayah dengan kondisi topografi dataran tinggi seluas 20.203,67 hektar atau sekitar 41,04 % dari keseluruhan wilayah Kabupaten yang tersebar di 6 kecamatan yakni Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Ketanggungan, dan Banjarharjo. Dilihat dari ketinggiannya dari permukaan laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 meter di atas permukaan laut (mdpl), Kecamatan Salem dengan ketinggian 500 mdpl, dan Kecamatan Paguyangan dengan ketinggian 342 mdpl. Sedangkan untuk Kecamatan Larangan, Kecamatan Banjarharjo, dan Kecamatan Ketanggungan tingginya berkisar antara 23 mdpl, 22 mdpl, dan 17 mdpl. Selain itu, wilayah kecamatan lain rata-rata berada pada ketinggian 1-5 mdpl yang tersebar di wilayah Kecamatan Losari,

Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, Songgom, Jatibarang, dan Brebes yang merupakan wilayah pesisir di bagian utara.

Sementara itu, pemanfaatan Lahan di wilayah Kabupaten Brebes dapat diuraikan sebagai berikut:

- Untuk kemiringan kurang dari 8 (datar) dapat digunakan untuk penggunaan tanaman lahan basah, yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Brebes.
- Kemiringan antara 8-15 (sedang atau berombak), masih dapat digunakan untuk penggunaan lahan pertanian, khususnya pertanian tanaman lahan kering yang meliputi seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Brebes.
- Kemiringan antara 15-45 (berat atau berbukit), dapat digunakan untuk tanaman keras (tahunan) baik dengan tanaman produksi maupun sebagai tanaman buffer, kondisi ini hampir di seluruh wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan meliputi Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Bumiayu, Sirampog, Larangan, Banjarharjo, Jatibarang, dan Tonjong.
- Kemiringan lebih dari 45 (sangat berat), kemungkinan longsor cukup tinggi dan diarahkan sebagai kawasan lindung. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo.

2. *Kondisi Demografis*

Penduduk Kabupaten Brebes menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2025 mencapai 2.084.348 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Masing-masing jumlahnya adalah 1.058.482 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 50,78% dan 1.025.866 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 49,22%.

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes bila dilihat per Kecamatan sangat bervariatif namun distribusi penduduk Kabupaten Brebes belum tersebar secara merata. Sementara itu, Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Bulakamba sebanyak 193.029 jiwa

(9,26%), Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Salem sebanyak 65.543 jiwa atau (3,14%).

Tabel 1.3. Penduduk Kabupaten Brebes menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio	Luas* Wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
Salem	33.245	32.298	65.543	102,93	167,21	392
Bantarkawung	54.738	52.459	107.197	104,34	208,18	515
Bumiayu	59.701	57.413	117.114	103,99	82,09	1.427
Paguyangan	60.853	58.100	118.953	104,74	108,17	1.100
Sirampog	37.392	35.877	73.269	104,22	74,19	988
Tonjong	41.002	39.720	80.722	103,23	86,55	933
Jatibarang	46.514	45.282	91.796	102,72	36,39	2.523
Wanasari	87.476	84.176	171.652	103,92	75,34	2.278
Brebes	97.272	95.040	192.312	102,35	92,23	2.085
Songgom	46.142	45.237	91.379	102,00	52,65	1.736
Kersana	35.807	35.071	70.878	102,10	26,97	2.628
Losari	73.804	71.701	145.505	102,93	91,79	1.585
Tanjung	56.857	54.644	111.501	104,05	72,09	1.547
Bulakamba	98.611	94.418	193.029	104,44	120,36	1.604
Larangan	83.874	82.052	165.926	102,22	160,25	1.035
Ketanggungan	77.757	75.338	153.095	103,21	153,41	998
Banjarharjo	67.437	67.040	134.477	100,59	161,75	831
Jumlah	**1.058.482**	**1.025.866**	**2.084.348**	**103,18**	**1.769,62**	**1.178**

Sumber data: Dindukcapil Kabupaten Brebes, 2026

Selain itu, angka kepadatan penduduk di Kabupaten Brebes mencapai 1.178 jiwa/km^2 yang artinya di setiap 1 km^2 didiami oleh sekitar 1.178 orang penduduk Kabupaten Brebes. Kepadatan paling tinggi ada di Kecamatan Wanasari yang mencapai 2.628 jiwa/km^2, sedangkan kepadatan penduduk paling rendah ada di Kecamatan Salem yang mencapai 392 jiwa/km^2.

3. *Kondisi Pendidikan*

Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan yang dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pembangunan suatu bangsa tidak dapat mengandalkan sumber daya alam semata, namun juga sumber daya manusia. Untuk itu, usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bersifat mutlak, salah satunya melalui pendidikan. Peningkatan di bidang pendidikan akan berimbas pada kualitas penduduk yang semakin baik. Untuk dapat mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan

dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dengan beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Brebes didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan sejak tingkat pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Data sarana pendidikan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4. Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Brebes Tahun 2023-2025

Tingkat Pendidikan	2023		2024		2025	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
TK	7	480	7	488	7	498
SD	854	34	851	34	850	38
MI	7	217	7	217	7	212
SDLB	1	1	1	1	1	1
SMP	77	89	77	88	77	109
MTs	4	78	4	78	5	101
SMA	17	16	17	16	17	16
SMK	6	89	6	89	6	89
MA	2	31	2	32	2	31
PT/Akademi	0	6	0	6	0	6

Sumber data : Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes Tahun 2025

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio ketersediaan sekolah dihitung dari perbandingan jumlah sekolah jenjang tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang sesuai dikali 10.000.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Perhitungan APK yaitu jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah dikali 100. Makin tinggi APK berarti semakin banyak anak

usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan atau semakin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga yang menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut ini:

a. Penyelenggaraan layanan pendidikan (PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat) belum sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.

   Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin mutu pendidikan, layanan pendidikan wajib memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu isu strategis yang harus diselesaikan di Kabupaten Brebes selama lima tahun ke depan adalah pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan baik pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, maupun pada pendidikan masyarakat.

b. Angka Partisipasi Kasar PAUD 3 - 6 tahun masih rendah.

   Partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan anak usia dini masih rendah. Dari data angka partisipasi kasar PAUD Tahun 2024, masih terdapat sekitar 67,50% anak usia 3 – 6 tahun di Kabupaten Brebes yang belum mengakses pendidikan anak usia dini. Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini, isu strategis berikutnya yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengakses pendidikan anak usia dini khususnya bagi anak usia 3 – 6 tahun.

c. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka masih memerlukan penguatan adaptasi dan integrasi lintas jenjang pendidikan.

   Kurikulum Merdeka, yang dirancang untuk mentransformasi pendidikan melalui pendekatan berbasis Profil Pelajar Pancasila, menekankan fleksibilitas pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil (P5), dan pengurangan beban konten agar peserta

didik memiliki waktu lebih untuk mengembangkan kompetensi esensial seperti kreativitas, kolaborasi, dan karakter kebangsaan. Namun, implementasinya di Kabupaten Brebes masih menghadapi kendala signifikan, terutama pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang adaptif, supervisi berbasis data, dan integrasi dengan Kurikulum 2013 di satuan pendidikan transisi.

Kapasitas guru dalam merancang modul ajar berbasis proyek dan asesmen formatif autentik perlu ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan, karena banyak guru masih terbiasa dengan model konvensional yang kaku. Selain itu, peran kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam memfasilitasi platform Merdeka Mengajar (seperti SIGmas dan platform digital Kemdikbudristek) sering terhambat oleh keterbatasan akses internet di daerah pedesaan Brebes serta kurangnya literasi digital. Di tingkat satuan pendidikan, tantangan utama muncul pada jenjang PAUD hingga SMA, di mana adaptasi kurikulum ini menuntut kolaborasi antarlembaga untuk proyek lintas jenjang, sementara realisasi anggaran untuk pengadaan sarana P5 (seperti laboratorium mini atau ruang kreatif) masih minim.

Dalam jangka pendek, lembaga pendidikan harus memprioritaskan bantuan teknis, seperti workshop praktik desain modul ajar dan simulasi P5 yang kontekstual dengan potensi lokal Brebes (misalnya proyek berbasis pertanian atau industri kreatif). Pelatihan ini tidak hanya menyentuh pemahaman konsep, tetapi juga aplikasi nyata dengan mentoring berkelanjutan, sehingga outputnya mencakup perubahan perilaku mengajar yang berkelanjutan. Tantangan terbesar adalah pengoptimalan di seluruh jenjang pendidikan, mengingat disparitas antara sekolah kota dan pinggiran, yang berpotensi menghambat pencapaian SDM unggul berbasis Pancasila jika tidak ditangani secara terintegrasi.

d. Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7 - 15 tahun belum mencapai 100.

Kewajiban pemerintah daerah untuk menuntaskan pendidikan dasar telah lama dicanangkan sejak Undang-Undang 20 Tahun 2003

mengamanatkan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun. Akan tetapi, di Kabupaten Brebes masih terdapat anak usia sekolah 7 – 15 tahun yang belum mengakses layanan pendidikan dasar. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan perumusan program dan kegiatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang belum mengakses layanan pendidikan.

e. Diperlukan penguatan terhadap sistem penilaian pendidikan.

   Ujian sebagai sistem penilaian pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang proses pembelajaran, dan kemampuan siswa untuk dapat menerima pembelajaran. Dengan kata lain, sistem penilaian pendidikan yang baik dapat secara tepat mencerminkan hasil belajar siswa dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan proses pembelajaran pada masa yang akan datang.

f. Kapasitas dan kualitas layanan pendidikan masyarakat yang masih rendah.

   Layanan pendidikan masyarakat masih perlu ditingkatkan, baik secara kapasitas maupun kualitas. Layanan pendidikan masyarakat bersifat strategis sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan formal.

g. Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan.

   Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dapat dinilai dari penguasaan terhadap kompetensi yang di persyaratkan untuk menjadi seorang guru dan tenaga kependidikan. Kompetensi guru masih menjadi isu yang perlu ditangani mengingat persentase guru yang memperoleh nilai standar hasil uji kompetensi guru masih rendah. Dengan meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan diharapkan kurikulum yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik pada proses pembelajaran.

h. Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang Pendidikan perlu ditingkatkan.

Masih berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan, isu strategis selanjutnya adalah pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan. Diharapkan tidak terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara satuan pendidikan yang berada di perkotaan dengan satuan pendidikan yang berada di pinggiran atau pedesaan dalam hal pemenuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan. Selain itu diperlukan juga pemerataan distribusi guru sesuai dengan mata pelajaran khususnya pada jenjang SMP.

i. Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan.

   Isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai adalah peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil. Dengan beban tugas dan tanggung jawab yang sama dengan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil, para guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya. Walaupun tentu saja dasar peningkatan kesejahteraan tersebut dengan batasan kriteria tertentu baik dari segi masa kerja, kompetensi, maupun beban mengajarnya.

j. Pengembangan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh generasi muda.

   Generasi muda sebagai salah satu aset pembangunan yang strategis perlu diberdayakan untuk menjadi salah satu motor penggerak roda pembangunan. Dengan kemampuan wirausaha yang baik diharapkan pemuda dapat menjadi generasi yang produktif dan tidak menjadi beban bagi masyarakat mengingat spektrum penduduk yang didominasi oleh penduduk dalam usia produktif (pemuda).

k. Perlunya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan.

   Organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi tersebut dapat memberikan masukan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga. Organisasi tersebut juga sebagai wahana bagi masyarakat

untuk mengembangkan diri baik di bidang kepemudaan, kepramukaan, maupun keolahragaan.

l. Perlunya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan.

Untuk meningkatkan kualitas kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan perlu dipacu dengan lebih meningkatnya frekuensi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun atas prakarsa mandiri masyarakat.

m. Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan keolahragaan juga merupakan faktor penting untuk mendorong peningkatan kualitas kepemudaan dan keolahragaan di masyarakat. Kegiatan kepemudaan dan keolahragaan perlu suatu wahana yang cukup memadai, baik untuk penyaluran bakat dan minat juga untuk peningkatan prestasi.

n. Peningkatan dan perbaikan sistem tata kelola.

- Perbaikan tata kelola Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

  Pengelolaan sumber daya yang ada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sebagai pendukung penyelenggaraan layanan pendidikan juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Pengelolaan sumber daya tersebut meliputi pemenuhan sarana prasarana pendukung, pemenuhan biaya operasional pendukung, peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dengan unit pelaksana teknis kecamatan dan satuan pendidikan, dan peningkatan kualitas pencatatan aset, dokumen perencanaan, dan laporan keuangan. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

- Peningkatan tata kelola layanan pendidikan.

  Selain meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang ditunjukkan dengan pencapaian standar

nasional pendidikan, tata kelola layanan pendidikan di tingkat Kabupaten juga menjadi isu strategis yang harus ditangani selama lima tahun ke depan. Tata kelola layanan pendidikan dapat ditandai dengan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan ditingkat Kabupaten. Secara fungsional, tata kelola layanan pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk mengintegrasikan program dan kegiatan lintas sektor pada bidang-bidang teknis di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

o. Pencapaian kinerja program-program pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga perlu dievaluasi secara berkala sebagai bahan masukan untuk merumuskan kembali program-program prioritas.

Berkaitan dengan pemenuhan capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program dan kegiatan menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk merumuskan kembali pelaksanaan program dan kegiatan baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun ketepatan mutu dan sasaran sehingga capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. *Kondisi Kesehatan*

Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat ditunjang oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Hal ini akan terwujud apabila terdapat dukungan pemerintah dan swasta. Pada tahun 2025 jumlah rumah sakit di Kabupaten Brebes mencapai 15 unit terdiri dari rumah sakit umum negeri 3 unit dan rumah sakit swasta 12 unit.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan rujukan. Di samping pelayanan kesehatan oleh Pemerintah, partisipasi sektor swasta juga semakin meningkat terutama

dalam pelayanan kesehatan rujukan. Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari Puskesmas Induk, Pustu, Balai pengobatan swasta, RS khusus, RSU Pemerintah dan RSU Swasta. Jumlah fasilitas kesehatan selengkapnya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.5. Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Unit)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	3
2.	Rumah Sakit Umum Swasta	12
3.	Rumah Sakit Khusus	2
4.	Puskesmas Induk	38
5.	Puskesmas Pembantu	59
6.	Klinik Utama	9
7.	Klinik Pratama	74
8.	Polindes	255

Sumber data : Brebes Dalam Data, 2025

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah: Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang memengaruhi Kesehatan, serta Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPD)

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes berdasarkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

a. Usia Harapan Hidup Kabupaten Brebes masih di bawah rata-rata UHH Provinsi Jawa Tengah. Usia Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir atau dapat diartikan dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Beberapa hal yang dapat memengaruhi nilai usia harapan hidup di Kabupaten Brebes adalah:
   1) Masih tingginya Kasus Kematian Ibu. hal ini disebabkan belum semua Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC (*Antenatal Care*) sesuai dengan standar, masih kurangnya tenaga kesehatan yang

berkompeten terhadap penanganan ibu hamil risiko tinggi, belum semua ibu hamil mendapatkan pendampingan, dan belum maksimalnya sistem informasi rujukan persalinan.

2) Masih tingginya Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Angka Kematian Bayi merupakan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada kurun waktu tertentu.

b. Meningkatnya angka kesakitan Penyakit Tidak Menular antara lain jantung, diabetes, kanker, dan stroke. hal ini disebabkan karena :
   1) Belum sadarnya masyarakat terhadap pola hidup sehat seperti makan buah dan sayur, aktivitas fisik, tidak merokok dan cek kesehatan rutin.
   2) Belum semua desa terdapat posbindu sebagai salah satu sarana skrining Penyakit Tidak Menular.
   3) Belum semua fasilitas kesehatan mampu melakukan skrining Penyakit Tidak Menular antara lain kanker serviks (IVA) dan pengobatan krioterapi.
c. Masih adanya penularan penyakit, yaitu HIV/AIDS, TB, kusta, filariasis, pneumonia pada balita, DBD/cikungunya, diare, dan penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi). Hal ini disebabkan antara lain :
   1) Belum semua anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap
   2) Belum semua orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
   3) Belum semua orang terduga TBC dilakukan pemeriksaan dahak.
   4) Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain masih banyaknya perilaku buang air besar sembarangan atau masih ada masyarakat yang tidak mempunyai akses jamban sehat.
d. Masih tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Hal ini disebabkan antara lain :

1) Belum semua Ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar.
2) Rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya ibu dalam pemberian makanan pendamping ASI.
3) Masih kurangnya cakupan pemberian ASI eksklusif.
4) Belum semua anak BALITA mendapatkan pelayanan sesuai standar antara lain : penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A minimal 2 kali setahun.

e. Masih adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung.
f. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan (dasar dan rujukan), kurangnya tenaga kesehatan, khususnya kebutuhan dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum terpenuhi secara merata.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Adapun Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Daerah, sejumlah 21 Dinas, yaitu :
   - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora)
   - Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda)
   - Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
   - Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR)
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim)

- Dinas Sosial (Dinsos)
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades)
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB)
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil)
- Dinas Perhubungan (Dinhub)
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfotik)
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinkopumdag)
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker)
- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar)
- Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus)
- Dinas Perikanan (Dinkan)
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH)

5. Badan
   - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)
   - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperida)
   - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
   - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
6. Lembaga Teknis Daerah lainnya, yaitu :
   - RSUD Brebes
   - RSUD Bumiayu
   - RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan
7. Kecamatan sejumlah 17 Kecamatan, yaitu :
   - Kecamatan Brebes
   - Kecamatan Wanasari
   - Kecamatan Bulakamba
   - Kecamatan Jatibarang

- Kecamatan Songgom
- Kecamatan Tanjung
- Kecamatan Losari
- Kecamatan Larangan
- Kecamatan Ketanggungan
- Kecamatan Kersana
- Kecamatan Banjarharjo
- Kecamatan Tonjong
- Kecamatan Bumiayu
- Kecamatan Sirampog
- Kecamatan Paguyangan
- Kecamatan Bantarkawung
- Kecamatan Salem

Kelurahan sejumlah 5 kelurahan, yaitu :

- Kelurahan Brebes
- Kelurahan Pasarbatang
- Kelurahan Limbangan Wetan
- Kelurahan Limbangan Kulon
- Kelurahan Gandasuli

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2025 sebanyak 14.161 orang, yang terdiri dari 5.740 orang laki-laki dan 8.421 orang perempuan.

Tabel 1.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Brebes Tahun 2025

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SD / Sederajat	34	2	36

2.	SLTP / Sederajat	57	1	58
3.	SLTA / Sederajat	544	126	670
4.	Diploma	415	1.390	1.805
5.	Sarjana, Magister & Spesialis	4.690	6.902	11.592
	JUMLAH	5.740	8.421	14.161

Sumber : BKPSDMD Kab. Brebes, 2025

Pemerintah Kabupaten Brebes membutuhkan Sumber Daya Manusia yang handal, berintegritas dan mempunyai kinerja yang baik sehingga maksimal dalam pelayanan terhadap masyarakat.

D. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi.

Ada beberapa permasalahan utama yang sedang berkembang di Kabupaten Brebes, diantaranya upaya peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan pelayanan dasar kesehatan serta kemiskinan. Untuk itu strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan mengacu pada permasalahan yang menonjol sebagai isu strategis, baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten.

Adapun permasalahan utama Kabupaten Brebes, secara singkat di rinci sebagai berikut :

1. *Kemiskinan*

Selama periode RPD 2023–2026, Brebes menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan dari 15,78 persen (Maret 2023) menjadi 15,60 persen (Maret 2024), dengan penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 26 ribu jiwa hingga Maret 2025, antara lain didukung program penuntasan kemiskinan ekstrem, penguatan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta prioritas APBD untuk penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek-aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang membutuhkan tinjauan multidimensi. Hak-hak dasar tersebut yaitu pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Berdasarkan kajian terhadap indikator yang diterbitkan oleh BPS, Indikator utama pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) melalui Garis Kemiskinan (GK), yang mencakup konsumsi makanan setara 2.100 kkal/kapita/hari dan non-makanan. Indikator makro yang digunakan meliputi Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).Indeks Pembangunan Manusia

Mengacu pada *Human Development Report* pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan

agar dapat hidup secara layak. IPM dihitung berdasar rata-rata geometri indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran.

Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan melalui standarisasi nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Karena IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang, maka memahaminya difokuskan pada dua aspek yaitu kecepatan dan status pencapaian indeks.

IPM merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan komponen penyusun yaitu angka harapan hidup (AHH); harapan lama sekolah (HLS); rata-rata lama sekolah (RLS) dan rata-rata pengeluaran per kapita. Kinerja IPM di Kabupaten Brebes belum menunjukkan perkembangan yang ideal. Dengan rentang wilayah yang sangat luas serta jumlah penduduk mencapai 2 juta jiwa tentunya gambaran kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes belum sesuai harapan.

2. *Tingkat Pengangguran Terbuka*

Permasalahan pengangguran yang harus segera mempunyai solusi adalah menciptakan budaya kerja serta menciptakan SDM yang mempunyai keterampilan. Berkembang di masyarakat Kabupaten Brebes bahwa bekerja di perantauan merupakan salah satu hal yang dapat menaikkan gengsi di tengah masyarakat, meski saat berangkat ke luar kota belum ada jaminan pekerjaan.

Beberapa perusahaan yang terdapat di Kabupaten Brebes telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, saat ini fakta di lapangan menunjukkan bahwa pekerja yang bekerja di Kabupaten Brebes tidak hanya dari dalam wilayah, namun juga berasal dari luar Kabupaten Brebes. Lembaga keterampilan kerja di Kabupaten Brebes juga belum dapat bekerja secara optimal, masalah yang dijumpai adalah kurangnya trainer, sarana dan prasarana yang representatif.

Walaupun kehadiran perusahaan-perusahaan baru berkontribusi menaikkan jumlah penduduk bekerja dari sekitar 826 ribu orang (2022)

menjadi 1,05 juta orang (2024), tingkat pengangguran terbuka masih berada pada kisaran 8,35 persen sehingga diperlukan penguatan pelatihan vokasi, *link and match* dengan industri, serta perubahan budaya kerja masyarakat agar peluang kerja lokal lebih optimal terserap.

3. *Pendidikan*

IPM Kabupaten Brebes meningkat dari 67,03 pada tahun 2022 menjadi 69,71 pada tahun 2023, didorong perbaikan umur harapan hidup (73,95 tahun), harapan lama sekolah (12,44 tahun), dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan sekitar 10,99 juta rupiah per tahun; berbagai program peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rumah tangga terus diperkuat untuk mengejar target IPM pada akhir periode RPD 2023–2026.

Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan yang dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pembangunan suatu bangsa tidak dapat mengandalkan dari sumber daya alam semata, maka usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bersifat mutlak, dimana pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Peningkatan di bidang pendidikan akan berimbas pada kualitas penduduk yang semakin baik. Untuk dapat mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dengan beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun sudah mendekati universal, namun APK dan APM pada jenjang SMP dan SMA/SMK masih menunjukkan kesenjangan antar kecamatan, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan, ditandai masih adanya anak usia sekolah yang bekerja membantu orang tua atau menikah dini. Hal ini menjadi isu strategis yang harus diatasi melalui perluasan akses pendidikan

menengah, beasiswa bagi keluarga miskin, serta peningkatan kualitas dan pemerataan guru.

4. *Kesehatan*

Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat ditunjang oleh fasilitas kesehatan, hal ini akan terwujud apabila adanya dukungan pemerintah dan swasta. Untuk mendukung tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Brebes jumlah tenaga kesehatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun demikian dengan pertimbangan laju pertumbuhan penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Brebes, jumlah tenaga medis belum mencapai angka ideal dalam pelayanan bidang kesehatan.

Walaupun jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Brebes meningkat setiap tahun, dengan penambahan Puskesmas dan jaringannya, sebaran layanan masih belum merata terutama di kecamatan dengan kondisi geografis sulit, sehingga berdampak pada masih tingginya kasus gizi kronis, penyakit menular, dan keterlambatan penanganan kegawatdaruratan. Isu strategis di bidang kesehatan adalah memperkuat pemerataan tenaga medis, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif di seluruh desa

5. *Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Jalan Kabupaten adalah jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Jalan dalam kondisi baik adalah jalan yang mempunyai kondisi perkerasan yang mantap dan dapat berfungsi melayani transortasi dengan baik. Yang dimaksud kondisi baik dalam

indikator ini adalah ruas jalan dalam kondisi baik (kerusakan <11 %) dan sedang (kerusakan <23%).

Jembatan adalah struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (*traffic flows*). Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Yang dimaksud Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik dalam hal ini adalah jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten dengan struktur atas dan struktur bahwahnya dalam kondisi baik sehingga secara keseluruhan Jembatan tersebut dapat berfungsi dengan baik.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten. Pemerintah kabupaten mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

6. *Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*

Definisi kawasan kumuh perkotaan adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dan pada umumnya terjadi di perkotaan. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat: Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Di Kabupaten Brebes telah di identifikasi kawasan kumuh yang ada dan untuk lebih mengintesifkan dan memfokuskan penanganannya telah dibuat SK Bupati Kawasan Kumuh.

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama lima tahun terakhir adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI.

Berdasarkan SK Bupati tentang Penetapan Kawasan Kumuh, total luasan kawasan kumuh di Kabupaten Brebes sebesar 409,512 hektare. Melalui program penanganan terpadu selama 2023–2025, telah dilakukan penanganan kawasan kumuh seluas 351,061 hektare, antara lain melalui peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, air minum, dan sanitasi. Dalam lima tahun terakhir, pemda bersama pemerintah pusat dan provinsi juga telah menangani sekitar zz unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) melalui skema APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN (Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial), namun backlog RTLH masih tinggi sehingga percepatan penanganan permukiman layak huni tetap menjadi isu strategis utama.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS

A. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, diamanatkan bahwa Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 adalah perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan tahap keempat RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025. Dan merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2017-2022. Visi pembangunan Kabupaten Brebes yang akan dicapai di tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam visi RPJPD yaitu **"Kabupaten Brebes Yang Madani, Maju dan Sejahtera"** yang mengarah pada pencapaian harapan masyarakat Kabupaten Brebes. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemadanian, kemajuan, dan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Selanjutnya, perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk bersinergi secara optimal untuk memberikan kontribusi bagi upaya pencapaiannya.

Brebes. Brebes diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Madani. Madani adalah masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi. Madani juga terkait dengan adanya pengakuan atas keragaman atau pluralisme dalam masyarakat. Perilaku masyarakat madani dalam menghadapi berbagai permasalahan baik selalu dihadapi dengan sopan santun dan berperadaban serta mencari jalan keluar dengan bermusyawarah untuk mufakat. Madani menghendaki sikap non diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan sehingga memberikan hak, kemampuan dan kesempatan bagi segenap masyarakat dan Lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam pembangunan. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi madani adalah terpeliharanya eksistensi agama ataupun ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat; terpelihara dan terjaminnya keamanan dan ketertiban serta keselamatan; tegaknya kebebasan berpikir yang jernih dan sehat; terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan penuh silaturahmi dan tenggang rasa; terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab serta bermoral tinggi; terbangunnya profesionalisme aparatur yang tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan daerah.

Maju. Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang

lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah.

Sejahtera. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan per kapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga; tingginya kualitas kehidupan beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.

Tahun 2025 merupakan tahun ke-tiga pelaksanaan dari RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan mengacu pada

RPD Tahun 2023–2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2022. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu empat tahun ke depan. Tujuan kemudian dijabarkan dalam sasaran, yaitu sebuah rumusan kondisi yang dapat menggambarkan tercapainya sebuah tujuan. Penjabaran tujuan dan sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Tujuan 1** : Terwujudnya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama Yang Sangat Kondusif
   b. Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Demokrasi Daerah
   c. Meningkatnya Kesadaran dan Perlindungan Hukum Dengan Menjunjung Tinggi Serta Mengutamakan Asas Bersih, Jujur Serta Adil Kepada Setiap Masyarakat
2. **Tujuan 2** : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas
   b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
   c. Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga
   d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
   e. Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender
   f. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif
   g. Meningkatnya Kepedulian Sosial Secara Luas Untuk Mewujudkan Ketahanan Sosial Terutama Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

h. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

i. Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan.

3. **Tujuan 3** : Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis, Dan Partisipatif, dengan sasaran :

a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Serta Partisipasi dan Peran Seluruh *Stakeholder* Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Peningkatan Kualitas Daerah

b. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif

d. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Optimalisasi Aset Secara Efisien dan Produktif Serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan Daerah

e. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi ASN

f. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban) Yang Baik (Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif)

g. Meningkatnya Peran Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bagian Dalam Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Daerah Serta Solusi Atas Permasalahan Daerah

h. Tersedianya Satu Data Informasi Daerah Yang Valid, Lengkap dan Terbaru Untuk Acuan Pembangunan Daerah

4. **Tujuan 4** : Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal, dengan sasaran :

a. Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas, Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi

b. Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan Mengembangkan Iklim Usaha Kondusif Serta Terjaminnya Berusaha Dan Pelayanan Investasi Yang Prima

c. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi Dan UMKM Sehingga Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Serta Mandiri

d. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Tenaga Kerja

e. Meningkatnya Efisiensi Modernisasi Pertanian dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Untuk Swasembada Pangan

f. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan

g. Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Kualitas Kelembagaan Dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa

h. Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Serta Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan Dan Perikanan

i. Meningkatnya Produktivitas Pertanian Untuk Ketahanan dan Kemandirian Pangan Serta Pemenuhan Kebutuhan Pangan Regional Maupun Nasional dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

j. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Hutan

k. Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi)

l. Meningkatnya Daya Saing Industri Unggulan Daerah Untuk Penggerak Perekonomian

m. Meningkatnya Transaksi Perdagangan Produk Unggulan Daerah Dan Menjaga Distribusi Dan Ketersediaan Barang-barang Kebutuhan Pokok

5. **Tujuan 5** : Terwujudnya Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah, dengan sasaran :

a. Meningkatnya Penataan Ruang dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah

b. Meningkatnya Perumahan dan Lingkungan Layak Ddn Sehat dengan Didukung Jaringan Infrastruktur yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah Maupun Antar Sektor

6. **Tujuan 6** : Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan sasaran :

a. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Untuk Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian Lingkungan Hidup

b. Meningkatnya Kelestarian dan Kesesuaian Tata Guna Lahan Guna Terwujudnya Keserasian Pembangunan Wilayah

c. Meningkatnya Konsistensi Kesesuaian dan Terintegrasinya Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome)* yang seharusnya terwujud akibat/dampak kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja Tahun 2025, disusun prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes. Di perjanjian kinerja juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam penyusunan Penetapan Kinerja bertujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan untuk dicapai pada tahun 2025 tersebut di atas selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati yang ditetapkan setelah disahkannya APBD Kabupaten Tahun 2025. Di dalam dokumen Penetapan Kinerja, tercantum sasaran strategis, indikator kinerja setiap sasaran strategis, dan target setiap indikator kinerja dimaksud baik bersifat kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat diukur tingkat capaian kinerjanya pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama Yang Sangat Kondusif	Persentase Penurunan Konflik SARA (%)	100	100
2	Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Demokrasi Daerah	Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg) (%)	94	94

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
3	Meningkatnya Kesadaran dan Perlindungan Hukum Dengan Menjunjung Tinggi Serta Mengutamakan Asas Bersih, Jujur Serta Adil Kepada Setiap Masyarakat	Persentase tindak pelanggaran Perda tertangani (%)	100	100
4	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.25	12.25
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6.42	6.42
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	71.54	71.54
6	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Pemuda Pelopor Berprestasi (Tingkat Provinsi) (Peringkat)	4	4
		Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	30.00	30.00
		Peningkatan Prestasi Olahraga (Tingkat Provinsi) (Peringkat)	8	8
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan (%)	96.00	96.00
8	Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87.36	87.36
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	63.83	63.83

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
		Peringkat Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) (Status)	4	4
9	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	62.5	62.5
		Persentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*) (%)	10	10
		Persentase Kepesertaan KB Aktif (Indeks)	70.5	70.5
10	Meningkatnya Kepedulian Sosial Secara Luas Untuk Mewujudkan Ketahanan Sosial Terutama Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penanganan Jumlah PMKS (%)	50	50
11	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Persentase kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan (%)	50	50
12	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan	Indeks Literasi (Indeks)	13.3	13.3
		Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat (Indeks)	58	58
13	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Serta Partisipasi dan Peran Seluruh *Stakeholder* dalam Perencanaan Pembangunan untuk Peningkatan Kualitas Daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100
14	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	2.9	2.9

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Skor)	98	98
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel serta Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84	84
		Indeks Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Indeks)	3.35	3.35
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Indeks)	64.5	64.5
16	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Optimalisasi Aset Secara Efisien dan Produktif Serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp. Juta)	480,750	811,520
		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (%)	19.9	19.9
17	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80.00	80.00
		Standar Kompetensi ASN (Skor)	75	75
18	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban) yang Baik (Transparan, Akuntabel dan Partisipatif)	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks) / Indeks Integritas	74	74
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3.50	3.50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Opini)	WTP	WTP
19	Meningkatnya Peran Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bagian Dalam Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Daerah Serta Solusi Atas Permasalahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	52	52
		Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3.14	3.14
20	Tersedianya Satu Data Informasi Daerah Yang Valid, Lengkap dan Terbaru untuk Acuan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	100	100
21	Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas,Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi	*Purchasing Power Parity*/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) (Rp. Ribu)	11,500	11,500
22	Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan Mengembangkan Iklim Usaha Kondusif Serta Terjaminnya Berusaha dan Pelayanan Investasi Yang Prima	Pertumbuhan Laju Investasi	4.00	4.00
23	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM Sehingga Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing serta Mandiri	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat (%)	60	60
		Persentase UMKM Aktif (%)	7.00	7.00
24	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69.60	69.60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
	Kerja	Rasio Penduduk Bekerja (%)	45	45
25	Meningkatnya Efisiensi Modernisasi Pertanian dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Untuk Swasembada Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Susenas (Skor)	95.8	95.8
26	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	Kinerja Lalu Lintas (0.6 s.d. 0.8) (Skor)	0.8	0.8
		Kinerja Keselamatan Lalu Lintas (Skor)	18	18
27	Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Kualitas Kelembagaan dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa	Persentase BUMDes Aktif (%)	85	85
		Persentase BUMDes Sehat (%)	65	65
		Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten (Indeks)	0.69	0.69
28	Meningkatnya Produksi Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Serta Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Peningkatan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Rp. Juta)	24,094,139	24,094,139
		Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	130	130
29	Meningkatnya Produktivitas Pertanian Untuk Ketahanan dan Kemandirian Pangan serta Pemenuhan Kebutuhan Pangan	Indeks Pertanaman (Indeks)	235	235

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
	Regional Maupun Nasional dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Nilai Tukar Petani (Nilai)	112	112
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Hutan	Peningkatan Luasan Lahan Konservasi (%)	29.86	29.86
31	Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi)	Peningkatan PDRB sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) (Rp. Juta)	2,227,892.91	2,227,892.91
32	Meningkatnya Daya Saing Industri Unggulan Daerah untuk Penggerak Perekonomian	Peningkatan PDRB sektor Industri (Rp. Juta)	10,119,460.38	10,119,460.38
33	Meningkatnya Transaksi Perdagangan Produk Unggulan Daerah dan Menjaga Distribusi dan Ketersediaan Barang-Barang Kebutuhan Pokok	Peningkatan PDRB sektor Perdagangan (Rp. Juta)	9,101,677	9,101,677
34	Meningkatnya Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Terpadu, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana untuk Menopang Perekonomian Daerah	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Mantap (%)	88	88
		Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik (%)	71	71
		Cakupan Akses Air Minum Layak (%)	100	100
		Cakupan Akses Jaringan Perpipaan (%)	26	26
		Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan (%)	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
		Persentase Penurunan *Blank Spot* Jaringan Seluler (%)	23.08	23.08
		Bantaran/tanggul sungai dan saluran pembuang berfungsi baik (%)	45	45
		Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0.6	0.6
		Meningkatnya persentase sanitasi aman (%)	1.6	1.6
		Persentase capaian penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan (%)	100	100
35	Meningkatnya Perumahan dan Lingkungan Layak dan Sehat dengan Didukung Jaringan Infrastruktur yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah Maupun Antar Sektor	PersentasePenurunan Kawasan Kumuh (%)	24.68	24.68
		Persentase Rumah Sehat Layak Huni (%)	27.5	27.5
		Persentase Akses Sanitasi Layak (%)	100	100
		Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak (%)	83	83
		Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)	57.28	57.28
36	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat untuk Pengelolaan dan Pendayagunaan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	50.15	50.15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
	Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	81.25	81.25
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	47.70	47.70
		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	40.00	40.00
37	Meningkatnya Kelestarian dan Kesesuaian Tata Guna Lahan Guna Terwujudnya Keserasian Pembangunan Wilayah	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	93	93
38	Meningkatnya Konsistensi Kesesuaian dan Terintegrasinya Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Hektar)	19	19

Anggaran belanja daerah Kabupaten Brebes pada APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 3.794.484.534.981,-.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

A. Pengukuran Kinerja

Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakan sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja dan pengukuran kinerja sasaran merupakan instrumen manajemen untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun melalui media pelaporan.

Pengukuran kinerja sasaran merupakan jembatan antara target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025 dengan capaian kinerjanya pada akhir tahun 2025 serta mengetahui tingkat akuntabilitas pelaksanaannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya pada setiap pelaksanaan urusan pemerintahan.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Brebes dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

➔ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

➔ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
91 s.d lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
76 s.d 90	Tinggi / Berhasil
66 s.d 75	Sedang / Cukup Berhasil
51 s.d 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d 50	Sangat Rendah / Sangat Tdk Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Jml Indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 95
Berhasil : 82,5
Cukup Berhasil : 70
Tidak Berhasil : 57,5
Sangat Tidak Berhasil : 25

Untuk pengukuran nilai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Angka tersebut didapat dari rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi\ x\ CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi\ x\ CKi)}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

E : Tingkat Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi: Capaian keluaran i

B. Capaian Kinerja Tahun 2025

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2025. Secara umum realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes dapat dicapai dengan baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya yang telah dicapai sampai dengan akhir Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan 6 (enam) Tujuan dan 38 (tiga puluh delapan) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 77 (tujuh puluh tujuh) indikator sasaran.

1. *Capaian Indikator Kinerja Utama*

Hingga akhir tahun 2025 capaian indikator kinerja utama Kabupaten Brebes, sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Capaian Kinerja Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama Yang Sangat Kondusif	Persentase Penurunan Konflik SARA (%)	100	100	100.00%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Demokrasi Daerah	Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg) (%)	94	98	104.26%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kesadaran Dan Perlindungan Hukum Dengan Menjunjung Tinggi Serta Mengutamakan Asas Bersih, Jujur Serta Adil Kepada Setiap Masyarakat	Persentase tindak pelanggaran Perda tertangani (%)	100	100	100.00%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.25	12.66	103.35%	Sangat Tinggi
		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6.42	6.61	102.96%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71.54	74.4	104.00%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga	Pemuda Pelopor Berprestasi (Tingkat Provinsi) (Peringkat)	4	0	0.00%	Sangat Rendah
		Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	30.00	0.01	0.03%	Sangat Rendah
		Peningkatan Prestasi Olahraga (Tingkat Provinsi) (Peringkat)	8	17	-12.50%	Sangat Rendah
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan (%)	96.00	97.57	101.64%	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
8	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87.36			dalam proses
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	63.83			dalam proses
		Peringkat Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) (Status)	4	3	75.00%	Sedang
9	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	62.5	64.51	103.22%	Sangat Tinggi
		Persentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*) (%)	10	6.19	138.10%	Sangat Tinggi
		Persentase Kepesertaan KB Aktif (Indeks)	70.5	68.26	96.82%	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya Kepedulian Sosial Secara Luas Untuk Mewujudkan Ketahanan Sosial Terutama Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penanganan Jumlah PMKS (%)	50	52.93	105.86%	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah	Persentase kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan (%)	50	72.12	144.24%	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan	Indeks Literasi (Indeks)	13.3	14.92	112.18%	Sangat Tinggi
		Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat (Indeks)	58	67.23	115.91%	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Serta Partisipasi Dan Peran Seluruh Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Peningkatan Kualitas Daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	100.00%	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	2.9	3.29	113.45%	Sangat Tinggi
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Skor)	98	90.09	91.93%	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84	86.59	103.08%	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	Inovatif	Indeks Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Indeks)	3.35			dalam proses
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Indeks)	64.5	64.76	100.40%	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Optimalisasi Aset Secara Efisien Dan Produktif Serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp. Juta)	811520	864266	106.50%	Sangat Tinggi
		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (%)	19.9	30.3	152.26%	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya Kapasitas Dan Kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80.00	79.34	99.18%	Sangat Tinggi
		Standar Kompetensi ASN (Skor)	75	72.95	97.27%	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban) Yang Baik (Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks)	74	74.4	100.54%	Sangat Tinggi
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3.50	2.825	80.71%	Tinggi
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Opini)	WTP			dalam proses
19	Meningkatnya Peran Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bagian Dalam Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Daerah Serta Solusi Atas Permasalahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	52	69.1	132.88%	Sangat Tinggi
		Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3.14			dalam proses
20	Tersedianya Satu Data Informasi Daerah Yang Valid, Lengkap Dan Terbaru Untuk Acuan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	100	100	100.00%	Sangat Tinggi
21	Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas,Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi	Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) (Rp. Ribu)	11500	11853	103.07%	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
22	Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Mengembangkan Iklim Usaha Kondusif Serta Terjaminnya Berusaha Dan Pelayanan Investasi Yang Prima	Pertumbuhan Laju Investasi	4.00	3.41	85.25%	Tinggi
23	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Koperasi Dan UMKM Sehingga Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Serta Mandiri	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat (%)	60	72.2	120.33%	Sangat Tinggi
		Persentase UMKM Aktif (%)	7.00	7.1	101.43%	Sangat Tinggi
24	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69.60	71.9	103.30%	Sangat Tinggi
		Rasio Penduduk Bekerja (%)	45	66.09	146.87%	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya Efisiensi Modernisasi Pertanian Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Untuk Swasembada Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Susenas (Skor)	95.8	97	101.25%	Sangat Tinggi
26	Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	Kinerja Lalu Lintas (0.6 s.d. 0.8) (Skor)	0.8	0.45	143.75%	Sangat Tinggi
		Kinerja Keselamatan Lalu Lintas (Skor)	18	15	116.67%	Sangat Tinggi
27	Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kualitas Kelembagaan Dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa	Persentase BUMDes Aktif (%)	85	99	116.47%	Sangat Tinggi
		Persentase BUMDes Sehat (%)	65	70	107.69%	Sangat Tinggi
		Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten (Indeks)	0.69	0.72	104.35%	Sangat Tinggi
28	Meningkatnya Produksi Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Serta Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan Dan Perikanan	Peningkatan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Rp. Juta)	24094139	21725968.94	90.17%	Tinggi
		Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	130	115.54	88.88%	Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
29	Meningkatnya Produktivitas Pertanian Untuk Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Serta Pemenuhan Kebutuhan Pangan Regional Maupun Nasional Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Pertanaman (Indeks)	235	285	121.28%	Sangat Tinggi
		Nilai Tukar Petani (Nilai)	112	114.78	102.48%	Sangat Tinggi
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Hutan	Peningkatan Luasan Lahan Konservasi (%)	29.86	0	0.00%	tidak diketahui
31	Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi)	Peningkatan PDRB sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) (Rp. Juta)	2227892.9	3652448.82	163.94%	Sangat Tinggi
32	Meningkatnya Daya Saing Industri Unggulan Daerah Untuk Penggerak Perekonomian	Peningkatan PDRB sektor Industri (Rp. Juta)	10119460	13105438	129.51%	Sangat Tinggi
33	Meningkatnya Transaksi Perdagangan Produk Unggulan Daerah Dan Menjaga Distribusi Dan Ketersediaan Barang-Barang Kebutuhan Pokok	Peningkatan PDRB sektor Perdagangan (Rp. Juta)	9101676.9	10667878.83	117.21%	Sangat Tinggi
34	Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Mantap (%)	88	63.19	71.81%	Sedang
		Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik (%)	71	67.49	95.06%	Sangat Tinggi
		Cakupan Akses Air Minum Layak (%)	100	100	100.00%	Sangat Tinggi
		Cakupan Akses Jaringan Perpipaan (%)	26	22.11	85.04%	Tinggi
		Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan (%)	100	88.97	88.97%	Tinggi
		Persentase Penurunan *Blank Spot* Jaringan Seluler (%)	23.08	0	0.00%	Sangat Rendah
		Bantaran/tanggul sungai dan saluran pembuang berfungsi baik (%)	45	50	111.11%	Sangat Tinggi
		Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0.6	0.58	96.67%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya persentase sanitasi aman (%)	1.6	1.59	99.38%	Sangat Tinggi
		Persentase capaian penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan (%)	100	97.41	97.41%	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
35	Meningkatnya Perumahan Dan Lingkungan Layak Dan Sehat Dengan Didukung Jaringan Infrastruktur Yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah Maupun Antar Sektor	PersentasePenurunan Kawasan Kumuh (%)	24.68	16.65	67.46%	Sedang
		Persentase Rumah Sehat Layak Huni (%)	27.5	48	174.55%	Sangat Tinggi
		Persentase Akses Sanitasi Layak (%)	100	100	100.00%	Sangat Tinggi
		Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak (%)	83	85.3	102.77%	Sangat Tinggi
		Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)	57.28	29.6	51.68%	Rendah
36	Meningkatnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	50.15	80.67	160.86%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	81.25	77.81	95.77%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	47.70	63.27	132.64%	Sangat Tinggi
		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	40.00	24.08	60.20%	Rendah
37	Meningkatnya Kelestarian Dan Kesesuaian Tata Guna Lahan Guna Terwujudnya Keserasian Pembangunan Wilayah	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	93	92	98.92%	Sangat Tinggi
38	Meningkatnya Konsistensi Kesesuaian Dan Terintegrasinya Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Hektar)	19	13.88	73.05%	Sedang

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 77 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa :

- 55 indikator dengan kategori "Sangat Tinggi"
- 6 indikator dengan kategori "Tinggi"
- 4 indikator dengan kategori "Sedang"
- 2 indikator dengan kategori "Rendah"

- 4 indikator dengan kategori "Sangat Rendah"
- 5 indikator masih dalam proses hasil penilaian
- 1 indikator tidak bisa di ukur realisasinya

2. *Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya*

Adapun realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan
		2024	2025	
1	Persentase Penurunan Konflik SARA (%)	100	100	●
2	Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg) (%)	66.4	98	▲
3	Persentase tindak pelanggaran Perda tertangani (%)	100	100	●
4	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.45	12.66	▲
5	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6.41	6.61	▲
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74.18	74.4	▲
7	Pemuda Pelopor Berprestasi (Tingkat Provinsi) (Peringkat)	0	0	●
8	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	24.07	0.01	▼
9	Peningkatan Prestasi Olahraga (Tingkat Provinsi) (Peringkat)	18	17	▼
10	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan (%)	97.045	97.57	▲
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87.61	Proses	
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	63.83	proses	
13	Peringkat Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) (Status)	3	3	●
14	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	63.27	64.51	▲
15	Persentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*) (%)	7.8	6.19	▼
16	Persentase Kepesertaan KB Aktif (Indeks)	67.84	68.26	▲
17	Persentase Penanganan Jumlah PMKS (%)	45.78	52.93	▲
18	Persentase kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan (%)	63.6	72.12	▲
19	Indeks Literasi (Indeks)	14.46	14.92	▲
20	Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat (Indeks)	66.8	67.23	▲
21	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	●
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	2.84	3.29	▲
23	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Skor)	93.33	90.09	▼
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84.57	86.59	▲
25	Indeks Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Indeks)	proses	proses	

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan
		2024	2025	
26	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Indeks)	64.29	64.76	▲
27	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp. Juta)	618350	864266	▲
28	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (%)	21.08	30.3	▲
29	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79.49	79.34	▼
30	Standar Kompetensi ASN (Skor)	91.7	72.95	▼
31	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks)	72.45	74.4	▲
32	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3.017	2.825	▼
33	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Opini)	WTP	proses	
34	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	59.33	69.1	▲
35	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3.49	proses	
36	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	100	100	●
37	Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) (Rp. Ribu)	11389	11853	▲
38	Pertumbuhan Laju Investasi	2.53	3.41	▲
39	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat (%)	55.2	72.2	▲
40	Persentase UMKM Aktif (%)	6.99	7.1	▲
41	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	71.92	71.9	▼
42	Rasio Penduduk Bekerja (%)	65.9	66.09	▲
43	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Susenas (Skor)	90.42	97	▲
44	Kinerja Lalu Lintas (0.6 s.d. 0.8) (Skor)	0.55	0.45	▼
45	Kinerja Keselamatan Lalu Lintas (Skor)	12	15	▲
46	Persentase BUMDes Aktif (%)	74	99	▲
47	Persentase BUMDes Sehat (%)	55	70	▲
48	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten (Indeks)	0.7	0.72	▲
49	Peningkatan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Rp. Juta)	20649761.9	21725968.94	▲
50	Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	112.51	115.54	▲
51	Indeks Pertanaman (Indeks)	289	285	▼
52	Nilai Tukar Petani (Nilai)	114.22	114.78	▲
53	Peningkatan Luasan Lahan Konservasi (%)	0	0	●
54	Peningkatan PDRB sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) (Rp. Juta)	3189356.88	3652448.82	▲
55	Peningkatan PDRB sektor Industri (Rp. Juta)	11980741.76	13105438	▲
56	Peningkatan PDRB sektor Perdagangan (Rp. Juta)	10040667.02	10667878.83	▲
57	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Mantap (%)	62.71	63.19	▲
58	Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik (%)	69	67.49	▼
59	Cakupan Akses Air Minum Layak (%)	100	100	●
60	Cakupan Akses Jaringan Perpipaan (%)	21.69	22.11	▲
61	Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan (%)	100	88.97	▼
62	Persentase Penurunan *Blank Spot* Jaringan Seluler (%)	0	0	●

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan
		2024	2025	
63	Bantaran/tanggul sungai dan saluran pembuang berfungsi baik (%)	46.55	50	▲
64	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0.58	0.58	●
65	Meningkatnya persentase sanitasi aman (%)	1.5	1.59	▲
66	Persentase capaian penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan (%)	95.91	97.41	▲
67	PersentasePenurunan Kawasan Kumuh (%)	15.05	16.65	▲
68	Persentase Rumah Sehat Layak Huni (%)	44.39	48	▲
69	Persentase Akses Sanitasi Layak (%)	100	100	●
70	Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak (%)	83.49	85.3	▲
71	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)	28.72	29.6	▲
72	Indeks Kualitas Air (Indeks)	61.16	80.67	▲
73	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	90.71	77.81	▼
74	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	48.96	63.27	▲
75	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	22.05	24.08	▲
76	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	92	92	●
77	Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Hektar)	13.71	13.88	▲

Keterangan :

▲ = Naik

● = Tetap

▼ = Turun

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi 77 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa :

- 47 indikator mengalami kenaikan
- 12 indikator Tetap
- 13 indikator mengalami penurunan
- 5 indikator belum diketahui

3. *Capaian Kinerja Menurut Sasaran*

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata – rata sesuai dengan Metode rata–rata data kelompok, maka dari 38 Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja tersebut, memiliki capaian kinerja masing – masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.4. Rata – rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata – rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator					
					Belum diketahui	Sangat rendah 0 < 50	Rendah 50,1 sd. 65	Sedang 65,1 sd. 75	Tinggi 75,1 sd. 90	Sangat Tinggi 90,1 sd. lebih
1	Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama Yang Sangat Kondusif	1	100%	Sangat Tinggi						1
2	Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Demokrasi Daerah	1	104,26 %	Sangat Tinggi						1
3	Meningkatnya Kesadaran Dan Perlindungan Hukum Dengan Menjunjung Tinggi Serta Mengutamakan Asas Bersih, Jujur Serta Adil Kepada Setiap Masyarakat	1	100%	Sangat Tinggi						1
4	Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas	2	103,15 %	Sangat Tinggi						2
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	104%	Sangat Tinggi						1
6	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga	3	-4.16%	Sangat Rendah		3				
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	101,64 %	Sangat Tinggi						1
8	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender	3	-	-	3					
9	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif	3	112,71 %	Sangat Tinggi						3
10	Meningkatnya Kepedulian Sosial Secara Luas Untuk Mewujudkan Ketahanan Sosial Terutama Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	105,86 %	Sangat Tinggi						1

No.	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata – rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator					
					Belum diketahui	Sangat rendah 0 < 50	Rendah 50,1 sd. 65	Sedang 65,1 sd. 75	Tinggi 75,1 sd. 90	Sangat Tinggi 90,1 sd. lebih
11	Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah	1	144,24 %	Sangat Tinggi						1
12	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan	2	114,05 %	Sangat Tinggi						2
13	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Serta Partisipasi Dan Peran Seluruh Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Peningkatan Kualitas Daerah	1	100.00 %	Sangat Tinggi						1
14	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	2	102,69 %	Sangat Tinggi						2
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	3	-	-	1					2
16	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Optimalisasi Aset Secara Efisien Dan Produktif Serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan Daerah	2	129,38 %	Sangat Tinggi						2
17	Meningkatnya Kapasitas Dan Kompetensi ASN	2	98,22%	Sangat Tinggi						2
18	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban) Yang Baik (Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif)	3	-	-	1				1	1
19	Meningkatnya Peran Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bagian Dalam Pertimbangan Pengambilan	2	-	-	1					1

No.	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata – rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator					
					Belum diketahui	Sangat rendah 0 < 50	Rendah 50,1 sd. 65	Sedang 65,1 sd. 75	Tinggi 75,1 sd. 90	Sangat Tinggi 90,1 sd. lebih
	Kebijakan Daerah Serta Solusi Atas Permasalahan Daerah									
20	Tersedianya Satu Data Informasi Daerah Yang Valid, Lengkap Dan Terbaru Untuk Acuan Pembangunan Daerah	1	100%	Sangat Tinggi						1
21	Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas,Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi	1	103,07 %	Sangat Tinggi						1
22	Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Mengembangkan Iklim Usaha Kondusif Serta Terjaminnya Berusaha Dan Pelayanan Investasi Yang Prima	1	85,25%	Tinggi					1	
23	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Koperasi Dan UMKM Sehingga Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Serta Mandiri	2	110,88 %	Sangat Tinggi						2
24	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	2	125,09 %	Sangat Tinggi						2
25	Meningkatnya Efisiensi Modernisasi Pertanian Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Untuk Swasembada Pangan	1	101,25 %	Sangat Tinggi						1
26	Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	2	130,21 %	Sangat Tinggi						2
27	Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kualitas Kelembagaan Dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa	3	109,50 %	Sangat Tinggi						3

No.	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata – rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator					
					Belum diketahui	Sangat rendah 0 < 50	Rendah 50,1 sd. 65	Sedang 65,1 sd. 75	Tinggi 75,1 sd. 90	Sangat Tinggi 90,1 sd. lebih
28	Meningkatnya Produksi Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Serta Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan Dan Perikanan	2	89,52%	Tinggi					2	
29	Meningkatnya Produktivitas Pertanian Untuk Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Serta Pemenuhan Kebutuhan Pangan Regional Maupun Nasional Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	2	111,88 %	Sangat Tinggi						2
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Hutan	1	-	-	1					
31	Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi)	1	163,94 %	Sangat Tinggi						1
32	Meningkatnya Daya Saing Industri Unggulan Daerah Untuk Penggerak Perekonomian	1	129,51 %	Sangat Tinggi						1
33	Meningkatnya Transaksi Perdagangan Produk Unggulan Daerah Dan Menjaga Distribusi Dan Ketersediaan Barang-Barang Kebutuhan Pokok	1	117,21 %	Sangat Tinggi						1
34	Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah	10	84,54%	Sangat Tinggi		1		1	2	6
35	Meningkatnya Perumahan Dan Lingkungan Layak Dan Sehat Dengan Didukung Jaringan Infrastruktur Yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah Maupun Antar Sektor	5	99,29%	Sangat Tinggi			1	1		3

No.	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata – rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator					
					Belum diketahui	Sangat rendah 0 < 50	Rendah 50,1 sd. 65	Sedang 65,1 sd. 75	Tinggi 75,1 sd. 90	Sangat Tinggi 90,1 sd. lebih
36	Meningkatnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian Lingkungan Hidup	4	112,37 %	Sangat Tinggi			1			3
37	Meningkatnya Kelestarian Dan Kesesuaian Tata Guna Lahan Guna Terwujudnya Keserasian Pembangunan Wilayah	1	98,92%	Sangat Tinggi						1
38	Meningkatnya Konsistensi Kesesuaian Dan Terintegrasinya Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	1	73,05%	Sedang				1		
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis	77	98,56%	Sangat Tinggi	6	4	2	4	6	55

Rata – rata capaian sasaran strategis belum diketahui persentasenya. Capaian dari 38 (tiga puluh delapan) Sasaran Strategis:

- 29 Sasaran dengan kategori sangat Tinggi
- 2 Sasaran dengan kategori Tinggi
- 1 Sasaran dengan kategori Sedang
- 0 Sasaran dengan kategori Rendah
- 1 Sasaran dengan kategori Sangat Rendah
- 4 Sasaran dengan kategori Belum Diketahui Hasilnya
- 1 Sasaran tidak dapat di ukur

4. *Capaian Kinerja Menurut Tujuan*

Adapun capaian indikator kinerja sasaran menurut misi dapat disimpulkan dari 77 Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Menurut Tujuan

No	Tujuan/kategori	Jumlah Indikator	Presentase
1	TUJUAN 1 Terwujudnya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal	3	
	Sangat Berhasil	3	100
	Berhasil		
	Cukup Berhasil		
	Tidak Berhasil		
	Sangat Tidak Berhasil		
2	TUJUAN 2 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	17	
	Sangat Berhasil	11	64,71
	Berhasil		
	Cukup Berhasil		
	Tidak Berhasil		
	Sangat Tidak Berhasil	3	17,65
	Belum diketahui	3	17,65
3	TUJUAN 3 Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis, Dan Partisipatif	16	
	Sangat Berhasil	12	75
	Berhasil	1	6,25
	Cukup Berhasil		
	Tidak Berhasil		
	Belum diketahui	3	18,75
4	TUJUAN 4 Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal	20	
	Sangat Berhasil	16	80
	Berhasil	3	15
	Cukup Berhasil		
	Tidak Berhasil		
	Sangat Tidak Berhasil		
	Belum diketahui	1	5
5	TUJUAN 5 Terwujudnya Peningkatkan Dan Pemerataan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Daerah	15	
	Sangat Berhasil	9	60

No	Tujuan/kategori	Jumlah Indikator	Presentase
	Berhasil	2	13,33
	Cukup Berhasil	3	20
	Tidak Berhasil	2	13,33
	Sangat Tidak Berhasil	1	6,67
6	TUJUAN 6 Terwujudnya Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	6	
	Sangat Berhasil	4	66,67
	Berhasil		
	Cukup Berhasil	1	16,67
	Tidak Berhasil	1	16,67
	Sangat Tidak Berhasil		
	Belum diketahui		

C. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2025

1. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1*

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama Yang Sangat KondusifToleransi Antar Umat Beragama

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.6. Capaian Indikator Sasaran Persentase Penurunan Konflik SARA

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Persentase Penurunan Konflik SARA	%	100	100	100	100	100

Indikator Persentase Penurunan Konflik SARA digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial serta harmonisasi kehidupan masyarakat yang beragam. Kabupaten Brebes merupakan wilayah dengan karakter masyarakat yang heterogen, baik dari sisi agama, budaya, maupun latar belakang sosial, sehingga potensi konflik berbasis SARA perlu dikelola secara berkelanjutan.

Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah kejadian konflik SARA pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, menggunakan rumus:

((Jumlah konflik SARA tahun sebelumnya – jumlah konflik SARA tahun berjalan) / jumlah konflik SARA tahun sebelumnya) × 100%

Pada Tahun 2025, tidak terdapat kejadian konflik SARA di Kabupaten Brebes, sehingga realisasi indikator mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan kondisi sosial yang kondusif serta efektivitas upaya pencegahan konflik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol.

Angka realisasi indikator diperoleh dari hasil pemantauan dan pengumpulan data yang bersumber dari:

- Laporan kewaspadaan dini dan monitoring sosial Badan Kesbangpol Kabupaten Brebes
- Laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- Koordinasi rutin dengan Forkopimda, khususnya Polres dan Kodim
- Informasi dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan
- Rekapitulasi laporan pengaduan masyarakat

Seluruh sumber data tersebut menunjukkan bahwa sepanjang Tahun 2025 tidak terdapat konflik SARA yang terjadi di wilayah Kabupaten Brebes.

Target indikator Persentase Penurunan Konflik SARA pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%. Realisasi capaian indikator juga mencapai 100%, sehingga target kinerja telah tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak yang diharapkan. Pada Tahun 2024, indikator ini juga mencapai capaian 100%. Konsistensi capaian selama dua tahun berturut-turut menunjukkan bahwa kondisi stabilitas sosial dan toleransi antarumat beragama di Kabupaten Brebes terjaga secara berkelanjutan, serta mencerminkan kesinambungan kebijakan dan kinerja Badan Kesbangpol. Target jangka menengah indikator ini dalam RPD Kabupaten Brebes Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%. Dengan capaian Tahun 2025 yang telah mencapai 100%, maka realisasi kinerja telah selaras dan memenuhi target jangka menengah yang direncanakan. Di tingkat nasional, konflik sosial berbasis SARA masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Kondisi Kabupaten Brebes yang nihil konflik SARA menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional maupun beberapa daerah lain, terutama dalam hal pengelolaan kerukunan sosial dan stabilitas masyarakat.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial masyarakat dan kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Brebes. Masyarakat Brebes secara umum masih menjunjung tinggi nilai kearifan lokal, toleransi, dan semangat kebersamaan. Kondisi ini diperkuat oleh peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Dari sisi kelembagaan, Badan Kesbangpol telah menjalankan fungsi deteksi dini dan cegah dini secara optimal melalui pemantauan intensif, penguatan peran FKUB dan FKDM, serta koordinasi lintas sektor dengan Forkopimda. Pendekatan persuasif, dialogis, dan preventif menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah potensi konflik sebelum berkembang.

Keberhasilan pencapaian Indikator Sasaran didukung oleh Program yang menunjang keberhasilan kinerja dan keluaran sub kegiatan antara lain:

a. Fasilitasi kerukunan umat beragama
b. Pembinaan FKUB dan FKDM
c. Dialog lintas agama dan kepercayaan
d. Monitoring dan evaluasi kewaspadaan dini

2. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2*

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Demokrasi Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 104,26 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.7. Capaian Indikator Sasaran Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres,	%	66,4	94	98	104,26	75

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
	Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg)						

Angka capaian Indikator Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg) diperoleh berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2025 yang merupakan Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW). Karena pada tahun 2025 tidak ada kegiatan terkait pemilu Pilpres, Pilgup, Pilbup maupun Pileg. Pilkades pergantian antar waktu (PAW) digelar apabila kepala desa yang menjabat berhenti sebelum akhir masa jabatan dan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun sedangkan pelaksanaan tidak dapat ditentukan waktunya. Dasar hukum Pemilihan Kepala Desa Permendagri 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Adapun perbedaan pilkades regular dan pilkades PAW antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.8. Perbedaan Pilkades Regular dan Pilkades PAW

	Pilkades Reguler	Pilkades PAW
1.	Daftar Pemilih Tetap (DPT) seluruh masyarakat desa yang memiliki hak suara	Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat desa yang ditentukan melalui Musyawarah Desa (Musdes), hal ini yang memungkinkan persentase pemilih dalam pilkades PAW lebih besar daripada Pilkades Reguler
2.	Kepanitiaan Pilkades secara berjenjang dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa	Kepenitiaan Pilkades oleh pemerintah desa
3.	Waktu pelaksanaan Pilkades dilaksanakan serentak seluruh desa yang melaksanakan Pilkades	Waktu pelaksanaan Pilkades ditentukan oleh masing-masing desa.

Sumber angka realisasi indikator Persentase pemilih dalam pemilu (Pilkades) diperoleh dari persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak suara pada pemelihan kepala desa dibagi dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikalikan 100 persen.

Target kinerja indikator pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 94%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 98%. Dengan demikian, capaian kinerja telah melampaui target sebesar 4 poin persentase atau mencapai 104,26% dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkades Tahun 2025 berada pada kategori sangat tinggi.

Realisasi indikator pada Tahun 2024 tercatat sebesar 66,4%, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 98%. Terjadi peningkatan sebesar 31,6 poin persentase. Peningkatan yang signifikan ini dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik pemilihan. Pada Tahun 2024 dilaksanakan pemilu skala nasional dan daerah yang kompleks, sedangkan pada Tahun 2025 hanya dilaksanakan Pilkades yang bersifat lokal dan memiliki kedekatan langsung dengan kepentingan masyarakat. Target jangka menengah indikator Persentase Pemilih dalam Pemilu sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) ditetapkan sebesar 75%. Realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 98% telah melampaui target jangka menengah sebesar 23 poin persentase, atau mencapai 130,67% dari target jangka menengah. Capaian ini menunjukkan bahwa sasaran strategis peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi telah tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil Pemilu 2025 tingkat partisipasi pemilih Pemilihan Presiden dan Wakil Persiden mencapai 81,78% (sumber https://www.kpu.go.id) sedangkan target RPJMN tahun 2020-2024 untuk Pilpres yakni 79,5%. Realisasi pilkades PAW tahun 2025 kurang dapat diperbandingkan dengan Pemilu Pemilihan Persiden dan Wakil Persiden namun dari gambaran tersebut Pilkades PAW telah melampaui capaian pada pemilu Pilpres.

Beberapa Permasalahan dalam pelaksanaan pilkades antara lain:

a. Belum memanfaatkan teknologi informasi karena Pilkades PAW.
b. Pelaksanaan pilkades PAW oleh panitia tingkat desa sehingga dikhawatirkan tidak independent

Dari permasalahan tersebut, Dinpermades Kabupaten Brebes berupaya untuk meningkatkan

a. Pada pelaksanaan Pilkades regular didorong untuk memanfaatkan tehnologi informasi
b. Dinpermades melakukan sosialisasi pelaksanaan pilkades PAW secara berkesinambungan;
c. Kerja bersama antara Dinpermades, Kecamatan dan desa yang terjalin baik dalam pelaksanaan Pilkades/Pilkades PAW;
d. Daftar pemilih tetap (DPT) pilkades PAW merupakan perwakilan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang ditentukan dalam musyawarah desa (Musdes), penentuan DPT seperti tersebut memungkinkan pesentase pemilih yang menggunakan hak pilih jauh lebih besar dibandingkan dengan pilkades regular; dan
e. Waktu pelaksaaan pilkades diupayakan pada hari libur, sehingga persentase partisipasi pemilih dalam pilkades lebih tinggi.

Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yang ada di Dinpermades. Sumberdaya Manuasia Dinpermades total 32 orang yang tersebar di beberapa bidang, hal ini tidak menjadi halangan dalam mendukung pelaksanaan pilkades. karena adanya kerja bersama antara Dinpermades, Kecamatan, dan pemerintahan desa serta masyarakat. Dalam aspek efisiensi anggaran, realisasi anggaran untuk indikator ini mencapai Rp. 4.678.386.930,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.465.977.442 dengan efisiensi sebesar 26,57%. hal ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran berdasarkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan capaian indikator persentase pemilih dalam pemilu (pilkades) didukung oleh program administrasi pemerintahan desa dimana dalam program tersebut berisi aktifitas seperti sub kegiatan Penyelenggaran Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Di dalam terdapat pemantauan atas partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pilkades.

3. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3*

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kesadaran Dan Perlindungan Hukum Dengan Menjunjung Tinggi Serta Mengutamakan Asas Bersih, Jujur Serta Adil Kepada Setiap Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.9. Capaian Indikator Sasaran Persentase tindak pelanggaran Perda tertangani

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Persentase tindak pelanggaran Perda tertangani	%	100	100	100	100	100

Indikator Persentase Tindak Pelanggaran Perda Tertangani digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam menangani pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda). Indikator ini mencerminkan sejauh mana pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Angka realisasi capaian ini diperoleh dari data internal yang mencatat jumlah pelanggaran Perda yang tertangani oleh instansi terkait sepanjang tahun 2024 melalui rumus:

$$\frac{Jumlah\ pelanggaran\ keamanan\ dan\ ketertiban\ yang\ tertangani}{Jumlah\ pelanggaran\ keamanan\ dan\ ketertiban} x\ 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, capaian indikator pada Tahun 2025 diperoleh sebesar 100%. Sumber data realisasi indikator Persentase Tindak Pelanggaran Perda Tertangani berasal dari data internal Satpol PP Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 yang terdokumentasi dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatan penegakan Perda serta Peraturan Kepala Daerah. Data tersebut

dihimpun dari berbagai kegiatan penegakan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Untuk memperjelas sumber dan jenis data realisasi indikator, berikut disajikan tabel data pendukung sebagai dasar perhitungan capaian indikator:

Tabel 3.10. Data Sumber Realisasi Penanganan Pelanggaran Perda Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan Penegakan Perda	Jumlah Kegiatan/Objek	Output Penanganan	Keterangan
1	Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT)	14 kegiatan	Seluruh temuan ditangani	Operasi penertiban penyakit masyarakat
2	Operasi Pemberantasan Rokok Ilegal	34 kegiatan	17.253 bungkus / 345.060 batang rokok ilegal	Penindakan cukai ilegal
3	Pembinaan Wanita Tuna Susila (WTS)	24 orang	Seluruh WTS dibina	Pembinaan dan pendataan
4	Penertiban dan pembongkaran bangunan liar	1 kegiatan	8 bangunan ditertibkan	Penegakan Perda Bangunan
5	Patroli wilayah dan penanganan gangguan trantibum	Rutin sepanjang tahun	Seluruh pelanggaran tertangani	Kegiatan rutin Satpol PP

Seluruh pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang teridentifikasi melalui kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditangani dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, jumlah pelanggaran yang tertangani sama dengan jumlah pelanggaran yang terjadi, sehingga realisasi indikator pada Tahun 2025 mencapai 100%.

Dari sisi perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, indikator Persentase Tindak Pelanggaran Perda Tertangani menunjukkan kinerja yang konsisten. Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, capaian indikator masing-masing mencapai 100%, dan capaian tersebut dapat dipertahankan pada Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 100%. Konsistensi ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun

terakhir Satpol PP Kabupaten Brebes mampu menjaga kinerja penanganan pelanggaran Perda secara optimal dan berkelanjutan. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan daerah, target akhir RPD Tahun 2026 untuk indikator Persentase Tindak Pelanggaran Perda Tertangani ditetapkan sebesar 100%. Dengan realisasi capaian indikator Tahun 2025 yang juga mencapai 100%, maka kinerja Satpol PP Kabupaten Brebes telah sepenuhnya sesuai dan selaras dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPD. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan penegakan Perda yang dilaksanakan telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis daerah.

Perbandingan capaian kinerja indikator ini dengan standar nasional atau regional tidak dilakukan secara kuantitatif dalam laporan ini. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pendekatan, metode pengumpulan data, serta sistem pelaporan pelanggaran Perda antar pemerintah daerah. Meskipun indikator dan rumus pengukuran yang digunakan secara konseptual sama, namun perbedaan basis data menjadikan perbandingan angka secara langsung tidak sepenuhnya sebanding secara metodologis. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja difokuskan pada kesesuaian antara target dan realisasi serta konsistensi capaian antar periode yang sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komitmen aparatur Satpol PP Kabupaten Brebes dalam melaksanakan penegakan Perda, optimalisasi pelaksanaan patroli wilayah, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu, kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat turut mendukung meningkatnya kepatuhan terhadap Perda. Adapun kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan penegakan Perda antara lain:

a. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional penegakan Perda;
b. Masih adanya aktivitas usaha yang menggunakan fasilitas umum dan ruang publik secara tidak semestinya;

c. Rendahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Daerah;
d. Keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Satpol PP Kabupaten Brebes;
e. Keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Satpol PP Kabupaten Brebes telah dan terus melakukan upaya sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan penegakan Perda;
b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien;
c. Memperkuat peran pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.

Dari perspektif efisiensi penggunaan sumber daya, pada Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 14.097.315.039,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.986.972.375,00 atau 92,12% dari total anggaran yang direncanakan dengan tingkat efisiensi sebesar 7,88%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain pelaksanaan patroli wilayah secara rutin, operasi penertiban pelanggaran Perda, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Satpol PP. Program dan kegiatan tersebut secara langsung berkontribusi terhadap tercapainya penanganan seluruh pelanggaran Perda yang teridentifikasi pada Tahun 2025. Secara keseluruhan, capaian kinerja indikator Persentase Tindak Pelanggaran Perda Tertangani pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal

dan konsisten, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Brebes.

4. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4*

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas

Sasaran Strategis 4 adalah Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 103,15 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,45	12,25	12,66	103,35	12,3
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,41	6,42	6,61	102,96	6,47

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas” terdiri dari 2 indikator diantaranya adalah:

a. Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes tahun 2025, angka Harapan Lama Sekolah telah mencapai 12,66 tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur jumlah tahun yang diharapkan akan dihabiskan oleh seorang anak dalam sistem pendidikan formal. Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata tahun sekolah yang ditempuh oleh populasi usia tertentu dengan

mempertimbangkan tingkat partisipasi pendidikan di berbagai jenjang.

Pada tahun 2025, realisasi HLS mencapai 12,66 tahun, capaian lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 12,25 tahun, dengan capaian sebesar 103,35% dari target. Angka ini menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan akses pendidikan, meskipun peningkatan dari tahun sebelumnya (12,45 tahun pada 2024) relatif kecil.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis, yaitu 12,3 tahun pada tahun 2026, capaian tahun ini telah melampaui target tersebut. Dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Nasional yang mencapai 12,10 tahun, capaian daerah ini berada di atas rata-rata nasional. Keberhasilan capaian indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang menghambat Pencapaian Target Harapan Lama Sekolah (HLS) diantaranya adalah:

a. Kondisi kemiskinan sehingga anak harus membantu orang tua bekerja.
b. Biaya tidak langsung sekolah (transportasi, seragam, perlengkapan) masih menjadi beban.
c. Jarak sekolah yang jauh, terutama di wilayah terpencil/perdesaan dan Keterbatasan sarana transportasi menuju sekolah.
d. Anak berhenti sekolah setelah jenjang SD/SMP.
e. Kualitas pembelajaran belum optimal sehingga motivasi belajar rendah.
f. Kurangnya layanan pendidikan nonformal sebagai alternatif.

Sedangkan faktor pendorong keberhasilan pencapaian Target Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah:

a. Program pengentasan kemiskinan berdampak pada keberlanjutan sekolah anak.
b. Sekolah menengah semakin mudah dijangkau.
c. Beasiswa dan bantuan pendidikan (PIP, BOS, bantuan daerah).
d. Program penelusuran dan pengembalian anak tidak sekolah (ATS).
e. Pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) sebagai jalur alternatif.

f. Peran komite sekolah dan masyarakat aktif mendukung pendidikan.

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, Anggaran melalui Dindikpora Kabupaten Brebes pada tahun 2025 yaitu Rp. 250.896.851.220,- dan realisasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp. 166.589.978.307,- atau 66,40%. Efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus efisiensi, yang menghasilkan nilai 35,75%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya cukup optimal dalam mencapai target kinerja. Beberapa program yang mendukung peningkatan ini antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta pelatihan dan penguatan kurikulum bagi tenaga pendidik. Namun, untuk lebih mendekati standar nasional, perlu dilakukan upaya tambahan seperti peningkatan investasi dalam sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan jangka panjang, serta kebijakan afirmatif untuk memastikan akses pendidikan bagi kelompok rentan.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, angka rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes Tahun 2025 tercapai 6,61 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Kabupaten Brebes usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Indikator Rata-rata Lama Sekolah dihitung berdasarkan jumlah total tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk dalam suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat akses masyarakat terhadap pendidikan formal dalam jangka waktu tertentu.

Sumber angka realisasi diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tahun 2025, yang menunjukkan bahwa realisasi rata-rata lama sekolah mencapai 6,61 tahun, lebih tinggi dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 6,42 tahun dengan angka capaian 102,95%. Capaian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dibandingkan

dengan capaian tahun 2024 yang berada di angka 6,41 tahun. Secara keseluruhan realisasi tetap menunjukkan peningkatan yang relatif stabil dari tahun ke tahun.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD 2026), yang menetapkan angka 6,47 tahun, maka realisasi saat ini telah melampaui target akhir yang telah ditetapkan. Namun, dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah nasional yang berada di angka 9,07 tahun, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan, yang mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah terkait.

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, Anggaran melalui Dindikpora Kabupaten Brebes pada tahun 2025 yaitu Rp. 25.459.701.500,- dan realisasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp. 22.580.513.033,- atau 88,69%. Efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus efisiensi, yang menghasilkan nilai 13,85%. Hal ini menandakan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan dengan optimal untuk mencapai target pendidikan yang telah ditetapkan.

Upaya peningkatan rata-rata lama sekolah dapat didorong melalui berbagai program strategis, seperti peningkatan aksesibilitas sekolah, serta penguatan kebijakan wajib belajar bagi kelompok usia sekolah. Kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan akses pendidikan di daerah tertentu atau faktor ekonomi keluarga yang menghambat keberlanjutan pendidikan, perlu diatasi dengan kebijakan yang lebih komprehensif agar target jangka menengah dan nasional dapat tercapai.

5. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5*

Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 104.42% berdasarkan skala

ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.12. Capaian Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	41,18	71,54	74,40	104	72,04

Angka Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir atau dapat diartikan dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Berdasarkan data BPS Kabupaten Brebes dengan perhitungan menggunakan hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form, selama empat tahun terakhir, dari 2021 hingga 2024, AHH telah meningkat sebesar 0,53 tahun, atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Capaian AHH Kabupaten Brebes pada tahun 2025 adalah 74,40 atau sebesar 104% dari target yang telah ditetapkan meningkat 0,22 poin dari tahun 2024 berada pada angka 74,18

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD 2026), yang menetapkan target sebesar 72,04 tahun, capaian tahun 2025 telah melampaui target akhir yang diharapkan. Meski demikian AHH Kabupaten Brebes masih dibawah rata-rata AHH Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 yaitu 75,24.



Gambar 3.1. Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2020 – 2025

Dari sisi efisiensi penggunaan anggaran, Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes pada tahun 2025 mencapai Rp. 308.748.221.606,- dengan realisasi sebesar Rp. 269.611.211.095,- atau 87,32%. Dengan realisasi kinerja sebesar 104% maka efiseiensi sumber daya anggaran tercapai 16,03%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif dalam mendukung pencapaian indikator AHH.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi nilai angka harapan hidup di Kabupaten Brebes adalah:

a. Masih tingginya Kasus Kematian Ibu, hal ini disebabkan belum semua Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC (Antenatal Care) sesuai dengan standar, masih kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten terhadap penanganan ibu hamil risiko tinggi, belum semua ibu hamil mendapatkan pendampingan, dan belum maksimalnya sistem informasi rujukan persalinan.
b. Masih tingginya Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Angka Kematian Bayi merupakan banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada kurun waktu tertentu. Adapun AKB pada Tahun 2025 yaitu 13,15 per 1.000 KH dari target 11,05 per 1.000

KH. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kematian bayi antar lain:

1) belum semua bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar,
2) masih kurangnya penanganan neonatus komplikasi (BBLR dan asfeksia),

Untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Brebes, diperlukan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada faktor-faktor utama yang memengaruhinya, yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan penyakit menular, serta pengurangan kasus stunting.

Salah satu langkah penting adalah mengurangi angka kematian ibu, yang masih cukup tinggi dalam dua tahun terakhir. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan cakupan pelayanan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil dengan memastikan mereka mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar minimal 6 kali, termasuk USG dan pemeriksaan laboratorium. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, terutama bidan dan dokter kandungan, dalam menangani kehamilan risiko tinggi. Sistem rujukan yang cepat dan efektif juga harus diperkuat agar ibu hamil dengan kondisi berisiko tinggi dapat segera mendapatkan penanganan medis yang diperlukan.

Dalam upaya menekan Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB), penting untuk memastikan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar, termasuk imunisasi dasar, ASI eksklusif, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Fasilitas kesehatan juga harus memiliki peralatan yang memadai untuk menangani bayi dengan komplikasi, seperti bayi berat lahir rendah (BBLR) dan asfiksia. Selain itu, pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai perawatan bayi baru lahir dan peningkatan cakupan program kunjungan rumah bagi bayi baru lahir akan membantu dalam menurunkan angka kematian bayi.

Selain faktor kematian ibu dan bayi, meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti jantung, diabetes, kanker, dan stroke juga menjadi tantangan dalam peningkatan AHH. Oleh karena itu, perlu

dilakukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup sehat, seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik, serta pengurangan konsumsi rokok dan alkohol. Penyediaan Pos bindu (Pos Pembinaan Terpadu) di setiap desa akan sangat membantu dalam deteksi dini PTM. Selain itu, layanan skrining PTM di fasilitas kesehatan perlu diperluas, termasuk pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA dan pengobatan krioterapi.

Penyakit menular seperti HIV/AIDS, Tuberkulosis (TBC), kusta, filariasis, pneumonia pada balita, serta DBD juga masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Brebes. Untuk mengatasinya, perlu ada peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, terutama bagi bayi dan balita, serta pemantauan kesehatan bagi kelompok risiko tinggi. Deteksi dini HIV/AIDS dan TBC juga harus lebih diperluas dengan memastikan bahwa ibu hamil, pasien TB, serta kelompok berisiko lainnya menjalani pemeriksaan secara berkala. Di sisi lain, program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) harus terus digalakkan untuk mencegah penularan penyakit yang dapat dicegah melalui perubahan perilaku, seperti diare dan DBD.

Salah satu faktor lain yang turut berkontribusi terhadap rendahnya AHH adalah stunting, yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Brebes. Untuk mengurangi angka stunting, langkah yang perlu diambil antara lain memastikan semua ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar dan tambahan gizi yang cukup, termasuk tablet tambah darah dan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang gizi. Edukasi ibu mengenai pemberian makanan pendamping ASI yang tepat dan pemantauan tumbuh kembang balita secara berkala di Posyandu juga harus terus ditingkatkan. Selain itu, perlu ada penguatan kebijakan dan program peningkatan cakupan ASI eksklusif, karena pemberian ASI eksklusif yang masih rendah menjadi salah satu penyebab utama stunting.

Dengan implementasi strategi yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat, diharapkan angka harapan hidup di Kabupaten Brebes dapat terus meningkat dan mendekati standar Provinsi maupun

nasional. Upaya ini tidak hanya memerlukan peningkatan layanan kesehatan, tetapi juga pendidikan kesehatan bagi masyarakat, penguatan infrastruktur pelayanan kesehatan, serta dukungan kebijakan yang tepat sasaran.

Keberhasilan capaian indikator kinerja didukung oleh beberapa Program, diantaranya adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.

6. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6*

Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 6 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 20,84%, berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Tidak Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Pemuda Pelopor Berprestasi (Tingkat Provinsi)	Peringkat	0	4	0	0	3
2	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	33,33	30	24,07	87,53	32,5
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Peringkat	22	8	18	-25	7

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
	(Tingkat Provinsi)						

Angka capaian kinerja sasaran ”MeningkatnyaPeran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga” terdiri dari 3 indikator diantaranya adalah:

a. Pemuda Pelopor Berprestasi (Tingkat Provinsi)

Indikator ini mengukur jumlah Pemuda Pelopor Berprestasi tingkat Provinsi sebagai bentuk peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah pemuda yang berhasil meraih peringkat pada ajang atau penghargaan tingkat Provinsi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebanyak 4 orang, namun realisasi hingga saat ini masih 0, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 0%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang juga 0, belum terdapat peningkatan kinerja pada indikator ini.

Target tahun 2024 sebelumnya juga ditetapkan sebanyak 4, namun tidak tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir belum terdapat pemuda yang berhasil meraih prestasi sebagai Pemuda Pelopor di tingkat Provinsi.

Dalam dokumen perencanaan strategis, target akhir RPD tahun 2026 ditetapkan sebanyak 3 orang. Dengan realisasi yang masih 0 hingga tahun 2025, terdapat risiko ketidaktercapaian target jangka menengah apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan pembinaan, pendampingan, fasilitasi kompetisi, serta penguatan seleksi dan persiapan peserta di tingkat kabupaten.

Penyebab kegagalan dalam pencapaian target bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: masih banyak beberapa cabang olahraga yang tidak diikutkan atau tidak ada minat dari para atlet pelajar, minimnya program pembinaan bagi pemuda pelopor, kurangnya sosialisasi mengenai kompetisi atau penghargaan yang

tersedia, serta terbatasnya dukungan dari pihak terkait dalam mendorong pencapaian prestasi di tingkat Provinsi. Sebagai alternatif solusi, mengenalkan dan mensosialisasikan cabang olahraga yang kurang diminati kepada para siswa melalui pembinaan atlet pada kategori serta disesuaikan dengan jenjang pendidikan tertentu serta perlu dilakukan peningkatan program pendampingan, pemberian insentif atau beasiswa bagi pemuda yang berprestasi, serta penyelenggaraan kompetisi yang lebih luas untuk menjaring potensi pemuda pelopor.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, karena realisasi capaian masih 0, perlu evaluasi terhadap alokasi anggaran dan efektivitas program yang telah dirancang untuk mendukung pencapaian target ini. Jika anggaran telah digunakan namun tidak menghasilkan capaian yang diharapkan, maka perlu dilakukan penyesuaian strategi dan kebijakan dalam implementasi program terkait.

Secara keseluruhan, belum adanya pemuda pelopor berprestasi yang meraih peringkat di tingkat Provinsi menjadi tantangan utama dalam pencapaian kinerja ini. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam perencanaan dan implementasi program/kegiatan untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat terealisasi pada tahun-tahun mendatang.

b. Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Indikator Sasaran Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pelatihan kewirausahaan dalam berbagai klaster sebagaimana tahun sebelumnya, sehingga tidak mampu mendorong partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Permasalahan utama terletak pada pengurangan alokasi anggaran untuk kegiatan pelatihan kewirausahaan.

Pada tahun 2025, hanya terdapat satu kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan, yaitu Pelatihan Tata Boga berbasis usaha rumahan (home industry) di Desa Slatri, Kecamatan

Larangan, Kabupaten Brebes, yang juga mencakup fasilitasi pembuatan izin usaha bagi calon pelaku usaha mandiri. Jumlah peserta dalam kegiatan tersebut hanya 50 orang, sehingga dampaknya terhadap peningkatan persentase partisipasi pemuda secara keseluruhan sangat terbatas.

Target Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri tahun 2025 ditetapkan sebesar 30%, namun realisasi hanya mencapai 0,01%, sehingga terdapat selisih sebesar 29,99 poin dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2025 sebesar 0,03 juga menunjukkan penurunan dibandingkan capaian tahun 2024, sehingga mengindikasikan perlunya perhatian serius dalam upaya peningkatan partisipasi pemuda pada sektor ekonomi mandiri.

Sebagai langkah perbaikan, diperlukan pengalokasian kembali anggaran untuk kegiatan pelatihan kewirausahaan pada berbagai klaster usaha, disertai peningkatan sosialisasi hingga ke pelosok daerah guna menumbuhkan minat dan motivasi berwirausaha di kalangan pemuda.

Faktor-faktor yang menghambat atau menyebabkan kegagalan pencapaian target Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%) dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemuda dan kelembagaan. Dari sisi pemuda, kecenderungan memilih menjadi pekerja dibandingkan memulai usaha sendiri karena dianggap lebih aman menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, keterbatasan kemampuan manajemen usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, serta inovasi produk turut memengaruhi rendahnya minat berwirausaha. Banyak pemuda juga belum memahami potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan serta menghadapi kendala keterbatasan modal awal dan akses terhadap lembaga pembiayaan.

Dari sisi kelembagaan (Dinas/OPD/organisasi pembina), hambatan meliputi pelatihan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan potensi wilayah, belum optimalnya peran sebagai penghubung antara pemuda dan lembaga permodalan seperti perbankan, koperasi, maupun CSR, serta belum maksimalnya pelibatan dunia usaha, UMKM, dan perguruan tinggi. Selain itu,

terdapat kesulitan dalam melakukan pemetaan, pembinaan, dan pemantauan perkembangan usaha pemuda, serta masih terbatasnya program lanjutan berupa monitoring dan pendampingan pascapelatihan.

Sementara itu, faktor pendorong keberhasilan pencapaian target antara lain dari sisi pemuda yang memiliki motivasi kuat untuk mandiri secara ekonomi, menguasai manajemen usaha dan pemasaran termasuk pemanfaatan teknologi digital, aktif menggunakan media sosial dan marketplace untuk pemasaran, serta memiliki daya juang dan ketahanan dalam menghadapi tantangan usaha.

Dari sisi kelembagaan, keberhasilan dapat didorong melalui penyusunan materi pelatihan yang relevan dengan potensi lokal dan tren ekonomi, penyediaan mentoring, monitoring, serta konsultasi usaha secara berkelanjutan, kerja sama dengan perbankan, koperasi, BUMDes, dan program CSR, serta sinergi dengan dunia usaha, UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas bisnis. Selain itu, penyebarluasan informasi peluang usaha hingga ke desa-desa menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi pemuda secara merata.

c. Peningkatan Prestasi Olahraga (Tingkat Provinsi)

Berdasarkan data yang tersedia, indikator Peningkatan Prestasi Olahraga (Tingkat Provinsi) pada tahun 2025 menunjukkan capaian peringkat 17, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 8. Dengan demikian, capaian kinerja hanya mencapai -12,5% dari target, yang berarti terjadi penurunan prestasi dibandingkan dengan harapan yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang berada di peringkat 18, terdapat perbaikan sebanyak 1 peringkat, namun peningkatannya masih sangat kecil dibandingkan dengan target yang diharapkan.

Dalam konteks perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RPD 2023-2026, target akhir yang ingin dicapai adalah peringkat 7.

Dengan capaian saat ini yang masih cukup jauh dari target jangka panjang, diperlukan evaluasi lebih dalam untuk memastikan adanya peningkatan prestasi yang signifikan di tahun-tahun mendatang.

Peningkatan Prestasi Olahraga (Tingkat Provinsi) pada awalnya menghadapi kendala karena dari 23 cabang olahraga yang dipertandingkan, hanya 12 cabang yang dapat diikuti. Beberapa cabang tidak lolos pada tahap Pra-Popda Provinsi, dan terdapat pula cabang olahraga yang belum tersedia di Kabupaten Brebes, seperti anggar, angkat besi, dan balap sepeda. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pembatas dalam optimalisasi capaian prestasi. Sebagai solusi, diperlukan penambahan anggaran pembinaan atlet pada cabang olahraga potensial agar pembinaan lebih terfokus dan berkelanjutan.

Adapun faktor penghambat pencapaian target antara lain dari sisi atlet, seperti program latihan yang belum terstruktur optimal, ketidakkonsistenan dalam mengikuti latihan, pengelolaan nutrisi dan pemulihan yang kurang terkontrol, minimnya pengalaman bertanding, serta penanganan cedera yang belum maksimal. Dari sisi pelatih dan pembinaan, kendala meliputi metode latihan yang belum sepenuhnya berbasis standar modern, keterbatasan pelatih bersertifikat pada beberapa cabang olahraga, belum optimalnya analisis hasil latihan dan pertandingan, serta pembinaan mental atlet yang masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, faktor pendorong keberhasilan antara lain adanya program latihan yang lebih terstruktur sesuai karakteristik cabang olahraga, konsistensi dan motivasi atlet yang tinggi, kesiapan mental dalam menghadapi kompetisi, pengelolaan pola makan dan pemulihan fisik yang lebih baik, serta meningkatnya frekuensi keikutsertaan dalam kejuaraan. Dari sisi pelatih, keberhasilan didukung oleh penerapan pendekatan pembinaan berbasis ilmiah, kompetensi dan pengalaman pelatih, adanya evaluasi hasil latihan dan pertandingan, serta penguatan aspek mental atlet secara berkelanjutan.

7. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7*

Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 7 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 101,64% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.14. Capaian Indikator Sasaran Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	97,045	96	97,57	101,64	96,5

Indikator capaian kinerja untuk Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan pada tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 101,64%. Angka ini dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi layanan administrasi kependudukan dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan. Sumber realisasi angka ini diperoleh dari hasil pelaporan kinerja administrasi kependudukan di daerah terkait. Cakupan ini terdiri dari persentase rata-rata kepemilikan KTP dan kartu keluarga dan rata-rata kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun.

Rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, terdiri dari rata-rata kepemilikan dokumen KTP dan KK, sedangkan rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa rata-rata kepemilikan akta kelahiran 0 – 18 tahun. Ketiga komponen tersebut di rata-ratakan sehingga didapat data rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil.

$$X = \frac{Y + Z}{2}$$

$$Y = \frac{\frac{1.522.796}{1.545.183} + \frac{693.567}{702.198}}{2}$$

$$Y = 98{,}66\%$$

$$Z = \frac{555.691}{575.996} = 96{,}47\%$$

$$X = \frac{98{,}66\% + 96{,}47\%}{2} = 97{,}57\%$$

Ket :

X : Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP dan KK) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun)

Y : Persentase Kepemilikan Dokumen KTP dan KK

Z : Persentase kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun)

Dibandingkan dengan target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 96%, realisasi mencapai 97,57%, yang berarti melebihi target dengan tingkat capaian sebesar 101,64%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu 97,045 % pada tahun 2024, terdapat peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam cakupan layanan administrasi kependudukan.

Dalam konteks dokumen perencanaan strategis, target akhir RPD tahun 2026 adalah 96,5%. Dengan capaian tahun 2025 yang telah melampaui target tersebut, maka tren peningkatan kinerja ini menjadi indikator positif terhadap perencanaan jangka menengah yang ditetapkan. Persentase cakupan layanan administrasi kependudukan nasional tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional yang mengatur hal tersebut.

Dari segi efisiensi penggunaan sumber daya, realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 9.533.694.028,- dari pagu anggaran Rp. 10.588.594.741,- dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 90,04%. Efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus efisiensi, yang menghasilkan nilai 10,94%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran cukup optimal dan efisien dalam mendukung pencapaian target layanan administrasi kependudukan.

Keberhasilan capaian indikator kinerja didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan faktor penunjang keberhasilan tersebut antara lain:

a. Seluruh jenis pelayanan administrasi kependudukan, adalah gratis, baik yang di dinas maupun yang di kecamatan.
b. Adanya pelayanan *online* dalam pengurusan dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak perlu hadir di dinas pada jam pelayanan.
c. Adanya beberapa landasan hukum mengenai Administrasi Kependudukan.
d. Pelayanan adminduk dapat dilakukan di beberapa tempat, diantaranya adalah di Dinas, Mal Pelayanan Publik, 17 Kecamatan dan Kios Adminduk Desa.
e. Adanya 297 kios adminduk desa yang tersebar di 292 desa dan 5 kelurahan se Kabupaten Brebes
f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes membuka saluran untuk konsultasi dan pengaduan melalui beberapa media sosial, seperti *facebook, whatsapp, twitter, website, instagram* sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu juga mempermudah dalam melakukan pengaduan maupun konsultasi. Dalam saluran tersebut juga gencar melakukan sosialisasi kependudukan, baik tentang inovasi baru maupun tentang informasi kependudukan lainnya.
g. Sudah diterapkannya Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. TTE tersebut adalah tandatangan berupa QR Code, yang ditandatangani secara digital dan *online* oleh Kepala Dinas, sehingga proses tanda tangan tersebut dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Setelah dokumen kependudukan tersebut ditandatangani, dapat dicetak di kecamatan. Pemohon tidak perlu hadir ke dinas untuk meminta tandatangan, cukup menunggu di kecamatan saja.
h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes juga membuka informasi tentang ketersediaan blangko KTP, melalui

website blakasuta. Hal ini mempermudah masyarakat untuk mengetahui kondisi keadaan blangko KTP di masing-masing kecamatan, sehingga tidak perlu datang ke kecamatan untuk menanyakan ada atau tidaknya blangko KTP.

i. Tidak ada permasalahan dalam penyediaan blangko, dikarenakan blangko akta dan kartu keluarga sudah diganti menggunakan kertas HVS 80gr ukuran A4, sehingga selalu tersedia di Dinas, dan blangko KTP juga selalu tersedia dari Kemendagri.
j. Tingginya capaian indikator kinerja program dan kegiatan
k. Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, seperti : SEMEDI Mandiri, jemput Bola Perekaman KTPel, BANGKIT, LAKA ASI, SABA DESA, JEMPOL KALIH, Sistem Pelaporan berbasis GS (Google Sheet), SIMPEL CAPIL, SIMPEL DAFDUK, BLAKASUTA, SIAPEL, PANDUDISANA, KERJA PINTAR, KUPER BAKIAK, KABAR IBU. Adapun kepanjangan dari istilah-istilah tersebut adalah :
    1) SEMEDI MANDIRI : Sehari Mesti Jadi Asal Urus Sendiri
    2) BANGKIT : Bayi Lahir Akta dan KK Langsung Terbit
    3) LAKA ASI : Layanan Akta Untuk Anak Penyandang Masalah Sosial dan Penghuni Panti
    4) JEMPOL KALIH : Jemput Bola Akta Kelahiran, KIA dan KTPel di Sekolah
    5) SIMPEL : SIstem Informasi Pelayanan
    6) SIAPEL : Sistem Informasi Administrasi
    7) PANDU DISANA : pelayanan adminduk di Rumah untuk Disabilitas, Penderita Sakit Berat dan Lansia
    8) KERJA PINTAR : Kerjasama Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dan Kartu Keluarga
    9) KUPER BAKIAK : Kunjungan Perpustakaan Bawa Pulang KIA Yuk
    10) KABAR IBU : KK baru sesuai Ijazah Baru

8. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8*

Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Akses Dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 8 dengan 3 indikator kinerja belum dapat diukur, karena masih ada indikator yang realisasinya masih dalam proses. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,61	87,36	*dalam proses*	-	87,56
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,35	63,83	*dalam proses*	-	64,69
3	Peringkat Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status	3	4	3	75%	4

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Akses Dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender” terdiri dari 3 indikator diantaranya adalah:

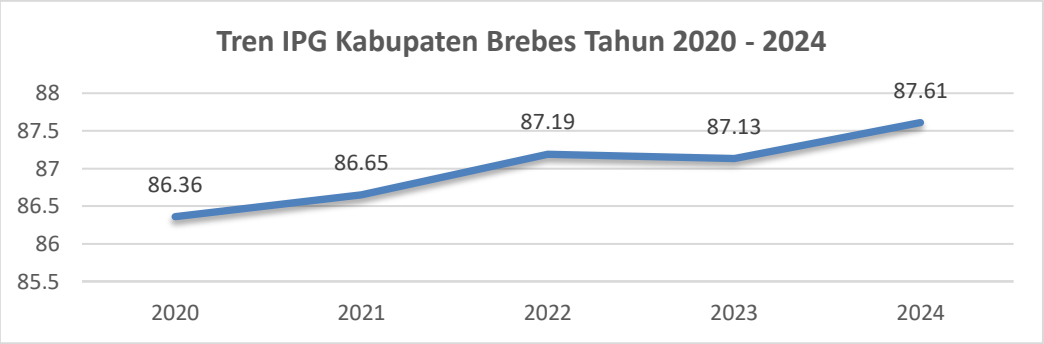
a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik angka capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) akan rilis sekitar bulan Juli 2026 sehingga indikator tersebut belum bisa diukur capaiannya hingga laporan ini dibuat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesetaraan gender di dalam masyarakat Indonesia. IPG membantu melacak perkembangan dan perubahan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi, dengan fokus pada perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Adapun Dimensi dalam IPG yaitu:

1) Kesehatan:
    a) Kesehatan reproduksi perempuan.
    b) Angka harapan hidup perempuan dan laki-laki.
    c) Kesehatan anak perempuan dan laki-laki.
2) Pendidikan:
    a) Akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan dasar dan tinggi.
    b) Rasio laki-laki perempuan di berbagai tingkatan pendidikan.
3) Partisipasi Ekonomi:
    a) Tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.
    b) Kesetaraan dalam pembayaran dan peluang karir.

IPG dihitung dengan menganalisis perbedaan antara indikator-indikator kesejahteraan perempuan dan laki-laki di setiap dimensi. Data untuk perhitungan berasal dari sumber-sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga-lembaga terkait.



Gambar 3.2. Grafik IPG Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Berdasarkan data periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Brebes menunjukkan tren perkembangan yang secara umum sangat progresif. Secara kumulatif, IPG Kabupaten Brebes mengalami peningkatan sebesar 1,25 poin dalam kurun waktu lima tahun terakhir (dari 86,36 pada tahun 2020 menjadi 87,61 pada tahun 2024). Kenaikan signifikan pada tahun 2024 mencerminkan semakin mengecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Brebes. Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain:

- Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan yang berdampak pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
- Perbaikan kualitas kesehatan ibu dan anak.
- Peningkatan partisipasi ekonomi perempuan melalui dukungan terhadap UMKM dan pelatihan keterampilan kerja.

Meskipun data IPG untuk tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tren positif hingga tahun 2024 memberikan fondasi optimisme yang kuat. Pemerintah Kabupaten Brebes tetap berkomitmen untuk terus mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap perencanaan penganggaran, memantau secara ketat indikator penyusun IPG guna memastikan tidak ada penurunan pada periode mendatang dan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan capaian tahun 2025 dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPD.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik angka capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) akan rilis sekitar bulan Juli 2026 sehingga indikator tersebut belum bisa diukur capaiannya sampai dengan laporan ini dibuat.

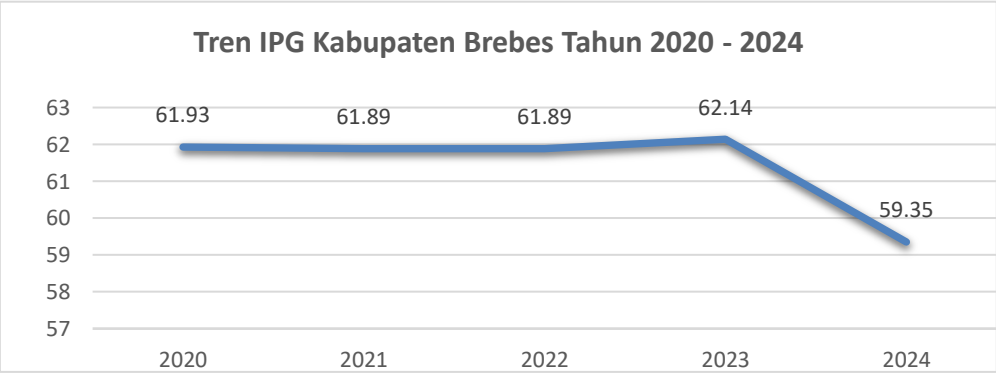
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pemberdayaan gender dalam suatu masyarakat. Indeks ini mencakup beberapa dimensi kunci yang mencerminkan kesetaraan gender, termasuk partisipasi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks Indonesia, IDG dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana pemberdayaan gender telah tercapai dalam berbagai sektor. IDG bukanlah ukuran tunggal, tetapi serangkaian indikator yang memberikan gambaran holistik tentang pemberdayaan gender dalam suatu masyarakat terutama di Kabupaten Brebes, seperti:

1) Partisipasi Ekonomi: IDG mengukur partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, seperti tingkat pekerjaan formal, usaha mikro, dan sektor informal. Data ini memberikan pandangan tentang sejauh mana perempuan dapat mengakses peluang

ekonomi dan berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara.

2) Pendidikan: Dimensi ini mencakup rasio partisipasi perempuan dan laki-laki di berbagai tingkatan pendidikan. IDG mengukur sejauh mana perempuan memiliki akses ke pendidikan tinggi, sekolah menengah, dan pendidikan dasar. Tingkat melek huruf dan kehadiran perempuan di sekolah juga menjadi faktor penilaian.
3) Kesehatan: IDG menilai aspek kesehatan perempuan, termasuk tingkat harapan hidup, akses ke layanan kesehatan reproduksi, dan kesehatan anak-anak. Ini mencerminkan sejauh mana sistem kesehatan mampu memberdayakan perempuan dan memberikan perlindungan kesehatan yang setara.
4) Partisipasi Politik: Pemberdayaan gender juga tercermin dalam partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. IDG mencakup aspek-aspek seperti keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik, tingkat partisipasi dalam pemilihan, dan peran kepemimpinan perempuan.

Sumber data untuk mengukur IDG biasanya berasal dari lembaga-lembaga pemerintah, dalam hal ini yakni adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.



Gambar 3.3. Grafik IDG Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Grafik tersebut menunjukkan tren Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kabupaten Brebes selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai IPG tercatat sebesar 61,93. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 nilai IPG relatif stagnan pada angka 61,89. Pada tahun 2023, IPG mengalami peningkatan menjadi 62,14. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 59,35.

Tren tersebut menggambarkan bahwa selama periode 2020 hingga 2022 kondisi pembangunan gender di Kabupaten Brebes cenderung stabil tanpa perubahan yang berarti, kemudian menunjukkan perbaikan pada tahun 2023. Akan tetapi, penurunan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan capaian pembangunan gender, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes.

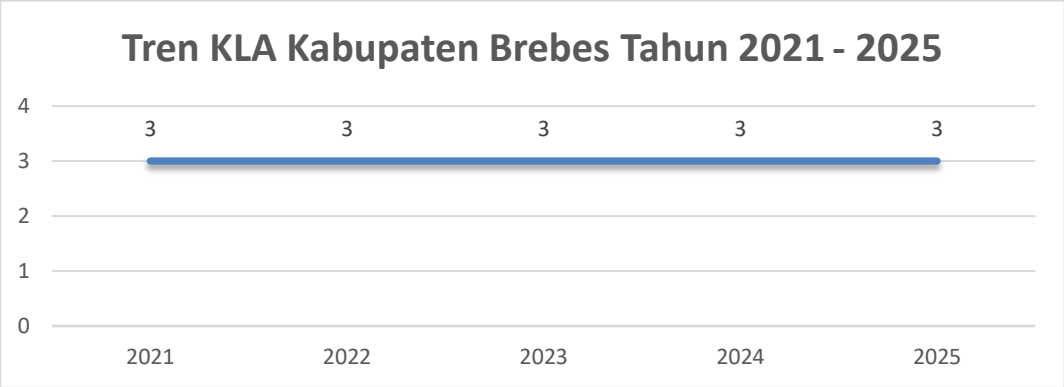
c. Peringkat Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Berdasarkan Penghargaan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 318/Men/TK.05/7/2025 pada tanggal 23 Juli 2025, Kabupaten Brebes memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat Nindya Tahun 2025. Penghargaan Kabupaten Layak Anak adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dapat memenuhi indikator-indikator tertentu dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak-anak. Berikut adalah beberapa indikator umum yang digunakan untuk menilai tingkat kelayakan suatu wilayah bagi anak-anak:

1) Akses Terhadap Pendidikan:
    a) Rasio partisipasi anak-anak dalam pendidikan.
    b) Ketersediaan dan kualitas fasilitas pendidikan.
    c) Program-program akses pendidikan untuk anak-anak difabel.

2) Kesehatan Anak:
   a) Cakupan imunisasi dan pelayanan kesehatan anak.
   b) Angka kematian bayi dan anak.
   c) Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan anak yang memadai.
3) Perlindungan dan Keamanan:
   a) Ketersediaan lembaga perlindungan anak di Kabupaten tersebut.
   b) Angka kekerasan terhadap anak.
   c) Upaya penanganan dan rehabilitasi anak-anak korban kekerasan.
4) Partisipasi Anak:
   a) Partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
   b) Program pemberdayaan anak dan remaja.
5) Ekonomi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan:
   a) Tingkat kemiskinan anak dan keluarga.
   b) Keterlibatan perempuan dalam keputusan ekonomi keluarga.
   c) Program pemberdayaan ekonomi perempuan.
6) Lingkungan yang Aman dan Ramah Anak:
   a) Keamanan lingkungan fisik dan sosial bagi anak-anak.
   b) Ketersediaan ruang terbuka hijau dan tempat bermain yang aman.
7) Akses Terhadap Budaya dan Rekreasi:
   a) Akses anak-anak terhadap kegiatan budaya dan rekreasi.
   b) Keterlibatan anak-anak dalam kegiatan sosial dan budaya.
8) Ketersediaan Layanan Sosial:
   Ketersediaan layanan sosial seperti program bantuan sosial dan kesejahteraan anak.
9) Pemberdayaan Masyarakat:
   a) Partisipasi masyarakat dalam program-program kesejahteraan anak.
   b) Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung kehidupan anak-anak.

Penghargaan Kabupaten Layak Anak terdiri dari 5 peringkat, yaitu Pratama (Status 1), Madya (Status 2), Nindya (Status 3), Utama (Status 4) dan KLA (Status 5). Sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023, Kabupaten Brebes mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan peringkat Nindya / Status 3. Penghargaan tersebut didapatkan berkat dukungan dan peran lintas sektor dan jejaring mitra yang ada. Adapun hal yang menghambat tercapainya target di Tahun 2023 adalah inovasi pemerintah daerah dalam lintas sektor dalam upaya membuat lingkungan yang layak anak, termasuk dalam hal komunikasi dan respons terhadap permintaan data dukung Kabupaten Layak Anak.



Gambar 3.4. Grafik KLA Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Sumber: DP3KB Kabupaten Brebes

Pada tahun 2025, realisasi capaian KLA Kabupaten Brebes adalah nilai 3 (Kategori Nindya).

Apabila target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar nilai 3, maka capaian telah sesuai target (100%). Namun apabila target tahunan diarahkan untuk meningkat ke nilai 4, maka capaian tahun ini masih belum memenuhi target peningkatan tersebut. Selama periode 2021–2025, capaian KLA Kabupaten Brebes stabil pada nilai 3 (Kategori Nindya). Tidak terdapat peningkatan maupun penurunan kategori.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak telah berjalan secara konsisten dan mampu dipertahankan, namun belum menunjukkan progres menuju kategori yang lebih tinggi.

Target jangka menengah dalam dokumen RPD ditetapkan sebesar nilai 4. Hingga tahun 2025, realisasi masih berada pada nilai 3, sehingga terdapat selisih 1 tingkat kategori dari target akhir yang ingin dicapai.

Dengan capaian yang stagnan selama lima tahun terakhir, diperlukan strategi percepatan agar target peningkatan ke Kategori Utama (nilai 4) dapat tercapai sesuai periode perencanaan.

Secara nasional, terdapat 355 kabupaten/kota yang menerima anugerah Kabupaten Layak Anak, terdiri dari: 22 kategori Utama, 69 kategori Nindya, 125 kategori Madya, 139 kategori Pratama. Kabupaten Brebes berada pada Kategori Nindya, yang menempatkan daerah pada kelompok menengah atas secara nasional. Posisi ini menunjukkan bahwa Brebes telah memenuhi sebagian besar indikator KLA dengan baik dan berada di atas kategori Madya dan Pratama.

Namun demikian, untuk meningkatkan daya saing daerah dan memenuhi target RPD, diperlukan penguatan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi program pemenuhan hak anak agar dapat naik ke kategori yang lebih tinggi.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 871.813.480,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 823.465.509,- atau 94,45%. Indikator ini tercapai efisiensi sebesar -25,94%.

9. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9*

Sasaran Strategis 9
Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 9 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 112,71% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,27	62,5	64,51	103,22	53,55
2	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*)	%	7,8	10	6,19	138,10	13,13
3	Persentase Kepesertaan KB Aktif	Indeks	67,84	70,5	68,26	96,82	13,13

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif” terdiri dari 3 indikator diantaranya adalah:

a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

   Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan.

   Terdapat 3 Dimensi untuk menentukan Index iBangga, antara lain Dimensi Ketenteraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Masing-masing dari dimensi tersebut memiliki indikator dalam menentukan nilai dimensi, sebagai berikut:

Tabel 3.17. Dimensi Indeks iBangga

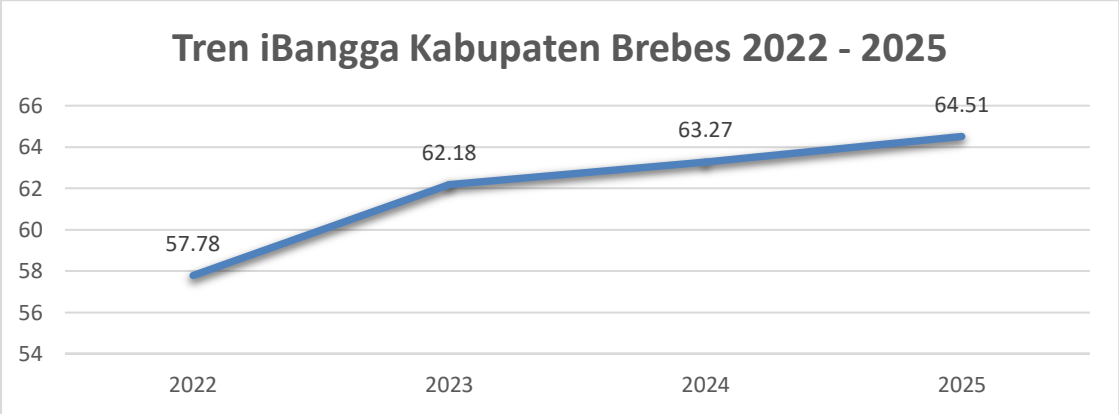
DIMENSI / INDIKATOR	NILAI MIN - MAX	CAPAIAN
Dimensi Ketentraman		**77,2**
Keluarga beribadah secara rutin dan toleransi beragama	50 – 100	94,9
Keluarga memiliki buku/akta nikah	50 – 100	99,9
Keluarga dimana setiap anak usia 0-17 tahun memiliki akta lahir	50 – 100	83,4
Keluarga dimana setiap anggota memiliki kartu jaminan kesehatan	20 – 100	71,2
PUS sedang menggunakan kontrasepsi *modern*	5 – 75	69,9
Tidak ada konflik keluarga	40 – 100	96,4
Kepala keluarga tidak cerai hidup	50 – 100	93,2
Keluarga tidak menikah dini	50 – 100	71,8
Dimensi Kemandirian		**66,1**
Keluarga memiliki sumber penghasilan	0 – 100	83,8
Keluarga dimana setiap lansia memenuhi kebutuhan dasar	0 – 100	60,0
Keluarga dengan penyandang disabilitas memenuhi kebutuhan dasar	0 – 100	58,3
Keluarga makan "makanan beragam"	0 – 100	56,0
Keluarga tinggal dalam rumah layak huni	0 – 100	72,5
Keluarga memiliki simpanan/tabungan	0 – 100	39,6
Keluarga dimana setiap anak usia 7-18 tahun tidak putus sekolah	40 – 100	84,7
Keluarga tidak terdapat anggota yang sakit/disabilitas	50 – 100	92,3
Keluarga akses media online	20 – 100	84,9
Dimensi Kebahagiaan		**50,2**
Interaksi antar anggota keluarga	20 – 100	42,4
Ayah terlibat pengasuhan anak	0 – 100	58,8
Rekreasi keluarga	20 – 100	60,4
Keluarga terlibat interaksi sosial	20 – 100	81,4

Sumber data perhitungan yang digunakan yakni adalah Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 oleh KemendukBangga/BKKBN RI dan index tersebut muncul/tertera pada website siperindu.online. Perhitungan dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan dengan pendekatan agregasi geometrik, dengan formulasi

$Indeks = \sqrt[i]{V1\ x\ V2\ x\ \dots x\ Vi}$, dengan i = 1, 2, 3 dst. Dan V adalah capaian disetiap indikator pada masing-masing dimensi. Sedangkan dalam menghitung iBangga dengan pendekatan agregasi aritmatik dari tiga dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formulasi:

$$\text{iBangga} = \sum_{i=1}^{3} (WiDi)$$

Dengan Di : indikator ke-i Wi : bibit ke-i, dan i = 1, 2, 3 adapun bobot untuk masing-masing indikator adalah Wi = $\frac{1}{p}$, dengan p = banyaknya indikator. Berikut adalah tren iBangga Kabupaten Brebes dari tahun 2022 – 2025:



Gambar 3.5. Grafik Tren iBangga Kabupaten Brebes Tahun 2022-2025

Sumber: KemendukBangga/ BKKBN Republik Indonesia

Semakin tinggi capaian iBangga, maka semakin baik penyelenggaraan program Pembangunan Keluarga. Kategori capaian iBangga sebagai berikut:

- Nilai iBangga <45, maka status pembangunan keluarga rendah
- Nilai iBangga antara >=45 dan <60, maka status pembangunan keluarga menengah bawah
- Nilai iBangga antara >=60 dan <75, maka status pembangunan keluarga menengah atas
- Nilai iBangga >=75, maka status pembangunan keluarga tinggi

Indikator iBangga diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan pembangunan keluarga di Indonesia, khususnya Kabupaten Brebes. Hasil tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemetaan keluarga di tingkat wilayah menurut dimensi atau indikatornya.

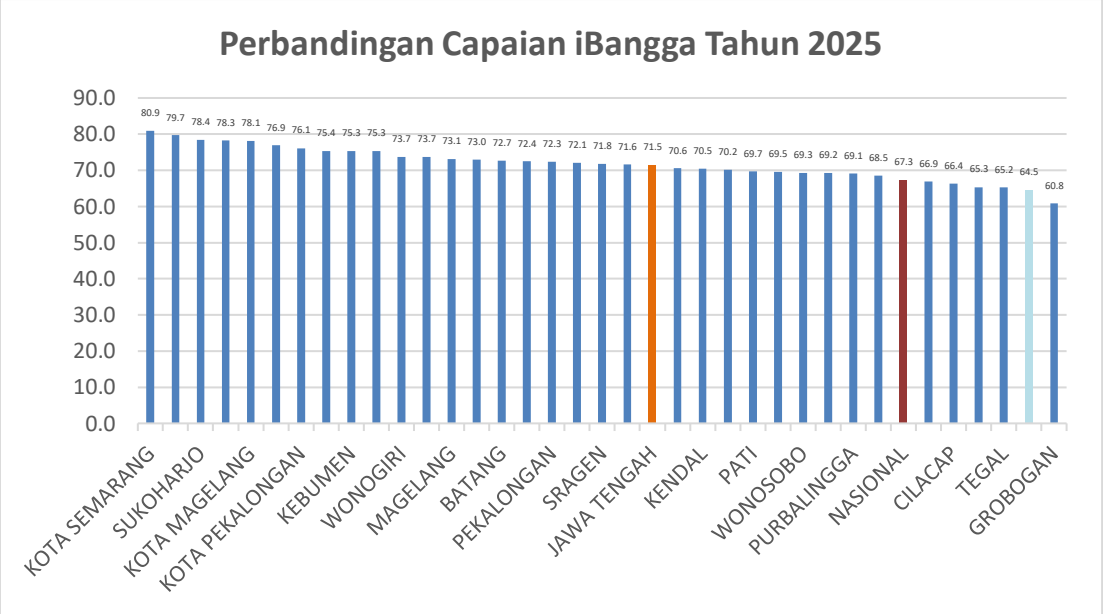
Berdasarkan data tersebut di atas, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Brebes periode 2022-2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022, capaian berada di angka 57,78 dan terus meningkat hingga mencapai 64,51 pada tahun 2025. Peningkatan nilai ini dibarengi dengan kenaikan level atau status pembangunan keluarga di Kabupaten Brebes. Berdasarkan kategori capaian iBangga:

- Tahun 2022: Dengan nilai 57,78, status pembangunan keluarga Kabupaten Brebes berada pada kategori "Menengah Bawah" (rentang nilai 45 sampai < 60).
- Tahun 2023 - 2025: Terjadi lompatan performa yang signifikan di mana Kabupaten Brebes berhasil naik kelas ke status "Menengah Atas" (rentang nilai 60 sampai < 75).
- Posisi Saat Ini (2025): Capaian sebesar 64,51 mengukuhkan posisi Kabupaten Brebes di kategori "Menengah Atas".

Capaian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya adalah:

- Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum. Dengan melibatkan berbagai pihak, iBangga dapat memperoleh beragam sudut pandang dan masukan yang dapat meningkatkan kualitasnya.
- Adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Komitmen tersebut dapat tercermin dalam alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan, implementasi dan pemantauan iBangga. Selain itu, dukungan teknis dan kelembagaan yang memadai juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan iBangga dalam jangka Panjang.

- Keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengembangan dan implementasinya. Masyarakat perlu dilibatkan dalam berbagai tahap, mulai dari perumusan indikator hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, iBangga dapat lebih representatif dan relevan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Perbandingan iBangga Kabupaten Brebes pada capaian regional, provinsi maupun nasional, sebagai berikut:



Gambar 3.6. Grafik Perbandingan Capaian iBangga

Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Brebes tercatat sebesar 64,5. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penguatan ketahanan keluarga, angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes masih menghadapi tantangan besar karena posisinya yang berada di bawah rata-rata capaian Nasional (67,5) maupun Provinsi Jawa Tengah (71,8). Diperlukan evaluasi mendalam dan intervensi program yang lebih tajam pada dimensi-dimensi penyusun iBangga untuk memperkecil gap capaian dan meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Brebes.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 22.101.661.000,-

dan terealisasi Rp. 21.338.611.074,- atau 96,55%, dengan capaian kinerja sebesar 103,22% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 6,46% .

b. Persentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*)

Unmet need adalah situasi dimana pasangan yang berpotensi membutuhkan layanan kontrasepsi/Pasangan Usia Subur (PUS) tidak mendapatkannya atau tidak menggunakan metode KB yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Ketidakikutsertaan dalam ber-KB atau *Unmet need* dapat memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, dan perkembangan sosial suatu masyarakat.

Semakin rendah capaian persentase *Unmet need*, maka semakin baik penyelenggaraan program Keluarga Berencana, maksudnya adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, dan mengatur kehamilan dapat berjalan dengan baik guna mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selain itu, pemantauan terhadap angka *Unmet need* KB dilakukan untuk mengetahui strategi penggarapan kesertaan ber-KB. Selain itu, indikator ini dapat menggambarkan keterbatasan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Penurunan *Unmet need* selain berkontribusi terhadap peningkatan mCPR dan penurunan TFR, juga dapat berkontribusi pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh kehamilan tidak diinginkan.

Pengolahan data indikator persentase *Unmet need* adalah

$$\frac{\sum unmetneed}{\sum Pasangan\ Usia\ Subur\ (PUS)} x\ 100\%$$

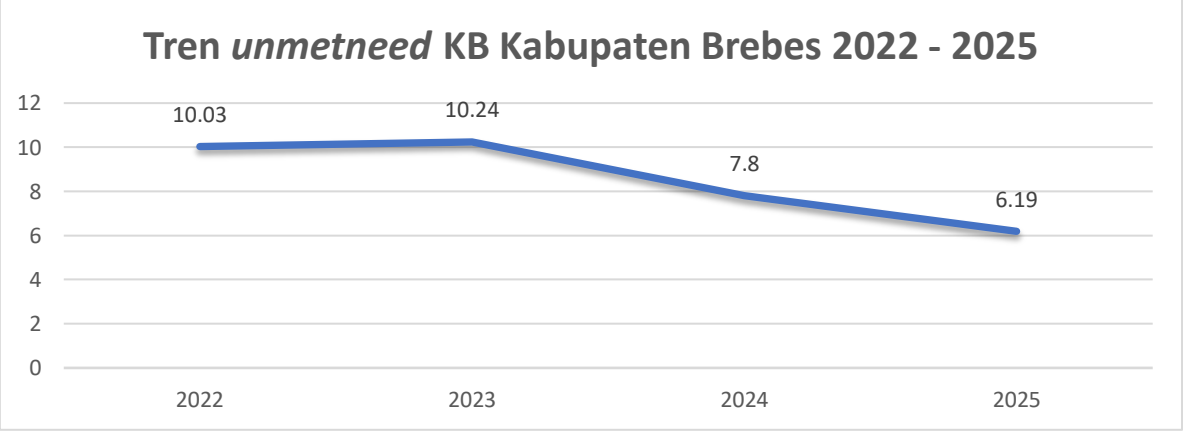
Tabel 3.18. Jumlah PUS bukan peserta KB Kabupaten Brebes

KECAMATAN	PUS BUKAN PESERTA KB JUMLAH UNMET NEED					PASANGAN USIA SUBUR
	HAMIL	TIDAK HAMIL			JUMLAH UNMET NEED	
		INGIN ANAK SEGERA	INGIN ANAK NANTI/KEMUDIAN	TIDAK INGIN ANAK LAGI		
SALEM	2	551	324	160	484	10959
BANTARKAWUNG	2	1345	245	626	871	17454
BUMIAYU	4	1902	279	606	885	17361
PAGUYANGAN	0	1130	359	605	964	18362
SIRAMPOG	6	830	312	392	704	10710
TONJONG	13	1594	244	462	707	12279
JATIBARANG	23	1292	365	552	917	14035
WANASARI	15	2601	781	1218	1999	26594
BREBES	1	2382	741	1490	2231	27244
SONGGOM	0	1095	790	534	1324	12081
KERSANA	3	914	262	396	658	11228
LOSARI	2	1921	592	900	1492	22591
TANJUNG	0	1818	576	817	1393	18847
BULAKAMBA	0	2723	592	855	1447	29295
LARANGAN	1	2021	824	718	1542	25464
KETANGGUNGAN	8	2160	410	831	1241	27516
BANJARHARJO	20	1937	406	801	1207	22002
Jumlah Total	**100**	**28216**	**8102**	**11963**	**20066**	**324022**

Sumber : newsiga-siga.bkkbn.go.id

Sehingga diperoleh angka :

$$\frac{20066}{324022} x\ 100\% = \mathbf{6,19\%}$$

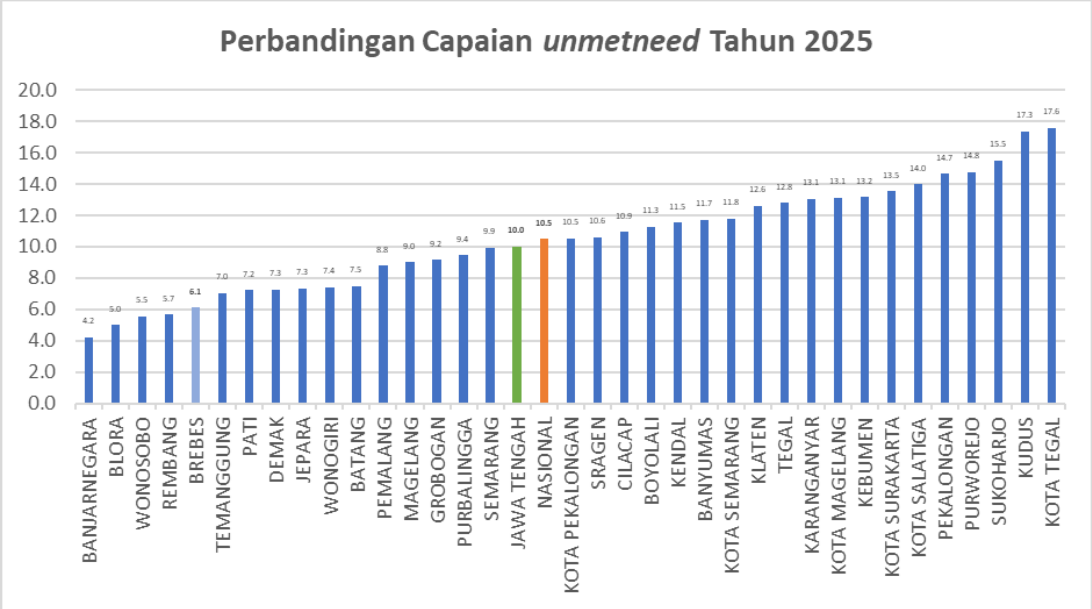


Gambar 3.7. Grafik Tren *Unmet need* KB Kabupaten Brebes Tahun 2022-2025

Capaian tersebut melebihi target yang telah direncanakan, hal itu tidak terlepas dari peran mitra kerja dan lintas sektor dalam mendukung pelayanan KB seperti Penyuluhan KB dan Tenaga Kesehatan pada Tempat Fasilitas Kesehatan serta kesadaran masyarakat yang cukup

baik untuk ber-KB.

Berikut Perbandingan Capaian *unmet need* Kabupaten Brebes pada capaian regional, provinsi maupun nasional, sebagai berikut:



Gambar 3.8. Grafik Perbandingan Capaian *Unmet need*

Capaian indikator *unmetneed* Kabupaten Brebes pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat solid dengan angka 6,19, yang secara impresif berada jauh di bawah rata-rata Nasional (10,5) maupun Provinsi Jawa Tengah (10,0). Keberhasilan menempati posisi lima besar terendah se-Jawa Tengah ini merupakan bukti nyata efektivitas strategi perluasan akses layanan kontrasepsi dan penguatan edukasi di lapangan, sehingga hambatan masyarakat dalam mendapatkan layanan keluarga berencana dapat diminimalisir secara signifikan. Prestasi ini menjadi indikator kunci bahwa program keluarga berencana di Brebes telah berjalan secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pasangan usia subur di seluruh wilayah.

Capaian tersebut melebihi target yang telah direncanakan, hal itu tidak terlepas dari peran mitra kerja dan lintas sektor dalam mendukung pelayanan KB serta partisipasi masyarakat dalam ber KB

yang cukup baik. Beberapa faktor pendukung penurunan *Unmet need* diantaranya adalah:

1) Perluasan jaringan layanan KB. BKKBN telah berhasil mendirikan pusat-pusat layanan KB yang mudah diakses, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Ini meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan pilihan KB, mengurangi hambatan geografis.
2) DP3KB Kabupaten Brebes bersama BKKBN secara aktif melibatkan diri dalam program pendidikan dan kampanye kesadaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KB. Informasi yang disediakan mencakup manfaat dan berbagai opsi KB, membantu masyarakat membuat keputusan yang terinformasi mengenai perencanaan keluarga.
3) Pemberdayaan perempuan merupakan aspek penting dalam penurunan *Unmet need*. BKKBN telah menginisiasi program-program yang mendukung peningkatan status dan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, sehingga memberikan kontrol lebih besar terhadap pilihan KB.
4) DP3KB Kabupaten Brebes secara proaktif menyediakan berbagai pilihan metode KB yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat memiliki akses lebih besar ke informasi komprehensif tentang metode-metode yang tersedia, memungkinkan mereka memilih opsi yang paling sesuai.
5) Sistem *monitoring* dan evaluasi berkelanjutan untuk melacak pencapaian dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Proses evaluasi yang terus-menerus memungkinkan adaptasi dan peningkatan berkelanjutan dari program-program KB.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 22.101.661.000,-

dan terealisasi Rp. 21.338.611.074,- atau 96,55%, dengan capaian kinerja sebesar 138,10% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 30,09% .

c. Persentase Kepesertaan KB Aktif

Kepesertaan dalam Keluarga Berencana (KB) secara aktif merujuk pada partisipasi aktif individu atau pasangan dalam program perencanaan keluarga yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Tujuan utama dari program KB adalah untuk memberikan kontrol yang lebih baik atas jumlah dan jarak kelahiran, sehingga dapat mencapai keluarga yang lebih kecil dan sehat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Kepesertaan KB secara aktif menjadi kunci untuk mencapai tujuan program KB, yaitu mengendalikan pertumbuhan populasi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan partisipasi aktif, individu atau pasangan dapat memanfaatkan layanan KB dengan lebih optimal untuk mencapai perencanaan keluarga yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal ini dibantu oleh mitra kerja yakni Penyuluh KB yang tersebar di 17 Kecamatan, Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang tersebar di 297 Desa serta Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) guna meningkatkan kepesertaan KB Aktif dalam menyukseskan Program Nasional yakni Program Bangga Kencana.

Pengolahan data indikator persentase kepesertaan KB Aktif adalah :

$$\frac{\sum Peserta\ KB\ Aktif}{\sum Pasangan\ Usia\ Subur\ (PUS)} x\ 100\%$$

Tabel 3.19. Jumlah KB Aktif dan PUS di Kabupaten Brebes

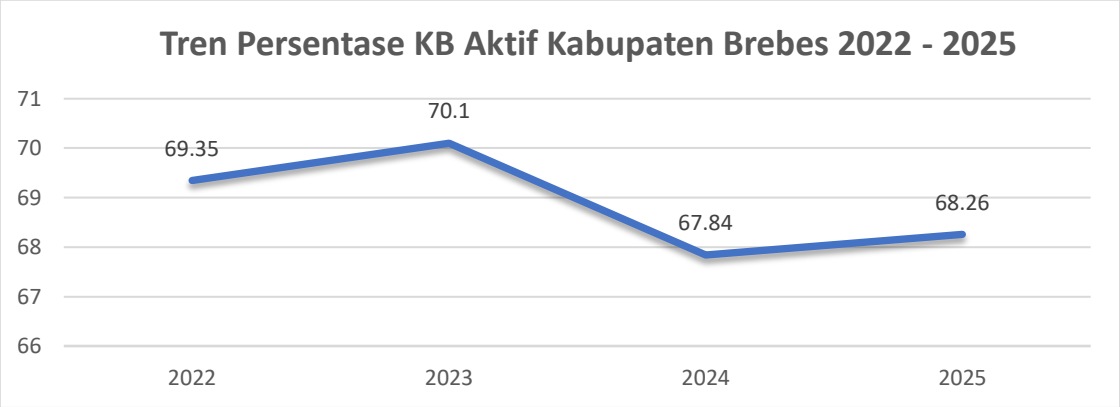
KECAMATAN	PASANGAN USIA SUBUR	JUMLAH PESERTA KB AKTIF
SALEM	10959	8659
BANTARKAWUNG	17454	12919
BUMIAYU	17361	11910
PAGUYANGAN	18362	13094
SIRAMPOG	10710	7015
TONJONG	12279	7742

KECAMATAN	PASANGAN USIA SUBUR	JUMLAH PESERTA KB AKTIF
JATIBARANG	14035	9049
WANASARI	26594	16487
BREBES	27244	17655
SONGGOM	12081	7941
KERSANA	11228	7968
LOSARI	22591	15101
TANJUNG	18847	12927
BULAKAMBA	29295	20366
LARANGAN	25464	17923
KETANGGUNGAN	27516	18701
BANJARHARJO	22002	15722
JUMLAH TOTAL	**324022**	**221179**

Sumber: newsiga-siga.bkkbn.go.id

Sehingga diperoleh angka :

$$\frac{221179}{324022} x\ 100\% = \mathbf{68,26\%}$$



Gambar 3.9. Tren Kepesertaan KB Aktif Kabupaten Brebes Tahun 2022-2025

Berdasarkan tren capaian tahun 2022–2025, persentase KB Aktif di Kabupaten Brebes pada tahun 2025 berhasil mencapai angka 68,26%, di mana keberhasilan ini didorong oleh sinergitas solid antara Pemerintah Daerah dengan mitra kerja lini lapangan mulai dari Penyuluh KB, PPKBD, Sub PPKBD, hingga Fasilitas Kesehatan dalam mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat. Selain adanya dukungan kuat dari pihak keluarga akseptor, peningkatan kinerja ini juga dipengaruhi secara signifikan oleh transformasi digital melalui

pemanfaatan teknologi dalam sistem *reporting* dan *recording*, sehingga data kepesertaan dapat terekam, diolah, dan dianalisis secara cepat serta akurat. Integrasi antara kolaborasi sumber daya manusia yang kompeten dan digitalisasi proses administrasi inilah yang menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas serta mendorong pemulihan angka kepesertaan KB di Kabupaten Brebes.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 22.101.661.000,- dan terealisasi Rp. 21.338.611.074,- atau 96,55%, dengan capaian kinerja sebesar 96,82% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 0,28% .

10. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10*

Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Kepedulian Sosial Secara Luas Untuk Mewujudkan Ketahanan Sosial Terutama Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 10 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 105,86% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.20. Capaian Indikator sasaran Persentase Penanganan Jumlah PMKS

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	%	43	45	45.78	101.73	52

Angka realisasi diperoleh dari Persentase Penanganan Jumlah PMKS diperoleh berdasarkan jumlah PMKS yang ditangani oleh dinas sosial pada tahun 2025 dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penanganan} = \frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani pada tahun n}}{} \times 100\%$$

Jumlah PMKS $\frac{\text{Jumlah keseluruhan PMKS pada tahun n}}{}$

$$= \frac{4.930}{9.315} \text{ X } 100\%$$

$$= 52{,}93\%$$

Penanganan PMKS yang tertangani oleh Dinas Sosial Kab. Brebes sebesar 52,93% pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 105,86% yang berarti pada tahun 2025 target tercapai atau Pengukuran indikator Persentase Penanganan Jumlah PMKS dengan Skala Ordinal termasuk ke dalam Predikat Kategori "Sangat Tinggi/Sangat Berhasil". Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 50%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 52,93% atau 105,86% dari target. Dengan demikian, kinerja tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,93 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan penanganan PMKS berjalan efektif dan mampu menghasilkan capaian di atas ekspektasi.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 sebesar 45,78% mengalami peningkatan menjadi 52,93% pada tahun 2025. Terjadi kenaikan sebesar 7,15 poin persentase. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pendataan, koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi program penanganan PMKS sehingga jumlah penerima manfaat yang tertangani semakin meningkat.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen RPD Tahun 2026 sebesar 52%, maka realisasi tahun 2025 sebesar 52,93% telah melampaui target akhir RPD sebesar 0,93 poin persentase. Dengan capaian tersebut, target jangka menengah dapat dikatakan telah tercapai lebih cepat dari waktu yang direncanakan.

Untuk indikator ini belum terdapat standar nasional yang secara langsung menjadi pembanding kuantitatif. Namun demikian, capaian di atas 50% menunjukkan bahwa lebih dari separuh PMKS yang terdata telah mendapatkan penanganan, sehingga dapat dikategorikan dalam capaian yang baik dalam konteks pelayanan kesejahteraan sosial daerah.

Capaian kinerja persentase penanganan PMKS pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung antara lain:

a. Peningkatan Verifikasi dan Validasi data khususnya pada penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan kelompok rentan lainnya sesuai kebutuhan.
b. Optimalisasi layanan rehabilitasi sosial melalui pendampingan, pemberian bantuan sosial, rujukan ke panti sosial, layanan trauma *healing* serta layanan lainnya sesuai mutu layanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terlaksana dengan baik.
c. Adanya dukungan sinergi lintas sektor dengan organisasi perangkat daerah, lembaga sosial, dan masyarakat yang memperluas jangkauan penanganan.

Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan dalam pelaksanaan penanganan PMKS di antaranya adalah:

a. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani.
b. adanya PMKS sulit dijangkau karena faktor mobilitas tinggi, tidak memiliki identitas kependudukan, kurang kooperatif atau menolak layanan rehabilitasi.
c. Keterbatasan sumber daya (tenaga pendamping, fasilitas rumah singgah, dan dukungan anggaran) yang menyebabkan tidak semua PMKS dapat tertangani secara merata dalam waktu bersamaan.

Sebagai solusi dan tindak lanjut, strategi yang telah dan akan ditempuh meliputi:

a. Penguatan mekanisme pendataan terpadu melalui integrasi sistem informasi, verifikasi lapangan, dan pemutakhiran data rutin.
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang sesuai standarisasi dalam mendukung pelayanan dan penanganan PMKS.
c. Peningkatan kapasitas SDM pendamping sosial melalui pelatihan teknis, supervisi, dan peningkatan kompetensi dalam penanganan kasus.

d. Peningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas sektor dengan organisasi perangkat daerah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam penanganan PMKS.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 7,63%. Dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 3.327.732.275,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.254.002.551,- atau 97,78%.

Dalam melaksanakan kegiatan terkait penanganan PMKS pada tahun 2025 di kabupaten Brebes didukung oleh beberapa program di antaranya adalah Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dimana dalam program tersebut berisi aktifitas yakni bantuan sosial seperti bantuan sosial bagi anak yatim piatu, eks penyakit sosial, penyandang disabilitas, orang terlantar. Bantuan Alat Bantu bagi penyandang disabilitas, dan bantuan sandang pangan bagi korban bencana, gelandangan dan pengemis serta pemberian mutu layanan lainnya bagi PMKS, sehingga PMKS mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, menjalankan fungsi sosialnya.

Upaya peningkatan dalam penanganan PMKS sangatlah diperlukan, karena luasnya wilayah Kabupaten Brebes dan populasi PMKS yang tinggi mengharuskan adanya peningkatan kinerja untuk tiap tahunnya dan di masa mendatang.

11. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11*

Sasaran Strategis 11
Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 11 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 132,5% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.21. Capaian Indikator Sasaran Persentase kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Persentase kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan	%	63,6	50	72,12	144,24	52

Persentase Kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan adalah Indikator untuk mengetahui banyaknya seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan selama 1 (satu) tahun. Indikator persentase kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan didapat dari jumlah grup kesenian/kebudayaan yang berdiri (meminta rekomendasi pendirian kelompok/grup) melakukan pentas (meminta rekomendasi ijin pentas) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2025 yang berjumlah 665 kelompok seni dibagi data awal (data tahun 2016) sebanyak 922 kelompok seni.

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 50%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 72,12%. Dengan demikian, capaian kinerja telah melampaui target sebesar 22,12 poin persentase atau mencapai 144,24% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian kebudayaan lokal daerah pada tahun berjalan terlaksana dengan sangat baik dan melebihi perencanaan awal.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 63,6%, realisasi Tahun 2025 sebesar 72,12% menunjukkan peningkatan sebesar 8,52 poin persentase. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya inventarisasi, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan lokal daerah. Secara tren, capaian tahun 2025 tidak hanya lebih tinggi dari target tahunan, tetapi juga menunjukkan progres positif dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan konsistensi dan peningkatan kinerja dalam pelestarian budaya daerah.

Target akhir RPD Tahun 2026 ditetapkan sebesar 52%. Realisasi Tahun 2025 sebesar 72,12% telah melampaui target jangka menengah tersebut sebesar 20,12 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator telah melebihi target akhir perencanaan sebelum periode berakhir, sehingga secara substansial sasaran strategis pelestarian kebudayaan lokal daerah telah tercapai lebih cepat dari yang direncanakan.

Untuk indikator persentase kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan, tidak terdapat data pembanding nasional atau regional yang secara kuantitatif dapat dijadikan standar acuan langsung. Oleh karena itu, evaluasi kinerja lebih difokuskan pada pencapaian target internal daerah dan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun tidak terdapat pembanding nasional, capaian sebesar 72,12% dapat dikategorikan baik karena telah melampaui target tahunan maupun target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 2.263.344.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.150.176.800,- atau 95% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 34,14%.

Adapun program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah Program Pengembangan kesenian dan pengembangan kesenian tradisional yaitu pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota, Pelestarian Kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota. Program kegiatan tersebut fokus pada pembinaan kelompok seni, memberikan stimulan kepada kelompok seni serta memfasilitasi kelompok seni yang ada agar bisa rutin tampil yang otomatis berpengaruh pada terlestarinya kebudayaan lokal daerah.

12. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12*

Sasaran Strategis 12
Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan

Sasaran Strategis 12 adalah "Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan". Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 12 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 114,05% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Indeks Literasi	Indeks	14,46	13,3	14,92	112,18	3,5
2	Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks	66,80	58	67,23	115,91	49,5

Angka capaian kinerja sasaran " Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan" terdiri dari 2 indikator diantaranya adalah:

a. Indeks Literasi

Indeks Literasi merupakan potret kecakapan literasi masyarakat yang diukur melalui aspek ketersediaan koleksi, pemerataan layanan, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi. Indeks Literasi Masyarakat diperoleh dari hasil survei lapangan, data statistik internal perpustakaan, dan pengolahan data sekunder dari instansi terkait yang kemudian divalidasi oleh sistem pendataan Perpusnas.

Indeks Literasi adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang merupakan pengukuran tingkat literasi masyarakat. IPLM ini dihitung berdasarkan usaha pemerintah dalam mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar. IPLM dihitung

berdasarkan unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM). Unsur-unsur tersebut di antaranya:

1) Pemerataan layanan perpustakaan
2) Ketercukupan koleksi perpustakaan
3) Ketercukupan tenaga perpustakaan
4) Tingkat kunjungan masyarakat
5) Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP
6) Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan
7) Anggota Perpustakaan

Rumus Perhitungan Indeks Literasi adalah:

IPLM Kabupaten/Kota:

$$\text{IPLM Kab/Kota} = \frac{\sum_{i=1}^{7}(\text{UPLM})_i}{7} \text{X } 100$$

Keterangan:

IPLM Kab/Kota : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota

UPLMi : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan literasi Masyarakat tersusun atas tujuh Unsur Pembangunan literasi Masyarakat (UPLM) yang menjadi indikator penilaian upaya pembangunan literasi masyarakat. Pada tingkat Kabupaten, IPLM bahkan menjadi salah satu indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020). Hasil IPLM Kabupaten Brebes Tahun 2024 ditunjukkan pada rekapan nilai IPLM Kabupaten Brebes berikut ini:

1) Nilai UPLM 1 sebesar 0,4203 artinya pemerataan layanan perpustakaan sebesar 42% dari seluruh jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Brebes.
2) Nilai UPLM 2 sebesar 0,2267 artinya ketercukupan koleksi perpustakaan sebesar 10% dari jumlah penduduk atau 23% dari standar.
3) Nilai UPLM 3 sebesar 1,0000 artinya, Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 100 persen dari standar.
4) Nilai UPLM 4 sebesar 0,1201 artinya Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 12 persen dari standar atau jika

dilihat dari jumlah kunjungan hanya 0,26% masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan, idealnya sesuai standar 2% masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan.

5) Nilai UPLM 5 sebesar 1,0000 artinya pencapaian perpustakaan yang dibina sudah sesuai standar yaitu 100% dari target yang dibina sesuai SNP. Perpustakaan yang dibina sudah 52,76% dari standar yang dibina 39%.
6) Nilai UPLM 6 sebesar 1,0000 artinya, pencapaian keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di perpustakaan sudah mencapai 100% dari standar. Keterlibatan masyarakat sudah mencapai 3,03% dari standar yaitu 2%.
7) Nilai UPLM 7 sebesar 1,0000 artinya, ketercapaian jumlah anggota perpustakaan sudah 100% dari target yang distandarkan. Jumlah anggota perpustakaan 10% dari jumlah penduduk dari standar 2%.
8) Nilai IPLM Kabupaten Brebes jika dihitung dari 7 UPLM penyusun IPLM adalah sebesar 58, 14 dengan nilai Sedang. Jika dikonversi sesuai target RPD maka capaian IPLM Kabupaten Brebes setelah dikonversi 4,71 adalah sebesar 14,46.

Pada Tahun 2025, target Indeks Literasi ditetapkan sebesar 13,3, sedangkan realisasi mencapai 14,92. Dengan demikian, capaian kinerja melampaui target sebesar 1,62 poin atau mencapai 112,18% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa program peningkatan literasi masyarakat berjalan lebih baik dari yang direncanakan. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 14,46, realisasi Tahun 2025 meningkat menjadi 14,92 atau naik sebesar 0,46 poin. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren positif dalam upaya peningkatan budaya literasi masyarakat, meskipun peningkatannya relatif moderat.

Target akhir RPD Tahun 2026 ditetapkan sebesar 3,5. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 14,92, capaian telah melampaui target akhir RPD. Namun demikian, perlu dilakukan penelaahan kembali terhadap konsistensi satuan dan formula

indikator dalam dokumen perencanaan untuk memastikan keselarasan target dan realisasi. Untuk indikator Indeks Literasi, tidak terdapat data pembanding nasional atau regional yang digunakan dalam dokumen ini. Oleh karena itu, evaluasi difokuskan pada pencapaian target internal dan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Keberhasilan ini didorong oleh kemudahan akses bahan bacaan digital. Berdasarkan kajian, masyarakat Brebes memiliki durasi akses internet yang tinggi untuk mencari informasi. Program Pojok Baca Digital (POCADI) dan penyediaan *e-book* melalui aplikasi perpustakaan digital menjadi faktor kunci yang memudahkan akses masyarakat kapan saja dan di mana saja. Selain itu, kegiatan promosi minat baca melalui media sosial dan lomba-lomba literasi terbukti efektif menarik minat generasi muda.

Indikator ini didukung oleh program Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.332.000.000,- terealisasi Rp 1.299.610.029,- atau 97,57% dengan capaian indikator yang tercapai 112,18% melalui rumus perhitungan efisiensi Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 28,89%.

b. Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat

Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat mengukur tingkat perilaku membaca masyarakat yang diukur menggunakan instrumen survei yang mencakup 5 indikator: Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah Buku, Frekuensi Akses Internet, dan Durasi Akses Internet.

Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat adalah tingkat kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi dan pengetahuan dari berbagai media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Indeks ini disebut juga Tingkat Kegemaran Membaca (TGM).

Berdasarkan hasil survei yang diolah data oleh Perpustakaan Nasional, Tahun 2025 diperoleh Nilai Budaya Kegemaran Membaca Masyarakat di Kabupaten Brebes sebesar 67,23.

Pada Tahun 2025, target Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat ditetapkan sebesar 58, sedangkan realisasi mencapai 67,23. Dengan

demikian, capaian kinerja melampaui target sebesar 9,23 poin atau mencapai 115,91% dari target. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mendorong peningkatan minat baca masyarakat. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 66,80, realisasi Tahun 2025 sebesar 67,23 mengalami peningkatan sebesar 0,43 poin. Kenaikan ini menunjukkan tren yang stabil dan konsisten dalam peningkatan kegemaran membaca masyarakat.

Target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 49,5. Realisasi Tahun 2025 sebesar 67,23 telah melampaui target akhir RPD sebesar 17,73 poin. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran jangka menengah telah tercapai lebih cepat dari waktu yang direncanakan, meskipun perlu dilakukan evaluasi kesesuaian formula indikator dalam dokumen perencanaan. Hingga saat ini, perbandingan dengan standar nasional belum dapat ditampilkan karena hasil survei resmi tingkat nasional dari Perpusnas RI untuk tahun berjalan belum dirilis. Namun, secara internal, capaian Brebes sudah berada pada kategori "Tinggi" (skor 60-80).

Keberhasilan capaian indikator didukung oleh Program Pembinaan Perpustakaan. Peningkatan nilai TGM terjadi dikarenakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes telah melakukan kegiatan literasi seperti bedah buku, perpustakaan keliling, lomba kegemaran membaca dan aktifnya taman bacaan masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes sehingga menumbuhkan minat membaca di masyarakat Kabupaten Brebes dan meningkatnya frekuensi kunjungan masyarakat untuk membaca di perpustakaan, serta meningkatkan akses penggunaan gadget di masyarakat yang mendorong peningkatan durasi membaca melalui akses internet. Komponen pengukuran TGM meliputi tingkat frekuensi membaca, durasi (lama) membaca, serta jumlah buku yang dibaca. Ditambah dengan variabel frekuensi penggunaan internet untuk mencari bahan bacaan per minggu, serta durasi akses internet untuk mencari bahan bacaan/informasi per hari.

Indikator ini didukung oleh program Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.332.000.000,-

terealisasi Rp 1.299.610.029,- atau 97,57% dengan capaian indikator 115,91% melalui rumus perhitungan efisiensi Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 15,82%.

13. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13*

Sasaran Strategis 13
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Serta Partisipasi Dan Peran Seluruh Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Peningkatan Kualitas Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 13 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.23. Capaian Indikator Sasaran Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100

Angka capaian indikator sasaran Persentase Kesesuaian Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dihitung dengan formulasi Jumlah program RKPD/Jumlah program RPJMD atau RPD x 100%. Jumlah Program yang ada di RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2025 yaitu 257 Program sesuai dengan jumlah Program yang ada di RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sehingga realisasinya sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dapat tercapai karena dalam penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes selalu melakukan koordinasi pada seluruh Perangkat Daerah. Selain itu adanya komitmen antar pimpinan untuk selalu mempedomani RPD Kabupaten Brebes Tahun

2023-2026 dalam penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2025. Penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja salah satunya didukung dengan adanya penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri. SIPD Kemendagri merupakan salah satu aplikasi penting dalam mendukung pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah.

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun ini telah memenuhi target secara penuh (100%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah telah selaras dan konsisten satu sama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, capaian indikator juga berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir tidak terjadi perubahan nilai dan kinerja tetap terjaga secara konsisten pada tingkat maksimal. Kondisi ini mencerminkan stabilitas dan konsistensi dalam penyusunan serta pengendalian dokumen perencanaan daerah.

Target akhir RPD Tahun 2026 untuk indikator ini ditetapkan sebesar 100%. Dengan realisasi Tahun 2025 yang telah mencapai 100%, maka target jangka menengah telah terpenuhi sebelum periode perencanaan berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian dan harmonisasi dokumen perencanaan telah berjalan optimal dan sesuai standar tata kelola perencanaan pembangunan daerah.

Untuk indikator ini tidak tersedia data pembanding nasional atau regional yang bersifat kuantitatif. Namun demikian, capaian 100% dapat dikategorikan sangat baik karena menunjukkan tingkat konsistensi dan keselarasan penuh antar dokumen perencanaan daerah, yang merupakan prinsip utama dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Keberhasilan capaian indikator kinerja didukung oleh beberapa Program, diantaranya adalah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Keberhasilan

Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dikarenakan dalam penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes selalu melakukan koordinasi pada seluruh Perangkat Daerah. Selain itu adanya komitmen antar pimpinan untuk selalu memedomani RPD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 dalam penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2025. Penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja salah satunya didukung dengan adanya penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri. SIPD Kemendagri merupakan salah satu aplikasi penting dalam mendukung pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Capaian ini tidak dapat diperbandingkan dengan capaian nasional, karena indikator kinerja merupakan indikator mandiri.

14. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14*

Sasaran Strategis 14
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 14 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 102,69% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,84	2,9	3,29	113,44	2,8
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	93,33	98	90,09	91,92	98,5

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” terdiri dari 2 indikator diantaranya adalah:

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Angka capaian indikator SPBE diperoleh melalui proses penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020, yaitu melalui mekanisme penilaian mandiri yang selanjutnya diverifikasi, diklarifikasi, dan divalidasi oleh tim asesor internal maupun eksternal untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Hasil Evaluasi SPBE terdiri dari berbagai domain penilaian meliputi Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.

Pada tahun 2025, target indeks SPBE ditetapkan sebesar 2,9 dan berhasil dicapai sebesar 3,29, menunjukkan kinerja yang melampaui sasaran. Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, terjadi tren peningkatan dari 2,83 pada tahun 2023 dan 2,84 pada tahun 2024, serta telah melampaui target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis/RPD sebesar 2,8. Bahkan, capaian tahun 2025 juga sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang berada pada angka 3,23, yang menunjukkan posisi kinerja daerah relatif kompetitif pada tingkat nasional.

Angka realisasi kinerja bersumber dari hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE oleh Kementerian PANRB yang didukung dokumen penilaian resmi, laporan hasil evaluasi, serta data pendukung implementasi SPBE di lingkungan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja tersebut terutama dipengaruhi oleh tersedianya Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE yang memperkuat aspek perencanaan strategis dan tata kelola. Keberhasilan ini menjadi dasar untuk terus mempertahankan capaian yang telah diraih melalui penguatan implementasi kebijakan, konsistensi pelaksanaan rencana strategis, serta peningkatan kualitas layanan digital. Di sisi lain, evaluasi berkelanjutan tetap dilakukan untuk mengantisipasi potensi penurunan kinerja, sehingga target pembangunan SPBE pada periode selanjutnya dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 2.120.994.500,- dan terealisasi Rp. 319.537.488,- atau 15.07%, dengan capaian kinerja sebesar 113.44% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 86.72%.

Rendahnya tingkat realisasi anggaran tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan strategis berupa pembangunan *Command Center* yang belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan, sehingga berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran. Meskipun demikian, capaian kinerja Indeks SPBE tetap menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tingkat pencapaian sebesar 113,44%, sehingga indikator ini dinilai efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 86,72%, yang mencerminkan bahwa target kinerja dapat diraih secara optimal meskipun dengan pemanfaatan anggaran yang relatif terbatas.

Keberhasilan capaian indikator kinerja didukung Program Aplikasi Informatika. Dalam implementasi SPBE sangat dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, kualitas SDM, dukungan kebijakan, dan tingkat integrasi sistem. Beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur, serta masalah keamanan data, dapat menghambat penerapan SPBE secara optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja SPBE, diperlukan peningkatan infrastruktur, pelatihan SDM, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan kebijakan yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Angka capaian indikator keterbukaan informasi publik diperoleh dari hasil evaluasi tahunan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melalui tahapan sosialisasi, pengisian evaluasi mandiri, verifikasi data, presentasi, dan penilaian, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam menyediakan akses informasi yang mudah, memadai, serta mendukung transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 98, namun realisasi capaian berada pada angka 90,09. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut relatif lebih rendah dari tahun 2024 yang mencapai 93,33, namun masih sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 89,54. Hingga tahun berjalan, realisasi tersebut juga belum memenuhi target jangka menengah dalam dokumen RPD yang ditetapkan sebesar 98,5. Sementara itu, meskipun indeks keterbukaan informasi publik nasional berada pada angka 66,43, perbandingan secara langsung tidak sepenuhnya relevan karena adanya perbedaan metodologi penilaian.

Angka realisasi kinerja bersumber dari hasil penilaian resmi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang didukung berita acara verifikasi, dokumen presentasi, serta laporan evaluasi keterbukaan informasi publik. Penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya terutama dipengaruhi oleh adanya perbedaan pandangan dengan tim evaluator pada saat proses verifikasi data, yang berdampak pada penilaian beberapa indikator. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap berada pada kategori badan publik “informatif”, sama seperti tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kualitas keterbukaan informasi secara umum masih terjaga. Sebagai langkah perbaikan, dilakukan penguatan pemenuhan dokumen pendukung, peningkatan koordinasi internal antarperangkat daerah, serta pendampingan intensif dalam proses evaluasi agar keselarasan pemahaman dengan evaluator dapat terbangun dan capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat meningkat.

Keberhasilan capaian indikator kinerja didukung Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, efisiensi penggunaan sumber daya anggaran mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020, yang menjadi pedoman dalam menilai keterkaitan antara pemanfaatan anggaran dan capaian kinerja. Pada indikator ini, pagu anggaran Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pendukung capaian kinerja sebesar Rp 829.736.050 direalisasikan sebesar Rp 823.781.374 atau

mencapai 99,28%, sementara capaian kinerja tercatat sebesar 91,92%. Berdasarkan perhitungan tersebut, indikator ini menunjukkan tingkat efisiensi sebesar -8,01%, yang mengindikasikan bahwa realisasi anggaran relatif lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi capaian kinerja yang diperoleh. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemanfaatan sumber daya belum sepenuhnya sebanding dengan hasil yang dicapai, sehingga ke depan diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program, penajaman perencanaan kegiatan, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan selaras dengan peningkatan capaian kinerja.

15. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15*

Sasaran Strategis 15
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 15 dengan 3 indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,57	84	86,59	103,08	85
2	Indeks Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Indeks	*Dalam proses*	3,35	*Dalam proses*	-	3,37
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Indeks	64,29	64,5	64,76	100,40	64,21

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang

Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif" terdiri dari 3 indikator diantaranya adalah:

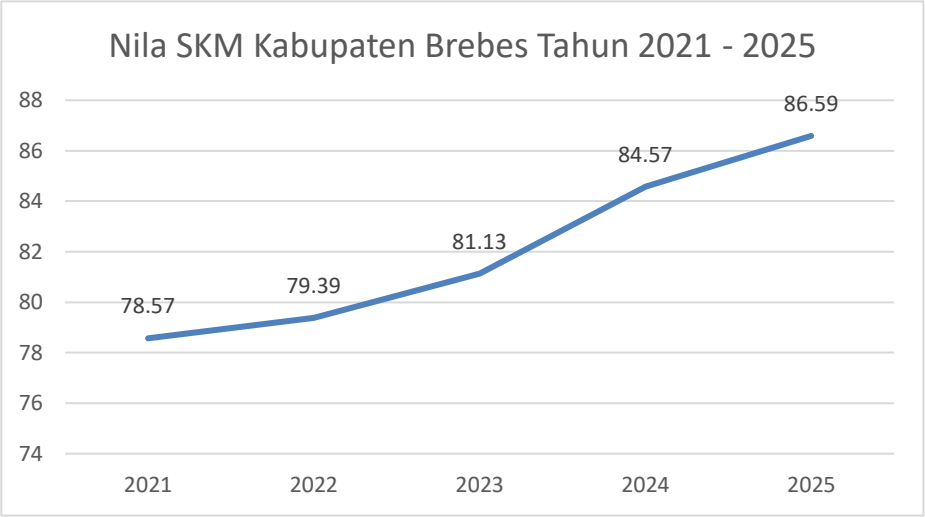
a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Angka capaian indikator ini diperoleh dari hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan melalui metode kuesioner. Rumus perhitungannya adalah rata-rata skor yang diperoleh dari responden terhadap berbagai aspek layanan, seperti kualitas layanan, waktu layanan, transparansi, dan kepuasan keseluruhan. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan di beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, pada Semester I Tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Brebes sebesar 86,05 dan pada Semester II Tahun 2024 sebesar 84,67 sehingga hasil perhitungan tahunan nilai IKM Kabupaten Brebes yaitu sebesar 87,12 masuk dalam kategori "Baik".

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 42 Perangkat Daerah dan Unit Kerja telah menyampaikan laporannya pada Laporan SKM semester 1 dan sebanyak 81 Perangkat Daerah dan Unit Kerja telah menyampaikan laporannya pada Laporan SKM semester 2. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada tahun ini disebabkan Perangkat Daerah yang belum selesai melakukan SKM pada Semester ke 2 bulan (Juli-Desember) Tahun 2025 dikarenakan pergantian admin pelaksana yang baru belum menguasai sistem aplikasi.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan realisasi capaian sebesar 86,59 pada tahun 2025, yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 4. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 103,08% dari target, yang berarti menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Jika melihat kecenderungan tren layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, tren tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Brebes dapat dilihat melalui grafik berikut :



Gambar 3.10. Grafik Nilai SKM Kabupaten Brebes Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025 di lingkup Pemerintah Kabupaten Brebes. Dibandingkan Tahun 2024 (84,57), realisasi Tahun 2025 meningkat menjadi 86,59 atau naik 2,02 poin. Jika dilihat dalam tren lima tahun terakhir, IKM menunjukkan peningkatan konsisten dari 78,57 (2021) menjadi 86,59 (2025). Peningkatan bertahap ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik, baik dari aspek kecepatan layanan, transparansi, maupun kepastian prosedur.

Target akhir RPD Tahun 2026 ditetapkan sebesar 85. Realisasi Tahun 2025 sebesar 86,59 telah melampaui target akhir RPD sebesar 1,59 poin. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran jangka menengah telah tercapai lebih cepat dari waktu yang direncanakan.

Keberhasilan capaian indikator kinerja didukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi yang melaksanakan fasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 182.526.728,- dan terealisasi Rp 176.936.370,- atau 96,94%. Melalui rumus perhitungan efisiensi Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 5,96%.

Sebagai tindak lanjut terhadap Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan surat Sekretariat Daerah perihal pelaksanaan dan pelaporan SKM oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Brebes kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. Selanjutnya, Bagian Organisasi melakukan pendampingan kepada beberapa Perangkat Daerah khususnya yang belum pernah melaksanakan SKM, serta mengingatkan seluruh Perangkat Daerah terkait batas waktu pelaporan SKM. Selain itu, beberapa Perangkat Daerah juga telah mengikuti pembinaan dari Kemenpan RB terkait kebijakan SKM yaitu Bimbingan Teknis dan Survei serentak. Adapun Perangkat Daerah yang telah mengikuti kegiatan dimaksud adalah seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan dan Puskesmas.

b. Indeks Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Indeks Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan hasil dari pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). EPPD adalah instrumen penilaian kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan tujuan utama untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah. Pelaksanaan EPPD pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Daerah yang dibentuk oleh Gubernur.

Indeks Nilai EPPD bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, EPPD Tahun 2026 atas LPPD Tahun Anggaran 2025 masih dalam proses penilaian. Sementara itu, EPPD Tahun 2025 atas LPPD Tahun 2024 belum ditetapkan dan direncanakan akan diumumkan pada peringatan Hari Otonomi Daerah, yaitu tanggal 25 April 2026.

Adapun hasil EPPD Tahun 2024 atas LPPD Tahun 2023 memperoleh skor sebesar 3,1324 dengan status “sedang”, sebagaimana tercantum

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2025. Sebelumnya, capaian EPPD Tahun 2023 atas LPPD Tahun Anggaran 2022 memperoleh skor sebesar 2,9354 dengan status "sedang", berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2023.

Capaian EPPD pada tahun berjalan masih dalam proses, sedangkan nilai EPPD Tahun 2025 atas LPPD Tahun Anggaran 2024 hingga saat ini belum ditetapkan. Adapun realisasi nilai EPPD Tahun 2024 atas LPPD Tahun 2023 memperoleh skor sebesar 3,1324 dengan status "sedang", sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2025. Nilai tersebut merupakan realisasi sebesar 94,63 persen dari target yang ditetapkan sebesar 3,31.

Sementara itu, realisasi nilai EPPD Tahun 2023 atas LPPD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 2,9354 dengan status "sedang", berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Capaian tersebut setara dengan 89,77 persen dari target sebesar 3,27.

Berdasarkan perbandingan capaian tersebut, Indeks Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mengalami

peningkatan sebesar 4,86 persen, dari capaian tahun 2022 sebesar 89,77 persen menjadi 94,63 persen pada tahun 2023.

Adapun nilai EPPD Tahun 2022 atas LPPD Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tanggal 18 April 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, memperoleh skor sebesar 2,36 dengan status "rendah". Capaian tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 24,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai EPPD Tahun 2021 atas LPPD Tahun Anggaran 2020 serta nilai EPPD Tahun 2020 atas LPPD Tahun Anggaran 2019 tidak tersedia, seiring dengan adanya perubahan regulasi, sistem penilaian, serta kondisi pandemi COVID-19.

Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dalam rangka memperoleh Indeks Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sangat dipengaruhi oleh kinerja serta ketersediaan sumber daya organisasi atau perangkat daerah. Kinerja organisasi atau perangkat daerah merupakan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban, yang sekaligus menjadi indikator keberhasilan dan cerminan prestasi organisasi.

Sumber daya organisasi terdiri atas tiga komponen utama, yaitu sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran. Ketersediaan dan kualitas SDM, dukungan sarana dan prasarana, serta kecukupan anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dapat dilihat dari keterpaduan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan, khususnya dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Dari aspek anggaran, tingkat realisasi yang mencapai 99,29 persen dari total alokasi sebesar Rp212.848.400 menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif dan relatif tepat sasaran. Tingginya persentase realisasi tersebut mencerminkan minimnya pemborosan anggaran serta kemampuan perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara akuntabel untuk mendukung pelaksanaan EPPD. Selain itu, anggaran yang tersedia mampu menghasilkan output utama berupa tersusunnya LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, keterlibatan aparatur yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyusunan LPPD menunjukkan adanya pemanfaatan SDM yang cukup optimal. Koordinasi antarperangkat daerah dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan turut mendukung efisiensi waktu dan tenaga, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan kapasitas dan pemahaman teknis terhadap indikator EPPD di beberapa perangkat daerah.

Sementara itu, dukungan sarana dan prasarana, termasuk pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendukung pelaporan, berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses kerja. Penggunaan teknologi informasi membantu mempercepat proses pengolahan data, mengurangi potensi kesalahan administratif, serta meningkatkan ketepatan waktu penyampaian LPPD.

Terkait dengan aspek anggaran, pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) didukung melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Subkegiatan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintahan daerah, khususnya melalui penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai salah satu indikator capaian utama.

Pada Tahun Anggaran 2025, subkegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp212.848.400. Dari alokasi tersebut, realisasi

anggaran mencapai Rp211.327.452 atau sebesar 99,29 persen. Tingginya tingkat realisasi anggaran ini menunjukkan adanya dukungan pendanaan yang relatif optimal dalam pelaksanaan EPPD, sehingga proses penyusunan LPPD dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

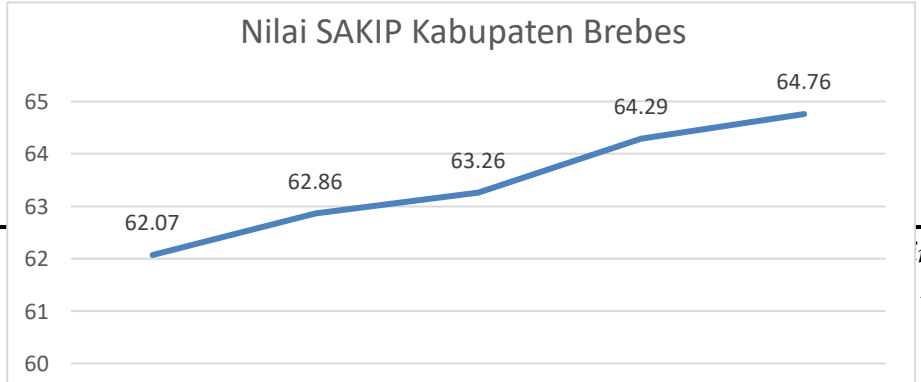
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP Kabupaten Brebes Tahun 2025 sebesar 64.76 masuk dalam kategori ”baik”.

Pada Tahun 2025, target SAKIP sebesar 64,5 dan realisasi mencapai 64,76. Dengan demikian, capaian melampaui target sebesar 0,26 poin atau 100,40% dari target. Hal ini menunjukkan penguatan dalam sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Dibandingkan dengan tahun 2023 maka terdapat peningkatan yang sebesar 1.03 poin. Rincian pada masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26. Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Kab. Brebes Tahun 2025

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2024	2025
a	Perencanaan Kinerja	30	21,73	21,73
b	Pengukuran Kinerja	30	21,87	21,97
c	Pelaporan Kinerja	15	8,86	8,92
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,83	12,14
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**64,29**	**64,76**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**



Gambar 3.11 Grafik Nilai SAKIP Kabupaten Brebes Tahun 2021 – 2024

Dibandingkan Tahun 2024 (64,29), realisasi Tahun 2025 meningkat menjadi 64,76 atau naik 0,47 poin. Dalam tren lima tahun terakhir, nilai SAKIP menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 62,07 (2021) menjadi 64,76 (2025). Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja, tren kinerja menunjukkan pola peningkatan yang konsisten, mencerminkan adanya perbaikan yang berkesinambungan dalam pelaksanaan SAKIP.

Target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 64,21. Realisasi Tahun 2025 sebesar 64,76 telah melampaui target jangka menengah sebesar 0,55 poin. Hal ini menunjukkan bahwa target perencanaan strategis telah tercapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

Rata-rata nilai SAKIP pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025 secara Nasional berada di angka 64.89. Dengan capaian 64.76, instansi ini berada sedikit di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan kinerja instansi yang kompetitif dan berada dalam kategori “B” Baik.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1) Terdapat ketidakselarasan kinerja pada perjanjian kinerja dan Indikator kinerja utama;
2) Perencanaan kinerja yang memuat tujuan dan sasaran strategis belum seluruhnya berorientasi hasil (*outcome*);
3) Pohon kinerja yang disusun belum mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

Dari permasalahan tersebut, Kabupaten Brebes berupaya untuk meningkatkan nilai AKIP dengan rencana aksi sebagai berikut:

1) Melakukan perubahan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan Sasaran pada RPD;
2) Mereviu kembali dokumen Perencanaan pada seluruh Perangkat Daerah;
3) Melakukan Reviu terhadap Laporan kinerja pada seluruh Perangkat Daerah;

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Melalui Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Pagu anggaran sebesar Rp. 107.934.130,- dan terealisasi Rp. 104.296.170,- atau 96,63% sehingga Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 3,76 % .

Indikator nilai SAKIP didukung oleh beberapa Program diantaranya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana dalam program tersebut berisi aktivitas seperti Penguatan koordinasi lintas unit organisasi untuk pencapaian kinerja, Monitoring dan evaluasi internal berkala untuk memastikan pelaksanaan program sesuai rencana, Bimbingan teknis terkait penyusunan dan evaluasi SAKIP.

16. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16*

Sasaran Strategis 16
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Optimalisasi Aset Secara Efisien Dan Produktif Serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 16 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 129,38% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Optimalisasi Aset Secara Efisien Dan Produktif Serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. Juta	618350	811520	864266	106,5	510430
2	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	21,08	19,9	30,3	152,26	14,55

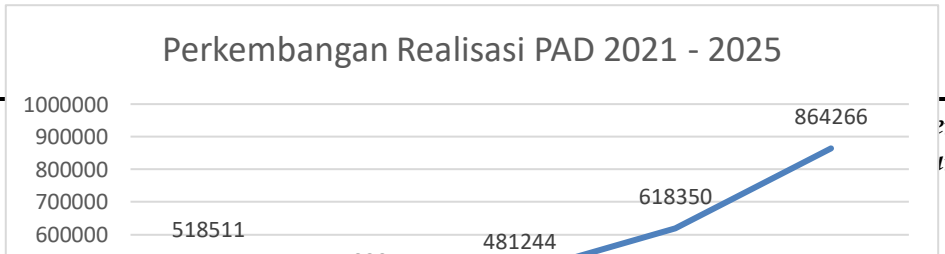
Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Optimalisasi Aset Secara Efisien Dan Produktif Serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan Daerah” terdiri dari 2 indikator diantaranya adalah:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Rumus Penghitungan Realisasi Indikator Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi\ PAD}{Target\ PAD}\ x\ 100\%$$

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{864.266}{811.520}\ x\ 100\% = 106{,}5\%$$



Gambar 3.12. Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2021 - 2025

Pada Tahun 2025, target PAD sebesar Rp 811,52 miliar dan realisasi mencapai Rp 864,27 miliar. Dengan demikian, realisasi melampaui target sebesar Rp 52,75 miliar atau 106,5% dari target. Hal ini menunjukkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah berjalan efektif, baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah.

Dibandingkan dengan Tahun 2024 (Rp 618,35 miliar), realisasi Tahun 2025 meningkat signifikan sebesar Rp 245,92 miliar. Jika dilihat dalam tren lima tahun terakhir, PAD sempat menurun pada 2022, kemudian meningkat pada 2023 dan 2024, serta mengalami lonjakan sangat signifikan pada 2025. Tren ini menunjukkan penguatan kapasitas fiskal daerah dan keberhasilan strategi intensifikasi serta ekstensifikasi pendapatan.

Target akhir RPD Tahun 2026 sebesar Rp 510,43 miliar. Realisasi Tahun 2025 sebesar Rp 864,27 miliar telah melampaui target akhir RPD sebesar Rp 353,84 miliar. Dengan demikian, target jangka menengah telah tercapai bahkan terlampaui sebelum periode perencanaan berakhir.

Keberhasilan capaian indikator dalam mencapai target Pajak dan Retribusi didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah serta faktor penyebab keberhasilan, antara lain:

1) Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2) Pemahaman masyarakat tentang peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semakin tinggi;
3) Persepsi terhadap kualitas pelayanan Daerah dan Retribusi Daerah semakin baik;
4) Kegiatan pelayanan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semakin dipermudah dengan adanya pembayaran secara Transaksi Non Tunai melalui *mobile banking* dan *E-Commerce;*
5) Penyesuaian target sesuai dengan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ada beberapa hambatan/kendala dalam proses pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2025, antara lain:

1) Banyak *space* baliho di tempat strategis dengan nilai pajak yang besar tidak terisi, dampak dari pengurangan belanja pemasangan reklame di perusahaan-perusahaan
2) Penggunaan *space* baliho yang terletak di tempat strategis dengan nilai pajak yang besar untuk kepentingan partai politik pada masa pemilihan umum yang menyebabkan reklame tersebut tidak dapat dipungut pajaknya.
3) Belum ada sanksi yang mengikat kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tindakan hukum bagi wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4) Tahun 2024 merupakan tahun politis yang menyebabkan para investor melakukan *wait* and *see* untuk berinvestasi
5) Ada penundaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari beberapa transaksi yang bernilai besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan beberapa upaya, seperti:

1) Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun 2023 dengan prosedur tertulis dan legal dalam perencanaan,

pemungutan, pencatatan, dan pengawasan PAD akan lebih terprogram dengan benar;

2) Memanfaatkan sumber daya yang ada di setiap kelurahan dan desa untuk memperbaharui data dan menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (pendataan ulang potensi Pajak Daerah);
3) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berwenang untuk membuka peluang kerja sama dengan lembaga pihak ketiga;
4) Menjalin koordinasi dengan Provinsi atau pemerintah daerah terkait kewajaran tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin besar kemampuan fiskal daerah dan semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap dana transfer. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi\ PAD}{Total\ Realisasi\ Pendapatan\ Transfer}\ x\ 100\%$$

Rumus ini menunjukkan rasio kemandirian, yaitu perbandingan antara kemampuan pendanaan yang bersumber dari PAD dengan dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan provinsi. Pada Tahun 2025, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ditargetkan sebesar 19,90%, dengan realisasi mencapai 30,30%, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini sebesar 152,26%. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{853.922.177.399{,}56}{2.818.436.817.876.00}\ x\ 100\ \% = 30{,}30\ \%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah pada Tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan, serta mencerminkan meningkatnya kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 21,08%, realisasi Tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan struktur pendapatan daerah, khususnya meningkatnya kontribusi PAD serta relatif menurunnya ketergantungan terhadap pendapatan transfer.

Realisasi Tahun 2025 sebesar 30,30% juga telah melampaui Target Akhir RPD Tahun 2026 sebesar 14,55%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah berjalan lebih cepat dari proyeksi perencanaan jangka menengah yang pada saat penyusunan RPD disusun dengan mempertimbangkan asumsi konservatif terhadap dinamika fiskal daerah dan ketergantungan terhadap dana transfer.

Angka realisasi indikator Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ini disusun berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 yang bersumber dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan masih bersifat *unaudited*, sehingga dapat mengalami penyesuaian setelah hasil pemeriksaan BPK ditetapkan secara resmi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh:

- meningkatnya realisasi PAD,
- optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah,
- perbaikan sistem pemungutan dan pengawasan pendapatan,
- serta pengendalian ketergantungan terhadap dana transfer.

Namun demikian, capaian yang tinggi perlu dijaga agar tidak bersifat temporer. Oleh karena itu, alternatif solusi yang terus dilakukan antara lain:

- penguatan basis data objek dan subjek pajak/retribusi,
- intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD,
- peningkatan koordinasi antar perangkat daerah pengelola pendapatan.

Efisiensi pencapaian indikator tujuan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dianalisis secara agregatif dan naratif dengan melihat keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian lima indikator sasaran pendukung. Analisis efisiensi tidak dinyatakan dalam satu nilai kuantitatif, melainkan melalui penilaian terhadap efektivitas proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah.

Ketercapaian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu, kesesuaian pelaporan penerbitan SP2D dengan SPD dan SPM, ketepatan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ketertiban tata kelola Barang Milik Daerah oleh OPD, serta tersajinya data keuangan daerah dalam SIPD menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran dapat dicapai tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa pencapaian tujuan kemandirian keuangan daerah telah dilaksanakan secara cukup efisien.

Pencapaian keberhasilan indikator Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pengendalian keuangan daerah. Program ini berperan strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17*

Sasaran Strategis 17
Meningkatnya Kapasitas Dan Kompetensi ASN

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 17 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 98,22% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.28. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dan Kompetensi ASN

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,49	80	79,34	99,18	85
2	Standar Kompetensi ASN	Skor	91,7	75	72,95	97,27	75

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Kapasitas Dan Kompetensi ASN” terdiri dari 2 indikator diantaranya adalah:

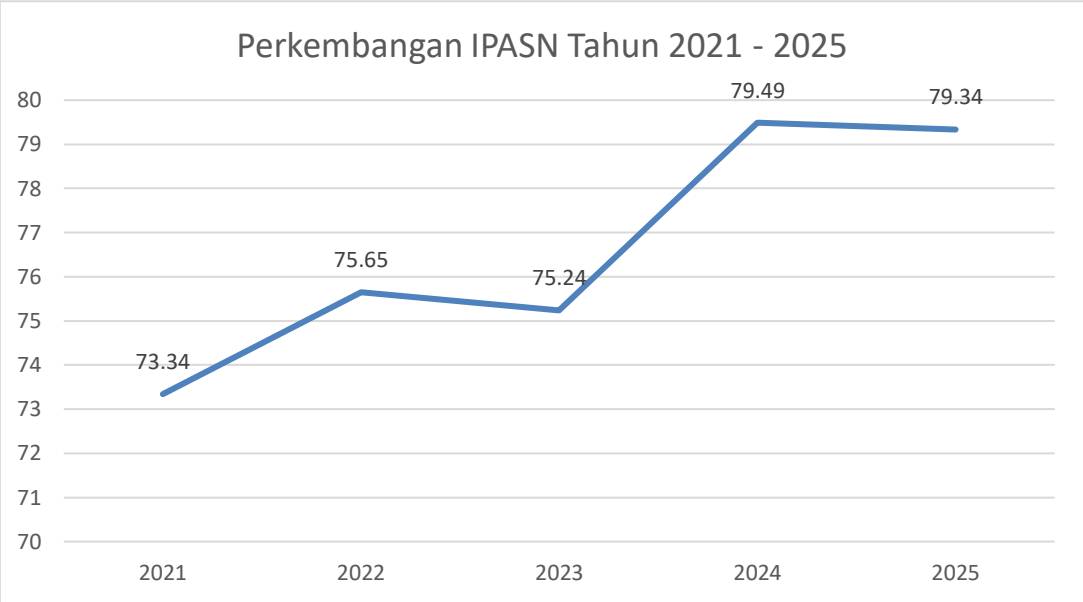
a. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

IPASN diperoleh dari penjumlahan indeks 4 komponen, yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Adapun untuk capaian indeks komponen tersebut sebagaimana tercantum di dalam tabel. *Range* nilai IPASN adalah 1–100, dibagi menjadi 5 kategori, yaitu:

- 91–100: sangat tinggi
- 81–90: tinggi
- 71–80: sedang
- 61–70: rendah
- <60: sangat rendah

IPASN Kabupaten Brebes memperoleh nilai 79,34 sehingga termasuk kategori “Sedang”. Berikut adalah grafik perkembangan IPASN dari tahun 2021 – 2025:



Gambar 3.13. Grafik Perkembangan IPASN Tahun 2021 - 2025

Pada Tahun 2025, target Indeks Profesionalitas ASN ditetapkan sebesar 80, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 79,34 atau 99,18% dari target. Dengan demikian, capaian kinerja tahun ini belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan selisih sebesar 0,66 poin. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada pada kategori baik dan mendekati target yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencapai 79,49, realisasi Tahun 2025 sebesar 79,34 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,15 poin. Penurunan ini relatif kecil dan menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN masih stabil, meskipun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen RPD Tahun 2026 sebesar 85, maka realisasi Tahun 2025 masih berada di bawah target tersebut dengan selisih 5,66 poin. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya percepatan peningkatan kualitas manajemen ASN serta perlunya akselerasi kebijakan pengembangan kompetensi dan penguatan sistem merit agar target akhir periode perencanaan dapat tercapai.

Apabila dibandingkan dengan capaian regional Jawa Tengah–DIY sebesar 80,61, realisasi Tahun 2025 yang sebesar 79,34 masih berada di bawah rata-rata regional dengan selisih 1,27 poin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya saing profesionalitas ASN daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu melampaui capaian rata-rata regional.

Penurunan tipis capaian pada Tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya pemenuhan standar kompetensi jabatan, keterbatasan akses dan pemerataan pengembangan kompetensi ASN, serta masih adanya ASN yang belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi dan persyaratan jabatan. Alternatif solusi yang telah dan perlu dilakukan meliputi peningkatan perencanaan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan, optimalisasi manajemen talenta, percepatan pemenuhan kualifikasi pendidikan dan pelatihan, serta penguatan monitoring evaluasi kinerja ASN berbasis sistem digital.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian IPASN antara lain dengan mendorong ASN secara berkelanjutan melakukan pemutakhiran dan validasi data kepegawaian melalui aplikasi MyASN, disertai peningkatan pengawasan dan pendampingan teknis. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah serta sosialisasi terkait pentingnya kelengkapan data ASN, agar capaian IPASN tetap terjaga dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

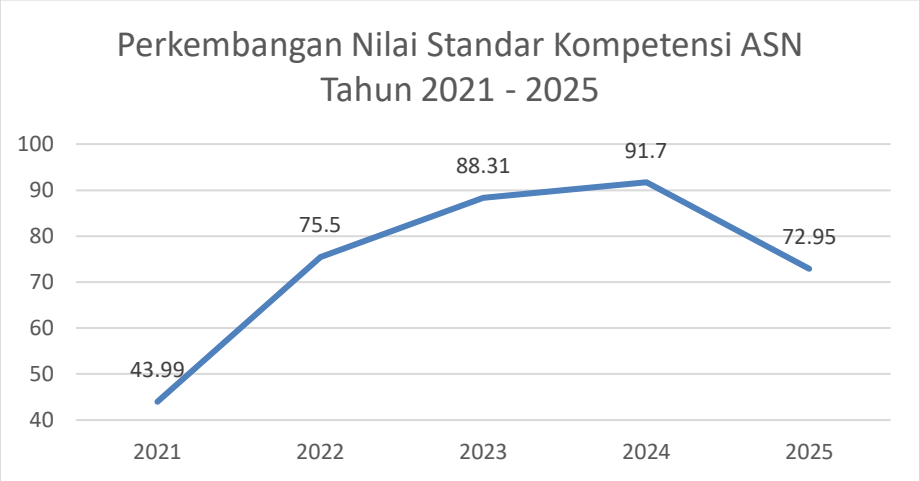
Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja IPASN sebesar Rp. 5.650.452.446,- dan terealisasi Rp. 5.346.816.764,- atau 94,63% dengan capaian kinerja sebesar 99,18%, maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 4,59% .

IPASN ditunjang dari 2 program yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program ini, secara akumulasi didukung dari 6 kegiatan yang sangat menunjang penilaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Disamping

itu, keberhasilan capaian ini juga ditunjang karena meningkatnya kesadaran dari ASN untuk memperbarui kualifikasi dan kompetensinya serta kemauan dalam kinerja dan kedisiplinan

b. Standar Kompetensi ASN

Indikator *Standar Kompetensi ASN* merupakan ukuran tingkat kesesuaian kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Nilai indikator ini diperoleh melalui pengukuran skor rata-rata kesesuaian kompetensi ASN yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, dibandingkan dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan skor hasil asesmen kompetensi ASN yang memenuhi standar, kemudian dirata-ratakan dalam bentuk skor komposit. Indikator ini mendukung sasaran peningkatan kualitas manajemen ASN berbasis sistem merit. Penilaian Standar Kompetensi ASN berdasarkan data peningkatan kompetensi yang diunggah melalui akun myASN masing-masing ASN. Standar kompetensi ASN diperoleh dengan rata-rata hasil penjumlahan indeks kompetensi PNS dan PPPK. Untuk capaian indeks kompetensi PNS sebesar 72,65 sedangkan PPPK sebesar 73,25 sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 72,95. Berikut adalah grafik perkembangan nilai Standar Kompetensi ASN dari tahun 2021 – 2025:



Gambar 3.14. Grafik Perkembangan Nilai Standar Kompetensi ASN Tahun 2021 - 2025

Pada Tahun 2025, target Standar Kompetensi ASN ditetapkan sebesar 75, sedangkan realisasi mencapai 72,95 atau 97,27% dari target. Dengan demikian, capaian kinerja tahun ini belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, dengan selisih sebesar 2,05 poin. Meskipun belum mencapai target, persentase capaian menunjukkan bahwa kinerja masih berada pada kategori cukup baik.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi penurunan signifikan. Pada Tahun 2023, realisasi mencapai 88,31 dan meningkat pada Tahun 2024 menjadi 91,7. Namun pada Tahun 2025, realisasi menurun menjadi 72,95. Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan metode pengukuran, penyesuaian standar, atau meningkatnya cakupan ASN yang dinilai sehingga mempengaruhi rata-rata skor. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus agar tren penurunan tidak berlanjut pada tahun berikutnya.

Dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPD Tahun 2026 sebesar 75, realisasi Tahun 2025 masih berada di bawah target akhir dengan selisih 2,05 poin. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan program peningkatan kompetensi agar pada akhir periode perencanaan nilai indikator dapat mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk perbandingan dengan standar nasional maupun regional, saat ini tidak tersedia data pembanding yang dapat digunakan sebagai referensi. Oleh karena itu, analisis kinerja difokuskan pada perbandingan internal antar tahun dan terhadap target perencanaan.

Penurunan capaian Tahun 2025 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum meratanya pelaksanaan pengembangan kompetensi, keterbatasan anggaran pelatihan, perubahan regulasi standar kompetensi jabatan, serta adanya ASN yang belum mengikuti atau lulus uji kompetensi sesuai ketentuan. Alternatif solusi yang telah dan perlu dilakukan meliputi penyusunan rencana pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan *(training need analysis*), peningkatan akses pelatihan baik klasikal maupun non-klasikal, optimalisasi pemanfaatan platform pembelajaran

daring, serta penguatan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar kompetensi secara berkala.

Upaya yang telah dan terus dilakukan antara lain mendorong ASN secara berkala untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, baik melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, maupun pembelajaran mandiri, serta melakukan pemutakhiran dan validasi data kompetensi pada aplikasi MyASN. Selain itu, dilakukan penguatan sosialisasi, monitoring, dan pendampingan teknis kepada perangkat daerah agar capaian Standar Kompetensi ASN dapat ditingkatkan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja IPASN sebesar Rp. 1.444.340.800,- dan terealisasi Rp. 1.376.385.936,- atau 95,30%, dengan capaian kinerja sebesar 97,27% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 2,03%.

Keberhasilan dalam capaian indikator kinerja didukung oleh Program-Kegiatan-Sub Kegiatan yang terdistribusi ke masing-masing pelaksana. Ada 2 kegiatan yang menunjang, yaitu Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

18. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18*

Sasaran Strategis 18
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban) Yang Baik (Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 18 dengan 3 indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban) Yang Baik (Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Hasil Survei Penilaian Integritas (Indeks Integritas)	Indeks	72,45	74	74,4	100,54	-
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,017	3,50	2,825	80,71	3.6
3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Opini	WTP	WTP	*Dalam proses*	-	WTP

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban) Yang Baik (Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif)” terdiri dari 3 indikator diantaranya adalah:

a. Hasil Survei Penilaian Integritas (Indeks Integritas)

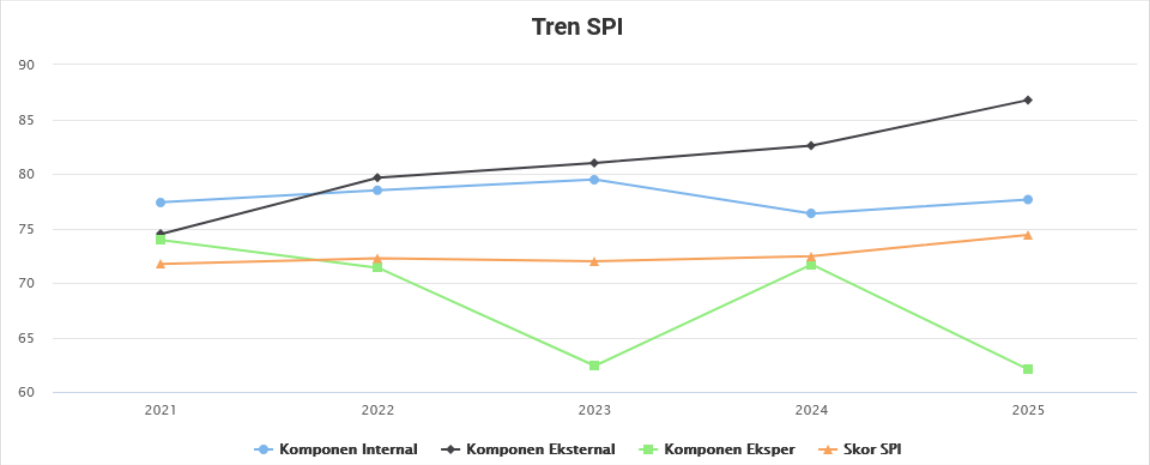
Realisasi Indikator Sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh berdasarkan hasil dari kuesioner yang diberikan oleh KPK kepada responden terpilih yang terbagi atas Responden Internal, Responden Eksternal (Pengguna layanan) dan Responden Eksper.

Indikator sasaran Survei Penilaian Integritas (SPI) digunakan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat integritas serta efektivitas upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai SPI pada tahun 2022 tercatat sebesar 76,36. Pada tahun 2023, nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 73, dan kembali menurun pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 72,45.

Pada tahun 2025, target nilai SPI ditetapkan sebesar 93 sebagai bentuk komitmen peningkatan integritas dan penguatan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan, realisasi nilai SPI yang dicapai sebesar 74,40. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa nilai SPI belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun tetap berada pada tingkat yang mencerminkan kondisi integritas yang relatif terjaga.

Dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 72,32, realisasi Tahun 2025 sebesar 74,4 berada di atas rata-rata nasional dengan selisih 2,08 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat integritas organisasi lebih baik dibandingkan rata-rata nasional dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance.*



Gambar 3.15. Grafik Tren SPI Tahun 2021-2025

Pada Komponen Internal, yang menggambarkan persepsi dan pengalaman pegawai terhadap penerapan nilai integritas, sistem pengendalian, serta budaya kerja di lingkungan organisasi, diperoleh skor sebesar 77,63. Nilai tersebut menunjukkan bahwa upaya internalisasi integritas dan penguatan tata kelola telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam aspek konsistensi penerapan dan pengawasan internal.

Pada Komponen Eksternal, yang mencerminkan penilaian dari pihak eksternal atau pengguna layanan terhadap integritas dan kualitas layanan yang diberikan, diperoleh skor sebesar 86,77. Capaian ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan persepsi positif dari pemangku kepentingan eksternal terhadap komitmen integritas serta

transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan. Hasil tersebut sekaligus menjadi indikasi bahwa interaksi dan layanan kepada pihak eksternal telah dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas yang baik.

Sementara itu, pada Komponen Eksper, yang menilai aspek kebijakan, sistem, serta efektivitas upaya pencegahan korupsi berdasarkan penilaian para ahli, diperoleh skor sebesar 62,04. Nilai ini menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut terhadap perumusan kebijakan, mitigasi risiko, serta efektivitas implementasi sistem pencegahan korupsi. Hasil penilaian komponen ini menjadi masukan strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes untuk menyusun langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan integritas organisasi secara menyeluruh.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, capaian kinerja indikator sasaran Survei Penilaian Integritas pada tahun 2025 sebesar 80 persen dan termasuk dalam kategori Baik. Capaian ini menjadi dasar bagi Inspektorat untuk terus melakukan penguatan upaya pencegahan korupsi serta peningkatan integritas secara berkelanjutan pada periode berikutnya. Sehingga untuk tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes berkomitmen untuk meningkatkan realisasi dengan membuat PIC khusus SPI di tiap OPD Kabupaten Brebes dan juga melakukan Rencana Aksi atas dasar rekomendasi yang ada dari KPK RI.

Pada indikator Survei Penilaian Integritas (SPI), capaian kinerja sebesar 80% dengan capaian anggaran 92,18% menghasilkan tingkat efisiensi sebesar -15,22%. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya hubungan antara penggunaan anggaran dan hasil kinerja yang dicapai. Kegagalan efisiensi pada indikator ini antara lain disebabkan oleh masih adanya keterbatasan pemahaman dan internalisasi nilai integritas di lingkungan perangkat daerah, efektivitas program pencegahan yang belum merata, serta perlunya waktu yang lebih panjang agar intervensi kebijakan dapat berdampak signifikan terhadap hasil survei. Selain itu, faktor eksternal dan

persepsi responden juga berpengaruh terhadap hasil SPI yang belum sesuai dengan target.

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Brebes tahun 2025 didukung oleh program dan kegiatan berikut:

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

   Program penyelenggaraan pengawasan adalah program yang berisi rencana kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Program ini dapat berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Tujuan program ini adalah: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan; Menjamin pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan; Menjamin pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan. Dalam Program ini terdapat kegiatan yang menunjang terciptanya keberhasilan sasaran yakni Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang merupakan kegiatan dasar inspektorat untuk melakukan pengawasan dalam audit kinerja (3E), operasional dan keuangan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

   Dalam Program ini terdapat beberapa kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Brebes, yakni:

   a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

      Pada kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan program kerja yang menunjang kegiatan pengawasan yang disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan merupakan *core* dari kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes.

   b) Pendampingan dan Asistensi

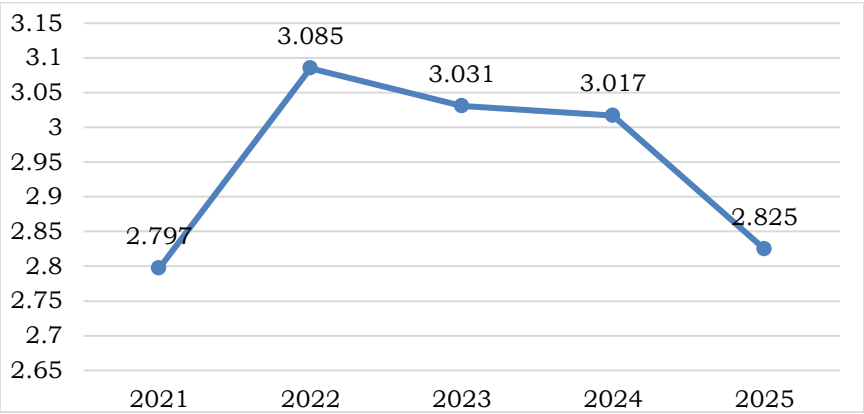
      Kegiatan Pendampingan dan Asistensi merupakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan *Monitoring Center of*

Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Dua hal tersebut merupakan *tools* untuk memantau apakah kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah telah berhasil melakukan tugasnya dalam hal pencegahan korupsi.

b. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan hasil evaluasi BPKP RI kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Capaian indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2025 mencapai skor 2.825 dari target sebesar 3.5 atau dengan tingkat capaian sebesar 80,71%. Terjadi penurunan skor maturitas penyelenggaraan SPIP di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, hal ini disebabkan oleh faktor struktural dan teknis. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu penilaian yang lebih ketat dan standar evaluasi yang berubah. Dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah hanya ada Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, dan Kabupaten Purbalingga yang mendapatkan Skor SPIP di level 3.



Gambar 3.16. Grafik Perkembangan SPIP Tahun 2021 - 2025

Perkembangan nilai SPIP Kabupaten Brebes tahun 2021–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif, dimulai dari 2,797 pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 3,085 pada tahun 2022 sebagai hasil penguatan penerapan pengendalian intern dan komitmen tata kelola. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 nilai SPIP mengalami penurunan bertahap menjadi 3,031 dan 3,017, yang mengindikasikan belum konsistennya keberlanjutan implementasi SPIP, khususnya pada aspek manajemen risiko dan tindak lanjut hasil evaluasi. Penurunan yang lebih nyata terjadi pada tahun 2025 dengan nilai 2,825, mencerminkan adanya tantangan dalam pemenuhan standar penilaian yang semakin ketat serta perlunya penguatan kembali peran pimpinan, kapasitas SDM, dan efektivitas pengendalian intern di seluruh perangkat daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 934.584.605,- dan terealisasi Rp. 916.259.417,- atau 98,04%, dengan capaian kinerja sebesar 80,71% maka Indikator ini tidak ada efisiensi dalam sumber daya anggaran.

c. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Capaian indikator Opini BPK diperoleh dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dinyatakan dalam bentuk opini. Mengingat indikator ini bersifat kualitatif, penilaian capaian kinerja dilakukan dengan pendekatan tercapai atau tidak tercapai, berdasarkan kesesuaian antara opini yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan..

Indikator Opini BPK mendukung sasaran strategis peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Angka realisasi indikator Opini BPK Tahun 2025 bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025

dan Dokumen resmi penyerahan LHP BPK kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan DPRD.

Hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes TA. 2025 akan diumumkan pada semester pertama tahun berikutnya, tepatnya paling lambat Juni 2026.

Selama periode 2019–2024, target indikator Opini BPK ditetapkan sebesar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan realisasi menunjukkan perolehan opini WTP secara berturut-turut setiap tahun. Dengan demikian, capaian indikator pada periode tersebut dinilai 100 persen, yang mencerminkan konsistensi dan keberlanjutan kualitas pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah. Konsistensi capaian tersebut menjadi dasar optimisme bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga pada Tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan kesinambungan dalam penerapan sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Secara kumulatif, realisasi kinerja hingga tahun berjalan telah selaras dengan target dalam Rencana Strategis (Renstra) dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara berkelanjutan.

Selain itu, capaian indikator Opini BPK Kabupaten Brebes telah sejalan dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sehingga kinerja indikator ini dinilai telah memenuhi standar nasional. Keberhasilan mempertahankan opini WTP didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Penguatan sistem pengendalian intern pada pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui pengendalian penatausahaan, pelaporan, dan rekonsiliasi keuangan;
- Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara konsisten dan terpantau, dengan peran aktif BPKAD dalam

fasilitasi, monitoring, dan evaluasi tindak lanjut perangkat daerah;

- Penguatan koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah, terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung.

Apabila masih terdapat catatan pemeriksaan, upaya perbaikan yang telah dan terus dilakukan oleh BPKAD meliputi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK melalui monitoring berkala, penetapan target waktu penyelesaian, serta fasilitasi dan pendampingan kepada perangkat daerah terkait pemenuhan dokumen dan koreksi administrasi.

Selain itu, dilakukan peningkatan pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penatausahaan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan, agar pelaksanaan pengelolaan keuangan semakin tertib dan sesuai ketentuan.

Efisiensi pencapaian indikator opini BPK dapat dilihat dari ketercapaian indikator sasaran pendukung, yaitu ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan, ketertiban penatausahaan keuangan SKPD, ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ketertiban pengelolaan keuangan daerah, serta ketertiban pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Ketercapaian indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilaksanakan secara efisien dan sesuai ketentuan, sehingga menjadi dasar pendukung bagi pencapaian opini BPK yang optimal setelah hasil pemeriksaan ditetapkan.

Pencapaian kinerja indikator Opini BPK didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berfokus pada ketertiban perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan dan penatausahaan aset daerah pada SKPD. Pelaksanaan kedua program tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilaksanakan secara efisien dan sesuai

ketentuan, sehingga menjadi dasar pendukung bagi pencapaian opini BPK yang optimal setelah hasil pemeriksaan ditetapkan secara resmi.

19. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19*

Sasaran Strategis 19
Meningkatnya Peran Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bagian Dalam Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Daerah Serta Solusi Atas Permasalahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 19 dengan 2 indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.30. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bagian Dalam Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Daerah Serta Solusi Atas Permasalahan Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	59,33	52	69,1	132,88	41.52
2	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,49	3,14	*Dalam proses*	-	3.18

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Peran Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bagian Dalam Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Daerah Serta Solusi Atas Permasalahan” terdiri dari 2 indikator diantaranya adalah:

a. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menilai pelaksanaan inovasi daerah. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah” dan “Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau

insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi".

Penilaian dan pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) hanya mengirimkan data dukung masing-masing indikator pada saat periode pengiriman. Indikator yang diukur dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31. Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

No	Aspek Satuan Pemerintahan Daerah	No	Aspek Satuan Inovasi Daerah
1	Visi dan Misi	16	Regulasi inovasi daerah
2	Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)	17	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah
3	APBD tepat waktu	18	Dukungan anggaran
4	Persentase peningkatan perizinan	19	Bimtek inovasi
5	Jumlah pendapatan per kapita	20	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD
6	Penurunan tingkat pengangguran terbuka	21	Keterlibatan aktor inovasi
7	Jumlah peningkatan investasi	22	Pelaksana inovasi daerah
8	Jumlah peningkatan PAD	23	Jejaring inovasi
9	Opini BPK	24	Sosialisasi inovasi daerah
10	Nilai capaian Lakip	25	Pedoman teknis
11	Penurunan angka kemiskinan	26	Kemudahan informasi layanan
12	Nilai IPM	27	Kecepatan penciptaan inovasi
13	Penghargaan bagi inovator	28	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan
14	Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi	29	Penyelesaian layanan pengaduan
15	Roadmap SIDa	30	Online sistem
		31	Replikasi
		32	Penggunaan IT
		33	Kemanfaatan Inovasi
		34	Monitoring dan evaluasi inovasi daerah
		35	Jumlah inovasi daerah

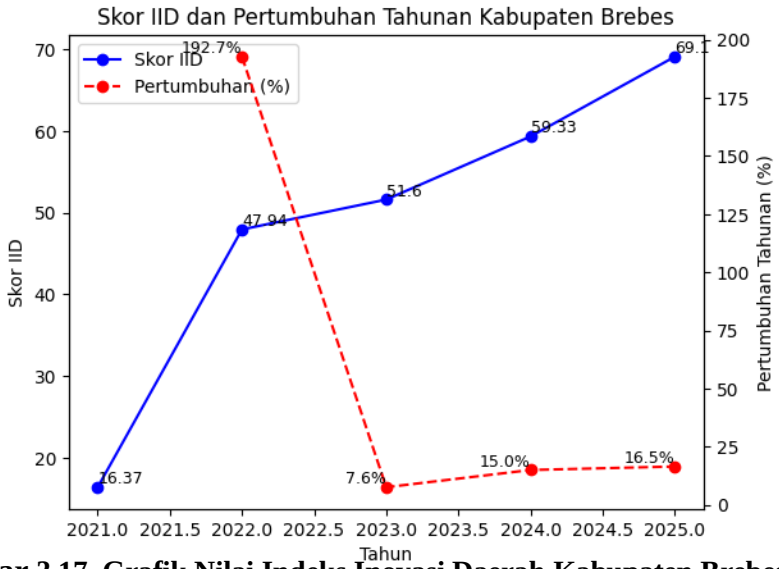
Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.10/3146/SJ tanggal 18 Juni 2025 perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2025, penilaian indeks Inovasi Daerah diperoleh dari pengukuran aspek satuan pemerintah daerah (25,20%), dan aspek satuan inovasi daerah (74,80%). Untuk skor dan kategori Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sangat Inovatif 60,01-100,00

Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang Inovatif	0,01 – 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Angka realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes diperoleh dari hasil penilaian resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui mekanisme Innovative Government Award (IGA). Penilaian IID dilakukan berdasarkan pengisian dan verifikasi data dukung inovasi daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui website BSKDN Kemendagri sesuai periode pengumpulan data yang ditetapkan.

Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes berperan sebagai koordinator pengelolaan dan pengiriman data inovasi daerah, meliputi fasilitasi pengisian, pendampingan perangkat daerah, verifikasi kelengkapan dan kualitas data dukung, serta sinkronisasi laporan inovasi daerah sebelum dilakukan penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri. Nilai skor dan peringkat IID yang digunakan dalam laporan kinerja ini merupakan hasil resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes dari Tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam grafik berikut:



Gambar 3.17. Grafik Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021-2025

Realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2025 sebesar 69,10 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 52,00,

dengan tingkat capaian 132,88%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja inovasi daerah berada jauh di atas target yang direncanakan. Kondisi tersebut mencerminkan semakin efektifnya pengelolaan inovasi daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes, khususnya melalui penguatan sistem pendampingan, verifikasi, dan pengendalian mutu data inovasi.

Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes menunjukkan pola transformasi bertahap yang jelas. Lonjakan sangat besar pada periode 2021–2022 (192,7%) mencerminkan fase aktivasi sistem inovasi daerah, yaitu peralihan dari kondisi hampir tanpa inovasi menjadi sistem yang mulai berjalan.

Setelah fase aktivasi tersebut, periode 2023–2025 menunjukkan pola pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan (7,6% → 15,0% → 16,5%), yang menandakan bahwa inovasi di Kabupaten Brebes telah bergerak dari sekadar kuantitas menuju kualitas, keberlanjutan, dan replikasi.

Pola ini menunjukkan bahwa pengelolaan inovasi daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes tidak hanya berhasil memicu lonjakan awal, tetapi juga berhasil menjaga momentum pertumbuhan inovasi hingga Kabupaten Brebes mencapai kategori Sangat Inovatif pada tahun 2025.

Realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2025 menunjukkan bahwa daerah telah memasuki kategori Sangat Inovatif dengan skor 69,10. Capaian ini menjadi kondisi awal (baseline) bagi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Brebes Nomor 51 Tahun 2025.

Dengan posisi awal yang sudah berada pada kategori sangat inovatif, maka pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes 2025–2029 diarahkan bukan lagi pada upaya keluar dari ketertinggalan inovasi, melainkan pada

penguatan kualitas, keberlanjutan, dan dampak inovasi terhadap pembangunan daerah sesuai dengan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes sebagai koordinator riset dan inovasi daerah.

Tabel 3.32. Posisi Kabupaten Brebes dalam Indeks Inovasi Daerah

Tahun	Score	Kategori	Peringkat Kabupaten/Kota di Jateng	Peringkat Kabupaten di Nasional
2021	16,37	Kurang Inovatif	35/35	306
2022	47,94	Inovatif	30/35	169
2023	51,60	Inovatif	25/35	104
2024	59,33	Inovatif	18/35	77
2025	69,10	Sangat Inovatif	16/35	54

Secara nasional, klasifikasi Kementerian Dalam Negeri menetapkan bahwa daerah dengan skor Indeks Inovasi Daerah di atas 60 masuk dalam kategori Sangat Inovatif. Dengan capaian skor 69,10 pada tahun 2025, Kabupaten Brebes telah melampaui standar nasional tersebut dan resmi berada pada kategori Sangat Inovatif.

Secara regional, posisi Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peringkat Kabupaten Brebes meningkat dari peringkat 29 dari 29 kabupaten pada tahun 2021 menjadi peringkat 13 dari 29 kabupaten pada tahun 2025, serta dari peringkat 35 dari 35 kabupaten/kota menjadi peringkat 16 dari 35 kabupaten/kota. Di tingkat nasional, peringkat Brebes juga meningkat tajam dari 306 pada tahun 2021 menjadi 54 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja inovasi Kabupaten Brebes telah berkembang lebih cepat dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia.

Tabel 3.33. Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes dan Perkembangan Jumlah Inovasi yang Dikirim dalam Penilaian IID

Tahun	Score	Kategori	Jumlah Inovasi Yang dikirim di IID
2021	16,37	Kurang Inovatif	1
2022	47,94	Inovatif	20
2023	51,60	Inovatif	56
2024	59,33	Inovatif	48
2025	69,10	Sangat Inovatif	85

Peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pengelolaan inovasi daerah telah berjalan secara semakin efektif dan terstruktur. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah inovasi yang dikirimkan dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah, dari hanya 1 inovasi pada tahun 2021 menjadi 85 inovasi pada tahun 2025 dengan tingkat kematangan inovasi yang juga meningkat. Seiring dengan itu, skor IID meningkat signifikan dari 16,37 (kategori Kurang Inovatif) menjadi 69,10 (kategori Sangat Inovatif), disertai dengan perbaikan peringkat baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes sebagai koordinator pengembangan riset dan inovasi daerah, yang melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendampingan, verifikasi, dan pengendalian mutu data dukung inovasi secara berkelanjutan. Melalui mekanisme tersebut, inovasi yang dihasilkan tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga semakin memenuhi aspek keberlanjutan, kemanfaatan, dan potensi replikasi.

Sebagai alternatif solusi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja, telah dilakukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan inovasi, serta pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pencatatan, verifikasi, dan pelaporan inovasi daerah secara lebih akurat dan efisien.

Peningkatan capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes dicapai melalui optimalisasi sumber daya yang telah ada, terutama dalam hal pemanfaatan aparatur, sistem kerja, dan mekanisme pengelolaan data inovasi yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes. Upaya peningkatan kinerja tidak bertumpu pada penambahan anggaran atau struktur baru, melainkan pada peningkatan efektivitas koordinasi, pendampingan, serta

pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data inovasi daerah.

Pendekatan ini memungkinkan proses pengumpulan data dukung, validasi inovasi, serta pelaporan kinerja dilakukan secara lebih terintegrasi dan efisien, sehingga setiap sumber daya yang digunakan memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi daerah. Dengan demikian, peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah dapat dicapai melalui penggunaan sumber daya yang lebih produktif dan tepat sasaran.

Keberhasilan peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes selaku pengampu urusan litbang dan inovasi daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan sosialisasi, pendampingan, verifikasi dan evaluasi inovasi, serta pemberian apresiasi kepada inovator dan perangkat daerah.

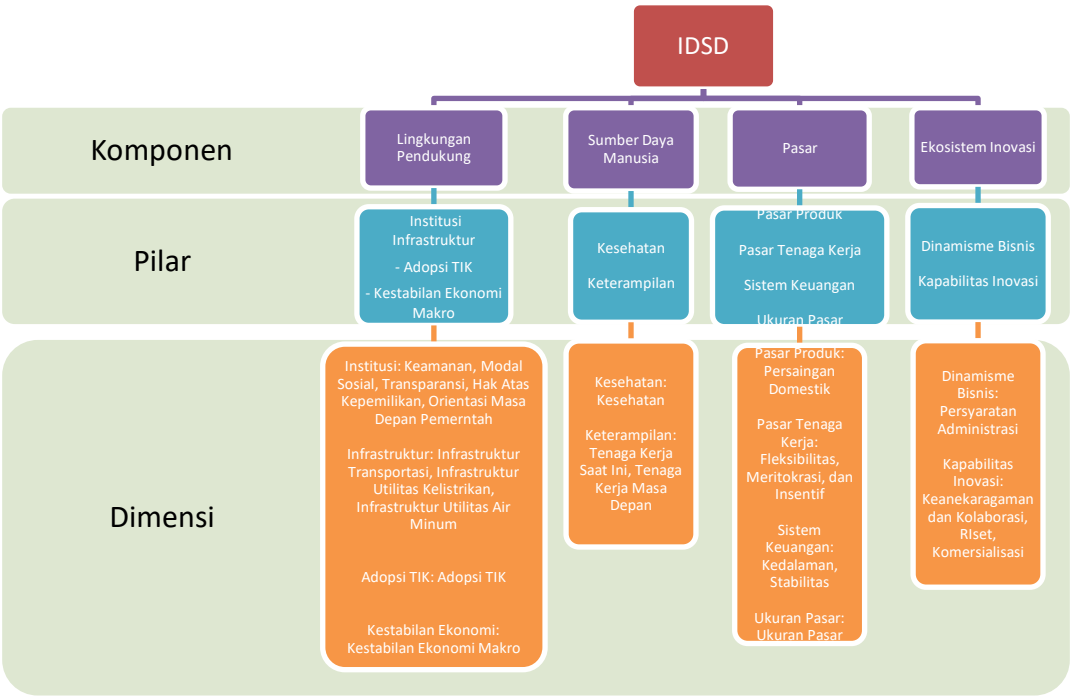
Melalui pola pendampingan yang sistematis dan terintegrasi yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes, perangkat daerah dan masyarakat semakin terdorong untuk menghasilkan inovasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah, kualitas, dan keberlanjutan inovasi daerah yang dinilai dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan skor Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun.

b. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, yang bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Konsep dan metode pengukuran IDSD mengadopsi kerangka *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia.

Pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Empat komponen tersebut terdiri dari 12 pilar daya saing dan dirinci lagi dalam beberapa dimensi. Secara rinci, komponen pembentuk IDSD adalah sebagai berikut:



Gambar 3.18. Komponen pembentukan IDSD

Pengukuran IDSD dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai kementerian dan lembaga. Mengacu pada Rumus perhitungan IDSD adalah sebagai berikut:

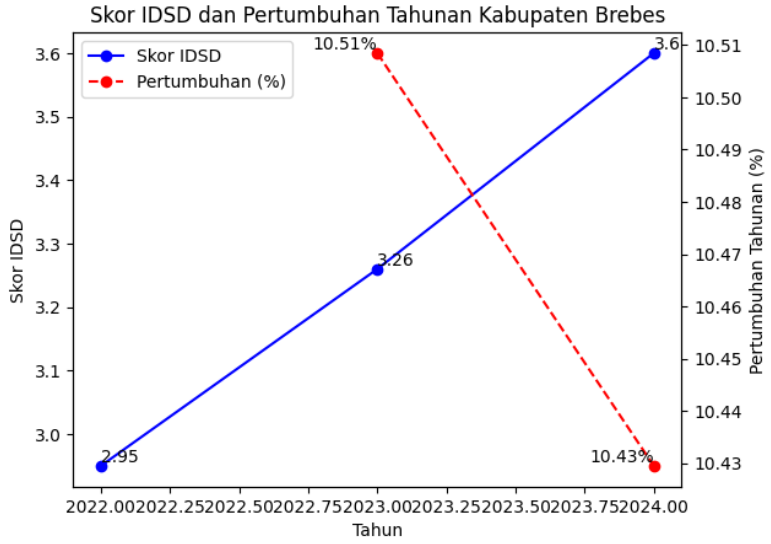
$$Skor_{i,d} = (N_{i,d} - NR_i / NT_i - NR_i) \times 5, \text{ dimana:}$$

$Skor_{i,d}$ adalah skor kemajuan daerah ke-d untuk indikator ke-I; $N_{i,d}$ adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d; NR_i adalah nilai terendah untuk indikator ke-I; dan NT_i adalah nilai terbaik untuk

indikator ke-I, hal ini terantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95) .

Angka realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Brebes diperoleh dari hasil pengukuran resmi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dipublikasikan setiap tahun melalui dokumen Indeks Daya Saing Daerah. Pengukuran IDSD menggunakan data sekunder dari berbagai kementerian, lembaga, dan sumber statistik nasional, yang diolah dengan metode yang mengacu pada kerangka Global Competitiveness Index (GCI) yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes menggunakan hasil pengukuran IDSD yang dirilis oleh BRIN sebagai dasar analisis, pemantauan, dan evaluasi daya saing daerah dalam penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tahun 2025 BRIN belum merilis angka capaian IDSD sehingga berikut ini masih menggunakan data terahir yaitu tahun 2024.



Gambar 3.19. Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Brebes 2021-2024

Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Brebes menunjukkan pola penguatan struktural yang konsisten. Peningkatan sebesar lebih dari 10% per tahun selama dua tahun berturut-turut menandakan bahwa daya saing daerah tidak meningkat secara sporadis, tetapi

melalui perbaikan sistemik pada berbagai pilar, seperti institusi, infrastruktur, pasar, dan ekosistem inovasi.

Konsistensi pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kebijakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang disinergikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes telah mampu mendorong perbaikan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Secara nasional, skor rata-rata Indeks Daya Saing Daerah Indonesia pada tahun 2024 adalah 3,43, sedangkan Kabupaten Brebes mencapai skor 3,60. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing Kabupaten Brebes telah berada di atas rata-rata nasional.

Dibandingkan dengan tingkat regional, skor Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 adalah 3,84, yang masih berada di atas skor Kabupaten Brebes. Namun demikian, selisih tersebut relatif tidak besar, sehingga menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes telah berada pada kelompok daerah dengan tingkat daya saing yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Posisi ini memperlihatkan bahwa kinerja pembangunan, tata kelola, dan inovasi daerah di Kabupaten Brebes telah mampu mendekati standar daya saing provinsi.

Peningkatan nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2024 bersifat struktural dan lintas pilar. Berdasarkan perbandingan nilai 12 pilar tahun 2023 dan 2024, 10 dari 12 pilar mengalami peningkatan, terutama pada pilar infrastruktur, pasar produk, kapabilitas inovasi, institusi, dan ukuran pasar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan daya saing Kabupaten Brebes tidak hanya terjadi pada satu sektor, tetapi mencerminkan penguatan ekosistem pembangunan secara menyeluruh.

Perbaikan tersebut tidak terlepas dari penguatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang disinergikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes, serta penerapan inovasi dan perbaikan tata kelola di berbagai perangkat daerah. Sebagai alternatif solusi untuk menjaga keberlanjutan kinerja dan mengatasi pilar yang masih lemah, khususnya sistem keuangan dan keterampilan, telah

dilakukan penguatan sinergi lintas perangkat daerah, peningkatan pemanfaatan data dan teknologi informasi, serta fasilitasi inovasi yang mendukung efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah.

Peningkatan nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Brebes juga menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini karena perbaikan daya saing tidak hanya berasal dari penambahan input, tetapi terutama dari peningkatan kualitas tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang disinergikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes.

Sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang dikoordinasikan melalui proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes memungkinkan berbagai program pembangunan dapat saling memperkuat tanpa terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran. Dengan demikian, peningkatan kinerja daya saing daerah dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Keberhasilan peningkatan nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Brebes tidak terlepas dari upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan di daerah, baik pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, maupun masyarakat, yang disinergikan melalui proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes. Penerapan inovasi dan perbaikan tata kelola di berbagai perangkat daerah telah mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, adopsi teknologi informasi, serta penguatan iklim usaha dan investasi yang direncanakan dan dimonitor secara terpadu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes telah berkontribusi terhadap perbaikan berbagai pilar

penyusun daya saing daerah. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya produktivitas, kepercayaan publik, dan daya tarik daerah, yang pada akhirnya tercermin dalam kenaikan nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Brebes.

20. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20*

Sasaran Strategis 20
Tersedianya Satu Data Informasi Daerah Yang Valid, Lengkap Dan Terbaru Untuk Acuan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 20 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.34. Capaian Indikator sasaran Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	%	100	100	100	100	100

Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah, didefinisikan sebagai penyebarluasan dan penggunaan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah maupun dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik membuat buku Brebes Dalam Data untuk memfasilitasi Ketersediaan Data Makro Daerah yang datanya bersumber dari OPD maupun instansi yang terlibat dalam pengisian indikator didalamnya. Untuk tahun 2024 realisasi Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah mencapai 100%. Rumus penghitungan untuk indikator tersebut adalah:

Indikator	Formulasi Penghitungan
Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	$\frac{Jumlah\ dokumen\ statistik\ yang\ di\ publikasikan}{Jumlah\ dokumen\ statistik\ yang\ akan\ dipublikasikan} \times 100\%$

Pengukuran cakupan tersebut dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah dokumen statistik yang dipublikasikan dengan jumlah dokumen yang direncanakan untuk diterbitkan. Pada tahun berjalan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merilis empat jenis publikasi statistik, yaitu buku Brebes Dalam Data, Potret Perekonomian, Buku Saku Infografis, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga capaian realisasi mencapai 100%. Capaian ini telah dipertahankan sejak tahun 2023 hingga 2025, sejalan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2025 maupun target akhir RPD tahun 2026 yang sama-sama berada pada angka 100%, yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi ketersediaan data makro daerah. Indikator ini bersifat mandiri sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Keberhasilan mempertahankan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain penerapan sistem manajemen data yang efektif dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi, koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, dan lembaga terkait lainnya, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data yang memungkinkan proses otomasi dan penyebaran data secara lebih cepat. Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas serta validitas data, serta optimalisasi penggunaan platform digital yang lebih maju guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi para pemangku kepentingan. Dengan langkah tersebut, ketersediaan data makro daerah diharapkan dapat terus terjaga dan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Keberhasilan capaian indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan pengelolaan penggunaan sumber daya anggaran yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 60.736.350,- direalisasikan sebesar Rp 60.534.773,- atau mencapai 99,67%, sejalan dengan capaian kinerja

indikator yang mencapai 100%. Berdasarkan perhitungan tersebut, indikator ini menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 0,33%, yang mencerminkan bahwa pemanfaatan anggaran telah dilaksanakan secara optimal dan seimbang dengan hasil kinerja yang diperoleh, serta mendukung keberhasilan penyelenggaraan statistik sektoral secara efektif.

21. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 21*

Sasaran Strategis 21
Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas,Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 21 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 103.07% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.35. Capaian Indikator Sasaran Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP)	Rp. (Ribu)	11.389	11.500	11.853	103,07	12.000

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga pada periode tertentu Pengeluaran riil per kapita merupakan biaya untuk konsumsi setiap penduduk yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pendapatan masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi pengeluaran per kapita Indikator ini yang merepresentasikan dimensi standar hidup layak dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada Tahun 2025, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik indikator Purchasing Power Parity (PPP) Kabupaten Brebes menunjukkan kinerja yang sangat baik. Nilai PPP terealisasi sebesar Rp11.853, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp11.500. Dengan demikian, capaian kinerja PPP Tahun 2025 mencapai 103,07 %,

yang menandakan bahwa target tahunan berhasil dicapai secara optimal.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar Rp11.389, nilai PPP Kabupaten Brebes pada Tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 4,07%. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan daya beli masyarakat serta peningkatan kemampuan ekonomi rumah tangga di Kabupaten Brebes. Capaian tersebut juga menunjukkan konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kabupaten Brebes Tahun 2026 sebesar Rp12.000, capaian Purchasing Power Parity (PPP) pada Tahun 2025 yang terealisasi sebesar Rp11.853 menunjukkan kinerja yang mendekati target akhir perencanaan. Secara proporsional, capaian tersebut telah mencapai sekitar 98,78 % dari target akhir RPD.

Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Brebes pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp11.835. Jika dibandingkan dengan capaian nasional yang mencapai Rp12.802, nilai pengeluaran per kapita Kabupaten Brebes masih berada di bawah rata-rata nasional. Selisih tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Brebes belum sepenuhnya menyamai tingkat daya beli masyarakat secara nasional. Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp12.746, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Brebes juga masih relatif lebih rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan daya beli antara Kabupaten Brebes dengan rata-rata provinsi, yang dipengaruhi oleh struktur perekonomian daerah, tingkat pendapatan masyarakat, serta dominasi sektor-sektor dengan nilai tambah yang relatif terbatas.

Meskipun demikian, capaian Kabupaten Brebes tetap menunjukkan tren positif dan menjadi dasar yang kuat untuk mendorong peningkatan kinerja ekonomi daerah ke depan. Diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas lokal, serta perluasan kesempatan kerja agar

pengeluaran per kapita masyarakat dapat terus meningkat dan secara bertahap mendekati capaian provinsi maupun nasional

Capaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat, namun juga masih dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan. Faktor pendukung tersebut antara lain:

- Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor unggulan daerah
- Pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
- Stabilisasi pasokan dan distribusi pangan

Sedangkan faktor penghambat ketercapaian kinerja antara lain:

- Fluktuasi produksi akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem
- Keterbatasan kapasitas fiskal dalam pengadaan cadangan pangan
- Keterbatasan hilirisasi dan nilai tambah produk pertanian

Jika dilihat dari dukungan anggaran sebesar Rp.271.738.500,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp.238.008.000,- atau sebesar 87,59 % namun mampu menghasilkan capaian kinerja di atas target yaitu 103,07 % , menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan terkait indikator PPP telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yaitu dengan tingkat efisiensi anggaran pada indikator PPP tercatat sebesar 15,02 %.

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator tersebut adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, melalui Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melaksanakan pengadaan cadangan pangan berupa beras sebanyak 18 ton pada tahun anggaran 2025. Melalui pengelolaan cadangan pangan yang terencana dan terkoordinasi tersebut, sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kontribusi

nyata terhadap penguatan ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes.

22. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 22*

Sasaran Strategis 22
Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Mengembangkan Iklim Usaha Kondusif Serta Terjaminnya Berusaha Dan Pelayanan Investasi Yang Prima

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 22 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 85,25% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.36. Capaian Indikator Sasaran Pertumbuhan Laju Investasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Pertumbuhan Laju Investasi	%	2.53	4	3,72	85,25	4.5

Pertumbuhan laju investasi merujuk pada perubahan atau peningkatan investasi selama periode waktu tertentu. Investasi ini dapat mencakup pengeluaran untuk memperoleh aset fisik, pengembangan proyek, atau partisipasi dalam instrumen keuangan. Indikator ini memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan investasi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Laju Investasi diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(\,nilai\ investasi\ tahun\ n\,) - (nilai\ investasi\ tahun\ n-1)}{(nilai\ investasi\ tahun\ n-1)}\ x\ 100\%$$

$$\frac{(2.428.374.377.927\,) - (2.348.212.755.858)}{(2.348.212.755.858)}\ x\ 100\%$$

sehingga diperoleh persentase pertumbuhan laju investasi tahun 2025 sebesar 3,41% dari target yang ditentukan sebesar 4.00%.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes jumlah investasi dari tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37. Realisasi dan Laju Investasi Kabupaten Brebes Tahun 2019-2025

NO	TAHUN	REALISASI INVESTASI	LAJU INVESTASI	SUMBER DATA
1	2019	759.047.056.765	-	Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun 2019
2	2020	1.255.697.165.466	65.43%	Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun 2020
3	2021	1.309.006.832.638	4.25%	Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun 2021
4	2022	1.802.095.702.198	37.67%	Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun 2022
5	2023	1.869.217.167.665	3.72%	Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun 2023
6 T	2024	2.348.212.755.858	2,53%	Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun 2024
7 T	2025	2.428.374.377.927	3,41%	Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun 2025

Pada Tahun 2025, target pertumbuhan laju investasi ditetapkan sebesar 4%, sedangkan realisasi mencapai 3,41%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun ini mencapai 85,25% dari target yang ditetapkan, atau masih terdapat selisih 0,59 poin di bawah target. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum sepenuhnya memenuhi target kinerja tahunan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2023 tercatat sebesar 3,72%, kemudian mengalami penurunan signifikan pada Tahun 2024 menjadi 2,53%, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 3,41%. Tren ini menunjukkan adanya fluktuasi pertumbuhan investasi, di mana Tahun 2025 mengalami pemulihan dibanding Tahun 2024, namun belum kembali pada level Tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi dinamika investasi daerah.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPD Tahun 2026 sebesar 4,5%, realisasi Tahun 2025 sebesar 3,41% masih berada di bawah lintasan target yang diharapkan. Dengan sisa waktu satu tahun perencanaan, diperlukan akselerasi kebijakan dan strategi promosi investasi agar target akhir periode dapat tercapai.

Dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 5,11%, pertumbuhan investasi daerah masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih 1,70 poin. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik dan daya saing investasi daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan daerah lain secara nasional.

Capaian indikator pertumbuhan laju investasi belum optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang terjadi antara lain :

a. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha melaporkan kemajuan penanaman modal secara *online* (LKPM) per periodenya;
b. Belum adanya sanksi/hukuman bagi pelaku usaha/perusahaan yang tidak menaati kewajiban dalam menyampaikan LKPM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
c. Belum optimalnya penyediaan media informasi berbasis teknologi informasi;
d. Belum efektifnya peran tim teknis perijinan
e. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui syarat ketentuan terkait perizinan;
f. Pelaku usaha banyak yang belum memahami akan jaringan internet, jadi informasi yang ada di website belum bisa diupdate oleh para pelaku usaha;

Dari permasalahan tersebut, DPMPTSP Kab. Brebes berupaya untuk mencapai target realisasi dengan rencana aksi sebagai berikut :

a. Melaksanakan sosialisasi tentang pelaporan dan pengisian LKPM di setiap triwulanan bagi pelaku usaha baik melalui *offline* maupun *online* (sosial media);
b. Dimaksimalkannya kegiatan bimbingan teknis / sosialisasi tentang pengisian LKPM *online* melalui *OSS RBA* bagi pelaku usaha yang ada di Kabupaten Brebes;
c. Dilaksanakannya desk fasilitasi pendampingan pengisian LKPM *online* bagi pelaku usaha yang ada di Kabupaten Brebes;

d. melaksanakan kegiatan pengawasan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Brebes.
e. Memaksimalkan kegiatan pelayanan keliling disetiap kecamatan sebagai wadah untuk memudahkan masyarakat memperoleh NIB;
f. Akan lebih memaksimalkan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan secara berkala kepada pelaku usaha;
g. Mengoptimalkan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang tata cara pengisian LKPM bagi para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Brebes;
h. Mengoptimalkan koordinasi baik secara *offline* maupun *online* terhadap pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM
i. Melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan secara berkala kepada pelaku usaha;
j. Himbauan serta edaran pelaporan LKPM kepada pelaku usaha;
k. Fasilitasi kepada pelaku usaha yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM;
l. Berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat (BKPM) dan pemerintah Kabupaten/kota melalui DPMPTSP Kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 167.625.686,- dan terealisasi Rp. 166.918.662,- atau 99,49%, dengan capaian kinerja sebesar 85.25% maka Indikator ini tidak efisien dengan tingkat efisiensi sebesar -16,8% . Indikator Pertumbuhan Laju Investasi didukung oleh Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dimana di dalam program tersebut berisi aktivitas seperti Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya, Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, serta Pengawasan Penanaman Modal.

23. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 23*

Sasaran Strategis 23
Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Koperasi Dan UMKM Sehingga Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Serta Mandiri

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 23 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 110,88% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.38. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Koperasi Dan UMKM Sehingga Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Serta Mandiri

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat	%	55,2	60	72,2	120,33	65
2	Persentase UMKM Aktif	%	6,99	7,00	7,1	101,43	7,3

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Koperasi Dan UMKM Sehingga Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Serta Mandiri” terdiri dari 2 indikator diantaranya adalah:

a. Persentase Peningkatan Koperasi Sehat

Indikator Persentase Peningkatan Koperasi Sehat digunakan untuk mengukur proporsi koperasi yang memperoleh predikat “sehat”. Indikator ini menjadi bagian dari sasaran peningkatan kualitas kelembagaan dan daya saing koperasi, yang bertujuan memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Koperasi Sehat diperoleh berdasarkan dari presentasi jumlah koperasi aktif yang berjumlah 532 dari total koperasi yang berjumlah 736 sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 72,2%. Data diambil dari *Online Data System* (ODS) koperasi per 31 Desember 2025. Koperasi sehat adalah koperasi yang aktif dan melaksanakan Rapat anggota tahunan. Pada tahun 2025 terdapat peningkatan untuk koperasi aktif dan sehat

karena adanya koperasi Desa/ Kelurahan merah putih. Di kabupaten Brebes terdapat sebanyak 297 koperasi Desa/Kelurahan Merah putih.

Pada Tahun 2025, target persentase koperasi sehat ditetapkan sebesar 60%, sedangkan realisasi mencapai 72,2%. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 120,33% dari target yang ditetapkan, atau melampaui target sebesar 12,2 poin. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pembinaan dan penguatan koperasi.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 55,2%, realisasi Tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan sebesar 17 poin. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan peningkatan kepatuhan koperasi terhadap standar kesehatan yang ditetapkan. Tren peningkatan ini mengindikasikan efektivitas program pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 65%, realisasi Tahun 2025 sebesar 72,2% telah melampaui target jangka menengah tersebut satu tahun lebih awal. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategis peningkatan kualitas koperasi telah tercapai lebih cepat dari perencanaan, sehingga pada tahun berikutnya dapat dilakukan penyesuaian target atau peningkatan standar kualitas koperasi.

Untuk standar nasional atau regional, tidak tersedia data pembanding yang spesifik. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan berdasarkan target internal daerah dan tren peningkatan kinerja dari tahun ke tahun.

Keberhasilan peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain intensifikasi pembinaan manajemen koperasi, pendampingan penyusunan laporan keuangan, peningkatan kepatuhan pelaksanaan RAT, serta penguatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi. Selain itu, penertiban koperasi tidak aktif juga turut meningkatkan persentase koperasi sehat. Alternatif solusi yang terus dilakukan meliputi digitalisasi pelaporan koperasi,

peningkatan pelatihan manajemen usaha, serta penguatan pengawasan berbasis risiko.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pembinaan dilakukan secara terpadu melalui sinergi program pelatihan, monitoring, dan evaluasi dengan memanfaatkan tenaga pendamping serta kerja sama lintas sektor. Optimalisasi anggaran pembinaan dan pemanfaatan forum koordinasi koperasi turut mendukung pencapaian target tanpa peningkatan biaya yang signifikan.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator ini antara lain fasilitasi pelaksanaan RAT, pelatihan manajemen dan akuntansi koperasi, pendampingan legalitas dan kelembagaan, monitoring evaluasi kesehatan koperasi, serta revitalisasi koperasi tidak aktif. Ke depan, upaya peningkatan kualitas koperasi akan difokuskan tidak hanya pada kuantitas koperasi sehat, tetapi juga pada penguatan daya saing dan keberlanjutan usaha koperasi.

b. Persentase UMKM Aktif

UMKM aktif dapat di artikan terdapat usaha yang berkelanjutan dengan adanya legalitas usaha, menambah kemitraan usaha dengan pihak lain, promosi usaha yang semakin luas, bertambah SDM dalam pengelolaan kewirausahaannya dan mendapatkan akses pembiayaan. Indikator Persentase UMKM Aktif merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang aktif beroperasi dibandingkan dengan total UMKM yang terdaftar. Rumus perhitungannya adalah Jumlah UMKM aktif / Total UMKM terdaftar x 100%. Jumlah UMKM yang aktif sudah dibina adalah sebesar 8.595 dari total UMKM sebesar 121.066 sehingga angka realisasi tercapai 7,1%.

Pada Tahun 2025, target persentase UMKM aktif ditetapkan sebesar 7%, sedangkan realisasi mencapai 7,1%. Dengan demikian capaian kinerja mencapai 101,43% dari target, atau melampaui target sebesar 0,1 poin. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM

berjalan efektif dan mampu mempertahankan serta meningkatkan tingkat keaktifan pelaku usaha.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 6,99%, realisasi Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,11 poin. Walaupun peningkatannya relatif kecil, tren ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan konsisten dalam menjaga keberlangsungan UMKM di tengah dinamika ekonomi.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 7,3%, realisasi Tahun 2025 sebesar 7,1% telah mendekati target jangka menengah tersebut dengan selisih 0,2 poin. Artinya, dengan penguatan program pada Tahun 2026, target akhir periode perencanaan sangat realistis untuk dicapai.

Untuk perbandingan dengan standar nasional atau regional, tidak tersedia data pembanding yang spesifik, sehingga evaluasi difokuskan pada pencapaian target internal dan tren peningkatan tahunan.

Meskipun indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, namun terdapat tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM seperti luasnya wilayah jangkauan pembinaan pemberdayaan pelaku UMKM dan banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Brebes yang tercatat sampai 106.082 tetapi belum didukung tenaga pembina/pendamping UMKM yang hanya berjumlah 6 (enam) tenaga dan terbatasnya anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Keberhasilan peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sosialisasi dalam pembinaan, perijinan serta koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dalam peningkatan SDM pelaku UMKM, fasilitasi perijinan serta pameran yang diselenggarakan oleh Provinsi. Alternatif solusi yang terus dilakukan meliputi penguatan pendampingan usaha berbasis klaster, peningkatan kualitas produk, serta perluasan jejaring kemitraan usaha.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, program pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui integrasi kegiatan pelatihan, fasilitasi

promosi, dan pendampingan dalam satu rangkaian program terpadu, sehingga penggunaan anggaran lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan keaktifan usaha. Meskipun anggaran dalam pembinaan UMKM adanya *refocusing* namun tetap dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat dalam hal penggunaan sumber daya. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja karena pembinaan yang dilakukan melalui kelompok-kelompok UMKM, sehingga pembinaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja melainkan oleh masing-masing kelompok UMKM baik itu pemasaran, perijinan maupun branding melalui kemasan yang lebih menarik.

24. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 24*

Sasaran Strategis 24
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Tenaga Kerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 24 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 125,09% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.39. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Tenaga Kerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,92	69,60	71,9	103,30	69,9
2	Rasio Penduduk Bekerja	%	65,9	45	66,09	146,87	35

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Tenaga Kerja” terdiri dari 2 indikator diantaranya adalah:

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya

persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Rumus perhitungannya adalah: Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja x 100%.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi serta menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pembangunan ketenagakerjaan daerah.

Sumber angka realisasi TPAK diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan dipublikasikan melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. Data ini merupakan data resmi yang digunakan sebagai rujukan nasional dan daerah dalam perencanaan pembangunan ketenagakerjaan.

Pada Tahun 2025, target TPAK Kabupaten Brebes ditetapkan sebesar 69,60%, sedangkan realisasi mencapai 71,9%. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 103,30% dari target yang ditetapkan, atau melampaui target sebesar 2,3 poin. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi lebih tinggi dari yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 71,92%, realisasi Tahun 2025 relatif stabil pada angka 71,9%. Stabilitas ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja tetap terjaga dalam dua tahun terakhir, tanpa mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini mengindikasikan daya serap dan keterlibatan tenaga kerja di Kabupaten Brebes cukup konsisten.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 69,9%, realisasi Tahun 2025 sebesar 71,9% telah melampaui target jangka menengah tersebut. Artinya, secara kinerja indikator, Kabupaten Brebes telah mencapai sasaran RPD lebih cepat dari waktu yang direncanakan.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 70,95%, TPAK Kabupaten Brebes (71,9%) berada sedikit di atas rata-rata nasional dengan selisih 0,95 poin. Namun demikian, dibandingkan

dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,36%, TPAK Kabupaten Brebes masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih 2,46 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja daerah cukup baik secara nasional, masih terdapat ruang peningkatan untuk menyamai atau melampaui capaian provinsi.

Keberhasilan mempertahankan TPAK yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya aktivitas sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM, serta meningkatnya kebutuhan ekonomi rumah tangga yang mendorong partisipasi kerja. Namun demikian, tingginya TPAK juga perlu diimbangi dengan kualitas pekerjaan dan tingkat pengangguran yang terkendali. Alternatif solusi yang terus dilakukan antara lain peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, penguatan link and match dengan dunia usaha, serta perluasan kesempatan kerja melalui program kewirausahaan dan padat karya.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, program ketenagakerjaan dilaksanakan melalui optimalisasi balai latihan kerja, sinergi dengan dunia usaha, serta pemanfaatan program pemerintah pusat sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Pendekatan kolaboratif ini mendukung pencapaian indikator secara efektif dan efisien.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini antara lain pelatihan kerja berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, bursa kerja (*job fair*), pembinaan kewirausahaan, serta program perluasan kesempatan kerja. Ke depan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja menjadi fokus utama agar TPAK yang tinggi juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes.

b. Rasio Penduduk Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan tingkat kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Brebes. Rasio penduduk yang bekerja atau yang disebut dengan istilah tingkat kesempatan kerja adalah jumlah total orang yang bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 -64 Tahun).

Jumlah orang yang bekerja di Kabupaten Brebes tahun 2024 menurut BPS sebanyak 1.065.808 dan penduduk usia kerja (PUK) sebesar 1.612.447 orang. Sehingga Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Brebes sebesar 66,09%.

Pada Tahun 2025, target rasio penduduk bekerja ditetapkan sebesar 45%, sedangkan realisasi mencapai 66,09%. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 146,87% dari target yang ditetapkan. Realisasi ini jauh melampaui target tahunan, yang menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja berada pada tingkat yang lebih tinggi dari perencanaan.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 65,9%, realisasi Tahun 2025 mengalami peningkatan tipis sebesar 0,19 poin. Kenaikan ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang relatif stabil dengan tren positif dalam penyerapan tenaga kerja.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 35%, realisasi Tahun 2025 sebesar 66,09% telah jauh melampaui target jangka menengah. Secara substansi, hal ini menunjukkan bahwa indikator telah tercapai secara signifikan lebih tinggi dari proyeksi dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyesuaian target agar lebih realistis dan mencerminkan dinamika data ketenagakerjaan aktual.

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 70,9%, Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Brebes (66,09%) masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih 4,81 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja daerah cukup baik dan stabil, masih terdapat ruang peningkatan untuk mendekati capaian provinsi.

Faktor keberhasilan ini salah satunya adalah dengan adanya dukungan berbagai pihak untuk memberikan pelatihan kerja agar penduduk usia kerja memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja di perusahaan Kawasan peruntukan industri Brebes seperti dari aspirasi pusat dan APBN melalui Kemenaker dan BLK Provinsi Jawa Tengah.

Dengan melihat tabel hasil realisasi kinerja 2024 dengan 2025 yang mengalami kenaikan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian melalui bidang Hubungan industrial dan tenaga kerja cukup baik dalam mencapai target kinerja. Meski demikian masih perlu dilakukan peningkatan. Berikut adalah analisis keberhasilannya Antara lain disebabkan karena:

1) Adanya SDM pengantar kerja dan mediator yang telah maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga ada pedoman dan regulasi pada Kabupaten Brebes yang mengatur pekerja, pemilik kerja baik pekerja lokal maupun migran.
3) Adanya investor baru yang mendirikan perusahaan di Kawasan peruntukan industri Kabupaten Brebes sehingga semakin memperbanyak kesempatan kerja dan lowongan pekerjaan.
4) Adanya kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinperinaker, BLK Provinsi Jawa Tengah, Kemenaker dan aspirasi yang jenis pelatihannya disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di Kabupaten Brebes serta pelatihan yang dapat memunculkan wirausaha baru.
5) Telah disusunnya dan telah diekspos nya dokumen RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah).
6) Kondusifitas hubungan antara pemerintah Kabupaten Brebes, perusahaan, dan serikat pekerja.

Meski demikian tidak menutup kemungkinan tidak terdapat permasalahan atau kendala. Dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat beberapa kendala atau masalah seperti:

1) Tidak semua pengangguran mendaftarkan dirinya pada aplikasi pencaker, atau tidak tercatatnya pengangguran karena tidak mendaftarkan dirinya pada kartu pencaker.
2) Masih terdapat masyarakat yang kurang berminat pada jenis kegiatan pelatihan yang diberikan (masih pilih-pilih sesuai

passion atau minat nya) sementara jelas-jelas pelatihan diberikan sesuai kebutuhan pasar kerja.

3) Masih terdapat perusahaan yang kurang tertib dalam melaporkan kondisi pekerja pada perusahaannya

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Brebes:

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan diri sebagai pencari kerja

1) Melakukan pendampingan kepada pencaker yang masih belum mengerti teknologi untuk mendaftarkan diri sebagai pencaker.
2) Menyelaraskan jenis pelatihan dengan melakukan pemetaan potensi masing –masing wilayah agar sesuai dengan minat atau *passion* calon peserta pelatihan.
3) Melakukan sosialisasi kepada HRD akan pentingnya melaporkan kondisi perusahaan dan pekerjanya.
4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik ke perusahaan

Dari uraian kedua indikator sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan telah menunjang keberhasilan kinerja yaitu meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Brebes. Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, kegiatan ini mencakup semua jenis kegiatan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja maupun yang memunculkan wirausaha baru. Adapun jenis pelatihan yang dilakukan seperti menjahit atau garmen, *upper* sepatu, *assembling*, Bahasa, tata boga, tata rias, perbengkelan, dll.
b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPKS terkait perijinan dan akreditasi agar pelatihan kerja yang dilakukan di LPKS sesuai dengan pedoman dan standar pelatihan.

c. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota. Merupakan kegiatan yang didalamnya memberikan pelayanan kepada para pencaker untuk pembuatan kartu AK1 , kepengurusan CPMI dan rekom ID., serta kegiatan penempatan para pencaker dan CPMI/CTKI.
d. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan. Merupakan kegiatan untuk penyusunan upah minimum Kabupaten agar tetap ada keseimbangan antara pengusaha dengan pekerja sehingga terjalin hubungan harmonis antara pemerintah, perusahaan dan pekerja.
e. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, merupakan kegiatan yang memfasilitasi dan menjembatani antara pekerja dengan perusahaan.
f. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini merupakan kegiatan tripartit yang menangani masalah antara pekerja (serikat) dengan perusahaan.

25. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 25*

Sasaran Strategis 25
Meningkatnya Efisiensi Modernisasi Pertanian Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Untuk Swasembada Pangan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 25 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 101,25% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.40. Capaian Indikator Sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Susenas

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Susenas	Skor	90,42	95,8	97	101,25	78,5

Pemerintah Indonesia Menyusun Pedoman strategi percepatan pembangunan pangan nasional melaui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Regulasi ini menyebutkan aspek utama konsumsi utama bertumpu pada : ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis sumberdaya lokal, aksesbilitas pangan yang merata dan terjangkau, perubahan pola konsumsi menjadi Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)dan keberpihakan kepada pelaku usaha pangan lokal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Pengukuran indikator ini bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja urusan ketahanan pangan.

Penialaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitatif ditunjukan melalui volume konsumsi pangan (kilogram/kap/tahun), konsusmsi energi penduduk (kkal/kap/tahun) dan konsumsi protein (gram protein/kap/tahun). Regulasi kecukupan energi dan protein diatur dalam Permenkes nomor 28 tahun 2019, yaitu AKE sebesar 2.100 kkal/lap/hari dan AKP sebesar 57 gram/kap/hari. Skor PPH diperoleh dari % Angka Kecukupan Energi X Bobot (per kelompok makanan) dengan menggunakan data konsumsi energi (kalori) susenas dari BPS. Persentase angka kecukupan energi merupakan persentase konsumsi energi per hari di bandingkan angka kecukupan energi yaitu 2100/kkal/kapita/hari.

Dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 95,8 , realisasi tahun 2025 sebesar 97, capaiannya sebesar 101,25 % masuk dalam

kategori sangat tinggi dan mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun 2024. Skor pola pangan harapan tahun 2025 sebesar 97 jika dibandingkan skor pola pangan harapan tahun 2024 sebesar 90,42 mengalami kenaikan sebesar 7,3 %. Pada tahun 2025, Skor PPH Kabupaten Brebes mengalami peningkatan signifikan dan mencapai 97, mendekati nilai ideal Skor PPH. Capaian ini mencerminkan meningkatnya keberagaman konsumsi pangan masyarakat serta semakin optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan, termasuk penguatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dan peningkatan koordinasi lintas sektor.

Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Susenas) memiliki target akhir RPD sebesar 78,5 Pada tahun 2025, realisasi Skor PPH Kabupaten Brebes tercatat sebesar 97, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 123,57 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan dalam rencana jangka menengah Kabupaten Brebes Capaian yang melebihi target tersebut mencerminkan keberhasilan Kabupaaten Brebes dalam meningkatkan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dengan tercapainya nilai di atas target RPD indikator Skor PPH berada pada kategori sangat berhasil, serta menunjukkan efektivitas kebijakan dan intervensi yang telah dilaksanakan.

Pada tahun 2024, Skor PPH Kabupaten Brebes mengalami penurunan menjadi 90,42, lebih rendah dibandingkan Skor PPH Nasional sebesar 93,5. Meski demikian, pada tahun 2025 kembali terjadi peningkatan yang cukup tajam, dengan Skor PPH Kabupaten Brebes mencapai 97, lebih tinggi dibandingkan Skor PPH Nasional yang tercatat sebesar 95,1. Capaian ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Brebes.

Peningkatan skor PPH daerah, khususnya Kabupaten Brebes, diupayakan melalui peningkatan konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat (umbi-umbian dan jagung), kacang-kacangan dan memperhatikan kenaikan konsumsi sayuran, buah dan pangan hewani. Perencanaan kebijakan pangan berbasis skor PPH memiliki tujuan akhir

yaitu penerapan pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk mewujudkan generasi SDM yang berkualitas, sehat, aktif dan produktif. Beberapa langkah yang bisa diambil, di antaranya adalah :

a. Kegiatan Pengembangan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

   Kegiatan ini berasal dari sumber Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Tahun 2025 kepada 23 kelompok penerima manfaat sebanyak 23 kelompok, yang tersebar di 5 Kecamatan di Kabupaten Brebes. Komponen kegiatan Desa B2SA sepenuhnya mengikuti acuan petunjuk teknis pelaksanaan Desa B2SA Peraturan Badan Pangan Nasional No. 01 tahun 2025. Komponen kegiatan Desa B2SA meliputi :

   - Kebun B2SA melalui pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan sumber pangan;
   - Penerapan pola pangan B2SA melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengolahan pangan B2SA.

b. Sosialisasi dan kreasi menu pola makan Beragam, Berigizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan mengenalkan dan memanfaatkan sumber pangan lokal

   Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan TP PKK di Kabupaten Brebes; dengan menampilkan kreasi beragam menu yang berbasis sumber daya lokal, kecuali beras dan terigu serta turunannya, tentunya menu yang disajikan harus memenuhi porsi yang dianjurkan, sesuai isi piringku.

c. Sosialisasi dan pelatihan olahan pangan lokal yang bernilai ekonomis

   Sosialisasi dan pelatihan pangan lokal dilaksanakan dengan mengangkat sumber daya lokal untuk penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Brebes. Selain sebagai sumber makanan bergizi untuk keluarga, materi pelatihan juga sebagai percontohan pangan yang benilai ekonomis sehingga menjadi pemasukan tambahan bagi keluarga. Pelatihan dilaksanakan dengan sasaran peserta pelatihan meliputi anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dan TP PKK

Kabupaten Brebes. Materi pelatihan diisi dengan pembuatan kue talam singkong dan dimsum ayam – kubis.

Dalam menghadapi prevelensi pangan masyarakat terhadap makanan kekinian, dapat dikreasikan menu pangan lokal yang enak, bergizi dan aman dalam bentuk yang menarik dan bernilai ekonomis sehingga dapat menyajikan menu makan B2SA dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya. Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan skor PPH Kabupaten Brebes, sebagai salah satu indikator ketahanan pangan dalam pembangunan kebijakan penganekaragaman pangan lokal.

Berdasarkan analisis di atas faktor yang mendukung keberhasilan peningkatan skor PPH antara lain: Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan, Efektivitas program edukasi gizi dan B2SA, Ketersediaan dan akses pangan yang relatif terjaga, Dukungan lintas sektor dan peran kelompok masyarakat.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat ketercapaian skor PPH antara lain: Ketergantungan yang masih tinggi terhadap padi – padian, Rendahnya konsumsi pangan lokal non- beras tertentu, Pengaruh faktor sosial ekonomi masyarakat, Keterbatasan intensitas pendampingan dan edukasi berkelanjutan.

Capaian kinerja sebesar 101,25% dengan tingkat penyerapan anggaran 96,27% yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 2.908.959.250, dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 2.800.352.140,-menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan efisien dengan tingkat efisiensi 4,92 %. Kinerja yang melampaui target dapat dicapai tanpa menghabiskan seluruh alokasi anggaran yang tersedia, sehingga mencerminkan optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan.

Terdapat empat program yang mendukung ketercapaian indikator kinerja skor pola pangan harapan, antara lain:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub

kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik, hal ini diperlukan untuk mendukung ketersedian pangan sehingga diperlukan data terkait lumbung pangan masyarakat yang masih dapat dimanfaatkan

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan yang mendukung antara lain:
   - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan yang mendukung Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya, sehingga pasokan dan harga pangan dapat terkontrol.
   - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yang mendukung Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dengan tersedianya cadangan pangan maka ketersedian pangan untuk kebencanaan dan kerawanan pangan dapat teratasi
   - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, di kegiatan ini difokuskan untuk peningkatan penganekaragaman pola konsumsi.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan yang mendukung yaitu Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota , kegiatan ini berfokus pada pendataan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SPKG).

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan Kegiatan yang mendukung yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan dukungan dua sub kegiatan

antara lain Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kabupaten/ kota dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini berfokus pada pengawasan penyediaan pangan yang aman untuk dikonsumsi.

26. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 26*

Sasaran Strategis 26
Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 26 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 130,21% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Rendah. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.41. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 202			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Kinerja Lalu Lintas (0.6 s.d. 0.8)	Skor	0,55	0,8	0,45	143,75	3
2	Kinerja Keselamatan Lalu Lintas	Skor	12	18	15	116,67	17

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan” terdiri dari 2 indikator diantaranya adalah:

a. Kinerja Lalu Lintas (0.6 s.d. 0.8)

Sumber Angka Realisasi Indikator Sasaran Kinerja lalu lintas adalah kemampuan ruas jalan melayani arus lalu lintas. Kinerja lalu lintas ruas jalan atau biasa disebut dengan V/C Ratio didapatkan dari perbandingan arus waktu sibuk di suatu ruas jalan dengan kapasitasnya. Kapasitas jalan adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melewati ruas jalan dalam periode waktu tertentu. Volume lalu lintas yang tinggi dapat menurunkan kinerja ruas jalan. Semakin besar nilai indikator V/C ratio maka semakin buruk.

Dikarenakan kinerja lalu lintas merupakan indikator negatif dimana semakin tinggi realisasi, semakin rendah capaian kinerjanya. Realisasi kinerja ruas jalan diperoleh dari survei volume lalu lintas pada jam sibuk serta perhitungan kapasitas jalan sesuai pedoman Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997.

- C ruas (Jalur) n = CO x FCLJ x FCPA x FCHS x FCUK
  = 3000 x 0,76 x 1 x 0,94 x 0,94
  = 2.013,26 smp/jam

- VCR ruas n = VCR ruas n / C ruas
  n = 902,39/ 2.013,26
  = 0,45

0,45 memiliki tingkat pelayanan C yang berarti arus stabil dimana pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Volume pelayanan berkaitan dengan kapasitas dapat di tolerir. Dari analisis survey lalu lintas (traffic counting) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes didapatkan data sebagai berikut :

- Nilai V/C tertinggi terjadi di Jalan SP. 3 Tol Pejagan Kanci-Ketanggungan-Batas. Kab. Tegal/Kab.Brebes dengan Nilai 0,84 dengan Tingkat Pelayanan Jalan D.
- Dari Sampel data 44 Ruas Jalan didaparkan nilai Rata-rata V/C yaitu 0,45 dengan Tingkat Pelayanan Jalan C yang berarti arus stabil dimana pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Volume pelayanan berkaitan dengan kapasitas dapat di tolerir.

Pada Tahun 2025, target skor kinerja lalu lintas ditetapkan sebesar 0,8, sedangkan realisasi mencapai 0,45. Karena indikator ini bersifat negatif (semakin kecil semakin baik), maka realisasi 0,45 menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan target. Dengan demikian, capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 0,55, realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan skor sebesar 0,10 poin. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi lalu lintas, yang berarti tingkat kepadatan dan kejenuhan jalan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 3, realisasi Tahun 2025 sebesar 0,45 telah jauh berada dalam kondisi yang lebih baik dari target jangka menengah tersebut. Secara substansi, hal ini menunjukkan bahwa kondisi lalu lintas di Kabupaten Brebes relatif terkendali dan telah melampaui ekspektasi perencanaan.

Untuk perbandingan dengan standar nasional atau regional, tidak tersedia data pembanding yang spesifik. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan berdasarkan tren capaian internal daerah dan target perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja V/C Ratio (Rasio Volume terhadap Kapasitas) pada suatu ruas jalan—dalam hal ini berhasil menjaga rasio tetap rendah (di bawah 0,7 atau 0,85) atau mengoptimalkan kinerja—dipengaruhi oleh keseimbangan antara volume lalu lintas yang melintas (V) dan kemampuan jalan menampung kendaraan (C).

Solusi untuk berhasil menurunkan *Volume/Capacity Ratio* (V/C Ratio)—yang berarti mengurangi kemacetan dan meningkatkan tingkat pelayanan jalan (LOS)—melibatkan kombinasi manajemen lalu lintas, peningkatan infrastruktur, dan pendekatan 193 ocial. Berdasarkan data rekayasa lalu lintas, target utamanya adalah menyeimbangkan jumlah kendaraan (V) dengan kapasitas jalan.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 728.366.861,- dan terealisasi Rp. 674.562.679,- atau 92,61%, dengan capaian kinerja sebesar 135,71% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 35,57%.

Program yang menunjang keberhasilan pada Indikator Kinerja Keselamatan Lalu Lintas adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.

b. Kinerja Keselamatan Lalu Lintas

Realisasi skor pada Indikator Kinerja Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2025 adalah 15, 15 diperoleh dari perhitungan data laka / kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Tahun 2025. Rumus perhitungannya adalah jumlah korban mati ditempat dibagi jumlah keseluruhan laka / kecelakaan lalu lintas, mati ditempat pada tahun ini ada 185 orang dengan jumlah keseluruhan kecelakaan lalu lintas ada 1.226 orang.

Tabel 3.42. Data Lakalantas Kabupaten Brebes Tahun 2025

NO	BULAN	LAKA	MD	LB	LR	RUMAT
1	JANUARI	118	20	0	160	125.900.000
2	FEBRUARI	73	12	0	85	69.150.000
3	MARET	77	11	1	104	129.200.000
4	APRIL	171	22	0	221	158.950.000
5	MEI	96	14	0	110	102.250.000
6	JUNI	100	23	0	126	209.800.000
7	JULI	80	17	0	100	133.550.000
8	AGUSTUS	112	19	0	132	132.450.000
9	SEPTEMBER	97	25	0	131	143.400.000
10	OKTOBER	113	10	2	162	252.300.000
11	NOVEMBER	70	8	0	96	100.300.000
12	DESEMBER	119	4	2	167	216.950.000
	JUMLAH	1226	185	5	1594	1.774.200.000

c. Pada Tahun 2025, target skor kinerja keselamatan lalu lintas ditetapkan sebesar 18, sedangkan realisasi mencapai 15. Karena indikator ini bersifat negatif (semakin kecil semakin baik), maka realisasi 15 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan

target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 dinilai melampaui target.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 12, realisasi Tahun 2025 sebesar 15 menunjukkan peningkatan skor sebesar 3 poin. Karena indikator ini bersifat negatif, kenaikan skor tersebut mengindikasikan adanya peningkatan risiko atau jumlah kejadian kecelakaan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, meskipun capaian Tahun 2025 lebih baik dari target, namun secara tren terjadi penurunan kualitas keselamatan dibanding Tahun 2024.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 17, realisasi Tahun 2025 sebesar 15 masih berada dalam batas yang lebih baik dari target jangka menengah. Artinya, secara perencanaan makro, kondisi keselamatan lalu lintas masih sesuai dengan jalur pencapaian target RPD, meskipun perlu perhatian agar tidak terjadi tren peningkatan skor di tahun berikutnya.

Data menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas Nasional di Tahun 2024 mencapai 150.096 kejadian. Pada tahun 2025, angka tersebut turun menjadi 141.608 kejadian atau berkurang 9.298 kejadian, setara penurunan 6,16 persen. Tren positif juga terlihat pada angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Pada 2024 tercatat 26.839 korban meninggal, lalu turun 19,8 persen atau berkurang 5.122 orang dalam satu tahun.

Penyebab keberhasilan atau peningkatan Indikator Kinerja Keselamatan Lalu Lintas salah satunya adalah perilaku pengemudi kendaraan yang disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas seperti tidak melawan arus, menggunakan helm bagi kendaraan roda dua, menggunakan seat belt bagi kendaaraan roda empat dan tidak menerobos saat lampu merah. Selain itu penyebab adanya peningkatan yang terjadi pada Tahun ini adalah Infrastruktur yang mulai memadai seperti jalan-jalan yang rusak atau berlubang segera di tindak lanjuti, penyalahgunaan parkir di bahu jalan maupun di trotoar yang dibenahi. Keberhasilan Indikator Kinerja Tahun ini juga dikarenakan terjalinnya sinergitas antar pemangku kepentingan antara lain dengan kepolisian dan instansi vertikal.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 5.478.244.450,- dan terealisasi Rp. 3.883.105.761,- atau 70,88%, dengan capaian kinerja sebesar 116,67% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 39,25%.

Program yang menunjang keberhasilan pada Indikator Kinerja Keselamatan Lalu Lintas adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

27. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 27*

Sasaran Strategis 27
Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kualitas Kelembagaan Dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 27 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 109,50% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.43. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kualitas Kelembagaan Dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Persentase BUMDes Aktif	%	74	85	99	116,47	100
2	Persentase BUMDes Sehat	%	55	65	70	107,69	100
3	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	Indeks	0,7	0,69	0,72	104,35	0,69

Angka capaian kinerja sasaran ” Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kualitas Kelembagaan Dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa” terdiri dari 3 indikator diantaranya adalah:

a. Persentase BUMDes Aktif

Angka capaian indikator persentase BUMDes Aktif diperoleh berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes atas 308 BUMDes (292 BUMDes dan 16 BUMDes Bersama) dengan hasil 99% (307) BUMDes Aktif terdiri dari 292 BUMDes dan 15 BUMDes Bersama.

BUMDes adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa sesuai dengan amanat Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pasal 87 ayat (1) sebagai dasar hukum pendirian BUMDes.

Adapun yang menjadi tolak ukur minimal BUMDes Aktif menurut hasil identifikasi antara lain:

- Terdapat PERDES tentang BUMDes.
- AD/ART BUMDes
- Kepengurusan aktif
- Memiliki bidang usaha

Angka realisasi indikator Persentase BUMDes Aktif diperoleh melalui rumus:

$$\text{Persentase BUMDes Aktif} = \frac{\text{(Jumlah BUMDes Aktif)}}{\text{Jumlah BUMDes di Kabupaten Brebes}} x100\%$$

Pada Tahun 2025, target persentase BUMDes aktif ditetapkan sebesar 85%, sedangkan realisasi mencapai 99%. Dengan demikian capaian kinerja mencapai 116,47% dari target yang ditetapkan, atau melampaui target sebesar 14 poin. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pembinaan dan penguatan kelembagaan BUMDes.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 61% dan Tahun 2024 sebesar 74%, realisasi Tahun 2025 sebesar 99% menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari 61% (2023) meningkat menjadi 74% (2024), dan melonjak menjadi 99% (2025). Tren ini menunjukkan adanya percepatan revitalisasi dan pengaktifan kembali BUMDes yang sebelumnya tidak aktif.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 100%, realisasi Tahun 2025 sebesar 99% telah sangat mendekati target jangka menengah tersebut dengan selisih hanya 1 poin. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategis pengaktifan BUMDes hampir sepenuhnya tercapai satu tahun sebelum akhir periode perencanaan. Untuk perbandingan dengan standar nasional atau regional, tidak tersedia data pembanding yang spesifik, sehingga evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan capaian internal daerah dan tren peningkatan tahunan.

Beberapa penyebab keberhasilan adanya BUMDes tidak aktif di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1) Secara kontinu Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes melalui Dinpermades melakukan pembinaan terhadap BUMDes dan BUMDesma;
2) Diwajibkannya penyertaan modal melalui dana desa oleh pemerintah desa, sehingga pengelolaan BUMDes lebih bergairah;
3) Hubungan yang harmonis antara pengurus BUMDes dengan pemerintah desa;

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 142.178.365,- dan terealisasi Rp. 140.106.522,- atau 98,54%, dengan capaian kinerja sebesar 116,47% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 15,78%. Hal ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran berdasarkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Indikator Persentase BUMDes Aktif didukung oleh Program diantaranya adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa dimana dalam program tersebut berisi aktifitas seperti Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, aktifitas tersebut untuk membina, memonitoring dan mengevaluasi BUMDes agar selalu aktif dalam mendukung peningkatan perekonomian desa.

b. Persentase BUMDes Sehat

Angka realisasi indikator persentase BUMDes Sehat diperoleh berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes atas atas 308 BUMDes (292 BUMDes dan 16 BUMDes Bersama) dengan hasil 68% (209) BUMDes Sehat terdiri dari 194 BUMDes dan 15 BUMDes Bersama.

BUMDes adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa sesuai dengan amanat Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pasal 87 ayat (1) sebagai dasar hukum pendirian BUMDes.

Adapun yang menjadi tolak ukur minimal BUMDes Sehat menurut hasil identifikasi antara lain:

- Terdapat PERDES tentang BUMDes.
- AD/ART BUMDes
- Kepengurusan aktif
- Memiliki bidang usaha
- Laporan keuangan akhir tahun BUMDes
- Telah Berbadan Hukum/sedang proses badan hukum

Angka capaian Indikator Persentase BUMDes Sehat diperoleh melalui rumus:

$$\text{Persentase BUMDes Sehat} = \frac{(\text{Jumlah BUMDes Sehat})}{\text{Jumlah BUMDes di Kabupaten Brebes}} x100\%$$

Pada Tahun 2025, target persentase BUMDes sehat ditetapkan sebesar 65%, sedangkan realisasi mencapai 70%. Dengan demikian capaian kinerja mencapai 107,69% dari target yang ditetapkan, atau melampaui target sebesar 5 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dan keberlanjutan usaha BUMDes mengalami peningkatan yang signifikan.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 45% dan Tahun 2024 sebesar 55%, realisasi Tahun 2025 sebesar 70% menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun

terakhir. Dari 45% meningkat menjadi 55%, dan kemudian naik kembali menjadi 70%. Tren ini menggambarkan adanya perbaikan bertahap dalam aspek manajemen, administrasi, dan penguatan unit usaha BUMDes.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 100%, realisasi Tahun 2025 sebesar 70% masih memerlukan peningkatan sebesar 30 poin dalam satu tahun ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tren kinerja positif, diperlukan percepatan dan penguatan pembinaan agar seluruh BUMDes dapat mencapai kategori sehat sesuai target akhir perencanaan.

Untuk perbandingan dengan standar nasional atau regional, tidak tersedia data pembanding yang spesifik, sehingga evaluasi difokuskan pada pencapaian target internal dan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Beberapa permasalahan adanya BUMDes tidak sehat di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1) Adanya pergantian pengurus BUMDes akibat adanya pergantian kepala desa, sehingga yang tadinya aktif bisa terjadi tidak aktif sehingga BUMDes menjadi tidak sehat;
2) Hubungan yang kurang harmonis antara pengurus BUMDes dengan pemerintah desa;
3) Pengurus BUMDes yang dibentuk tidak aktif sehingga BUMDes tidak aktif dan berakibat pada BUMDes menjadi tidak sehat.

Dari permasalahan tersebut, Dinpermades Kabupaten Brebes berupaya untuk meningkatkan persentase BUMDes Sehat dengan rencana aksi sebagai berikut:

1) Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 3 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
2) Mendorong BUMDes untuk selalu berkoordinasi dengan *steakholder*;
3) Mendorong agar pembentukan pengurus BUMDes lebih selektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 142.178.365,- dan

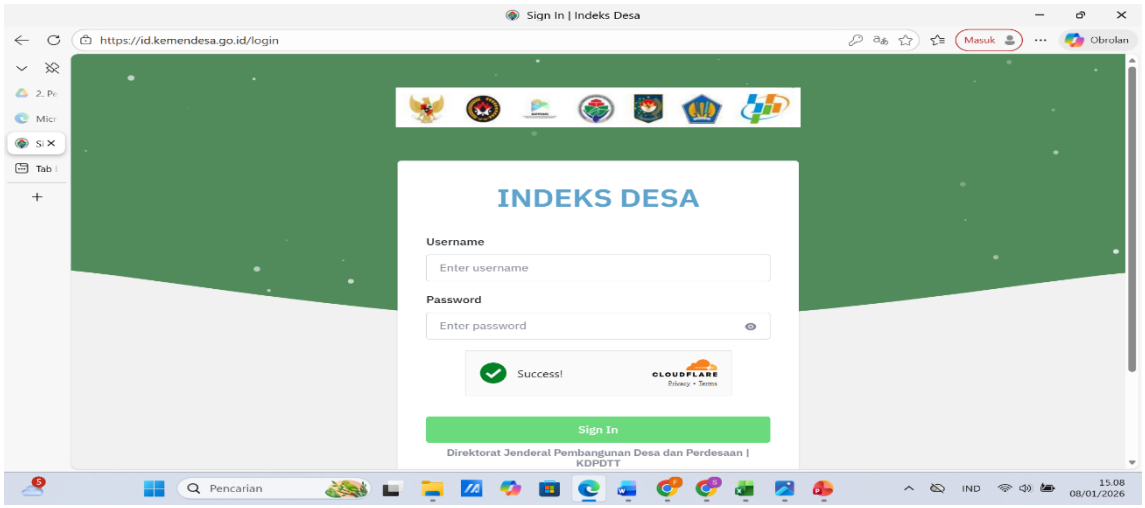
terealisasi Rp. 140.106.522,- atau 98,54%, dengan capaian kinerja sebesar 107,69% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 7,9%. Hal ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran berdasarkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Indikator Persentase BUMDes Sehat didukung oleh Program diantaranya adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa dimana dalam program tersebut berisi aktivitas seperti Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, aktivitas tersebut untuk membina, memonitoring dan mengevaluasi BUMDes agar selalu aktif dalam mendukung peningkatan perekonomian desa.

c. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten

Tahun 2025 angka realisasi indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten diperoleh berdasarkan output dari hasil Indeks Desa (ID), hal ini dengan adanya Indeks Desa (ID) Indeks Desa Membangun (IDM) tidak berlaku lagi, namun demikian output dari Indeks Desa (ID) tidak berbeda jauh dengan Indeks Desa Membangun (IDM) sehingga capaian Indeks Desa Membangun tahun 2024 dapat berlanjut ke capaian tahun 2025. Realisasi tahun 2025 berdasarkan KepmenDesPDT Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2025.

Sumber angka realisasi Indeks desa membangun berasal dari hasil penilaian melalui aplikasi Indeks Desa (*https://id.kemendesa.go.id*) yang kemudian dituangkan dalam KepmenDesPDT Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2025 dengan nilai 72,34% dengan indeks 0,72 katagori desa ”Maju”.



Gambar 3.20. Gambar *Screenshot dashboard* aplikasi IDM (https://idm.kemendesa.go.id) tahun 2024

Pada Tahun 2025, target IDM Kabupaten Brebes ditetapkan sebesar 0,69, sementara realisasi mencapai 0,72. Dengan demikian, capaian kinerja melampaui target sebesar 0,03 poin atau sekitar 104,35% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya percepatan peningkatan status desa dibandingkan dengan perencanaan awal.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2023 sebesar 0,70 mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2024 menjadi 0,69, namun kembali meningkat signifikan pada Tahun 2025 menjadi 0,72. Tren ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan pembangunan desa setelah sempat stagnan. Secara kumulatif dalam tiga tahun terakhir, nilai IDM menunjukkan arah peningkatan yang positif.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 0,69, realisasi Tahun 2025 sebesar 0,72 telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian pembangunan desa telah berada di atas proyeksi dokumen perencanaan strategis. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian strategi agar capaian yang telah baik ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan menuju kategori desa maju dan mandiri secara lebih merata.

Tabel 3.44. Perbandingan Status Kemajuan dan Kemandirian

Status Desa	Kab. Brebes	Prov. Jawa Tengah	Nasional (%)
Mandiri	**47**	**2.208**	**20.503**
Maju	**130**	**3.921**	**23.579**
Total	**177**	**6.129**	**44.082**
Berkembang	115	1.666	21.813
Tertinggal	0	15	4.672
Sangat Tertinggal	0	0	4.694
Desa tidak Memenuhi kriteria	**0**	0	4
	292	**7.810**	**75.265**

Pada tabel di atas menunjukan bahwa jumlah pada tingkat baik itu kabupaten, provinsi maupun nasional bahwa realisasi tertinggi ada pada status desa maju atau indeks di atas 0,70

Beberapa permasalahan masih kecilnya indeks desa membangun tingkat Kabupaten Brebes antara lain adalah sebagai berikut:

1) Masih rendahnya rata-rata indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan sosial, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan;
2) Belum terkoordinasinya pembangunan desa yang menunjang peningkatan nilai indeks desa membangun (IDM) Kabupaten Brebes;
3) Penginputan data ke aplikasi IDM (*https://idm.kemendesa.go.id*) oleh pemerintah desa belum menggambarkan kondisi desa.

Dari permasalahan tersebut, Dinpermades Kabupaten Brebes berupaya untuk meningkatkan indeks desa membangun dengan rencana aksi sebagai berikut:

1) Pembangunan desa didorong untuk difokuskan pada peningkatan indeks ketahanan ekologi/lingkungan;
2) Mendorong kolaborasi antara perangkat daerah dan pemerintahan desa dalam usaha meningkatkan indeks desa membangun;
3) Dilakukan sosialisasi, pembinaan, dan monev *input* ke aplikasi IDM.
4) Peng*input*an data ke aplikasi IDM (*https://idm.kemendesa.go.id*) oleh pemerintah desa didampingi tenaga ahli pendamping desa (TAPD).

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 1.366.975.850,- dan terealisasi Rp. 1.330.873.649,- atau 97,36%, dengan capaian kinerja sebesar 104,35% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 6,39%.

Keberhasilan capaian indikator persentase indeks desa membangun (IDM) didukung oleh program antara lain program penataan desa, program peningkatan kerja sama antar desa, program administrasi pemerintahan desa, dan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat, seluruh program baik langsung maupun tidak langsung kegiatan-kegiatannya mendukung peningkatan indeks desa membangun.

28. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 28*

Sasaran Strategis 28
Meningkatnya Produksi Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Serta Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan Dan Perikanan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 28 dengan 2 indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.45. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Serta Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan Dan Perikanan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Peningkatan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	20.649.761,9	24.094.139	21.725.968,94	90,17	24.576.021
2	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	114,58	130	115,54	88,88	140

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Produksi Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan Dengan Menjaga Kelestarian

Lingkungan Serta Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan Dan Perikanan" terdiri dari 2 indikator diantaranya adalah:

a. Peningkatan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

   Indikator *Peningkatan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan* merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan nilai tambah bruto sektor pertanian dalam struktur perekonomian daerah. Nilai PDRB dihitung berdasarkan pendekatan produksi sesuai metodologi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu menjumlahkan nilai tambah dari seluruh lapangan usaha pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam satu tahun tertentu, yang dinyatakan dalam juta rupiah (harga berlaku atau harga konstan sesuai publikasi resmi). Indikator ini mendukung sasaran strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan, mengingat sektor pertanian merupakan kontributor utama PDRB Kabupaten Brebes.

   Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke tahun.

   Sumber angka realisasi diperoleh dari publikasi resmi PDRB Kabupaten Brebes yang diterbitkan oleh BPS setiap tahun, berdasarkan hasil kompilasi data produksi, harga komoditas, survei sektoral, serta laporan administratif dari perangkat daerah teknis.

   Pada Tahun 2025, target nilai PDRB sektor pertanian ditetapkan sebesar Rp24.094.139 juta, sedangkan realisasi mencapai Rp21.725.968,94 juta atau 90,17% dari target. Dengan demikian,

capaian kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan dan terdapat selisih sebesar Rp2.368.170,06 juta dari target tahun berjalan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2023 sebesar Rp19.745.353,72 juta meningkat menjadi Rp20.649.761,9 juta pada Tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi Rp21.725.968,94 juta pada Tahun 2025. Secara tren, terjadi peningkatan nilai PDRB setiap tahun, meskipun laju pertumbuhannya belum mampu mencapai proyeksi target Tahun 2025. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian tetap positif, namun berada di bawah ekspektasi perencanaan.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar Rp24.576.021 juta, realisasi Tahun 2025 masih memerlukan peningkatan sebesar Rp2.850.052,06 juta dalam satu tahun mendatang. Dengan demikian, diperlukan upaya percepatan pertumbuhan sektor pertanian agar target jangka menengah dapat tercapai.

Untuk perbandingan regional, capaian PDRB sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar Rp253.907,09 miliar (dalam satuan miliar rupiah). Secara proporsional, kontribusi Kabupaten Brebes merupakan bagian dari struktur ekonomi pertanian Jawa Tengah, namun secara skala masih dipengaruhi oleh faktor luas wilayah, produktivitas, dan struktur komoditas unggulan daerah.

Peningkatan PDRB terus terjadi akibat peningkatan *output* dari berbagai lapangan usaha di bidang pertanian baik dari hulu maupun sampai hilir. Program/ Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung PDRB Sektor Pertanian yaitu dengan meningkatkan nilai tambah komoditas- komoditas pertanian antara lain dengan peningkatan baik produksi hasil pertanian baik kualitas maupun kuantitas. Peningkatan produktivitas dengan penyediaan dan pemberian bantuan benih padi, jagung dan kedelai yang unggul, peningkatan dan perbaikan teknologi budidaya tanaman pangan buatan kelompok tani, Peningkatan budidaya hortikultura dan perkebunan dengan sekolah lapang dan sosialisasi *Good Agricultural*

Practices (GAP), bantuan sarana budidaya hortikultura khususnya bawang merah, aneka cabai, pisang dan buah-buahan lainya, bantuan dan pelatihan pascapanen untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian hortikultura dan perkebunan dan bantuan untuk peningkatan pengelolaan hasil budidaya dan perkebunan, penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan seperti menjamin ketersediaan, distribusi, pengawasan pupuk subsidi dan pestisida, peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air dan peningkatan tambah tanam/IP dan infrastruktur air tanah dangkal dan air tanah dalam, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani untuk mempermudah mobilisasi sarana prasarana dan hasil pertanian merupakan program kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung hasil pertanian yang merupakan salah satu sektor pembentuk PDRB Kabupaten Brebes.

Program kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan PDRB antara lain, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian.

b. Nilai Tukar Nelayan

Secara konsepsional Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator kemampuan tukar (*term of trade*) komoditas produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Sumber angka realisasi diperoleh dari (tampilkan data dari mana perolehan angka realisasi)

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

$$= \frac{\text{Total Penerimaan Nelayan}}{\text{Total Pengeluaran Nelayan}} \times 100$$

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2024

$$= \frac{(\text{NTN Tw I} + \text{NTN Tw II} + \text{NTN Tw III} + \text{NTN Tw IV})}{4}$$

$$= (105{,}89 + 111{,}47 + 117{,}37 + 127{,}41)$$

4

= 115,54

Dinas Perikanan Kabupaten Brebes menghitung Nilai Tukar Nelayan melalui perbandingan total penerimaan nelayan dengan total pengeluaran nelayan dan dikali 100. Hal ini dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Brebes setiap triwulan. NTN Tahun 2025 didapatkan dari rata-rata NTN dalam satu tahun sehingga diperoleh nilai 115,54.

Target Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2025 adalah 130, sedangkan realisasinya sebesar 115,54. Realisasi tersebut masih di bawah target sebesar 14,46 poin, menunjukkan bahwa NTN 2025 masih belum memenuhi target kinerja yang ditentukan.

Realisasi NTN tahun 2025 (115,54) mengalami kenaikan sebesar 3,03 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (112,51). Jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, NTN mengalami tren yang fluktuatif. Seperti pada tahun 2020 – 2022 NTN menunjukkan pola peningkatan, tahun 2022-2024 NTN menunjukkan pola penurunan, sedangkan tahun 2024-2025 mengalami kenaikan.

Target akhir RPD untuk indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 140. Dengan realisasi tahun 2025 sebesar 115,54, realisasi tersebut masih berada 24,46 poin di bawah target akhir RPD. Hal ini menunjukkan meskipun terdapat perbaikan, realisasi yang dicapai masih belum mencapai ekspektasi strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menegah.

Realisasi NTN nasional tahun 2025 sebesar 104,58 dan realisasi NTN Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 99,73 (Data terbaru Oktober 2025, sumber data: https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/ntn/summary).

Jika dibandingkan dengan Realisasi NTN Kabupaten Brebes tahun 2025 yaitu 115,54 maka realisasi ini sudah melampaui 10,96 poin di atas realisasi NTN nasional dan 15,81 poin di atas realisasi NTN Provinsi Jawa Tengah.

Faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Nelayan diantaranya adalah Pendapatan nelayan (indeks harga yang diterima nelayan) meliputi penangkapan di perairan umum dan penangkapan di laut dan Pengeluaran keluarga nelayan (indeks harga yang dibayar nelayan) meliputi fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh nelayan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil tangkapan.

Salah satu faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan NTN di Kabupaten Brebes dari tahun lalu adalah hasil produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) tahun 2025 (8.010,55 Ton) mengalami kenaikan sebesar 3.320,93 ton jika dibandingkan dengan tahun 2024 (4.689,62 Ton).

NTN tahun 2025 (115,54) mengalami kenaikan sebesar 3,03 poin dari tahun lalu (NTN 2024: 112,51) karena adanya kenaikan total penerimaan (Yt) sebesar 8,04% meskipun total pengeluaran juga mengalami sedikit kenaikan sebesar (Et) 1,39%. Beberapa hal yang kemungkinan menjadi penyebab kenaikan total penerimaan nelayan antara lain perubahan komposisi jenis ikan hasil tangkapan dan atau kenaikan harga berbagai komoditas hasil tangkapan pada tingkat produsen (nelayan). Meskipun total pengeluaran juga mengalami kenaikan namun tidak sebesar kenaikan total penerimaan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan NTN antara lain:

1) *Restocking* di perairan umum dengan jenis benih ikan yang bervariasi;
2) Pembinaan Teknis / Sosialisasi untuk Nelayan (Kelompok Nelayan) dan Bakul dalam Rangka Peningkatan Kapasitas inovasi pemasaran (supermarket di daerah terdekat);
3) Pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
4) Rehabilitasi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pengerukan alur perahu;
5) Pembinaan Anggota Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Usaha Perikanan Tangkap;
6) Pendampingan pelayanan rekomendasi BBM.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Efisiensi indikator ini sebesar -11,63%. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran belum efektif dan efisien karena capaian kinerja masih di bawah 100%. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 7 bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi NTN yaitu pendapatan nelayan (indeks harga yang diterima nelayan) dan pengeluaran keluarga nelayan (indeks harga yang dibayar nelayan) yang bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti harga jual hasil tangkapan (harga komoditas pada tingkat produsen / nelayan), volume produksi, biaya operasional (BBM, alat tangkap, perbaikan kapal, perbekalan dan lain-lain), kebijakan pemerintah, manajemen rantai pasok dan sebagainya. Namun, apabila dilihat dari target tingkat kabupaten, NTN tahun 2025 tidak mencapai target tetapi NTN Kabupaten Brebes sudah melampaui NTN tahun 2025 pada tingkat nasional maupun regional (Provinsi Jawa Tengah). Dilihat dari hal tersebut, maka masih rendahnya tingkat efisiensi sumber daya juga disebabkan karena capaian kinerja masih di bawah 100% yang salah satunya karena target pada tingkat kabupaten jauh di atas realisasi NTN nasional dan regional (Provinsi Jawa Tengah) saat ini.

Indikator nilai tukar nelayan (NTN) didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di mana dalam program tersebut berisi aktifitas seperti *Restocking* di perairan umum dengan jenis benih ikan yang bervariasi, Pembinaan Teknis / Sosialisasi untuk Nelayan (Kelompok Nelayan) dan Bakul dalam Rangka Peningkatan Kapasitas, Pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, Rehabilitasi TPI, Pendampingan pelayanan rekomendasi BBM, Pembinaan anggota POKMASWAS dan lain sebagainya. Dengan capaian yang masih di bawah target meskipun menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan tahun lalu, maka upaya yang sudah dilakukan perlu dilanjutkan, dan peningkatan juga perlu dilakukan untuk dapat mencapai target dan memperbaiki aspek-aspek yang

masih perlu perbaikan, serta memenuhi tantangan kinerja di masa mendatang.

29. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 29*

Sasaran Strategis 29
Meningkatnya Produktivitas Pertanian Untuk Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Serta Pemenuhan Kebutuhan Pangan Regional Maupun Nasional Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 29 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 11,88% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.46. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertanian Untuk Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Serta Pemenuhan Kebutuhan Pangan Regional Maupun Nasional Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Pertanaman	Indeks	289	235	285	121,28	189
2	Nilai Tukar Petani	Nilai	114,22	112	114,78	102,48	99,5

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Produktivitas Pertanian Untuk Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Serta Pemenuhan Kebutuhan Pangan Regional Maupun Nasional Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup” terdiri dari 2 indikator diantaranya adalah:

a. Indeks Pertanaman

Indeks Pertanaman adalah rata-rata masa tanam dan panen satu tahun pada lahan yang sama (IP = Luas Tambah Tanam / Luas Lahan Baku Sawah x 100). Indeks Pertanaman (IP) merupakan indikator intensitas pemanfaatan lahan sawah dalam satu tahun tanam yang mencerminkan tingkat produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan pertanian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Indeks Pertanaman pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 285 dari target yang ditetapkan

sebesar 235, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 121,28 persen. Dengan demikian, kinerja Indeks Pertanaman pada Tahun 2025 berada pada kategori sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan intensitas tanam telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui target yang direncanakan.

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 289, Indeks Pertanaman Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 4 poin. Penurunan tersebut relatif kecil dan tidak signifikan, serta masih menunjukkan tingkat Indeks Pertanaman yang tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya luas lahan baku sawah, adanya dinamika iklim, serta penyesuaian pola tanam petani pada sebagian wilayah yang berdampak pada intensitas tanam.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 sebesar 189, capaian Indeks Pertanaman Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPD secara signifikan, dengan selisih 96 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Indeks Pertanaman telah melampaui sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program peningkatan intensitas tanam dalam mendukung keberlanjutan produksi tanaman pangan dan ketahanan pangan daerah.

Di beberapa kecamatan indeks pertanaman di tahun 2025 ada yang mengalami kenaikan seperti Kecamatan Salem, Bumiayu, Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan Songgom dikarenakan meningkatnya luas tambah tanam dari tahun sebelumnya seluas 145.455 hektar, bertambah menjadi 178.983 hektar.

Potensi peningkatan Indeks Pertanaman di setiap wilayah dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, iklim, tanah, dan unsur hara secara terpadu serta melalui perbaikan pola tanam, baik padi maupun komoditas lainnya. IP perlu ditingkatkan dikarenakan untuk efisiensi sumberdaya, peningkatan produktivitas, peningkatan produksi, meningkatkan ketersediaan pangan dan untuk

kesejahteraan petani. Kunci keberhasilan indeks pertanaman, yaitu perlunya ketersediaan air yang cukup, varietas umur genjah dan toleran kekeringan, pengelolaan lahan, memaksimalkan pemanfaatan air, dan strategi adaptasi kekeringan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman tahun 2025 antara lain dukungan infrastruktur baik bersumber dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebanyak 10 unit bersumber dana APBD, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sebanyak 10 unit bersumber dana APBD, dan 11 unit bersumber APBD Provinsi. Pembangunan irigasi perpompaan untuk 8 lokasi menggunakan sumber dana APBN, 1 lokasi bersumber dana APBD Provinsi dan 1 unit menggunakan APBD Kabupaten.

Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pertanaman (IP), terutama melalui percepatan dan efisiensi proses budidaya pertanian. Ketersediaan alsintan seperti traktor roda dua/empat, rice transplanter, dan combine harvester mampu mempercepat pengolahan lahan, tanam, hingga panen. Dengan waktu olah tanah dan tanam yang lebih singkat, jeda antar musim tanam dapat ditekan, sehingga petani memiliki peluang untuk menambah frekuensi tanam dalam satu tahun pada luasan lahan yang sama. Untuk tahun 2025 bersumber dana APBN bantuan alsintan diberikan dengan total 183 unit antara lain Handsprayer Elektrik sebanyak 56 unit, pompa air 3 inch sebanyak 30 unit, pompa air 6 inch sebanyak 5 unit, tractor roda dua sebanyak 47 unit, tractor roda empat sebanyak 16 unit, combine harvester besar sebanyak 8 unit, cultivator sebanyak 1 unit, power thresher 6 unit, rice transplanter 5 unit, tractor crawler sebanyak 4 unit serta drone 5 unit, bantuan tersebut diberikan untuk kelompok tani/ gapoktan dan untuk brigade alsintan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh poktan/ gapoktan/ UPJA. Selain itu bantuan alsintan juga di berikan bersumber dari dana APBD Kabupaten yaitu berupa handsprayer elektrik 30 unit, pompa air 3 inch sebanyak 21 unit.

Capaian kinerja Indeks Pertanaman (IP) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung mencerminkan kondisi, kebijakan, serta intervensi program yang mampu mendorong peningkatan intensitas tanam melalui pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal. Faktor pendukung tersebut antara lain:

1) Ketersediaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang mempercepat proses olah tanah, tanam, dan panen.
2) Berkurangnya jeda waktu antar musim tanam sehingga memungkinkan peningkatan frekuensi tanam dalam satu tahun.
3) Dukungan infrastruktur irigasi yang relatif memadai, khususnya pada wilayah irigasi teknis dan setengah teknis.
4) Penerapan kalender tanam yang lebih tepat waktu sesuai kondisi iklim dan ketersediaan air.
5) Pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian lapangan kepada petani dan kelompok tani.
6) Sinergi program pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong intensifikasi pertanian.

Sementara itu, faktor penghambat menggambarkan berbagai keterbatasan dan tantangan yang masih dihadapi dalam upaya menjaga dan meningkatkan frekuensi tanam pada lahan pertanian yang tersedia. Faktor penghambat tersebut antara lain:

1) Ketidakpastian iklim dan perubahan pola curah hujan yang memengaruhi jadwal tanam.
2) Keterbatasan ketersediaan air irigasi pada lahan tadah hujan.
3) Keterbatasan tenaga kerja pertanian pada musim tanam dan panen tertentu.
4) Berkurangnya luas lahan baku sawah akibat alih fungsi lahan pertanian.
5) Keterbatasan modal dan kesiapan sebagian petani dalam menerapkan teknologi budidaya.
6) Risiko serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dapat menunda musim tanam berikutnya.

Pada Tahun 2025, capaian kinerja Indeks Pertanaman mencapai *98,28%* dengan *Pagu Anggaran sebesar Rp6.632.296.350* dan *Realisasi Anggaran sebesar Rp4.585.826.223***,** atau *69,14%* dari total pagu. Adapun *tingkat efisiensi anggaran* diperoleh dari perbandingan selisih efisiensi terhadap anggaran proporsional, yang menghasilkan nilai *29,65%***.** Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Pertanaman dapat direalisasikan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari anggaran yang seharusnya dibutuhkan, sehingga pelaksanaan kegiatan dinilai *efisien* tanpa mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan Indeks Pertanaman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan beberapa program/ kegiatan, yaitu :

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, yaitu mengawasi terkait ketersediaan alsintan, pupuk dan pestisida. Bantuan dan pelatihaan pascapanen untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian hortikultura dan perkebunan dan bantuan untuk peningkatan pengelolaan hasil budidaya dan perkebunan.
2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, yaitu dengan pembangunan prasarana pertanian berupa Jalan Usaha Tani sehingga mempermudah distribusi hasil pertanian, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sehingga dapat mengatasi ketersediaan air untuk pertanian. Peningkatan infrastuktur irigasi untuk meningkatkan luas tambah tanam sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman.

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemampuan daya beli petani terhadap kebutuhan hidup sehari-harinya. Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga yang diterima petani (IT) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan

harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Indeks harga yang dibayar petani (IB) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

Rata – rata Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2025 diangka 114,78. NTP lebih dari 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 112 maka capaian tahun 2025 sebesar 102,48 %. Maka realisasi di tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 114,22, Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,56 poin. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi petani, yang antara lain dipengaruhi oleh relatif stabilnya harga hasil pertanian di tingkat produsen, pengendalian biaya produksi, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan sarana produksi pertanian.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 sebesar 99,5, capaian Nilai Tukar Petani Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPD secara signifikan, dengan selisih sebesar 15,28 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa sasaran peningkatan kesejahteraan petani telah tercapai lebih cepat dari yang direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah, sekaligus mencerminkan efektivitas program dan kegiatan pembangunan sektor pertanian dalam mendukung peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Nilai NTP nasional pada tahun 2025 yaitu 123,26 jika dibandingkan dengan capaian nasional nilai tukar petani jawa tengah masih dibawah 9,04 poin, hal ini berarti jika dibandingkan rata – rata daerah daerah lain nilai tukar petani provinsi jawa tengah khususnya kabupaten brebes masih harus ditingkatkan.

Faktor yang mempengaruhi kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah penerimaan petani dari hasil usahatani, pengeluaran pangan, dan pengeluaran non pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi NTP, di antaranya: Kenaikan inflasi, Harga produksi, Harga konsumtif, biaya produksi. Dengan fasilitasi sarana pertanian seperti benih, pupuk, pestisida dan pembangunan irigasi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Untuk menekan salah satu faktor yang mempengaruhi indeks harga yang dibayar petani yaitu dengan menekan harga konsumsi petani, yang dilakukan antara lain dengan pengendalian inflasi antara lain dengan gerakan pangan murah. Yang sudah dilakukan untuk dapat menekan biaya produksi yaitu dengan peningkatan pembangunan prasarana pertanian seperti Pembangunan Jalan Usaha Tani, hal ini dapat menekan biaya angkut hasil pertanian. Kegiatan peningkatan kapasitas petani juga berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan hasil pertanian.

Berdasarkan pengelolaan anggaran Tahun 2025, dari total pagu anggaran sebesar Rp10.295.561.402,- terealisasi sebesar Rp7.994.586.121,- atau 77,65%. Dengan tingkat realisasi anggaran tersebut, persentase capaian kinerja yang diperoleh mencapai 102,48 %. yang menunjukkan bahwa target kinerja tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran yaitu dengan tingkat efisiesi sebesar 24,23%, di mana output dan outcome kinerja dapat dicapai secara optimal.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Tahun 2025 difokuskan pada penguatan aspek produksi, efisiensi biaya usaha tani, serta peningkatan kapasitas petani. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana

Pertanian diarahkan untuk menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian yang tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, dan terjangkau, sehingga mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani.

Selanjutnya, melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, pemerintah daerah berupaya meningkatkan dan menjaga keberfungsian infrastruktur pendukung usaha tani, seperti jaringan irigasi pertanian, jalan usaha tani, dan sarana pendukung lainnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi hasil pertanian, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani.

Selain itu, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan sebagai upaya mitigasi risiko usaha tani akibat dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, serta kejadian bencana alam. Program ini berperan penting dalam menjaga keberlanjutan produksi dan stabilitas pendapatan petani, sehingga turut mendukung peningkatan Nilai Tukar Petani.

Program Penyuluhan Pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam menerapkan teknologi budidaya, pengelolaan usaha tani, serta akses terhadap informasi pasar. Melalui pendampingan penyuluh pertanian yang berkelanjutan, petani didorong untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan Nilai Tukar Petani secara berkelanjutan.

30. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 30*

Sasaran Strategis 30
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Hutan

Tabel 3.47. Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Luasan Lahan Konservasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Peningkatan Luasan Lahan Konservasi	%	-	29.86	-	-	30

Indikator Peningkatan Luasan Lahan Konservasi dengan target capaian 29,76% pada tahun 2025 tidak dapat diperoleh realisasi capaiannya karena ketidakjelasan sumber data. Salah satu faktor utama yang menyebabkan sulitnya pengukuran indikator ini adalah tidak adanya sistem pendataan yang terintegrasi dan terpercaya terkait luas lahan konservasi yang bertambah setiap tahunnya. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang menyebabkan data ini sulit diukur, seperti kejelasan pihak atau penanggung jawab pengelola lahan, misalnya pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau masyarakat lokal.

31. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 31*

Sasaran Strategis 31
Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 31 dengan 1 indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.48. Capaian Indikator Sasaran Peningkatan PDRB sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Peningkatan PDRB sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi)	Rp. Juta	3.189.356,88	2.227.892,9	3.652.448,82	163,94%	2.272.450,77

Indikator *Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi)* merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk

mengetahui perkembangan nilai tambah bruto lapangan usaha penyediaan akomodasi sebagai bagian dari sektor pariwisata dalam struktur perekonomian daerah. Nilai ini dihitung berdasarkan metodologi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, melalui pendekatan produksi dengan menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh hotel, penginapan, homestay, dan bentuk akomodasi lainnya dalam satu tahun tertentu. Indikator ini mendukung sasaran strategis peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (Provinsi maupun Kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan *(financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bidang Pariwisata merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun di sektor pariwisata. Dalam capaian indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pemerintah daerah, terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, PDRB yang dimaksud hanya mencakup komponen Penyediaan Akomodasi.

Pada Tahun 2025, target PDRB sektor penyediaan akomodasi ditetapkan sebesar Rp2.227.892,9 juta, sedangkan realisasi mencapai Rp3.652.448,82 juta atau 163,94% dari target. Dengan demikian, capaian kinerja melampaui target sebesar Rp1.424.555,92 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pariwisata, khususnya penyediaan akomodasi, berkembang jauh lebih tinggi dari proyeksi perencanaan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.850.536,28 juta meningkat menjadi Rp3.189.356,88 juta pada Tahun 2024, dan kembali meningkat signifikan menjadi

Rp3.652.448,82 juta pada Tahun 2025. Tren ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan bahkan akseleratif dalam tiga tahun terakhir, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas wisata dan tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Brebes.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar Rp2.272.450,77 juta, realisasi Tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah tersebut secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa proyeksi dalam dokumen perencanaan relatif konservatif dibandingkan dengan dinamika pertumbuhan riil sektor pariwisata. Ke depan, diperlukan penyesuaian strategi dan target agar lebih mencerminkan potensi pertumbuhan aktual.

Untuk perbandingan regional, capaian PDRB sektor penyediaan akomodasi Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar Rp72.617,60 miliar (dalam jutaan rupiah setara Rp72.617.600 juta). Dibandingkan dengan capaian Kabupaten Brebes sebesar Rp3.652.448,82 juta, kontribusi Brebes masih merupakan bagian kecil dari total provinsi, namun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berpotensi meningkatkan pangsa daerah dalam struktur ekonomi pariwisata Jawa Tengah.

Mengacu pada hasil di atas terlihat bahwa program pendukung seperti Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata telah berjalan seperti yang diharapkan, secara keseluruhan untuk bidang pariwisata indikatornya dapat memenuhi target yang ditentukan, hal ini dikarenakan adanya perubahan tren pariwisata dimana sekarang pariwisata/wisata setidaknya harus bisa memenuhi 4 F yaitu *Fresh, Fun, Family*, dan *Food* yang artinya bahwa wisata sekarang haruslah wisata baru yang bisa dilakukan bersama keluarga, menyenangkan semua orang baik orang tua maupun anak, serta bisa untuk makan bersama, sehingga yang masih bisa eksis saat ini adalah wisata kuliner. Untuk wisata obyek maupun *spot selfy* sudah tidak banyak diminati.

Beberapa permasalahan dalam hal Peningkatan PDRB sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) diantaranya :

a. Kondisi rob yang sering terjadi menyebabkan akses jalan yang rusak sedikit menyulitkan di beberapa DTW
b. Kondisi jalan di dalam area wisata yang rusak banyak dikeluhkan oleh pengunjung sehingga mereka enggan datang kembali
c. Pekan Lebaran yang mengalami penurunan pengunjung secara drastis
d. Tidak adanya wahana yang mendukung di dalam area wisata
e. Pendapatan lain-lain yang kurang
f. Banyaknya fasilitas wisata yang rusak
g. Akses jalan menuju DTW rusak juga sempat ditutup beberapa bulan untuk perbaikan
h. Sepinya Pengunjung
i. Perubahan tren kunjungan wisata yang sekarang lebih mengarah pada wisata kuliner.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah penyatuan program yang saling mengisi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di bidang Pariwisata. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana wisata yang menyangkut Destinasi / Pengembangan pembangunan, penghijauan lokasi obyek wisata, mainan anak-anak dan remaja, sehingga akan ditingkatkan secara bertahap;
b. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang kepariwisataan, akan ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan diklat pariwisata;
c. Sektor transportasi menuju obyek wisata, ditingkatkan dengan melakukan kerja sama dengan instalasi terkait dan para pengusaha lokal sekitar obyek untuk mengusahakan angkutan (angkot);
d. Obyek wisata yang status kepemilikan tanahnya bukan milik Pemda agar statusnya dapat di ubah menjadi milik Pemda Kabupaten Brebes;
e. Lemahnya hubungan kerja sama kelembagaan antar wilayah pemerintah dan *stakeholders* kepariwisataan akan ditingkatkan;

f. Kegiatan promosi dan informasi kepariwisataan akan lebih ditingkatkan.

32. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 32*

Sasaran Strategis 32
Meningkatnya Daya Saing Industri Unggulan Daerah Untuk Penggerak Perekonomian

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 32 dengan 1 indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.49. Capaian Indikator Sasaran Peningkatan PDRB sektor Industri

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Peningkatan PDRB sektor Industri	Rp. Juta	11.980.741,76	10.119.460	13.105.438	129,51%	10.625.433,4

Indikator *Peningkatan PDRB Sektor Industri* merupakan ukuran nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha sektor industri pengolahan dalam satu tahun tertentu. PDRB sektor industri dihitung menggunakan pendekatan produksi, yaitu penjumlahan nilai tambah dari seluruh aktivitas industri pengolahan yang berada di wilayah Kabupaten Brebes, sesuai metodologi perhitungan PDRB regional. Indikator ini mendukung sasaran strategis peningkatan struktur ekonomi daerah melalui penguatan sektor sekunder sebagai penggerak pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Sumber angka realisasi diperoleh dari publikasi resmi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Brebes yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan hasil kompilasi data industri, survei usaha, serta perhitungan neraca regional.

Pada Tahun 2025, target PDRB sektor industri ditetapkan sebesar Rp10.119.460 juta, sedangkan realisasi mencapai Rp13.105.438 juta atau sebesar 129,51% dari target. Dengan demikian terdapat kelebihan capaian sebesar Rp2.985.978 juta dari target yang ditetapkan. Capaian

ini menunjukkan pertumbuhan sektor industri yang jauh melampaui proyeksi perencanaan tahunan.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar Rp10.848.792,04 juta dan Tahun 2024 sebesar Rp11.980.741,76 juta, realisasi Tahun 2025 sebesar Rp13.105.438 juta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya akselerasi pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Brebes.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar Rp10.625.433,4 juta, realisasi Tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah tersebut satu tahun lebih awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa proyeksi awal RPD relatif konservatif dibandingkan dengan dinamika pertumbuhan riil sektor industri yang terjadi.

Untuk perbandingan regional, PDRB sektor industri Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar Rp648.749,29 miliar (dalam satuan miliar rupiah). Secara proporsional, kontribusi Kabupaten Brebes masih merupakan bagian dari struktur industri Jawa Tengah, namun pertumbuhan yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan peran sektor industri daerah dalam mendukung perekonomian regional.

Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Permasalahan dalam hal pengembangan industri yang menjadi penghambat bagi keberhasilan sasaran indikator ini seperti:

a. Masalah perijinan bagi para pelaku IKM
b. Permasalahan pangsa pasar/distribusi produk hasil IKM
c. Pasokan bahan baku bagi para pelaku IKM
d. SDM dalam memanajemen usaha, dan lain-lain.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain :

a. Memberikan kemudahan dan pendampingan ijin usaha bagi industri kecil dan menengah.
b. Memberikan pembinaan bagi industri kecil dan menengah dalam memperkuat kluster industri dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan SDM, ketrampilan, serta magang bagi para pelaku IKM

di beberapa daerah yang mempunyai keunggulan atas sebuah produk IKM.

c. Memberikan fasilitasi kemitraan kerja sama bagi industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta .
d. Membantu industri kecil dan menengah dalam pengujian laboratorium atas produk yang dihasilkannya sehingga memenuhi standar yang dipersyaratkan bagi produk yang bersangkutan. Selain itu juga memberikan kemudahan untuk mendapatkan HAKI, Label Halal, PiRT.

33. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 33*

Sasaran Strategis 33
Meningkatnya Transaksi Perdagangan Produk Unggulan Daerah Dan Menjaga Distribusi Dan Ketersediaan Barang-Barang Kebutuhan Pokok

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 33 dengan 1 indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.50. Capaian Indikator Sasaran Peningkatan PDRB sektor Perdagangan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Peningkatan PDRB sektor Perdagangan	Rp. Juta	10.040.667,02	9.101.676,9	10.667.878,38	117,21	9.556.760,45

Indikator *Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan* merupakan ukuran nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, dalam satu tahun tertentu. PDRB sektor perdagangan dihitung menggunakan pendekatan produksi, yaitu penjumlahan nilai tambah dari seluruh aktivitas usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Brebes sesuai metodologi penghitungan PDRB regional. Indikator ini mendukung sasaran strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan sektor tersier sebagai penggerak distribusi barang dan jasa.

Sumber angka realisasi diperoleh dari publikasi resmi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Brebes yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan kompilasi data survei usaha perdagangan, laporan pelaku usaha, serta perhitungan neraca regional.

Pada Tahun 2025, target PDRB sektor perdagangan ditetapkan sebesar Rp9.101.676,9 juta, sedangkan realisasi mencapai Rp10.667.878,38 juta atau sebesar 117,21% dari target. Dengan demikian terdapat kelebihan capaian sebesar Rp1.566.201,48 juta dari target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Kabupaten Brebes tumbuh lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar Rp8.533.468,78 juta dan Tahun 2024 sebesar Rp10.040.667,02 juta, realisasi Tahun 2025 sebesar Rp10.667.878,38 juta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2023 ke 2024 dan tetap tumbuh pada tahun 2025 mencerminkan membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya perputaran ekonomi daerah.

Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar Rp9.556.760,45 juta, realisasi Tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah tersebut satu tahun lebih awal. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika sektor perdagangan berkembang lebih cepat dari asumsi perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen strategis.

Untuk perbandingan regional, PDRB sektor perdagangan Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar Rp262.081,27 miliar (dalam satuan miliar rupiah). Secara proporsional, kontribusi Kabupaten Brebes merupakan bagian dari struktur perdagangan regional Jawa Tengah, dan pertumbuhan positif di daerah turut mendukung kinerja perdagangan provinsi secara keseluruhan.

Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Permasalahan yang dihadapi dalam Upaya pencapaian indikator adalah :

a. Pedagang yang berjualan di masing-masing pasar semakin berkurang sehingga menurunkan PAD Retribusi Pasar.
b. Kondisi pasar yang semakin sepi menyebabkan jumlah pembeli yang datang ke pasar semakin berkurang sehingga mengurangi potensi pendapatan pedagang.
c. Semakin banyaknya penjualan secara *online* mengakibatkan minat pembeli untuk datang ke pasar semakin menurun .

Faktor-faktor kunci yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan ini dapat melibatkan kebijakan strategis pemerintah, investasi dalam infrastruktur perdagangan, pengembangan teknologi, dan peningkatan efisiensi operasional. Kondisi eksternal, seperti stabilitas ekonomi global dan perkembangan tren konsumen, juga mungkin memainkan peran dalam pencapaian ini.

Dampak positif dari peningkatan PDRB sektor Perdagangan dapat melibatkan penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan perusahaan, dan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di sektor Perdagangan dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor terkait, seperti transportasi dan logistik.

34. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 34*

Sasaran Strategis 34
Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 34 dengan 10 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 106,41% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.51. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Mantap	%	62,71	88	63,19	71,81	90
2	Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik	%	69	71	67,49	95,06	75
3	Cakupan Akses Air Minum Layak	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan Akses Jaringan Perpipaan	%	21,69	26	22,11	85,04	28
5	Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan	%	100	100	88,97	88,97	100
6	Persentase Penurunan *Blank Spot* Jaringan Seluler	%	0	23.08	0	0	30.77
7	Bantaran/tanggul sungai dan saluran pembuang berfungsi baik	%	46,55	45	50	111,11	30
8	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	Indeks	0,58	0.6	0,58	96,67	0.33
9	Meningkatnya persentase sanitasi aman	%	1,5	1.6	1,59	99,38	1
10	Persentase capaian penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan	%	95,91	100	97,41	97,41	100

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah” terdiri dari 10 indikator diantaranya adalah:

a. Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Mantap

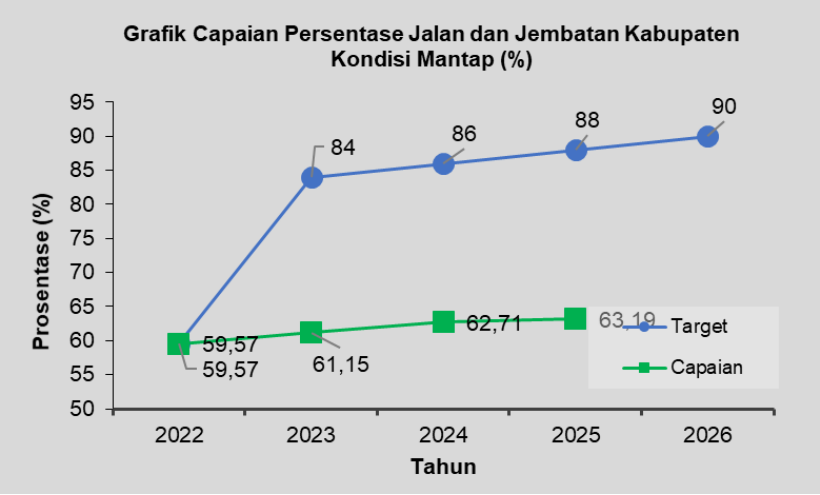
   Untuk mengukur capaian kinerja pada Indikator Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Mantap, pengukuran

dilakukan dengan Survei Kondisi Jalan (SKJ) dan Survei Kondisi Jembatan, kemudian hasil dari SKJ dihitung panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dibagi dengan panjang total jalan Kabupaten yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes, Untuk lebih jelas nya berikut formulasinya:

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (Km)}}{\text{Panjang Total Jalan Kabupaten (Km)}} \text{ x } 100\%$$

Data yang menjadi dasar perhitungan berasal dari Panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten sesuai dengan SK Bupati No. 620/145 tahun 2023 Tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten, yang setiap tahun di lakukan Survei Kondisi Jalan (SKJ) untuk mengetahui kondisi atau kualitas Jalan Kabupaten.

Tahun 2025 yaitu sebesar 63,19% (atau 764,756 km dari 1.210,194 km) sedangkan target pada tahun 2025 sebesar 88,00% artinya persentase tingkat capaian sasaran 2 berada pada angka 71,81% (belum melampaui target/ tidak tercapai).



Gambar 3.21. Grafik Capaian Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten Kondisi Mantap (%)

Capaian kinerja sasaran 1, Persentase jalan dan jembatan kabupaten kondisi mantap tahun 2025 berada pada angka 63,19% dengan capaian tersebut Sasaran 1 masih berada di bawah target, dimana

pada tahun 2025 target jalan kondisi mantap yaitu sebesar 68%, dengan hasil tersebut maka tingkat capaian indikator sasaran sebesar 71,81% (belum tercapai), penyebab umum tidak tercapainya indikator sasaran yaitu adanya laju penurunan kondisi jalan yang cepat tidak sebanding dengan kegiatan penanganan jalan mengingat Terbatasnya anggaran pada program penyelanggaraan jalan, selain itu penyebab utama penurunan kondisi jalan yaitu adanya kendaraan Over Dimension Overload (ODOL) yang melintasi beberapa ruas jalan Kabupaten, dan juga musim penghujan yang lebih Panjang tidak diantisipasi dengan menyediakan drainase permukaan/Saluran samping jalan yang dapat mengalirkan air dari permukaan jalan seringkali menyebabkan genangan yang dapat merusak permukaan jalan sehingga membuat umur layan jalan menjadi lebih pendek, Solusi kedepan untuk peningkatan pencapaian sasaran diantaranya Anggaran pada program jalan agar lebih di prioritaskan dan perlu adanya sosialisasi dan penerapan regulasi terkait batas muatan kendaraan terhadap kelas jalan.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 175.839.430.900,- dan terealisasi Rp. 167.764.762.515,- atau 95,41%, dengan capaian kinerja sebesar 71,81% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar -32,86%.

Pencapaian indikator sasaran ditunjang oleh Program Penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, dari Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan melalui output yang dihasilkan, Adapun pada tahun 2025 DPU Kab. Brebes telah melakukan peningkatan kondisi jalan dengan total Panjang 117,77 Km, terdiri dari rekonstruksi jalan : 80,44 Km, Pemeliharaan Berkala jalan : 8,15 Km, dan Pemeliharaan rutin jalan : 29,18 Km.



Gambar 3.22. Peningkatan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142



Gambar 3.23. Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jalan

b. Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik

Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Brebes merupakan indikator yang menggambarkan proporsi panjang atau jumlah jaringan irigasi yang berada dalam kondisi baik terhadap total jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah. Jumlah total daerah irigasi menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah 449. Panjang total saluran irigasi adalah 417.329 m' (terdapat beberapa Daerah Irigasi yang hilang/alih fungsi, dan tetap dicatatkan sebagai jaringan yang rusak berat karena belum ada berita acara terkait penghapusan data Daerah Irigasi), penghitungan capaian

kinerja indikator sasaran strategis didasarkan pada kondisi jaringan irigasi yang dibandingkan dengan total panjang jaringan irigasi dan diprosentasekan. Adapun kondisi jaringan irigasi di Kabupten Brebes pada tahun 2025 adalah :

Kondisi baik adalah sepanjang 281.665 m atau sebesar 67,49 %;
Kondisi rusak berat sepanjang 108.248 m atau sebesar 25,94 %;
Kondisi Rusak Ringan sepanjang 7.787 m atau sebesar 1,87 %;
Kondisi Rusak sedang sepanjang 19.628 m atau sebesar 4,70 %.

Pada tahun 2025, persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Brebes terealisasi sebesar 67,49 persen, lebih rendah dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 71 persen. Dengan demikian terdapat deviasi negatif sekitar 3,51 poin persentase, yang menunjukkan bahwa kinerja indikator ini belum mencapai sasaran tahunan yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 69 persen dan tahun 2023 sebesar 67 persen, kinerja tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024, meskipun masih sedikit lebih tinggi dibanding angka 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa tren perbaikan kondisi irigasi belum berlangsung secara konsisten dan masih terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun.

Dilihat dari perspektif jangka menengah, realisasi tahun 2025 sebesar 67,49 persen masih cukup jauh di bawah target akhir RPD 2026 sebesar 75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas infrastruktur irigasi perlu dipercepat dalam sisa periode perencanaan, baik melalui peningkatan volume rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi maupun melalui pemeliharaan berkala yang lebih optimal. Ketiadaan data pembanding capaian nasional atau regional menyebabkan perbandingan langsung terhadap standar nasional/regional belum dapat dilakukan, sehingga penilaian kinerja lebih difokuskan pada pencapaian terhadap target internal yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.

Sampai dengan penyusunan laporan ini, belum tersedia data pembanding capaian indikator pada tingkat nasional maupun

regional yang bersifat resmi dan terpublikasi untuk indikator dimaksud. Oleh karena itu, analisis kinerja difokuskan pada perbandingan antara realisasi dengan target tahunan dan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, serta tren capaian dari tahun ke tahun di Kabupaten Brebes.

Penurunan capaian tahun 2025 dibanding tahun 2024 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Anggaran pengelolaan irigasi (untuk rehab dan pemeliharaan jaringan irigasi) berkurang banyak untuk Tahun Anggaran 2025, Cuaca ektrim yang mengakibatkan adanya bencana alam seperti banjir, longsor dan lain-lain, yang mengakibatkan banyak jaringan irigasi yang mengalami kerusakan (banyak daerah irigasi yang berubah status dari kondisi baik/rusak ringan menjadi rusak berat), Beberapa Daerah Irigasi mengalami alih fungsi lahan, sehingga jaringan irigasi menjadi hilang/tertimbun (rusak berat).

Efisiensi dalam pencapaian indikator kinerja dapat dilihat dari anggaran yang digunakan. Untuk indikator kinerja Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik menggunakan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dimana dalam hal penggunaan anggaran terdapat efisiensi sebesar 3,77% dari anggaran sebesar Rp. 12.930.290.450 dan realisasinya sebesar Rp. 12.442.484.270 atau sebesar 96,23 % dari anggaran.

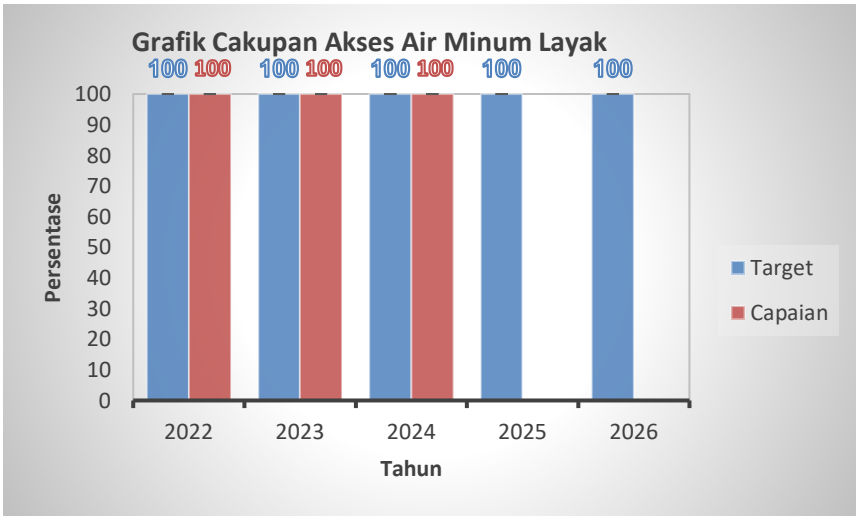
c. Cakupan Akses Air Minum Layak

Untuk mengukur capaian kinerja pada Indikator sasaran, pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah rumah tangga (SR) yang mengakses air bersih melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Brebes (SR) di Kabupaten Brebes. Untuk lebih jelasnya berikut cara menghitung Indikator Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Akses Air Bersih Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Brebes (SR)}} \text{ x } 100\%$$

Data yang menjadi dasar perhitungan adalah *database* cakupan layanan air minum yang dimiliki dinas pekerjaan umum yang selalu di lakukan pembaharuan data setelah kegiatan Program Penyediaan Air Minum selesai di laksanakan yang menghasilkan penambahan jumlah rumah tangga yang mendapat sambungan rumah (SR) penyediaan Air Minum melalui jaringan perpipaan.

Cakupan Akses Air Minum Layak (%) Tahun 2025 yaitu sebesar 100% (702.198 KK) artinya telah mencapai taget tahun 2025 yaitu sebesar 100%, Capain Cakupan Akses Air Minum Layak terdiri dari Akses Jaringan Perpipaan sebanyak 155.268 KK atau 22,11% dan Jaringan Bukan Perpipaan sebanyak 546.930 KK atau 77,89%, sehingga total persentase tingkat capaian sebesar 100,00% (sesuai target/ tercapai).



Gambar 3.24. Grafik Cakupan Akses Air Minum Layak(%)

Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang menghasilkan Sebanyak 1742 SR (Sambungan rumah) penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Kepada Masyarakat, Sehingga berdampak pada minigkatnya cakupan layanan Air Minum yang layak melalui Jaringan Perpipaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam penyediaan air minum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes bersama OPD lain

yang tergabung dalam tim Pokja AMPL (Air minum dan Penyehatan Lingkungan) yang saat ini bernama Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Bidang Air Minum, Pokja PKP adalah salah satu kelompok kerja yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait beserta stakeholder terkait lainnya saling bersinergi dan bekerja untuk membangun sarana dan prasarana air bersih layak melalui jaringan perpipaan untuk masyarakat, sedangkan untuk yang jaringan non perpipaan diampu oleh OPD lain, selain itu penyediaan jaringan air bersih perpipaan juga bekerja sama dengan PDAM dan PAMSIMAS.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes bersama OPD lain yang tergabung dalam tim Pokja AMPL (Air minum dan Penyehatan Lingkungan) yang saat ini bernama Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Bidang Air Minum adalah salah satu kelompok kerja yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait beserta *stakeholder* terkait lainnya yang ikut dalam mewujudkan semua masyarakat untuk mendapat akses air bersih layak khususnya dalam membangun sarana dan prasarana air bersih melalui jaringan perpipaan, sedangkan untuk yang non perpipaan diampu oleh OPD lain. Untuk jaringan air bersih perpipaan juga bekerja sama dengan PDAM dan PAMSIMAS.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 11.899.904.400,- dan terealisasi Rp. 11.449.172.759,- atau 96,21%, dengan capaian kinerja sebesar 100% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 3,79%.

Capaian indikator sasaran merupakan hasil dari adanya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, sebagai informasi pada tahun 2025 DPU Kab. Brebes telah melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang menghasilkan sebanyak 1.742 SR (Sambungan rumah) sehingga memberi dampak positif dengan terus Meningkatnya akses air minum layak bagi

masyarakat melalui Sistem penyediaan Air Minum melalui Jaringan Perpipaan.



Gambar 3.25. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Kaligangsa Kulon Kec. Brebes Kab. Brebes



Gambar 3.26. Dokumentasi Sambungan Rumah Desa Limbangan

d. Cakupan Akses Jaringan Perpipaan

Untuk mengukur capaian kinerja pada Indikator sasaran, pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah rumah tangga (SR) yang mengakses air bersih melalui jaringan perpipaan dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Brebes (SR) di Kabupaten Brebes. Untuk lebih jelas nya berikut formulasi penghitungannya:

$$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Akses Air Bersih Melalui Jaringan Perpipaan (SR)}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Brebes (SR)}} \text{ x } 100\%$$

Data yang menjadi dasar perhitungan adalah *database* cakupan layanan air minum yang dimiliki dinas pekerjaan umum yang selalu

di lakukan pembaharuan data setelah kegiatan Program Penyediaan Air Minum selesai dilaksanakan yang menghasilkan penambahan jumlah rumah tangga yang mendapat sambungan rumah (SR) penyediaan Air Minum melalui jaringan perpipaan.

Indikator Cakupan Akses Jaringan Perpipaan (%) Tahun 2025 yaitu sebesar 22,11% (atau 155.268 KK dari 702.198 KK), belum mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 26 persen. Hal ini menunjukkan terdapat selisih kekurangan sekitar 3,89 poin persentase dibanding target yang direncanakan, sehingga kinerja indikator belum memenuhi sasaran tahunan yang diharapkan. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 21,69 persen dan tahun 2023 sebesar 20,82 persen, terlihat adanya tren peningkatan bertahap selama tiga tahun terakhir, meskipun laju peningkatannya masih lebih rendah dari yang direncanakan dalam dokumen perencanaan.

Dari perspektif jangka menengah, capaian sampai dengan tahun 2025 sebesar 22,11 persen masih berada di bawah target akhir RPD 2026 yang ditetapkan sebesar 28 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa percepatan peningkatan cakupan layanan jaringan perpipaan perlu ditingkatkan dalam sisa periode perencanaan, mengingat selisih yang masih cukup besar antara realisasi eksisting dan target jangka menengah. Ketiadaan data pembanding capaian nasional atau regional dalam dokumen ini menyebabkan perbandingan langsung dengan standar nasional/regional belum dapat dilakukan secara kuantitatif, namun secara umum tren di banyak daerah menunjukkan bahwa cakupan perpipaan masih menjadi tantangan dan membutuhkan investasi besar serta penguatan manajemen layanan.

Peningkatan kinerja dari 20,82 persen (2023) menjadi 22,11 persen (2025) menunjukkan adanya keberhasilan program perluasan sambungan rumah, peningkatan kapasitas produksi, atau perbaikan jaringan yang telah berjalan, walaupun belum cukup untuk memenuhi target tahunan dan target RPD. Kegagalan pencapaian target tahunan dan target jangka menengah yang masih jauh dapat

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kapasitas produksi air baku, keterbatasan jaringan distribusi di wilayah-wilayah pinggiran, kemampuan keuangan daerah dan PDAM yang belum memadai untuk investasi besar, serta faktor kesediaan masyarakat menjadi pelanggan jaringan perpipaan. Alternatif solusi yang umumnya dilakukan antara lain: mendorong peningkatan investasi infrastruktur air minum (baik melalui APBD, APBN, maupun skema kerja sama), optimalisasi pemanfaatan aset yang ada, pengurangan kebocoran air (*non revenue water),* dan peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta untuk pengembangan SPAM baru.



Gambar 3.27. Grafik Capaian Cakupan Akses Jaringan Perpipaan (%)

Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang menghasilkan Sebanyak 1742 SR (Sambungan rumah) penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Kepada Masyarakat, Sehingga berdampak pada meningkatnya cakupan layanan Air Minum yang layak melalui Jaringan Perpipaan, Kendati demikian hasil dari kegiatan tersebut belum mampu mendongkrak secara signifikan cakupan layanan air minum jaringan perpipaan, mengingat kebutuhan air minum layak yang sangat besar, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk.

Dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam penyediaan air minum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes bersama OPD lain yang tergabung dalam tim Pokja AMPL (Air minum dan Penyehatan Lingkungan) yang saat ini bernama Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Bidang Air Minum, Pokja PKP adalah salah satu kelompok kerja yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait beserta stakeholder terkait lainnya saling bersinergi dan bekerja untuk membangun sarana dan prasarana air bersih layak melalui jaringan perpipaan untuk masyarakat, sedangkan untuk yang jaringan non perpipaan diampu oleh OPD lain, selain itu penyediaan jaringan air bersih perpipaan juga bekerja sama dengan PDAM dan PAMSIMAS.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 11.899.904.400,- dan terealisasi Rp. 11.449.172.759,- atau 96,21%, dengan capaian kinerja sebesar 85,04% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar -13,14%.

Capaian indikator sasaran ini merupakan hasil dari adanya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, sebagai informasi pada tahun 2025 DPU Kab. Brebes telah melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang menghasilkan sebanyak 1.742 SR (Sambungan rumah) sehingga memberi dampak positif yaitu terus Meningkatnya akses air minum layak bagi masyarakat melalui Sistem penyediaan Air Minum melalui Jaringan Perpipaan.



Gambar 3.28. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes



Gambar 3.29. Dokumentasi Sambungan Rumah Desa Limbangan

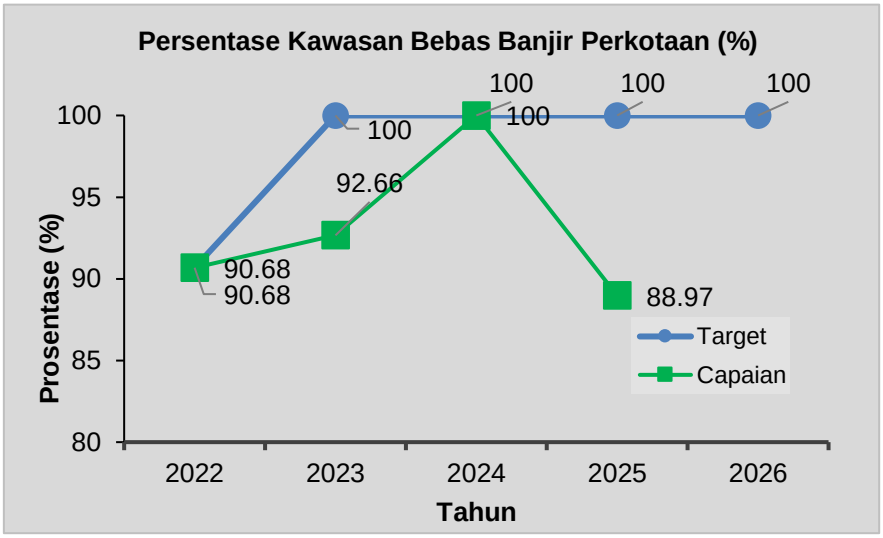
e. Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan

Untuk mengukur capaian kinerja pada Indikator sasaran, pengukuran dilakukan dengan pengukuran luas kawasan bebas genangan perkotaan (Ha) dibagi dengan luas total titik genangan perkotaan (Ha), Untuk lebih jelasnya berikut formulasi perhitungannya:

$$= \frac{\text{Luas Kawasan Bebas Genangan Perkotaan (Ha)}}{\text{Luas Total TItik Genangan Perkotaan (Ha)}} \text{ x } 100\%$$

Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan (%) Tahun 2024 yaitu sebesar 88,97% (atau 135,78 Ha dari 152,61 Ha) dari target 100,00% dengan persentase tingkat capaian sebesar 88,97% (melampaui target/ tercapai). Pada tahun 2025 DPU Kab. Brebes telah melakukan perbaikan drainase dengan total saluran drainase yang telah di perbaiki sepanjang 99,81 Km, Sehingga bisa

mengurangi risiko banjir pada titik-titik rawan banjir yang ada di kota Brebes.



Gambar 3.30. Grafik Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan

Kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes adalah meningkatkan kondisi saluran drainase juga pemeliharaan saluran drainase yang mengalami kerusakan serta membentuk tim "SIJAGA BANJIR" atau Sistem Jejaring Jaga Banjir yaitu tim yang selalu siap siaga jika hujan deras dan terjadi genangan di kawasan kota Brebes akan segera bergerak cepat untuk menanganinya, Namun pada tahun 2025 diakibatkan oleh hujan intensitas tinggi, terjadi genangan di beberapa titik di Kota Brebes. Solusi kedepan untuk peningkatan pencapaian indikator diantaranya Melakukan peningkatan sistem drainase yang ada di Kota Brebes melalui Normalisasi saluran drainase dan perbaikan Sarana pendukungnya, selaian itu perlu adanya Reviu masterplan drainase Kota Brebes, untuk memetakan Kawasan rawan genangan terbaru yang ada di Kota Brebes, supaya nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanganan yang lebih efektif untuk mengatasi banjir di Kawasan Perkotaan Brebes.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 13.902.850.200,- dan terealisasi Rp. 13.428.458.887,- atau 96,59%, dengan capaian

kinerja sebesar 85,04% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar -13,58%.



Gambar 3.31. Pemeliharaan Rutin Drainase Perkotaan Sub Sistem Kali Kamal Brebes



Gambar 3.32. Pemeliharaan Rutin Drainase Sigeleng



Gambar 3.33. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Drainase Kec. Bumiayu

f. Persentase Penurunan *Blank Spot* Jaringan Seluler

Persentase Penurunan *Blank Spot* Jaringan Seluler, didefinisikan sebagai tingkat persentase penurunan wilayah yang belum mendapat akses jaringan seluler maupun internet di Kabupaten Brebes. Adapun rumus penghitungan untuk indikator tersebut adalah:

Indikator	Formulasi Penghitungan
Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	$\frac{(\text{Jumlah Desa\&Kelurahan} - \text{Jumlah Desa\&Kelurahan } \textit{Blank Spot})}{\text{Jumlah Desa\&Kelurahan}} \times 100\%$

Pada tahun 2025, belum terjadi pengurangan area blank spot, sehingga target penurunan sebesar 23,08% belum dapat dicapai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah blank spot yang sebagian besar bukan merupakan kawasan permukiman, dengan jumlah penduduk yang relatif sangat sedikit, sehingga kurang menarik bagi penyedia menara telekomunikasi untuk berinvestasi karena dinilai tidak menguntungkan secara bisnis. Pada tahun 2023, capaian justru menunjukkan penambahan wilayah blank spot sebesar (-15,38%), sementara pada tahun 2024 tidak terjadi perubahan. Indikator ini merupakan indikator kinerja mandiri sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Indikator kinerja tersebut didukung melalui Program Aplikasi Informatika, namun hasil capaian masih dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, antara lain keterbatasan pembangunan infrastruktur jaringan seperti menara BTS dan akses teknologi, kondisi topografi dan geografis yang sulit dijangkau sinyal, adanya gangguan interferensi jaringan maupun faktor cuaca, serta keterbatasan sumber daya dan investasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi percepatan pembangunan infrastruktur jaringan melalui penambahan menara BTS dan perluasan cakupan layanan, pemanfaatan teknologi yang lebih maju seperti 4G LTE, 5G, dan beamforming untuk meningkatkan jangkauan sinyal, penggunaan konektivitas satelit di wilayah terpencil, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna

mendorong investasi dan kemudahan perizinan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 51.783.750,- dan terealisasi Rp. 51.691.938,- atau 99,82%, dengan capaian kinerja sebesar 0% maka Indikator ini tidak terdapat efisiensi.

g. Bantaran/tanggul sungai dan saluran pembuang berfungsi baik

Penghitungan indikator sasaran didasarkan pada pencapaian tahun sebelumnya ditambah dengan pencapaian tahun ini terus dibandingkan dengan total panjang saluran dan dipersentasekan. Pencapaian tahun ini dihitung berdasarkan paket pekerjaan yang dikerjakan. Contoh penghitungan dalam tahun ini Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Tebing Saluran Pembuangan Laren, Purbanala Desa Jatisawit yang masuk dalam sub kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai.

Tabel 3.52. Penghitungan Paket pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuangan

KEGIATAN : PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : REHABILITASI TANGGUL SUNGAI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TALUD PENGAMAN TEBING SALURAN PEMBUANG LAREN, PURBANALA DESA JATISAWIT
LOKASI : DESA JATISAWIT, KEC. BUMIAYU
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SKET / GAMBAR	PERHITUNGAN								VOLUME
1	2	3								4
			B	H	N		L	A	V	
	PEK.PASANGAN									
	POT. A-A Pj = 39,90 M' (Ka)									
	Galian tanah biasa									**43,89 M³**
		1	1,00	1,10	1,00		39,90	1,10	43,89	43,89 M³
	Beton mutu f'c=10 MPA, Slump (10 ± 2,5) cm									**58,93 M³**
	pondasi	1	1,00	1,10	1,00		39,90	1,10	43,89	43,89 M³
	kolom	2	0,40 + 0,80 / 2,00	3,70	1,00	13,00	0,30	28,86	8,66	8,66 M³
										M³
	Balok	3	0,40	0,20	2,00		39,90	0,16	6,38	6,38 M³
	Pasangan batu belah 1:4									**79,92 M³**
		1	0,40 + 0,80 / 2,00	3,70	1,00	12,00	3,00	26,64	79,92	79,92 M³
	Plesteran 1 : 3									**22,74 M²**
		1	0,57		1,00		39,90	0,57	22,74	22,74 M²
	Siaran 1 : 2									**133,20 M²**
		1		3,70	1,00	12,00	3,00	44,40	133,20	133,20 M²
	Pembesian									**1.089,39 kg**
	Angkur besi 2Ø12	1	2,00	0,60	1,00	39,90		0,888	42,52	42,52 kg
	Kolom 6Ø12	2		6,00		13,00	5,30	0,888	367,10	367,10 kg
	Begel Ø6-150	3	36,00			13,00	1,20	0,222	124,69	124,69 kg
	Ring balok 6Ø12	4		6,00		2,00	39,90	0,888	425,17	425,17 kg
	Begel Ø6-150	5	266,00			2,00	1,10	0,222	129,91	129,91 kg
	Pipa Drainase PVC Ø 1,5" + Ijuk perjarak 1 m									**38,40 M'**
		1	4,00	0,80		12,00			38,40	38,40 M'
	Bekisting									**94,23 M²**
		1		1,0	1,00		39,90		39,90	39,90 M²
		2		0,3	1,00	13,00	3,70		14,43	14,43 M²
		3		0,3	2,00	2,00	39,90		39,90	39,90 M²
	Timbunan									**37,00 M³**
		1	0,50 + 1,50 / 2,00	1,85	1,00		20,00		37,00	37,00 M³

Rekapitulasi pekerjaan :

Galian tanah biasa	**43,89 M³**
Beton mutu f'c=10 MPA, Slump (10 ± 2,5) cm	**58,93 M³**
Pasangan batu belah 1:4	**79,92 M³**
Plesteran 1 : 3	**22,74 M²**
Siaran 1 : 2	**133,20 M²**
Pembesian	**1.089,39 kg**
Pipa Drainase PVC Ø 1,5" + Ijuk perjarak 1 m	**38,40 M'**
Bekisting	**94,23 M²**
Timbunan	**37,00 M³**

Page 1

Dari contoh perhitungan diatas diperoleh bahwa paket pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Tebing Saluran Pembuangan Laren Purbanala Desa Jatisawit diperoleh panjang saluran pembuang yang di rehab sepanjang 39,90 meter.

Total panjang saluran pembuang yang direhab/normalisasi tahun 2025 sepanjang 53.730 m atau 53,73 Km. sedangkan pencapaian tahun 2024 sepanjang 667,76 Km. Sehingga untuk total pencapaian realisasi tahun 2025 = perolehan sampai tahun 2024 + perolehan tahun 2025

Total realisasi = 667,76 Km + 53,73 Km

Total realisasi = 721,49 Km

Total Panjang saluran 1.434,4 Km

Sehingga prosentase realisasi = 721,49 /1.434,4 x 100 %

Sehingga prosentase realisasi = 50 %

Pada tahun 2025, capaian persentase bantaran/tanggul sungai dan saluran pembuang berfungsi baik di Kabupaten Brebes sebesar 50 persen, tepat sama dengan target yang ditetapkan sebesar 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator untuk tahun berjalan telah memenuhi sasaran tahunan yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 46,54 persen dan tahun 2023 sebesar 44,87 persen, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir, dengan kenaikan bertahap dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah daerah dalam bentuk pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir telah memberi dampak positif terhadap proporsi bantaran/tanggul dan saluran pembuang yang berfungsi baik.

Dari perspektif jangka menengah, realisasi 2025 sebesar 50 persen secara nominal berada jauh di atas target akhir RPD 2026 yang tercantum sebesar 30 persen. Sampai dengan penyusunan laporan ini, belum tersedia data pembanding capaian indikator pada tingkat nasional maupun regional yang bersifat resmi dan terpublikasi untuk indikator dimaksud. Oleh karena itu, analisis kinerja difokuskan pada perbandingan antara realisasi dengan target tahunan dan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, serta tren capaian dari tahun ke tahun di Kabupaten Brebes.

Keberhasilan mencapai target tahun 2025 dan tren peningkatan selama beberapa tahun terakhir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes dalam melakukan pengawasan kegiatan infrastruktur khususnya dalam kegiatan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA).

Efisiensi dalam pencapaian indikator kinerja dapat dilihat dari anggaran yang digunakan. Untuk indikator kinerja Peningkatan Kualitas Tanggul Sungai dan Saluran Pembuang menggunakan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan

Pengelolaan SDA dan Bangunan Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dimana dalam hal penggunaan anggaran terdapat efisiensi sebesar 1,18% dari anggaran sebesar Rp. 26.303.843.500 dan realisasinya sebesar Rp. 25.992.754.208 atau sebesar 98,82% dari anggaran.

h. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Brebes merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kapasitas dan ketahanan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan dalam menghadapi bencana, yang dihitung berdasarkan pemenuhan 7 parameter/prioritas dan 71 indikator yang dinilai melalui kuesioner terstruktur dan diverifikasi. Nilai IKD diperoleh dengan mengonversi skor hasil penilaian terhadap 71 indikator (masing-masing terdiri dari beberapa pertanyaan kunci) menjadi angka indeks 0–1 melalui perangkat lunak/alat hitung resmi BNPB, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan kapasitas dan ketahanan yang semakin baik. Indikator ini mendukung sasaran peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana serta menjadi instrumen monitoring dan evaluasi risiko bencana di daerah yang terintegrasi dengan Indeks Risiko Bencana (IRB).

IKD dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan 7 (tujuh) prioritas dengan 71 indikator dimana untuk setiap indikator terdiri atas 4 (empat) pertanyaan. Ke-7 prioritas tersebut adalah (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Setiap prioritas akan dinilai level indikatornya, apabila:

Level 1 : Belum ada inisiatif untuk menghasilkannya..

Level 2 : Hasil/penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum sesuai dengan kualitas standar.

Level 3 : Tersedia namun manfaatnya belum terasa menyeluruh.

Level 4 : Telah dirasakan manfaatnya secara optimal.

Level 5 : Manfaat dari hasil/penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang.

Monitoring dan evaluasi Tingkat Ketahanan untuk setiap prioritas penilaian:

Tingkat Ketahanan Tinggi : level 4 – 5

Tingkat Ketahanan Sedang : level 3

Tingkat Ketahanan Rendah: level 1 -2

Data yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian IKD berasal dari BPBD Kabupaten Brebes dan OPD teknis terkait. IKD memotret secara keseluruhan peran semua pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pendekatan Tingkat Ketahanan Daerah yang digunakan untuk mengukur IKD menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan disertai data dukuug yang merepresentasikan pencapaian indikator dimaksud. Setiap indikator terdiri atas 4 (empat) pertanyaan. Pertanyaan dijawab Ya mendapat nilai 1 (satu) dan yang dijawab Tidak mendapat nilai 0 (nol). Jika menjawab Ya, maka perlu melampirkan data dukung.

Kriteria Tingkat Ketahanan Daerah berdasarkan nilai IKD :

Nilai IKD 0 – 0,40 : Tingkat Ketahanan Daerah Rendah

Nilai IKD 0,41 – 0,80 : Tingkat Ketahanan Daerah Sedang

Nilai IKD 0,81 – 1,00 : Tingkat Ketahanan Daerah Tinggi

Pada tahun 2025, realisasi IKD Kabupaten Brebes sebesar 0,58, berada di bawah target penyesuaian tahun 2025 sebesar 0,60 yang ditetapkan lebih tinggi karena capaian tahun 2024 telah melampaui target awal dalam RPD tahun 2025. Dibandingkan target tersebut, terdapat selisih kekurangan sekitar 0,02 poin indeks, sehingga kinerja tahun 2025 belum memenuhi sasaran tahunan yang telah dinaikkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 0,58 dan tahun 2023 sebesar 0,57, kinerja IKD menunjukkan pola relatif stagnan, yakni peningkatan tipis dari 2023 ke 2024, kemudian bertahan di angka yang sama (0,58) pada tahun 2025 tanpa kenaikan

lebih lanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penguatan ketahanan daerah sudah mencapai level tertentu, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong lompatan peningkatan nilai indeks.

Dilihat dari perspektif jangka menengah, realisasi IKD tahun 2025 sebesar 0,58 jauh berada di atas target akhir RPD 2026 yang tercantum sebesar 0,33. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah dalam RPD tampak sangat konservatif atau tidak lagi relevan dengan perkembangan kebijakan dan capaian terkini IKD, karena level ketahanan faktual daerah sudah berada jauh di atas angka target yang direncanakan. Dengan demikian, secara angka dapat dikatakan bahwa sasaran jangka menengah telah terlampaui, namun tetap diperlukan konsistensi upaya peningkatan kualitas ketahanan, mengingat nilai indeks masih dapat ditingkatkan mendekati kategori yang lebih tinggi sesuai klasifikasi BNPB.

Terkait pembandingan dengan standar nasional/regional, untuk nilai IKD tahun 2025 BNPB belum menerbitkan data resmi yang terpublikasi luas per provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga perbandingan kuantitatif dengan rata-rata nasional atau regional belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, analisis kinerja pada tahun laporan ini difokuskan pada perbandingan antara realisasi dengan target tahunan dan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan daerah, serta tren capaian IKD Kabupaten Brebes sendiri dari tahun ke tahun. Setelah BNPB menerbitkan nilai IKD nasional/regional tahun 2025, data tersebut dapat digunakan sebagai pembanding dalam laporan kinerja periode berikutnya.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 2.463.261.800,- dan terealisasi Rp. 2.307.434.567,- atau 93,67%, dengan capaian kinerja sebesar 96,67% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 3,10%.

Indikator nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dimana dalam program tersebut terdapat beberapa aktivitas, seperti:

1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
3) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
4) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
5) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
6) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
7) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
8) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
9) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
10) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
11) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bencana
13) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
14) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

i. Meningkatnya persentase sanitasi aman

Akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dan dikelola dengan baik. Akses sanitasi aman juga memperhatikan aspek pencemaran lingkungan. Syarat-syarat akses sanitasi aman :

1) Kloset menggunakan leher angsa
2) Tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)
3) Air limbah domestik diolah dengan tangki septik sesuai standar
4) Tangki septik disedot secara berkala atau melalui jaringan perpipaan terpusat

5) Air limbah dikelola melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) secara aman

Manfaat akses sanitasi aman Berpengaruh terhadap kesehatan, Membantu mewujudkan ekonomi hijau yang ramah lingkungan, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu fenomena terkait sanitasi adalah fasilitas WC yang tidak inklusif bagi masyarakat berkebutuhan khusus, contohnya adalah penyandang disabilitas. Fasilitas WC inklusif bagi disabilitas wajib memiliki beberapa komponen, seperti adanya kunci/gembok, lampu, sabun, ketersediaan air, tempat sampah, fasilitas penyangga, dan ketiadaan lubang mengintip. Ketiadaan komponen tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas tidak mampu melakukan BAB dengan nyaman.

Pada tahun 2025, realisasi persentase sanitasi aman di Kabupaten Brebes sebesar 1,59 persen, berada di bawah target penyesuaian tahun 2025 sebesar 1,6 persen yang dinaikkan karena capaian 2024 telah melampaui target awal dalam RPD. Dibandingkan target tersebut, terdapat selisih kekurangan sekitar 0,01 poin persen, sehingga kinerja tahun 2025 belum memenuhi sasaran tahunan yang telah disesuaikan ke atas. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 1,5 persen dan tahun 2023 sebesar 1,59 persen, kinerja menunjukkan pola fluktuatif: peningkatan dari 2023 ke 2024, kemudian kembali ke level 2023 pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan akses sanitasi aman belum konsisten dan masih sangat rendah secara keseluruhan.

Dari perspektif jangka menengah, realisasi tahun 2025 sebesar 1,59 persen jauh berada di atas target akhir RPD 2026 yang tercantum sebesar 1 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah dalam RPD tampak sangat konservatif atau tidak lagi mencerminkan ambisi nasional untuk akses sanitasi aman, karena capaian faktual daerah sudah melebihi angka target tersebut. Meskipun demikian, nilai rendah secara absolut (di bawah 2 persen) mengindikasikan perlunya percepatan intervensi agar tidak hanya

melampaui target internal, tetapi juga mendekati standar nasional yang lebih ambisius.

Tidak tersedianya data pembanding capaian nasional atau regional untuk indikator ini dalam dokumen penyusunan LKjIP menyebabkan perbandingan langsung dengan standar nasional/regional belum dapat dilakukan secara kuantitatif. Analisis kinerja sehingga lebih difokuskan pada pencapaian terhadap target tahunan dan jangka menengah daerah, serta tren internal Kabupaten Brebes.

Realisasi anggaran indikator Meningkatnya Persentase Sanitasi Aman pada Tahun 2025 mencapai Rp. 8.891.566.273,- dari pagu Rp. 8.961.730.400,- atau sebesar 99,22%. Dengan capaian kinerja sebesar 99,38% dan tingkat efisiensi 0,16%, penggunaan anggaran dinilai sangat efisien karena mampu menghasilkan kinerja yang melampaui target perencanaan.

Capaian indikator Meningkatnya Persentase Sanitasi Aman didukung oleh tersedianya pendanaan yang memadai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga program sanitasi dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, khususnya pengelolaan air limbah domestik, turut mendorong keberhasilan capaian kinerja. Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang mengacu pada standar teknis sanitasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang cukup baik juga menjadi faktor penting dalam peningkatan akses sanitasi aman.

Capaian indikator Meningkatnya Persentase Sanitasi Aman masih menghadapi kendala utama berupa belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Brebes. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan lumpur tinja belum dapat dilakukan sesuai standar sanitasi aman, sehingga berdampak pada rendahnya cakupan layanan sanitasi aman secara menyeluruh.

Sebagai upaya peningkatan capaian indikator Meningkatnya Persentase Sanitasi Aman, Pemerintah Kabupaten Brebes akan memperluas cakupan layanan sanitasi aman melalui pembangunan

sarana sanitasi individual yang memenuhi standar teknis. Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan perencanaan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagai bagian dari pemenuhan sistem sanitasi aman yang berkelanjutan. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi aman bagi kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya, akan diperkuat sinergi pendanaan dan perencanaan lintas sektor guna mempercepat peningkatan akses sanitasi aman secara terpadu dan berkelanjutan.

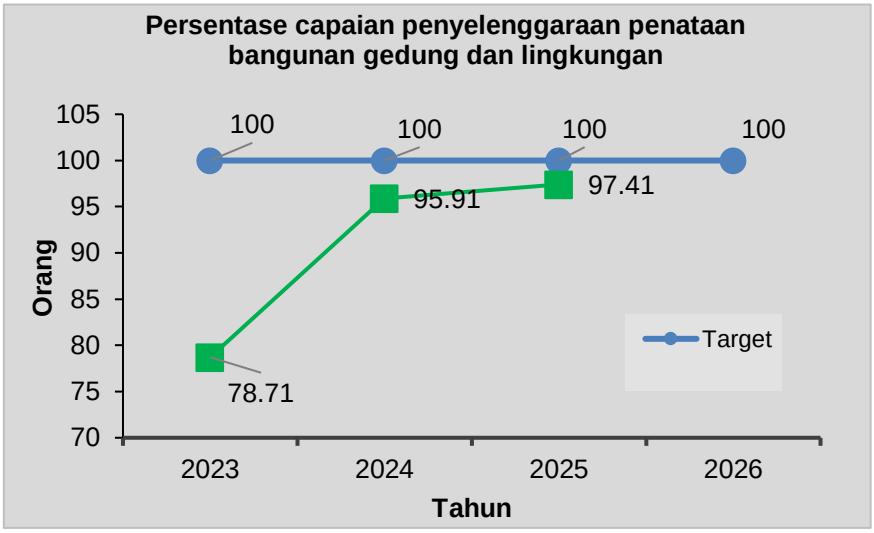
j. Persentase capaian penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan

Untuk mengukur capaian kinerja pada Indikator sasaran pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dibagi jumlah total permohonan PBG dan SLF. Untuk lebih jelasnya berikut cara perhitungan Indikator Sasaran:

$$= \frac{\text{Jumlah Penerbitan PBG dan SLF (Permohonan)}}{\text{Jumlah Total Permohonan PBG dan SLF}} \text{ x } 100\%$$

Adapun data yang menjadi dasar perhitungan Berasal dari laporan Capaian jumlah pengajuan permohonan PBG dan SLF yang menjadi salah satu layanan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Brebes.

Indikator Persentase kualitas bangunan gedung sesuai dengan norma standar dan peraturan yang berlaku, Capaian sasaran tersebut pada Tahun 2025 yaitu sebesar 97,41%, terdiri dari PBG sejumlah 441 terbit dari 428 permohonan dokumen lengkap, dan SLF sejumlah 137 terbit dari dari 139 permohonan dokumen lengkap, Adapun target pada tahun 2025 yaitu 100% artinya tingkat capaian indikator yaitu 97,41%.



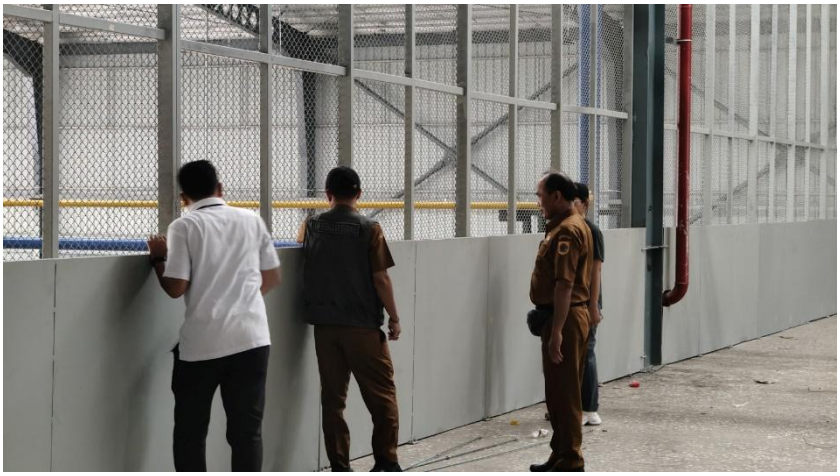
Gambar 3.34. Grafik Capaian Persentase kualitas bangunan gedung sesuai dengan norma standar dan peraturan yang berlaku

Capaian kinerja Indikator sasaran 5 telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 97,41%, kegiatan sosialisasi PBG dan SLF juga secara rutin menjadi agenda dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diadakan setahun sekali. Dengan adanya FKP semakin menambah pengetahuan pemohon PBG dan SLF sehingga proses pelengkapan syarat pengajuan PBG dan SLF semakin meningkat, dan berdampak pada capaian Indikator sasaran 5 lebih optimal pada tahun 2025.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 456.647.300,- dan terealisasi Rp. 297.587.415,- atau 65,17%, dengan capaian kinerja sebesar 97,41% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 26,75%.



Gambar 3.35. Pelaksanaan Rapat Konsultasi PBG



Gambar 3.36. Kunjungan Lapangan SLF

35. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 35*

Sasaran Strategis 35
Meningkatnya Perumahan Dan Lingkungan Layak Dan Sehat Dengan Didukung Jaringan Infrastruktur Yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah Maupun Antar Sektor

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 35 dengan 5 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 99,29% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.53. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perumahan Dan Lingkungan Layak Dan Sehat Dengan Didukung Jaringan Infrastruktur Yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah Maupun Antar Sektor

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian	
1	PersentasePenurunan Kawasan Kumuh	%	15,05	24,68	16,65	67,46	25.92
2	Persentase Rumah Sehat Layak Huni	%	44,39	27,5	48	174,55	11.24
3	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak	%	83,49	83	85,30	102,77	86
5	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	28,72	57,28	29,6	51,68	63.01

Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Perumahan Dan Lingkungan Layak Dan Sehat Dengan Didukung Jaringan Infrastruktur Yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah Maupun Antar Sektor” terdiri dari 5 indikator diantaranya adalah:

a. PersentasePenurunan Kawasan Kumuh

Indikator Persentase Penurunan Kawasan Kumuh di Kabupaten Brebes pada tahun 2025 dihitung dengan membandingkan luasan kawasan kumuh yang berhasil ditangani dengan total luasan kawasan kumuh yang ada pada tahun berjalan, kemudian dikalikan 100 persen. Berdasarkan hasil pengukuran, pada akhir tahun 2024 luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Brebes tercatat sebesar 409,512 hektar. Pada tahun 2025, penanganan kawasan kumuh berhasil dilakukan seluas 58,452 hektar, sehingga luas kawasan kumuh yang tersisa pada akhir tahun 2025 menjadi 351,061 hektar. Dengan capaian penurunan luasan kawasan kumuh sebesar 16,65%, terdapat peningkatan dibandingkan capaian tahun 2024 yang hanya mencapai 15,05%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja penanganan kawasan kumuh dari tahun ke tahun. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan, indikator ini hanya mencapai 67,46%, sehingga kinerjanya masih berada dalam kategori Cukup. Luasan kawasan

kumuh yang masih cukup besar menunjukkan bahwa upaya penanganan kumuh di Kabupaten Brebes perlu terus diperkuat secara berkelanjutan.

Peningkatan capaian penurunan kawasan kumuh di Kabupaten Brebes pada tahun 2025 didukung oleh adanya alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu. Dukungan pendanaan ini memungkinkan dilaksanakannya intervensi penanganan kawasan kumuh secara lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis kawasan. Melalui pemanfaatan DAK Tematik tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes dapat melaksanakan berbagai kegiatan strategis di Desa Kedunguter, yang meliputi pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman, seperti pembangunan drainase lingkungan, peningkatan kualitas rumah layak huni, penyediaan dan perbaikan sarana sanitasi berupa jamban, serta peningkatan infrastruktur pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara langsung berdampak pada perbaikan kualitas lingkungan permukiman dan berkontribusi signifikan terhadap pengurangan luasan kawasan kumuh. capaian penurunan kawasan kumuh dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain belum optimalnya prioritas program penanganan kawasan kumuh di tingkat kabupaten, munculnya kawasan kumuh baru akibat pertumbuhan permukiman yang tidak terencana, serta terbatasnya dukungan anggaran untuk intervensi penanganan kumuh secara komprehensif. Selain itu, kompleksitas permasalahan kawasan kumuh yang mencakup aspek infrastruktur dasar, sosial, ekonomi, dan tata ruang juga menjadi tantangan dalam percepatan penanganannya.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 208.326.100,- dan terealisasi Rp. 198.304.600,- atau 95,19%, dengan capaian kinerja sebesar 67,46% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar -43%.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penurunan kawasan kumuh di Kabupaten Brebes adalah melalui

penguatan perencanaan dan penetapan lokasi prioritas penanganan kumuh secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Brebes akan mengoptimalkan peran POKJA PKP dalam mengoordinasikan program lintas perangkat daerah, mendorong pemanfaatan pendanaan DAK Tematik, APBD, CSR, serta dukungan pemerintah provinsi dan pusat, serta memperkuat upaya pencegahan munculnya kawasan kumuh baru melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan pembinaan masyarakat. Selain itu, penanganan kawasan kumuh akan diarahkan tidak hanya pada perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar, perumahan layak huni, dan sanitasi yang berkelanjutan, sehingga pengurangan luasan kawasan kumuh dapat dicapai secara lebih efektif dan berkesinambungan.

b. Persentase Rumah Sehat Layak Huni

Indikator Persentase Rumah Sehat Layak Huni dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang berhasil ditangani dengan total RTLH yang terdata. Pada tahun 2025, Kabupaten Brebes memiliki 20.767 unit rumah tidak layak huni, dengan jumlah rumah yang telah ditangani sebanyak 9.968 unit. Dengan demikian, persentase rumah sehat layak huni yang berhasil dicapai adalah sebesar 48%. capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 27,5%, dengan tingkat realisasi mencapai 174,55%, sehingga termasuk dalam kategori kinerja sangat baik. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 44,39%, terjadi peningkatan sebesar 3,61% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang konsisten dan signifikan dalam upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat di Kabupaten Brebes.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari peran strategis penyediaan rumah sehat layak huni sebagai salah satu instrumen utama penanggulangan kemiskinan, serta dukungannya terhadap Program Strategis Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah. Selain itu, sinergi pendanaan dari berbagai pemangku kepentingan

turut memperkuat pencapaian kinerja, yang meliputi dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta partisipasi dan swadaya masyarakat.

Untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan capaian persentase rumah sehat layak huni, diperlukan strategi lanjutan, antara lain melalui penanganan backlog perumahan yang masih cukup tinggi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan rumah baru bagi masyarakat miskin, baik secara mandiri maupun berbasis komunitas, serta penguatan kerja sama dengan pengembang perumahan guna menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat non-miskin dan non-Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Seluruh upaya tersebut didukung oleh berbagai program yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai.

Dari sisi pengelolaan anggaran, indikator Persentase Rumah Sehat Layak Huni pada tahun 2025 didukung oleh anggaran sebesar Rp34.736.945.967, dengan realisasi anggaran mencapai Rp33.704.484.734 atau sebesar 97,03%. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan capaian kinerja sebesar 174,55% dan realisasi anggaran sebesar 97,03%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 46%. Hal ini menunjukkan bahwa output dan outcome yang dihasilkan jauh melampaui target yang direncanakan tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran secara penuh. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program peningkatan rumah sehat layak huni telah dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

c. Persentase Akses Sanitasi Layak

Tingkat capaian Indikator Persentase Akses Sanitasi Layak pada tahun 2025 mencapai 100%, dengan realisasi sebesar 100% dari

target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh target kinerja yang direncanakan pada tahun 2025 telah terpenuhi secara optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan program jambanisasi yang telah menyalurkan bantuan pembangunan jamban kepada 1.581 rumah tangga, sesuai dengan target penyaluran yang telah ditetapkan pada tahun 2025, yaitu sebanyak 1.581 rumah tangga. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian indikator Persentase Akses Sanitasi Layak menunjukkan kondisi yang stabil, di mana pada kedua tahun tersebut capaian indikator sama-sama mencapai 100%. Dengan demikian, kinerja indikator ini dapat dikategorikan baik, karena mampu mempertahankan capaian maksimal secara konsisten. Penyediaan akses sanitasi layak merupakan salah satu indikator penting dalam penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Brebes, mengingat akses sanitasi yang memadai berpengaruh langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman.

Faktor pendukung utama tercapainya indikator Persentase Akses Sanitasi Layak pada tahun 2025 adalah karena program jambanisasi merupakan bagian integral dari upaya penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Brebes. Program ini menjadi prioritas pemerintah daerah karena akses sanitasi yang layak berpengaruh langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan. Integrasi program jambanisasi dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan stunting mendorong penguatan dukungan lintas sektor, baik dari aspek perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal dan capaian indikator akses sanitasi layak dapat dipertahankan pada tingkat maksimal. Namun di kabupaten brebes belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Ketiadaan IPLT menyebabkan pengelolaan lumpur tinja belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga sistem sanitasi

yang ada belum sepenuhnya memenuhi standar pengelolaan air limbah domestik yang aman.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pelaksanaan program Persentase Akses Sanitasi Layak pada tahun 2025 didukung oleh anggaran sebesar Rp8.961.730.400, dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.891.566.273 atau 99,22%. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan capaian kinerja indikator sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,22%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,79%.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan akses sanitasi layak di Kabupaten Brebes pada periode selanjutnya, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan dan penguatan alokasi anggaran untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Penyediaan IPLT dalam mewujudkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang aman, terstandar, dan berkelanjutan, sehingga mampu memperluas cakupan pelayanan sanitasi layak kepada masyarakat secara lebih merata. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Brebes. Pelaksanaan strategi ini didukung melalui optimalisasi sumber pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Sanitasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) bidang Kesehatan, yang dialokasikan dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah secara terintegrasi dan berkesinambungan.

d. Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak

Indikator kinerja Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dengan total jumlah rumah tangga di Kabupaten Brebes, yang dihitung menggunakan rumus: jumlah rumah tangga bersanitasi layak dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Brebes, dikalikan 100 persen. Berdasarkan hasil

pengukuran pada tahun 2025, jumlah rumah tangga yang telah memiliki sanitasi layak di Kabupaten Brebes tercatat sebanyak 572.756 rumah tangga dari total 671.479 rumah tangga. Dengan demikian, realisasi persentase kepemilikan sanitasi layak pada tahun 2025 mencapai 85,30%, yang melampaui target kinerja sebesar 83%. Capaian tersebut menunjukkan tingkat realisasi kinerja sebesar 102,77%, sehingga indikator ini dapat dikategorikan dalam kriteria kinerja sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 83,49%, terjadi peningkatan sebesar 1,81% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya kemajuan yang konsisten dalam upaya perluasan akses sanitasi layak bagi masyarakat Kabupaten Brebes. Capaian ini didukung oleh sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan bidang Sanitasi, yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas sanitasi permukiman.

Indikator Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak memiliki peran strategis sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Brebes, yang dilaksanakan melalui program jambanisasi secara berkelanjutan. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan capaian kepemilikan sanitasi layak secara komprehensif dan berkelanjutan, masih diperlukan dukungan sistem pengelolaan air limbah yang memadai, salah satunya melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Brebes.

Dari aspek pengelolaan anggaran, pelaksanaan indikator Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak pada tahun 2025 didukung oleh anggaran sebesar Rp8.961.730.400, dengan realisasi anggaran mencapai Rp8.891.566.273 atau sebesar 99,22%. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan capaian kinerja sebesar 102,77% dan realisasi anggaran sebesar 99,22%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 3,48%.

Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai bahkan melampaui sasaran yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien.

Tindak lanjut atas capaian indikator Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Brebes akan melakukan penguatan perencanaan dan peningkatan alokasi anggaran guna memperluas cakupan kepemilikan sanitasi layak, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Upaya tersebut akan difokuskan pada keberlanjutan program jambanisasi, disertai dengan percepatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, akan dilakukan optimalisasi koordinasi lintas sektor serta pemanfaatan sumber pendanaan guna mendukung pencapaian target sanitasi layak.

e. Persentase Penanganan Kawasan Kumuh

Indikator persentase penanganan kawasan kumuh dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kawasan yang ditangani dengan jumlah total kawasan kumuh, menggunakan rumus: Jumlah kawasan yang ditangani / Jumlah kawasan kumuh * 100%. Pada tahun 2025, terdapat 64 kawasan kumuh di Kabupaten Brebes, dengan 19 kawasan yang berhasil ditangani. Realisasi penanganan kawasan kumuh pada tahun 2025 mencapai 29.68%, sementara target penanganan ditetapkan sebesar 57.28%. Dengan capaian kinerja sebesar 51.67%, hasil ini dapat dikategorikan kurang, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2024 sebesar 28.72penanganan kawasan kumuh mengalami peningkatan sebesar 0.96% dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya pendanaan untuk penanganan kawasan kumuh serta jumlah kawasan kumuh yang cukup banyak, yang membutuhkan penanganan bertahap. Strategi untuk penanganan kawasan kumuh melibatkan pengoptimalan peran Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP)

dalam koordinasi pengurangan kawasan kumuh. Selain itu, alokasi anggaran yang tepat sasaran untuk penanganan kawasan kumuh di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Pada tahun 2025, terdapat program pengentasan kawasan kumuh di Desa Kedunguter, yang mencakup penanganan rumah tidak layak huni dan pembangunan infrastruktur.

Pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh pada tahun 2025 didukung oleh anggaran sebesar Rp208.032.610.000 (menyesuaikan penulisan angka), dengan realisasi anggaran sebesar Rp198.304.600 atau 95,19%. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan capaian kinerja indikator sebesar 51,67% dan realisasi anggaran sebesar 95,19%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar -87%. Strategi penanganan kawasan kumuh ke depan akan diarahkan pada optimalisasi peran Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) dalam mengoordinasikan program lintas perangkat daerah, serta peningkatan ketepatan sasaran alokasi anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

36. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 36*

Sasaran Strategis 36
Meningkatnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian Lingkungan Hidup

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 36 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata nilai capaian sebesar 99,69% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.54. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian Lingkungan Hidup

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	61,16	50,15	80,67	160,85	50,2
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,71	81,25	77,81	95,77	81,3
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	48,96	47,70	63,27	132,64	47,8
4	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	22,05	40,00	24,08	60,2	40,5

Nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu dan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah sedangkan penghitungan lahan menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Data capaian indikator indeks lingkungan hidup diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes yang didapatkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Angka capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian Lingkungan Hidup” terdiri dari 4 indikator diantaranya adalah:

a. Indeks Kualitas Air

   Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari analisis data kualitas air sungai yang dipantau pada sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten Brebes, Indeks Kualitas Air dikembangkan dengan konsep bahwa nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan kualitas air yang semakin baik. Indeks kualitas air (IKA) memberikan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. IKA digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang kompleks dan digunakan untuk memberikan indikasi awal secara cepat tentang kondisi kualitas air sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur pengurangan laju pencemaran air. IKA dapat memberikan indikasi kesehatan badan air di berbagai titik dan dapat digunakan untuk

melacak perubahan dari waktu ke waktu. Jumlah parameter yang digunakan adalah 8 parameter yaitu DO, *Fecal Coliform*, COD, pH, BOD, T-P, TSS, dan NO3-N. Pemantauan dan/atau pengumpulan data untuk menghitung kualitas air dilakukan dengan ketentuan:

1) menggunakan metode pengambilan sampel dan pengujian parameter mutu air sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang setara;
2) dilakukan oleh petugas sampling yang telah memiliki sertifikat pelatihan sampling air;
3) peralatan pengukur parameter mutu air telah dikalibrasi dan masuk batas keberterimaan.

Pada tahun 2025, realisasi IKA sebesar 80,67 melampaui target 50,15 dengan capaian 160,86 persen, menunjukkan kinerja luar biasa terhadap sasaran tahunan. Dibandingkan tahun 2024 (61,04) dan 2023 (50,03), terjadi tren peningkatan signifikan dan konsisten. Realisasi 2025 juga jauh di atas target akhir RPD 2026 (50,28), menandakan sasaran jangka menengah telah terlampaui. Belum ada standar nasional/regional spesifik untuk IKA Brebes, sehingga fokus pada tren internal.

Indikator Kinerja didukung oleh beberapa program, diantaranya adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Peningkatan kinerja dalam pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Brebes antara lain dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1) Melakukan inspeksi secara rutin untuk memantau pelaku usaha dan masyarakat yang berada di daerah sempadan sungai.
2) Melakukan pembinaan dan penindakan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar peraturan pembuangan limbah industri dan domestik yang tidak sesuai baku mutu lingkungan.

3) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta untuk tidak buang Air Besar Sembarangan (BABS), dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Karena salah satu parameter sensitif dalam pengukuran Indeks Kualitas Air adalah Parameter *Fecal Coli. Fecal Coliform* berasal dari limbah kotoran hewan dan manusia. Selain sosialisasi juga dengan pembangunan jamban untuk masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perwaskim. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak BABS akan ikut mengurangi kadar *fecal coli* di aliran sungai.
4) Melakukan pengawasan kualitas air secara terus menerus dengan menganalisis kualitas air yang masuk ke badan sungai atau yang berada pada aliran sungai.
5) Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan juga sosialisasi rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 1.627.028.100,- dan terealisasi Rp. 1.551.931.735,- atau 95,38%, dengan capaian kinerja sebesar 160,85% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 40,70%.

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan pengukuran konsentrasi polutan udara dalam polusi udara ambien dan risiko kesehatan yang terkait, Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu Oksidan/Ozon di permukaan, bahan partikel, Karbon Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO2) dan Nitrogen Dioksida (NO2). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO2 dan SO2 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan

bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Pemantauan dan/atau pengumpulan data untuk menghitung kualitas air dilakukan dengan ketentuan:

Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh dengan metode *passive sampler* yang bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan yang ditunjuk KLHK;

Untuk pengujian kualitas udara ambien menggunakan metode sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau metode lain yang diakui secara Internasional;

Dilakukan oleh petugas *sampling* yang mempunyai pengalaman atau yang membidangi Lingkungan Hidup dan telah mengikuti pelatihan pengambilan sampel udara;

Peralatan pengukur parameter harus telah dikalibrasi dan masuk batas keberterimaan;

Dilakukan oleh petugas pengukur yang mempunyai pengalaman dalam pengukuran tinggi muka air tanah;

Pemantauan dilakukan di 4 titik mewakili sektor perkantoran, permukiman, industri, dan transportasi, pemantauan selama 2 periode (semester 1 dan semester 2). Lokasi tersebut di Perkantoran (Dinas Kominfotik Kabupaten Brebes), Pemukiman (Perum Taman Indo Siasem), Industri (PT BIG, Desa Tengguli, Kec Tanjung), Jalur Transportasi (Dinas Pariwisata Jl A Yani - Pantura).

Realisasi 2025 sebesar 77,81 hampir mencapai target 81,25 (95,79 persen), meskipun belum tepat sasaran tahunan. Tren meningkat tajam dari 48,06 (2023) dan 50,91 (2024). Dibanding target RPD 2026 (81,3), masih sedikit di bawah namun tren positif. Belum ada standar nasional/regional untuk diperbandingkan.

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian Indikator Kinerja antara lain:

1) Emisi Kendaraan di Jalur Pantura: Tingginya volume lalu lintas kendaraan, khususnya kendaraan berat yang melintasi jalur

Pantura (Pantai Utara), merupakan penyumbang utama emisi karbon dan polusi udara.

2) Aktivitas Industri Perikanan: Industri pengolahan hasil perikanan yang aktif di wilayah Brebes melepaskan limbah asap yang memengaruhi kualitas udara sekitar.
3) Aktivitas Domestik dan Pembakaran Sampah: Aktivitas sehari-hari seperti pembakaran sampah yang masih menjadi penyumbang polusi partikulat di tingkat lokal.
4) Aktivitas Industri : semakin maraknya industri di Kabupaten Brebes yang menyumbang pada kenaikan emisi karbon dan Efek Gas Rumah Kaca yang semakin meningkat.
5) Adanya penambahan paramater PM 2.5 dalam pengukuran Indeks Kualitas Udara.
6) Parameter PM 2.5 adalah salah satu polutan atau zat sumber polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan. Nilai PM 2.5 yang digunakan dalam menentukan target IKU tahun 2025 disepakati untuk Kab/Kota di Jawa Tengah memakai angka dari fixed station yang ada di Semarang dimana angkanya saat itu adalah 4. Namun pada akhir 2025 penentuan pengukuran parameter PM 2.5 berubah menggunakan citra satelit yang dilakukan oleh BRIN,yang mana nilainya untuk masing – masing Kabupaten Kota adalah berbeda, didapatkan nilainya untuk Kabupaten Brebes adalah 14.25. Hal ini mempengaruhi turunnya capaian Indeks Kualitas Udara karena nilai PM 2.5 yang tingi (polutan).

Indikator Kinerja didukung oleh beberapa program, diantaranya adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Peningkatan kinerja dalam pengukuran Indeks Kualitas Udara antara lain dipengaruhi oleh :

1) Adanya kelompok – kelompok masyarakat yang peduli lingkungan antara lain dengan adanya Pembentukan Kelompok Pelestari Sumber daya Alam (KPSA) Wana Lestari Sawojajar. Kelompok ini aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian alam, salah satunya melakukan penanaman *mangrove*, seperti diketahui *mangrove* merupakan tumbuhan yang memiliki daya serap emisi karbon 5x lipat dibandingkan tumbuhan lain.
2) Uji Emisi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Brebes.
3) Uji Ketebalan Asap Kendaraan (*Smoke Tester*) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Brebes.
4) Uji kandungan CO & HC (alat uji : gas *analyzer* atau CO-HC meter) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Brebes.
5) Terlaksananya kegiatan sosialisasi terkait pentingnya pengolahan air limbah domestik kepada warga.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 845.368.000,- dan terealisasi Rp. 770.135.864,- atau 91,10%, dengan capaian kinerja sebesar 95,77% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 4,88%.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diperoleh dengan mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Untuk penyusunan metode penghitungan IKL

yang dapat mewakili karakteristik wilayah perkotaan, hulu dan hilir daerah aliran sungai serta kepulauan.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diperoleh dengan mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. Dengan metode Delineasi menggunakan citra satelit, setelahnya data akan diproses di laman KLHK untuk menghasilkan perhitungan dan terverifikasi datanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (yamg merupakan akumulasi perhitungan dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan) validasi data dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan data konsentrasi setiap parameter, penghapusan data yang tidak normal dan/atau pemeriksaan kesesuaian data dengan metode pemantauan dan pengumpulan data. Validasi pemantauan kualitas air dan udara dilengkapi dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium dan sertifikat akreditasi laboratorium. Sedangkan untuk validasi hasil pemantauan tutupan lahan dilengkapi dengan Peta Tutupan Lahan. Tim pelaksana IKLH kemudian memasukkan data hasil validasi secara elektronik melalui laman ppkl.menlhk.go.id/iklh. Verifikasi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pasal 29, dilakukan untuk memastikan kebenaran data hasil validasi dan kesesuaian laboratorium yang digunakan.

Pada tahun 2025, realisasi IKTL sebesar 63,27 persen melampaui target tahunan 47,70 persen dengan tingkat pencapaian sekitar 132,77 persen, menunjukkan kinerja sangat positif terhadap sasaran tahun berjalan. Dibandingkan realisasi tahun 2024 (48,96 persen) dan 2023 (49,08 persen), terjadi tren peningkatan signifikan pada 2025 setelah sempat stagnan di kisaran 49 persen, dengan lompatan sekitar 14 poin persen dalam satu tahun. Realisasi sampai tahun 2025 juga telah jauh melampaui target akhir RPD 2026 (47,8 persen),

mengindikasikan bahwa sasaran jangka menengah untuk indikator ini telah tercapai lebih awal dan bahkan dapat direvisi ke atas untuk periode berikutnya. Tidak tersedianya data pembanding capaian nasional atau regional dalam dokumen penyusunan LKjIP menyebabkan perbandingan langsung dengan standar nasional/regional belum dapat dilakukan secara kuantitatif, analisis kinerja sehingga lebih difokuskan pada pencapaian target internal daerah dan tren historis Kabupaten Brebes.

Keberhasilan lompatan IKTL pada tahun 2025 dapat disebabkan oleh berbagai faktor positif seperti - Meningkatnya RTH yang dilengkapi titik koordinat, deliniasi yang makin banyak, serta program penanaman yang banyak dilakukan oleh tim DLH mapun dari teman teman relawan lingkungan mulai dari beberapa tahun terakhir menghasilkan tinggi pohon sudah mulai ditangkap citra satelit, sehingga meningkatkan nilai IKL.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 3.215.055.859,- dan terealisasi Rp. 3.128.318.794,- atau 97,30%, dengan capaian kinerja sebesar 132,64% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar 26,64%.

Indikator Kinerja didukung oleh beberapa program, diantaranya adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

d. Cakupan Pelayanan Persampahan

Cakupan Pelayanan Sampah adalah Persentase Sampah di Kabupaten Brebes yang dapat terpilah, terkelola dan terangkut sampai pada proses akhir di TPA.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Brebes jumlah penduduk tahun 2025 sebesar 2.065.501 Jiwa, maka timbulan sampah sebesar :

Timbulan sampah (Kg)

= Jumlah Penduduk X Timbulan sampah Per orang / hari

= 2.065.501 Jiwa X 0,5 kg / hari

= 1.032.751 Kg / hari

= 1.032,75 Ton / hari

Volume sampah total yang terangkut ke TPA Kaliwlingi Brebes dan TPA Kalijurang Tonjong serta yang terolah di TPS 3R Desa sebesar = 248,69 Ton / hari, sehingga Rasio pengangkutan sampah terhadap timbulan sampah sebesar

$$= \frac{248{,}69 \text{ Ton / hari}}{1.032{,}75 \text{ Ton / hari}} = 24{,}08\ \%$$

Pada tahun 2025, cakupan pelayanan persampahan Kabupaten Brebes terealisasi sebesar 24,08 persen, masih jauh di bawah target tahunan yang ditetapkan sebesar 40 persen. Hal ini menunjukkan deviasi negatif sekitar 15,92 poin persentase sehingga kinerja indikator belum mencapai sasaran tahunan yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 22,05 persen dan tahun 2023 sebesar 21,38 persen, terlihat adanya tren peningkatan bertahap dari tahun ke tahun, tetapi laju peningkatan tersebut masih lambat dan belum sejalan dengan skenario peningkatan yang diperlukan untuk mencapai target 40 persen dalam satu tahun anggaran.

Dilihat dari perspektif jangka menengah, realisasi tahun 2025 sebesar 24,08 persen juga masih cukup jauh di bawah target akhir RPD 2026 yang ditetapkan sebesar 40,5 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa percepatan perluasan cakupan layanan persampahan harus menjadi prioritas dalam sisa periode RPD, baik melalui penambahan armada dan infrastruktur persampahan maupun penguatan kelembagaan dan pembiayaan. Karena tidak tersedia data pembanding capaian nasional/regional yang spesifik dalam dokumen ini, perbandingan langsung dengan rata-rata nasional atau provinsi belum dapat dilakukan; oleh karena itu,

analisis kinerja difokuskan pada pencapaian terhadap target internal dan tren historis Kabupaten Brebes sendiri

Pencapaian kinerja untuk pengelolaan sampah masih belum mencapai target karena:

1) Pertambahan Penduduk dan budaya penggunaan kemasan sekali pakai menimbulkan timbulan sampah yang terus bertambah;
2) Dengan tidak adanya pengurangan sampah yang masuk ke TPA dan tidak ada pengelolaan sampah di TPA mengakibatkan umur TPA semakin berkurang;
3) Terdapat timbulan sampah liar di banyak titik di Kab. Brebes, baik di bahu jalan, lahan kosong, sempadan sungai dll.;
4) SDM yang terus berkurang dikarenakan usia pensiun dan belum ada pengganti, alat berat dan pengangkut sampah yang terbatas dan mulai sering dilakukan perbaikan menyebabkan kendala dalam penanganan sampah.

Dari permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil langkah-langkah berikut:

1) Melakukan Sosialisasi dan Pelatihan Pengurangan, pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri agar dapat menahan laju timbulan sampah;
2) Penanganan sampah dihulu dengan pengurangan timbulan, pengolahan sampah di TPS 3R dan TPST terbangun dan pengolahan sampah TPA yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2025;
3) Berkoordinasi dengan *Stakeholder* terkait dalam mengatasi sampah liar;
4) Melakukan usulan ke APBN, APBD Provinsi dan APBD dalam pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan dalam penanganan sampah di hulu tengah dan hilir.

Indikator Kinerja didukung oleh Program Pengelolaan Persampahan, Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020. Pagu anggaran pendukung capaian indikator kinerja sebesar Rp. 24.812.852.116,-

dan terealisasi Rp. 12.303.307.539,- atau 49,58%, dengan capaian kinerja sebesar 60,20% maka Indikator ini tercapai efisiensi sebesar -17,63%.

37. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 37*

Sasaran Strategis 37
Meningkatnya Kelestarian Dan Kesesuaian Tata Guna Lahan Guna Terwujudnya Keserasian Pembangunan Wilayah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 37 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 122,67% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.55. Capaian Indikator Sasaran Persentase Ketaatan Terhadap RTRW

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	92	93	92	98,92	85

Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diukur dengan metode sbb :

Ketaatan terhadap RTRW = 100% - (Prosentase Verifikasi KKPR yang tidak sesuai dengan peruntukannya + Prosentase KKPR pada Kawasan Tanaman Pangan + Prosentase ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana pola ruang)

Ketaatan terhadap RTRW = 100 % - (1,26 % + 1,57 % + 0,63 %)

Ketaatan terhadap RTRW = 96,54 %

Ketaatan terhadap RTRW = 92 %

Angka 1,26 % diperoleh dari jumlah permohonan verifikasi KKPR yang tidak sesuai sebagian maupun seluruh rencana kegiatan pada tahun berjalan dan KKPR yang berada pada kawasan tanaman pangan dibandingkan dengan jumlah permohonan verifikasi KKPR pada tahun berjalan Jumlah permohonan verifikasi KKPR tahun 2025 sebanyak 238 buah

Jumlah verifikasi KKPR yang tidak sesuai sebanyak 3 buah
Sehingga 3/238 x 100 % = 1,26%
Luasan KKPR yang terbit pada kawasan tanaman pangan adalah seluas 1068,02 Ha dari luas total kawasan tanaman pangan 67.850 Ha
Angka 0,24 % diperoleh dari prosentase luas lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

sedikit di bawah target penyesuaian perjanjian kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 93 persen (penyesuaian karena capaian 2024 92 persen melampaui target RPD awal 80 persen). Dengan demikian, terdapat selisih kekurangan 1 poin persen terhadap target tahunan yang ambisius, meskipun secara keseluruhan kinerja tetap tinggi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 92 persen dan tahun 2023 sebesar 92 persen, kinerja menunjukkan kondisi stabil pada level yang sama selama tiga tahun berturut-turut, tanpa adanya peningkatan atau penurunan signifikan. Stabilitas ini mengindikasikan konsistensi sistem pengawasan, meskipun belum ada lompatan untuk memenuhi target yang dinaikkan.

Dari perspektif jangka menengah, realisasi tahun 2025 sebesar 92 persen jauh melampaui target akhir RPD 2026 yang tercantum sebesar 85 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah dalam RPD relatif konservatif dibandingkan kinerja riil yang stabil di atas 90 persen, sehingga sasaran tersebut dapat dianggap telah tercapai lebih awal dan berpotensi direvisi naik pada dokumen perencanaan selanjutnya. Karena tidak tersedia data pembanding capaian nasional atau regional dalam dokumen penyusunan LKjIP, perbandingan langsung dengan standar nasional/regional belum dapat dilakukan; analisis kinerja sehingga lebih menekankan pada pencapaian target internal daerah dan konsistensi tren historis.

Keberhasilan indikator ini ditopang dengan banyak permohonan verifikasi KKPR di tahun 2025 sesuai dengan RTRW sedangkan permohonan verifikasi KKPR yang tidak sesuai ada 3 buah. Di tahun yang akan datang akan lebih banyak melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media elektronik agar permohonan yang masuk sesuai dengan RTRW.

Efisiensi dalam pencapaian indikator kinerja dapat dilihat dari anggaran yang digunakan. Untuk indikator kinerja sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan penataan ruang menggunakan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dimana dalam hal penggunaan anggaran terdapat efisiensi sebesar 3,67% dari anggaran sebesar Rp.1.325.797.600,- dan realisasinya sebesar Rp.1.277.161.913,- atau sebesar 96.33% dari anggaran.

38. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 38*

Sasaran Strategis 38
Meningkatnya Konsistensi Kesesuaian Dan Terintegrasinya Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 38 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 80,65% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.56. Capaian Indikator Sasaran Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Hektar	13,71	19	13,88	73,05	20

Indikator kinerja Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya dihitung berdasarkan perbandingan antara akumulasi kondisi awal luasan tanah yang telah tersedia dengan tambahan pengadaan tanah pada tahun berjalan terhadap target luasan tanah yang ditetapkan, dikalikan 100 persen. Pada tahun 2024, kondisi awal luasan tanah yang telah tersedia sebesar 13,71 Ha. Pada tahun 2025 dilakukan pengadaan tanah tambahan

seluas 0,1723 Ha melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang diperuntukkan bagi pengadaan lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Brebes. Dengan tambahan tersebut, realisasi luas tanah yang disediakan pada tahun 2025 mencapai 13,8823 Ha dari target 19 Ha, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 73,06 persen, yang termasuk dalam kategori cukup. Capaian ini menunjukkan bahwa penyediaan tanah untuk kepentingan umum telah berjalan, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Belum tercapainya kinerja tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan alokasi pendanaan untuk kegiatan pengadaan tanah, sehingga pelaksanaan pengadaan tanah belum dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai target. Selain itu, proses pengadaan tanah memerlukan tahapan administratif dan teknis yang cukup kompleks, yang turut mempengaruhi kecepatan realisasi luasan tanah yang dapat disediakan. Meskipun demikian, pengadaan tanah pada tahun 2025 tetap memiliki nilai strategis yang tinggi, mengingat Kabupaten Brebes sebelumnya belum memiliki fasilitas IPLT. Penyediaan lahan untuk pembangunan IPLT menjadi langkah awal yang penting dalam mendukung peningkatan layanan sanitasi dan pengelolaan lingkungan, serta pemenuhan standar pelayanan dasar di bidang sanitasi.

pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp1.595.843.900, dengan realisasi sebesar Rp1.313.381.240 atau 82,30 persen dari pagu anggaran. Tingkat efisiensi anggaran tercatat sebesar -15,73 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran belum sepenuhnya sejalan dengan capaian kinerja fisik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penyerapan anggaran relatif tinggi, capaian output berupa luasan tanah yang berhasil disediakan masih terbatas, terutama akibat kendala eksternal seperti ketersediaan lahan dan keterbatasan dana pengadaan. Secara keseluruhan, kinerja indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pertanahan telah mendukung persiapan penyediaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, khususnya untuk fasilitas sanitasi strategis. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan pengadaan tanah, peningkatan alokasi pendanaan, serta

optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah agar target penyediaan tanah dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang secara umum cukup baik, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 adalah berikut:

Tabel 3.57. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3,631,469,388,306.00**	**3,681,789,330,903.56**	**101.38**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**811,519,601,986.00**	**837,226,546,061.56**	**103.16**
4.1.01	Pajak Daerah	357,000,000,000.00	344,841,272,817.00	96.59
4.1.02	Retribusi Daerah	427,374,454,707.00	444,156,201,662.00	103.92
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22,764,275,046.00	25,511,478,757.00	112.06
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4,380,872,233.00	22,717,592,825.56	518.56
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**811,519,601,986.00**	**837,226,546,061.56**	**103.16**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2,819,949,786,320.00**	**2,844,562,784,842.00**	**100.87**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0.00	0.00	0.00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	40,769,633,000.00	39,305,751,500.00	96.40
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,543,835,125,100.00	1,601,570,137,664.00	103.73
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	686,015,650,556.00	696,708,027,982.00	101.55
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**2,270,620,408,656.00**	**2,337,583,917,146.00**	**102.94**

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.2.01.05	Dana Desa	345,356,263,000.00	310,333,723,980.00	89.85
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6,915,077,000.00	6,915,077,000.00	100.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**352,271,340,000.00**	**317,248,800,980.00**	**90.05**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197,058,037,664.00	189,730,066,716.00	96.28
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	180,057,037,664.00	173,208,138,520.00	96.19
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	17,001,000,000.00	16,521,928,196.00	97.18
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**197,058,037,664.00**	**189,730,066,716.00**	**96.28**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2,819,949,786,320.00**	**2,844,562,784,842.00**	**100.87**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**3,631,469,388,306.00**	**3,681,789,330,903.56**	**101.38**
5	**BELANJA DAERAH**	**3,804,738,534,981.00**	**3,376,768,549,515.00**	**88.75**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2,838,781,702,672.00**	**2,516,263,759,305.00**	**88.63**
5.1.01	Belanja Pegawai	1,615,089,156,571.00	1,480,247,416,014.00	91.65
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,092,185,696,101.00	943,255,386,472.00	86.36
5.1.05	Belanja Hibah	120,178,500,000.00	82,177,571,819.00	68.37
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11,328,350,000.00	10,583,385,000.00	93.42
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2,838,781,702,672.00**	**2,516,263,759,305.00**	**88.63**
5.2	**BELANJA MODAL**	**374,392,439,309.00**	**327,130,116,742.00**	**87.37**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	431,000,000.00	209,999,240.00	48.72
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101,633,516,102.00	76,300,569,342.00	75.07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62,713,715,282.00	55,982,416,954.00	89.26
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	185,297,079,617.00	179,814,035,857.00	97.04
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20,768,238,308.00	11,502,373,419.00	55.38
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3,548,890,000.00	3,320,721,930.00	93.57
	JUMLAH BELANJA MODAL	**374,392,439,309.00**	**327,130,116,742.00**	**87.37**

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6,900,000,000.00**	**3,886,835,677.00**	**56.33**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6,900,000,000.00	3,886,835,677.00	56.33
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**6,900,000,000.00**	**3,886,835,677.00**	**56.33**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**584,664,393,000.00**	**529,487,837,791.00**	**90.56**
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	39,844,378,000.00	21,294,412,062.00	53.44
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3,220,752,000.00	2,263,793,497.00	70.28
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	541,599,263,000.00	505,929,632,232.00	93.41
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**584,664,393,000.00**	**529,487,837,791.00**	**90.56**
	JUMLAH BELANJA	**3,804,738,534,981.00**	**3,376,768,549,515.00**	**88.75**
	SURPLUS/DEFISIT	**(173,269,146,675.00)**	**305,020,781,388.56**	**(176.03)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**173,269,146,675.00**	**173,259,146,675.35**	**99.99**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**177,369,146,675.00**	**177,359,146,675.35**	**99.99**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	177,359,146,675.00	177,359,146,675.35	100.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**177,369,146,675.00**	**177,359,146,675.35**	**99.99**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**4,100,000,000.00**	**4,100,000,000.00**	**100.00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	100.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**4,100,000,000.00**	**4,100,000,000.00**	**100.00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**173,269,146,675.00**	**173,259,146,675.35**	**99.99**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0.00**	**478,279,928,063.91**	**0.00**

Sumber : BPKAD Kab. Brebes, 2026 (un-audit)

Realisasi pendapatan tahun 2025 jika dibandingkan tahun 2024 menunjukkan kenaikan. Berdasarkan realisasi tahun 2025, secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 adalah sebesar sebesar Rp. 3.631.469.388.306,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.681.789.330.903,56 atau 101,38%. Perkembangan pendapatan Kabupaten Brebes dari tahun 2021 – 2025 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.58. Perkembangan Pendapatan Daerah dari Tahun 2021-2025

TAHUN	PENDAPATAN		REALISASI
	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4
2021	3.138.485.176.291,00	3.152.123.285.229,00	100,43
2022	3.108.650.039.024,00	2.994.091.244.684,06	96,31
2023	3.102.607.861.008,00	2.829.366.075.747,00	91,19
2024	3.662.126.927.162,00	3.481.539.341.741,00	95,07
2025	3.631.469.388.306,00	3.681.789.330.903,56	101,38

Sumber : BAPENDA Kabupaten Brebes 2025

Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pendapatan daerah secara umum diantaranya dikarenakan:

Tabel 3.59. Permasalahan Pendapatan Daerah

No.	OPD	% Real	Kendala
1.	BAPENDA	96,59	a. Berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda No. 6 Tahun 2023 terkait pembatasan wajib pajak reklame yang bersifat politik b. Tahun politis, sehingga para investor *wait and see* untuk investasi; c. Ada penundaan bayar BPHTB dari beberapa transaksi yg bernilai besar.
2.	DPKH	45,74	Beberapa peternak mengalami penurunan usaha, sehingga belum mampu membayar sewa.
3.	DLH	79,12	Penerapan pemungutan retribusi sampah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga capaian realisasi masih rendah.
4.	DISHUB	66,21	a. Target retribusi parkir yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak sesuai potensi retribusi parkir b. Kurangnya anggaran operasional penarikan retribusi. c. Dalam hal penarikan belum semuanya dg

No.	OPD	% Real	Kendala
			sistem online/ non tunai. d. Ada regulasi yg mengatur area/ jalur yg tdk boleh di tarik retribusi e. Keterbatasan SDM karena banyak yang purna tugas.
5.	SATPOL PP	0	Retribusi alat pemadam kebakaran juga masih produk baru sehingga masih memerlukan waktu dan soialisasi untuk pelaku usaha untuk sadar akan pentingnya proteksi kebakaran.
6.	DINKOPUMDAG	78,92	a. Adanya kenaikan pendapatan b. Banyaknya masyarakat pembeli yang memanfaatkan belanja lewat online (banyak pedagang gulung tikar dn memilih untuk tutup). c. Sejalan musim hujan dan gagal panen membuat daya beli masyarakat kurang. d. Banyak munculnya pasar desa dan pasar modern. e. Hampir semua pasar se kab Brebes perlu adanya rehab total (fasilitas sarpras Yang ada di pasar kurang mendukung dalam persaingan di era globalisasi /modern,pasar tradisional kalah saing). f. Terbatasnya anggaran pemeliharaan pasar sehingga di usia tua pasar banyak fasilitas2 yang sudah tidak layak yang perlu diperbaiki namun anggaran tidak mencukupi) sehingga pembeli memilih belanja di toko2 modern/grosir/*on line.*
7.	DPMPTSP	84,32	a. Pengajuan PBG mensyaratkan perizinan dasar berupa KKPR dan persetujuan lingkungan untuk usaha besar (non UMK) menjadi kewenangan pusat. Dalam proses pengajuan perizinan tersebut membutuhkan waktu bertahun tahun karena menunggu antrian seluruh indonesia yang hanya ditangani oleh pemerintah pusat, pada akhirnya menghambat proses penerbitan PBG. b. Sewa tanah reklame tahun 2025 hanya dikenakan untuk jalan kewenangan Kabupaten, untuk jalan kewenangan Propinsi dan Nasional tidak ditarik retribusi karena pengenaan biaya retribusi sesuai kewenangan. c. Retribusi trayek sudah tidak diatur dalam Perda retribusi Kabupaten Brebes menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada diatasnya, dengan kata lain izin trayek non retribusi.
8.	BAGIAN KESRA	70,20	Belum banyak yang menyewa Gedung *Islamic Center*
9.	DINPERWASKIM	71,84	a. Terdapat 8 (delapan) unit kamar tidak bisa dihuni karena kerusakan pada atap dan kebocoran pada pipa saluran drainase. b. Keterlambatan penghuni dalam membayar retribusi karena kondisi keuangan.

No.	OPD	% Real	Kendala
10.	DPU	23,57	Alat tidak murni sewa banyak untuk kepentingan dinas, bencana, dan bantuan lain dan rekanan juga banyak yang punya alat sendiri.
11.	DINAS PERIKANAN	88,46	Pengaruh cuaca ekstrem.
12.	DINBUDPAR	49,80	Banyaknya fasilitas Daya Tarik Wisata (DTW yang rusak dan penurunan pengunjung yang signifikan.
13.	DINDIKPORA	71,97	Kendala banyak persaingan kolam renang yang lebih bagus dengan fasilitas yang lebih memadai, oleh karenanya mengurangi pengunjung yang datang di kolam renang GOR.

Secara umum, seluruh program kinerja Badan Pendapatan Daerah telah dilaksanakan. Namun, terdapat beberapa target pendapatan yang belum tercapai, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Reklame tidak tercapai akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda Nomor 6 Tahun 2023, yang membatasi objek pajak reklame, khususnya reklame bersifat politik yang tidak lagi menjadi objek pajak. Kondisi ini menyebabkan vendor besar memanfaatkan ruang reklame untuk kepentingan partai politik dalam skala besar.
2. PBJT tidak mencapai target karena adanya kebijakan stimulus berupa diskon 50% dari Pemerintah Pusat yang diberlakukan setelah APBD ditetapkan.
3. Pajak Minerba (MBLB) tidak tercapai karena penetapan target didasarkan pada dokumen rencana penambangan lima tahunan masing-masing wajib pajak, sementara realisasi produksi sering kali tidak sesuai dengan rencana tersebut.
4. PKB tidak tercapai karena penetapan target yang terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan potensi riil, serta menurunnya kepatuhan masyarakat akibat kenaikan opsen PKB dan BBNKB yang cukup signifikan.

Itulah beberapa faktor penyebab tidak tercapainya realisasi Pajak Daerah hingga 100%, meskipun secara kinerja program, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes telah dilaksanakan secara optimal.

Adapun beberapa faktor yang mendukung tercapainya target pada jenis Pajak Daerah tertentu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan Pajak Daerah.
3. Semakin baiknya persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan daerah.
4. Kemudahan pelayanan dan pembayaran Pajak Daerah melalui sistem transaksi non-tunai (mobile banking dan e-commerce).
5. Pelaksanaan Program Jempol (Bapenda Jemput Bola) yang hadir langsung ke desa-desa untuk membuka layanan pembayaran, mutasi, dan pembukaan blokir guna mempermudah pengurusan PBB-P2. Pada tahun 2025, pelayanan dilaksanakan di Kecamatan Kersana dan Kecamatan Larangan, antara lain di Desa Limbangan (Kecamatan Kersana) dengan 799 transaksi senilai Rp37.968.312, serta di Desa Kedungbokor (Kecamatan Larangan) yang difokuskan pada layanan mutasi SPPT PBB-P2.
6. Penyesuaian target pendapatan sesuai dengan potensi riil Pajak Daerah.

Dari sisi belanja daerah, secara umum pelaksanaan belanja daerah pada tahun 2025 menunjukkan kinerja fiskal yang relatif sehat dan terkendali. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2025, diketahui anggaran belanja sebesar Rp. 3.804.738.534.981,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.376.768.549.515,- atau sebesar 82,29 % mencerminkan efisiensi dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, yang berdampak pada terbentuknya SiLPA sebesar Rp. 478.279.928.063,91 sebagai ruang fiskal untuk pembiayaan tahun anggaran berikutnya. Secara keseluruhan, kondisi ini mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.

Permasalahan yang muncul dalam pengelolan keuangan daerah secara umum diantaranya dikarenakan:

1. Koordinasi antar perangkat daerah dan BLUD dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belum sepenuhnya seragam, sehingga

berpotensi memengaruhi ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi pendukung lainnya belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi pemahaman pengguna maupun konsistensi penginputan data.
3. Kapasitas dan pemahaman aparatur pengelola keuangan dan akuntansi pada SKPD/BLUD masih beragam, sehingga diperlukan pembinaan dan rekonsiliasi secara berkelanjutan untuk menjaga kesesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan.
4. Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, masih dijumpai ketidaktertiban dalam perencanaan kebutuhan BMD, khususnya dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan terbaru.
5. Validitas dan keterkinian data BMD pada sistem informasi pengelolaan aset masih memerlukan penguatan melalui inventarisasi, rekonsiliasi, dan pembaruan data secara berkala.
6. Dari sisi perencanaan dan penganggaran, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta konsistensi tahapan penyusunan APBD masih memerlukan penguatan agar sepenuhnya selaras dengan kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka upaya yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD dan BLUD dalam rangka percepatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi pendukung lainnya, serta memastikan keseragaman dan konsistensi penginputan data.
3. Melaksanakan pembinaan akuntansi kepada SKPD dan BLUD serta melakukan rekonsiliasi keuangan secara berkala guna meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan.
4. Menyediakan dan mengembangkan aplikasi RKBMD, melakukan sosialisasi penyusunan RKBMD sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun

2024, serta melaksanakan penelaahan dan verifikasi RKBMD yang disusun oleh SKPD.

5. Mengoptimalkan entry data BMD ke dalam SIMDA BMD dan E-BMD, disertai rekonsiliasi dan inventarisasi BMD secara berkala, serta melakukan pembaruan data pasca inventarisasi.
6. Mendorong pensertipikatan tanah BMD, optimalisasi pemanfaatan BMD, serta pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pengurus Barang, baik secara daring maupun luring, guna meningkatkan kapasitas SDM pengelola aset daerah.
8. Melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sejak penyusunan RKPD hingga penyusunan RAPBD, melaksanakan pembahasan lintas perangkat daerah pada setiap tahapan, serta memastikan seluruh proses penyusunan APBD selaras dengan kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.

BAB IV
PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Brebes tahun 2025 yang merupakan tahun ketiga pada RPD 2023-2026 dalam pembangunan periode lima tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap capaian kinerja pada semua sasaran pembangunan daerah, dengan cara membandingkan capaian setiap indikator kinerja sasaran terhadap target yang telah ditentukan. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 38 sasaran strategis dan 77 indikator pembangunan yang ada, diketahui tercapai dengan nilai sementara sebesar 94,67% dengan kategori sangat berhasil. Capaian kinerja berkategori sangat berhasil sebanyak 55 indikator, berkategori berhasil sebanyak 6 indikator, berkategori cukup berhasil sebanyak 4 indikator, berkategori kurang berhasil 2 indikator, dan berkategori sangat kurang berhasil 4 indikator dan masih dalam proses hasil penilaian sebanyak 5 indikator serta terdapat 1 indikator yang tidak bisa di ukur. Hasil capaian kinerja ini tentulah tidak terlepas dari komitmen kepala Perangkat Daerah untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam IKU dan Renstra. Adanya capaian kinerja sasaran yang belum mencapai 100% (mencapai target) pada tahun 2025 ini menunjukkan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target sasaran secara optimal. Adapun indikator kinerja yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Pemuda Pelopor Berprestasi (Tingkat Provinsi)

   Penyebab kegagalan dalam pencapaian target bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: masih banyak beberapa cabang olahraga yang tidak diikutkan atau tidak ada minat dari para atlet pelajar, minimnya program pembinaan bagi pemuda pelopor, kurangnya sosialisasi mengenai kompetisi atau penghargaan yang

tersedia, serta terbatasnya dukungan dari pihak terkait dalam mendorong pencapaian prestasi di tingkat Provinsi. Sebagai alternatif solusi, mengenalkan dan mensosialisasikan cabang olahraga yang kurang diminati kepada para siswa melalui pembinaan atlet pada kategori serta disesuaikan dengan jenjang pendidikan tertentu serta perlu dilakukan peningkatan program pendampingan, pemberian insentif atau beasiswa bagi pemuda yang berprestasi, serta penyelenggaraan kompetisi yang lebih luas untuk menjaring potensi pemuda pelopor.

2. Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)

   Faktor-faktor yang menghambat atau menyebabkan kegagalan pencapaian target dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemuda dan kelembagaan. Dari sisi pemuda, kecenderungan memilih menjadi pekerja dibandingkan memulai usaha sendiri karena dianggap lebih aman menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, keterbatasan kemampuan manajemen usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, serta inovasi produk turut memengaruhi rendahnya minat berwirausaha. Banyak pemuda juga belum memahami potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan serta menghadapi kendala keterbatasan modal awal dan akses terhadap lembaga pembiayaan.

   Dari sisi kelembagaan (Dinas/OPD/organisasi pembina), hambatan meliputi pelatihan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan potensi wilayah, belum optimalnya peran sebagai penghubung antara pemuda dan lembaga permodalan seperti perbankan, koperasi, maupun CSR, serta belum maksimalnya pelibatan dunia usaha, UMKM, dan perguruan tinggi. Selain itu, terdapat kesulitan dalam melakukan pemetaan, pembinaan, dan pemantauan perkembangan usaha pemuda, serta masih terbatasnya program lanjutan berupa monitoring dan pendampingan pascapelatihan.

   Sebagai langkah perbaikan, diperlukan pengalokasian kembali anggaran untuk kegiatan pelatihan kewirausahaan pada berbagai klaster usaha, disertai peningkatan sosialisasi hingga ke pelosok

daerah guna menumbuhkan minat dan motivasi berwirausaha di kalangan pemuda.

3. Peningkatan Prestasi Olahraga (Tingkat Provinsi)

   Penurunan pencapaian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran untuk mengikutsertakan/partisipasi dalam kompetisi beberapa cabang olahraga, pembinaan atlet secara berkelanjutan, dan minimnya fasilitas olahraga yang memadai. Alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kualitas pelatih, penambahan frekuensi kompetisi sebagai ajang pembinaan, serta penguatan program beasiswa atlet berprestasi.

4. Persentase Penurunan *Blank Spot* Jaringan Seluler

   Indikator kinerja tersebut didukung melalui Program Aplikasi Informatika, namun hasil capaian masih dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, antara lain keterbatasan pembangunan infrastruktur jaringan seperti menara BTS dan akses teknologi, kondisi topografi dan geografis yang sulit dijangkau sinyal, adanya gangguan interferensi jaringan maupun faktor cuaca, serta keterbatasan sumber daya dan investasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi percepatan pembangunan infrastruktur jaringan melalui penambahan menara BTS dan perluasan cakupan layanan, pemanfaatan teknologi yang lebih maju seperti 4G LTE, 5G, dan beamforming untuk meningkatkan jangkauan sinyal, penggunaan konektivitas satelit di wilayah terpencil, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mendorong investasi dan kemudahan perizinan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

5. Persentase Penanganan Kawasan Kumuh

   Permasalahan dalam pencapaian indikator dipegaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya pendanaan untuk penanganan kawasan kumuh serta jumlah kawasan kumuh yang cukup banyak, yang membutuhkan penanganan bertahap. Strategi untuk penanganan kawasan kumuh melibatkan pengoptimalan peran

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) dalam koordinasi pengurangan kawasan kumuh. Selain itu, alokasi anggaran yang tepat sasaran untuk penanganan kawasan kumuh di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.

6. Cakupan Pelayanan Persampahan

   Pencapaian kinerja untuk pengelolaan sampah masih belum mencapai target karena:

   a. Pertambahan Penduduk dan budaya penggunaan kemasan sekali pakai menimbulkan timbulan sampah yang terus bertambah;
   b. Dengan tidak adanya pengurangan sampah yang masuk ke TPA dan tidak ada pengelolaan sampah di TPA mengakibatkan umur TPA semakin berkurang;
   c. Terdapat timbulan sampah liar di banyak titik di Kab. Brebes, baik di bahu jalan, lahan kosong, sempadan sungai dll.;
   d. SDM yang terus berkurang dikarenakan usia pensiun dan belum ada pengganti, alat berat dan pengangkut sampah yang terbatas dan mulai sering dilakukan perbaikan menyebabkan kendala dalam penanganan sampah.

   Dari permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil langkah-langkah berikut:

   a. Melakukan Sosialisasi dan Pelatihan Pengurangan, pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri agar dapat menahan laju timbulan sampah;
   b. Penanganan sampah dihulu dengan pengurangan timbulan, pengolahan sampah di TPS 3R dan TPST terbangun dan pengolahan sampah TPA yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2026;
   c. Berkoordinasi dengan *Stakeholder* terkait dalam mengatasi sampah liar;

d. Melakukan usulan ke APBN, APBD Provinsi dan APBD dalam pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan dalam penanganan sampah di hulu tengah dan hilir.

Beberapa permasalahan yang telah ditemukan dalam usaha pencapaian target serta solusi pemecahan yang telah dirumuskan, perlu disadari oleh pelaksana kegiatan serta semua *stakeholder* untuk menjadi masukan dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang sehingga tingkat capaian kinerja pada setiap sasaran pembangunan daerah dapat ditingkatkan, antara lain :

1. Perlu adanya sistem monitoring, evaluasi dan pengendalian capaian kinerja pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja yang lebih baik;
2. Diperlukan adanya upaya yang keras dalam peningkatan IPM di Kabupaten Brebes dengan sinergitas Perangkat Daerah yang terkait;
3. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM dan Sistem Pelayanan Publik di berbagai bidang.

Di era demokrasi, transparansi dan globalisasi saat ini, diperlukan komitmen dan upaya kita bersama untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Salah satu upaya adalah dengan terus meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, dari tahun ke tahun perlu senantiasa disempurnakan sehingga LKjIP dapat memberikan informasi capaian kinerja pembangunan daerah setiap tahunnya kepada masyarakat dan pihak-pihak lainnya secara transparan dan akuntabel.

Brebes, 30 Maret 2026

Bupati Brebes,

Hj. Paramitha Widya Kusuma, SE., MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah

N a m a : Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
Jabatan : Pj. BUPATI BREBES

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Brebes, 2 Januari 2025
Pj. BUPATI BREBES,

Ir. Djoko Gunawan, MT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Keterangan (5)
1	Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama Yang Sangat Kondusif	Persentase Penurunan Konflik SARA (%)	100	
2	Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Demokrasi Daerah	Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg) (%)	94	
3	Meningkatnya Kesadaran Dan Perlindungan Hukum Dengan Menjunjung Tinggi Serta Mengutamakan Asas Bersih, Jujur Serta Adil Kepada Setiap Masyarakat	Persentase tindak pelanggaran Perda tertangani (%)	100	
4	Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.25	
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6.42	
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	71.54	
6	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga	Pemuda Pelopor Berprestasi (Tingkat Provinsi) (Peringkat)	4	
		Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	30.00	
		Peningkatan Prestasi Olahraga (Tingkat Provinsi) (Peringkat)	8	
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan (%)	96.00	
8	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87.36	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	63.83	
		Peringkat Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) (Status)	4	
9	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	62.5	
		Persentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) (%)	10	
		Persentase Kepesertaan KB Aktif (Indeks)	70.5	
10	Meningkatnya Kepedulian Sosial Secara Luas Untuk Mewujudkan Ketahanan Sosial Terutama Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penanganan Jumlah PMKS (%)	50	
11	Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah	Persentase kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan (%)	50	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
12	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan	Indeks Literasi (Indeks)	13.3	
		Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat (Indeks)	58	
13	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Serta Partisipasi Dan Peran Seluruh Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Peningkatan Kualitas Daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	
14	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	2.9	
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Skor)	98	
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84	
		Indeks Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Indeks)	3.35	
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Indeks)	64.5	
16	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Optimalisasi Aset Secara Efisien Dan Produktif Serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp. Juta)	480,750	
		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (%)	19.9	
17	Meningkatnya Kapasitas Dan Kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80.00	
		Standar Kompetensi ASN (Skor)	75	
18	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban) Yang Baik (Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif)	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks) / Indeks Integritas	74	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3.50	
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Opini)	WTP	
19	Meningkatnya Peran Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bagian Dalam Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Daerah Serta Solusi Atas Permasalahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	52	
		Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3.14	
20	Tersedianya Satu Data Informasi Daerah Yang Valid, Lengkap Dan Terbaru Untuk Acuan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
21	Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas,Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi	Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) (Rp. Ribu)	11,500	
22	Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Mengembangkan Iklim Usaha Kondusif Serta Terjaminnya Berusaha Dan Pelayanan Investasi Yang Prima	Pertumbuhan Laju Investasi	4.00	
23	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Koperasi Dan UMKM Sehingga Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Serta Mandiri	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat (%)	60	
		Persentase UMKM Aktif (%)	7.00	
24	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69.60	
		Rasio Penduduk Bekerja (%)	45	
25	Meningkatnya Efisiensi Modernisasi Pertanian Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Untuk Swasembada Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Susenas (Skor)	95.8	
26	Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	Kinerja Lalu Lintas (0.6 s.d. 0.8) (Skor)	0.8	
		Kinerja Keselamatan Lalu Lintas (Skor)	18	
27	Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kualitas Kelembagaan Dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa	Persentase BUMDes Aktif (%)	85	
		Persentase BUMDes Sehat (%)	65	
		Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten (Indeks)	0.69	
28	Meningkatnya Produksi Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Serta Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan Dan Perikanan	Peningkatan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Rp. Juta)	24,094,139	
		Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	130	
29	Meningkatnya Produktifitas Pertanian Untuk Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Serta Pemenuhan Kebutuhan Pangan Regional Maupun Nasional Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Pertanaman (Indeks)	235	
		Nilai Tukar Petani (Nilai)	112	
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Hutan	Peningkatan Luasan Lahan Konservasi (%)	29.86	
31	Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi)	Peningkatan PDRB sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) (Rp. Juta)	2,227,892.91	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
32	Meningkatnya Daya Saing Industri Unggulan Daerah Untuk Penggerak Perekonomian	Peningkatan PDRB sektor Industri (Rp. Juta)	10,119,460.38	
33	Meningkatnya Transaksi Perdagangan Produk Unggulan Daerah Dan Menjaga Distribusi Dan Ketersediaan Barang-Barang Kebutuhan Pokok	Peningkatan PDRB sektor Perdagangan (Rp. Juta)	9,101,677	
34	Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Mantap (%)	88	
		Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik (%)	71	
		Cakupan Akses Air Minum Layak (%)	100	
		Cakupan Akses Jaringan Perpipaan (%)	26	
		Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan (%)	100	
		Persentase Penurunan Blank Spot Jaringan Seluler (%)	23.08	
		Bantaran/tanggul sungai dan saluran pembuang berfungsi baik (%)	45	
		Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0.6	
		Menigkatnya persentase sanitasi aman (%)	1.6	
		Persentase capaian penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan (%)	100	
35	Meningkatnya Perumahan Dan Lingkungan Layak Dan Sehat Dengan Didukung Jaringan Infrastruktur Yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah Maupun Antar Sektor	Presentase Penurunan Kawasan Kumuh (%)	24.68	
		Persentase Rumah Sehat Layak Huni (%)	27.5	
		Persentase Akses Sanitasi Layak (%)	100	
		Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak (%)	83	
		Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)	57.28	
36	Meningkatnya Kesadaran Dan Pertisipasi Masyarakat Untuk Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	50.15	
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	81.25	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	47.70	
		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	40.00	
37	Meningkatnya Kelestarian Dan Kesesuaian Tata Guna Lahan Guna Terwujudnya Keserasian Pembangunan Wilayah	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	93	
38	Meningkatnya Konsistensi Kesesuaian Dan Terintegrasinya Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Hektar)	19	

Brebes, 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BREBES

Ir. Djoko Gunawan, MT

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5,509,812,940	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20,447,030,000	
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	295,592,988	
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4,192,347,050	
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4,517,478,724	
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,277,773,000	
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	332,219,200	
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,085,260,432	
9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	115,000,000	
10	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	18,000,000	
11	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	185,000,000	
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	13,194,457,500	
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	11,710,650,000	
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	1,182,320,370	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	549,307,250	
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,769,765,450	
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	618,451,750	
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	489,719,750	
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	539,668,900	
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	45,200,000	
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	204,349,350	

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
22	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10,299,919,000	
23	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,332,000,000	
24	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	53,469,000	
25	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	230,000,000	
26	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	140,093,922,895	
27	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	32,543,263,047	
28	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1,318,500,000	
29	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	22,343,250	
30	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50,004,500	
31	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2,733,375,400	
32	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	977,230,000	
33	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	20,770,521,900	
34	PROGRAM PENATAAN DESA	169,496,000	
35	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	220,996,850	
36	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	102,311,000	
37	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	200,943,000	
38	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	998,201,835	
39	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9,434,624,900	
40	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	136,319,500	
41	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	827,500,000	
42	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	262,759,012	
43	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	583,750,000	

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
44	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	159,416,812	
45	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20,650,000	
46	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	23,730,000	
47	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	215,979,950	
48	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	298,211,000	
49	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,182,161,115	
50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8,861,730,400	
51	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	13,435,916,100	
52	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	12,541,578,900	
53	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50,000,000	
54	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	385,320,700	
55	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	800,009,700	
56	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4,517,912,389	
57	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	580,816,299,944	
58	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5,900,123,868	
59	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	286,938,521,020	
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,203,412,647	
61	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	424,086,000	
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	400,000,000	
63	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16,649,007,346	
64	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3,325,000	
65	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	47,231,616	
66	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	51,558,711,650	

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
67	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan	158,494,500	
68	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	322,540,000	
69	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	20,000,000	
70	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	654,814,200	
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7,157,987,050	
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2,595,571,500	
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	893,681,000	
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	26,840,000	
75	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,049,241,600	
76	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,323,080,000	
77	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	183,931,150	
78	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	43,000,000	
79	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	182,210,100	
80	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	29,478,552	
81	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	673,196,013	
82	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	140,000,000	
83	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	852,472,000	
84	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	226,601,000	
85	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	971,229,200	
86	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	483,406,300	
87	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,293,616,550	
88	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	802,996,625	

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
89	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2,714,411,250	
90	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,794,657,575	
91	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	115,085,000	
92	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,563,845,500	
93	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	1,897,733,500	
94	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	3,817,703,400	
95	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	9,991,156,267	
96	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,558,412,750	
97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,193,690,582,270	
98	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5,136,414,435	
99	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9,827,058,014	
100	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	201,520,120,600	
101	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	53,573,183,191	
102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,601,991,200	
103	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,452,080,000	
104	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3,343,876,850	
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	147,020,750	
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	86,999,300	
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200,604,000	
108	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	2,179,003,200	
109	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3,666,977,052	
110	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,254,198,200	

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
111	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,553,784,308	
112	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	639,998,500	
113	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	83,354,224	
114	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,194,628,000	
115	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	60,949,250	
116	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,915,935,000	
117	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	16,789,000	
118	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	23,000,000	
119	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	21,395,443,200	
120	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,101,573,200	
121	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	20,000,000	
122	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,262,504,557	
123	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	285,192,332	
124	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	61,973,000	
125	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	76,167,550	
	total	**3,833,982,985,665**	

Brebes, 2 Januari 2025

PJ. BUPATI BREBES

Ir. Djoko Gunawan, MT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah

N a m a : Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M.
Jabatan : BUPATI BREBES

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Brebes, 8 September 2025
BUPATI BREBES,

Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)		Keterangan (5)
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Meningkatnya Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Serta Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama Yang Sangat Kondusif	Persentase Penurunan Konflik SARA (%)	100	100	
2	Meningkatnya Kesadaran Sosial Politik Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Demokrasi Daerah	Persentase pemilih dalam pemilu (Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades dan Pileg) (%)	94	94	
3	Meningkatnya Kesadaran Dan Perlindungan Hukum Dengan Menjunjung Tinggi Serta Mengutamakan Asas Bersih, Jujur Serta Adil Kepada Setiap Masyarakat	Persentase tindak pelanggaran Perda tertangani (%)	100	100	
4	Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.25	12.25	
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6.42	6.42	
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	71.54	71.54	
6	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga	Pemuda Pelopor Berprestasi (Tingkat Provinsi) (Peringkat)	4	4	
		Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	30.00	30.00	
		Peningkatan Prestasi Olahraga (Tingkat Provinsi) (Peringkat)	8	8	
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan (%)	96.00	96.00	
8	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87.36	87.36	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	63.83	63.83	
		Peringkat Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) (Status)	4	4	
9	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Serta Peningkatan Pelayanan KB Yang Berkualitas, Terjangkau Serta Efektif	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	62.5	62.5	
		Persentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) (%)	10	10	
		Persentase Kepesertaan KB Aktif (Indeks)	70.5	70.5	
10	Meningkatnya Kepedulian Sosial Secara Luas Untuk Mewujudkan Ketahanan Sosial Terutama Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penanganan Jumlah PMKS (%)	50	50	
11	Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah	Persentase kebudayaan lokal daerah yang dilestarikan (%)	50	50	
12	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Melalui Inisiasi Budaya Membaca Gerakan Kunjung Perpustakaan	Indeks Literasi (Indeks)	13.3	13.3	
		Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat (Indeks)	58	58	
13	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Serta Partisipasi Dan Peran Seluruh Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Peningkatan Kualitas Daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	
14	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	2.9	2.9	
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Skor)	98	98	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (4)		Keterangan
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84	84	
		Indeks Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Indeks)	3.35	3.35	
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Indeks)	64.5	64.5	
16	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Optimalisasi Aset Secara Efisien Dan Produktif Serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp. Juta)	480,750	811,520	
		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (%)	19.9	19.9	
17	Meningkatnya Kapasitas Dan Kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80.00	80.00	
		Standar Kompetensi ASN (Skor)	75	75	
18	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban) Yang Baik (Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif)	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Indeks) / Indeks Integritas	74	74	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3.50	3.50	
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Opini)	WTP	WTP	
19	Meningkatnya Peran Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bagian Dalam Pertimbangan Pengambilan Kebijakan Daerah Serta Solusi Atas Permasalahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	52	52	
		Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3.14	3.14	
20	Tersedianya Satu Data Informasi Daerah Yang Valid, Lengkap Dan Terbaru Untuk Acuan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	100	100	
21	Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas,Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi	Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) (Rp. Ribu)	11,500	11,500	
22	Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Mengembangkan Iklim Usaha Kondusif Serta Terjaminnya Berusaha Dan Pelayanan Investasi Yang Prima	Pertumbuhan Laju Investasi	4.00	4.00	
23	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Koperasi Dan UMKM Sehingga Tercipta Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Serta Mandiri	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat (%)	60	60	
		Persentase UMKM Aktif (%)	7.00	7.00	
24	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69.60	69.60	
		Rasio Penduduk Bekerja (%)	45	45	
25	Meningkatnya Efisiensi Modernisasi Pertanian Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Untuk Swasembada Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Susenas (Skor)	95.8	95.8	
26	Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	Kinerja Lalu Lintas (0.6 s.d. 0.8) (Skor)	0.8	0.8	
		Kinerja Keselamatan Lalu Lintas (Skor)	18	18	
	Meningkatnya Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Dan Kualitas Kelembagaan Dengan Melibatkan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa	Persentase BUMDes Aktif (%)	85	85	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (4)		Keterangan
27		Persentase BUMDes Sehat (%)	65	65	
		Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten (Indeks)	0.69	0.69	
28	Meningkatnya Produksi Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Serta Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan Dan Perikanan	Peningkatan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Rp. Juta)	24,094,139	24,094,139	
		Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	130	130	
29	Meningkatnya Produktifitas Pertanian Untuk Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Serta Pemenuhan Kebutuhan Pangan Regional Maupun Nasional Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Pertanaman (Indeks)	235	235	
		Nilai Tukar Petani (Nilai)	112	112	
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Hutan	Peningkatan Luasan Lahan Konservasi (%)	29.86	29.86	
31	Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi)	Peningkatan PDRB sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi) (Rp. Juta)	2,227,892.91	2,227,892.91	
32	Meningkatnya Daya Saing Industri Unggulan Daerah Untuk Penggerak Perekonomian	Peningkatan PDRB sektor Industri (Rp. Juta)	10,119,460.38	10,119,460.38	
33	Meningkatnya Transaksi Perdagangan Produk Unggulan Daerah Dan Menjaga Distribusi Dan Ketersediaan Barang-Barang Kebutuhan Pokok	Peningkatan PDRB sektor Perdagangan (Rp. Juta)	9,101,677	9,101,677	
34	Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah	Persentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kondisi Mantap (%)	88	88	
		Persentase Infrastruktur Irigasi Kondisi Baik (%)	71	71	
		Cakupan Akses Air Minum Layak (%)	100	100	
		Cakupan Akses Jaringan Perpipaan (%)	26	26	
		Persentase Kawasan Bebas Banjir Perkotaan (%)	100	100	
		Persentase Penurunan Blank Spot Jaringan Seluler (%)	23.08	23.08	
		Bantaran/tanggul sungai dan saluran pembuang berfungsi baik (%)	45	45	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (4)		Keterangan
		Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0.6	0.6	
		Menigkatnya persentase sanitasi aman (%)	1.6	1.6	
		Persentase capaian penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan (%)	100	100	
35	Meningkatnya Perumahan Dan Lingkungan Layak Dan Sehat Dengan Didukung Jaringan Infrastruktur Yang Terintegrasi Baik Antar Wilayah Maupun Antar Sektor	Presentase Penurunan Kawasan Kumuh (%)	24.68	24.68	
		Persentase Rumah Sehat Layak Huni (%)	27.5	27.5	
		Persentase Akses Sanitasi Layak (%)	100	100	
		Persentase Kepemilikan Sanitasi Layak (%)	83	83	
		Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)	57.28	57.28	
36	Meningkatnya Kesadaran Dan Pertisipasi Masyarakat Untuk Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berorientasi Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	50.15	50.15	
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	81.25	81.25	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	47.70	47.70	
		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	40.00	40.00	
37	Meningkatnya Kelestarian Dan Kesesuaian Tata Guna Lahan Guna Terwujudnya Keserasian Pembangunan Wilayah	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	93	93	
38	Meningkatnya Konsistensi Kesesuaian Dan Terintegrasinya Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Hektar)	19	19	

Brebes, 8 September 2025

BUPATI BREBES,

Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M.

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5,509,812,940	4,941,430,795	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20,447,030,000	19,985,520,248	
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	295,592,988	192,082,548	
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4,192,347,050	3,551,239,300	
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4,517,478,724	3,651,262,874	
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,277,773,000	1,454,912,050	
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	332,219,200	267,919,600	
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,085,260,432	2,222,488,365	
9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	115,000,000	62,996,315	
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	
11	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	18,000,000	18,000,000	
12	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	185,000,000	1,007,479,000	
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	13,194,457,500	13,403,118,500	
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	11,710,650,000	11,604,015,000	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	1,182,320,370	1,275,773,775	
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	549,307,250	549,832,250	
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,769,765,450	3,760,856,000	
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	618,451,750	542,863,725	
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	489,719,750	677,767,950	
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	539,668,900	426,624,000	
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	45,200,000	24,744,000	
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	204,349,350	148,844,200	
23	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10,299,919,000	10,299,919,000	
24	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,332,000,000	1,332,000,000	
25	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	53,469,000	50,883,000	
26	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	230,000,000	230,000,000	
27	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	140,093,922,895	143,030,043,356	
28	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	32,543,263,047	28,239,134,071	
29	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1,318,500,000	1,371,541,450	
30	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	22,343,250	22,805,750	

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
31	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50,004,500	40,612,700	
32	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2,733,375,400	2,463,261,800	
33	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	977,230,000	868,109,000	
34	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	20,770,521,900	3,042,871,100	
35	PROGRAM PENATAAN DESA	169,496,000	131,760,800	
36	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	220,996,850	208,747,100	
37	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	102,311,000	68,044,500	
38	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	200,943,000	254,667,450	
39	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	998,201,835	1,547,323,686	
40	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9,434,624,900	14,097,024,800	
41	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	136,319,500	499,909,500	
42	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	827,500,000	852,620,100	
43	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	262,759,012	285,553,852	
44	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN	-	-	
45	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	583,750,000	558,813,480	
46	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	159,416,812	108,989,312	
47	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20,650,000	18,100,000	
48	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	23,730,000	13,705,506	
49	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	215,979,950	1,983,973,750	
50	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	298,211,000	183,532,200	
51	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,182,161,115	1,990,940,448	
52	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8,861,730,400	8,961,730,400	
53	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	13,435,916,100	13,902,850,200	
54	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	12,541,578,900	11,899,904,400	
55	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50,000,000	28,279,771	
56	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	385,320,700	335,006,477	
57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	800,009,700	829,736,050	
58	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4,517,912,389	3,215,055,859	
59	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	580,816,299,944	596,584,556,596	
60	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5,900,123,868	4,626,436,284	
61	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	286,938,521,020	303,069,995,569	
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,203,412,647	950,530,317	

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
63	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	424,086,000	1,114,987,000	
64	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	400,000,000	379,052,000	
65	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16,649,007,346	24,812,852,116	
66	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3,325,000	2,315,000	
67	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	47,231,616	45,337,608	
68	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	51,558,711,650	39,234,133,950	
69	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan	158,494,500	4,710,250	
70	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	322,540,000	250,108,200	
71	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	-	-	
72	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	20,000,000	5,977,542	
73	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	654,814,200	562,079,300	
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7,157,987,050	8,102,987,050	
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2,595,571,500	4,000,026,700	
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	893,681,000	1,806,569,000	
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	26,840,000	26,840,000	
78	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,049,241,600	915,347,050	
79	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,323,080,000	1,444,340,800	
80	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	183,931,150	122,201,500	
81	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	43,000,000	43,000,000	
82	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	182,210,100	149,388,646	
83	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	29,478,552	18,445,536	
84	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	673,196,013	634,697,594	
85	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	140,000,000	76,349,600	
86	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	852,472,000	845,368,000	
87	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	226,601,000	197,727,000	
88	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	971,229,200	1,219,464,400	
89	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	483,406,300	393,422,251	
90	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,293,616,550	1,017,065,050	
91	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	802,996,625	760,890,375	
92	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2,714,411,250	2,863,343,250	
93	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,794,657,575	1,794,657,575	

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
94	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	115,085,000	36,603,000	
95	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,563,845,500	1,648,204,267	
96	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	1,897,733,500	1,467,909,000	
97	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	-	-	
98	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	3,817,703,400	3,835,376,250	
99	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	9,991,156,267	11,193,288,967	
100	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,558,412,750	2,632,246,900	
101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,193,690,582,270	2,183,365,967,330	
102	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5,136,414,435	4,792,256,807	
103	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9,827,058,014	3,465,584,351	
104	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	201,520,120,600	165,239,430,900	
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	53,573,183,191	54,588,446,295	
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,601,991,200	915,563,800	
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,452,080,000	1,325,797,600	
108	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3,343,876,850	2,053,575,800	
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	147,020,750	137,020,750	
110	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	86,999,300	60,736,350	
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200,604,000	105,666,000	

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
112	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	2,179,003,200	1,387,096,800	
113	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3,666,977,052	4,125,506,293	
114	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,254,198,200	1,938,056,860	
115	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,553,784,308	1,360,031,013	
116	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	639,998,500	299,207,000	
117	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	83,354,224	29,553,784	
118	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,194,628,000	933,136,100	
119	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	60,949,250	39,996,508	
120	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,915,935,000	2,173,598,600	
121	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	16,789,000	16,789,800	
122	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	23,000,000	83,000,000	
123	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	21,395,443,200	22,408,309,950	
124	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,101,573,200	491,185,602	
125	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	20,000,000	-	
126	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,262,504,557	1,163,218,900	
127	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	285,192,332	285,192,332	
128	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	61,973,000	27,690,350	
129	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	76,167,550	46,866,250	
	total	**3,833,982,985,665**	**3,794,484,534,981**	

Brebes, 8 September 2025

BUPATI BREBES,

Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M.